



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Dharmasraya Akhir Tahun Anggaran 2019 dapat tersusun dan terselesaikan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Dharmasraya akhir tahun anggaran 2019, merupakan gambaran pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan kesepakatan antara kepala daerah bersama DPRD yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019.

VISI

**“MENUJU
DHARMASRAYA
MANDIRI DAN
BERBUDAYA”**

Implementasi RPJMD Tahun 2016-2021 dan pada RKPD Tahun 2019 telah memberikan arah kebijakan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam **mewujudkan visi, “Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya.”** Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah memposisikan diri sebagai fasilitator manajemen pelayanan publik sesuai dengan visi Pemerintah, sekaligus selaras dalam upaya mewujudkan pengawasan yang akuntabel, transparan dan independen yang bermuara pada pencapaian cita-cita luhur sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Dharmasraya ini disusun berpedoman dan berdasarkan RKPD Tahun 2019 yang memuat beberapa hal, antara lain :

1. Dasar hukum, Visi dan Misi Kepala Daerah serta gambaran umum daerah
2. Penjabaran APBD
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
4. Penyelenggaraan tugas pembantuan dan penugasan

Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya selama Tahun 2019 yang mempedomani RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021, tidak terlepas dari itikad kuat, dukungan dan kerja keras dari semua *stakeholders* baik komponen legislatif, eksekutif maupun masyarakat yang berpartisipasi aktif demi terselenggaranya tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah, kiranya dapat memberikan saran dan masukan, yang bersifat konstruktif termasuk catatan-catatan strategis untuk dapat ditindaklanjuti dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan pada tahun mendatang.

Terakhir kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam mewujudkan target program yang telah direncanakan diucapkan ungkapan terimakasih, diiringi dengan doa semoga Allah SWT, senantiasa membimbing niat baik dan langkah kita dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Dharmasraya yang kita cintai, Aamiin.

Pulau Punjung, Maret 2020

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKU TUANKU KERAJAAN, S.E.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DASAR HUKUM	1
B. VISI MISI KEPALA DAERAH	
C. DATA UMUM DAERAH.....	2
1. Letak dan Kondisi Geografis Daerah	2
2. Gambaran Umum Demografis	6
3. Kondisi Ekonomi.....	6
BAB II PENJABARAN APBD	28
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	28
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH	
C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH	32
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH, KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DI TETAPKAN,TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.	
A. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	38
I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	39
a. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	39
1. PENDIDIKAN	39
2. KESEHATAN	54
3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	128
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN .	145
5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	152
6. SOSIAL	153
b. URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	164

1. Tenaga Kerja.....	164
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	165
3. Pangan.....	169
4. Pertanahan	179
5. Lingkungan Hidup	181
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	205
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	206
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	217
9. Perhubungan.....	219
10. Komunikasi dan Informatika.....	223
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	228
12. Penanaman Modal	234
13. Kepemudaan dan Olah Raga	240
14. Statistik	243
15. Persandian.....	245
16. Kebudayaan	248
17. Perpustakaan	260
18. Kearsipan	262
2. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN.....	265
1. Perikanan.....	265
2. Pariwisata	273
3. Pertanian	281
4. Kehutanan	304
5. Energi Sumber Daya Mineral	304
6. Perdagangan	304
7. Perindustrian	314
8. Transmigrasi	316
3. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	318
9. Perencanaan.....	318
10. Keuangan	331



11. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	347
12. Penelitian dan Pengembangan	356
13. Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan	
Perundang-Undangan	356
a. Sekretariat Daerah	356
b. Sekretariat Dewan	403
c. Kesatuan Bangsa dan Politik.....	404
d. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	407
e. Kecamatan	407
f. Pengawasan	409
g. Pengadaan Barang dan Jasa	416
B. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DI TETAPKAN	
C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.	
BAB IV PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	422
BAB V PENUTUP	470



BAB I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 69 ayat (1) dinyatakan bahwa salah satu kewajiban kepala daerah adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), selain itu kepala daerah juga berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan ringkasan LPPD.

LKPJ merupakan dokumen yang memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Dokumen LKPJ disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya LKPJ ini dibahas bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD untuk melahirkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah. Rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD ini akan dijadikan bahan dalam penyusunan perencanaan tahun berjalan dan tahun berikutnya; penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah

Adapun hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

1. capaian pelaksanaan program dan kegiatan, permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan
2. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya
3. tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya

sedangkan pelaksanaan tugas pembantuan yang menjadi muatan LKPJ terdiri dari tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat, dan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah daerah provinsi disertai



dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan dan penugasan.

B. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2019 diantaranya sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Tahun Anggaran 2019;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- 6) Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

C. VISI DAN MISI

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah

dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2016- 2021 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun sebagai berikut:

MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA

Mandiri :

- Ekonomi daerah yang memiliki daya tahan menghadapi fluktuasi ekonomi eksternal dengan mendorong keragaman produksi daerah, ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi keluarga, serta meningkatkan nilai tambah produk komoditi daerah.
- Semakin besarnya peran masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian, jaringan distribusi, dan pemasaran.
- Berkurangnya arus modal dan pelayanan penduduk keluar daerah karena semakin tersedianya berbagai sarana ekonomi dan sosial di daerah sendiri bagi kebutuhan masyarakat dan lebih lanjut diharapkan mampu melayani daerah sekitar.

Berbudaya :

- Semakin cerdas terdidik dan terampilnya anak negeri.
- Kuatnya identitas budaya Dharmasraya yang multikultural yang berkarya, berinovasi dan mencipta untuk kesejahteraan berdasarkan iman dan taqwa.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

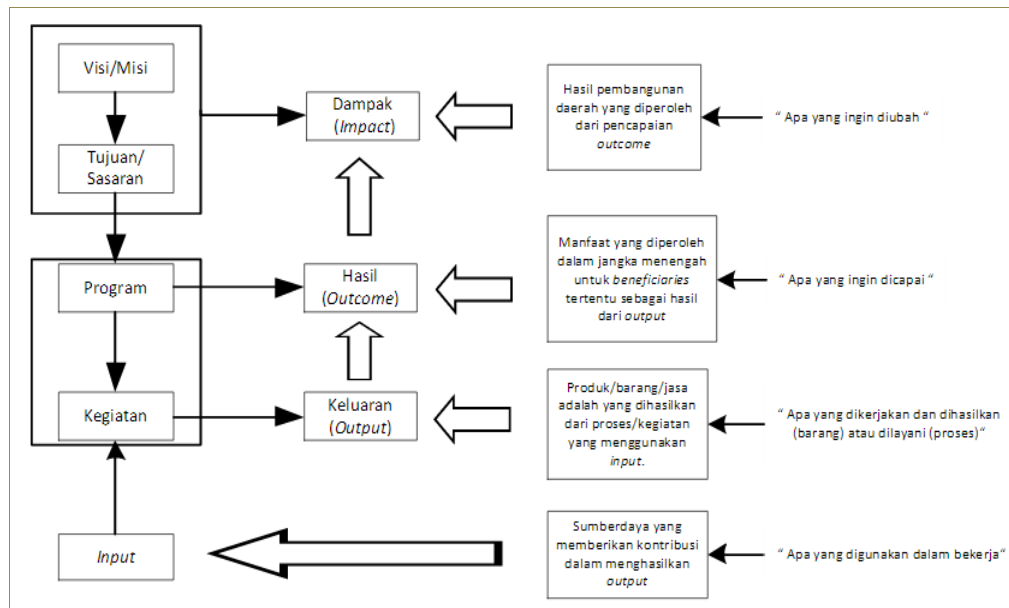


1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun

Visi dan misi ini dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran daerah yang diukur dengan menggunakan indikator tujuan dan indikator sasaran sekaligus berisikan target dari masing-masing indikatornya

Dalam rangka penetapan tujuan dan sasaran pada tahap perumusan sasaran strategis atau prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.

Gambar 1.1
Skematik Keterkaitan Antara Visi, Misi Dengan Perumusan Tujuan Dan Sasaran, Program



Tabel 1.2
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Misi 1 :Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.										
1	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				70,25	70,42	70,66	70,71	70,88	71,2
			Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	70,30	70,57	70,78	71,01	71,23	71,46
			Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,23	8,31	8,40	8,48	8,57	8,65
				Harapan lama sekolah	tahun	12,39	12,56	12,73	12,9	13,07	13,24
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	persentase Ketersediaan Kalori dan Protein per kapita	persen	78,58	78,58	78,58	78,58	78,58	78,58
			Meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	88,6	88,91	89,22	89,53	89,84	90,15
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	48,014	48,558	49,102	49,646	50,19	50,734

Activate

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.										
1	Meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap	Persentase Nagari yang terkoneksi dengan jalan mantap			persen						
			meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan	Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap	persen	44,44	47,99	51,82	55,65	59,49	63,33
2	Peningkatan kawasan pemukiman yang layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	Meningkatnya kualitas perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	persen	87,59	87,88	88,17	88,45	88,73	89,00
		Akses Air Minum Layak	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak	Akses Air Minum Layak	persen	14,53	16,26	19,26	22,71	26,29	30,08
		Akses Sanitasi Layak		Akses Sanitasi Layak	persen	39,99	39,79	40,01	40,62	41,6	42,91

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Misi 3 : Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.										
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan PDRB			persen	5,34	5,60	5,70	5,80	5,90	6,00
		PDRB Per Kapita			Juta rupiah	36,78	39,17	41,65	44,10	46,83	49,67
		Tingkat Kemiskinan			persen	7,16	6,76	6,46	6,17	5,89	5,62
			Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	persen	29,74452	29,32951	29,24684	29,25	29,1	29
			Meningkatnya Daya Saing Dunia Usaha dan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Koperasi Sehat	unit	5	7	15	20	25	30
				Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	unit	15	20	25	30	35	40
				Persentase IKM dengan peningkatan Omset	persen	1,54	2,01	5,42	5,7	6,1	6,5

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Persentase Pasar dalam kondisi baik	persen	18	20	22	25	28	30
			Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	persen	7,16	6,76	6,46	6,17	5,89	5,62
4 Misi 4 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.											
	Menciptakan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			indeks	62,85	66,50	67,00	67,50	68,00	68,50
			Meningkatnya Status Mutu Air, Udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	indeks	58,88	67,5	68	68,5	69	69,5
				Indeks Kualitas Udara	indeks	84,17	84,6	85,5	86	86,5	87
				Indeks Tutupan Lahan	indeks	-	45,5	50	50,5	51	51,5
5 Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.											
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)				C	C	C	C	CC	B
			Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan	Persentase Capaian RPJMD (IKU Daerah)	Indeks	90	90	90	90	95	95

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			pembangunan	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WDP/disclaimer	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatnya kualitas birokrasi pemerintahan	Hasil evaluasi AKIP	bobot	C (45,67)	B (60,46)	B	B	BB	BB
				Nilai LPPD	bobot	3,1500 (tinggi) naik peringkat	3,2000 (tinggi) naik peringkat	3,2500 (tinggi) naik peringkat	3,2750 (tinggi) naik peringkat	3,3000 (tinggi) naik peringkat	3,3226 (tinggi) naik peringkat
6	Misi 6 : Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.										
	pembangunan berbasis nagari	persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal	Meningkatkan status pembangunan nagari	persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal	persen	55,77	26,92	23,08	19,23	15,38	11,54
7	Misi 7 : Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun										
	Pengelolaan khazanah dan warisan budaya serta adat untuk memperkuat identitas Dharmasraya	Jumlah pelestarian cagar budaya	terlaksananya pelestarian warisan budaya Dharmasraya	Jumlah pelestarian cagar budaya	unit	50	80	152	170	180	190



D. DATA UMUM DAERAH

1. Letak dan Kondisi Geografis Daerah

a. Karakteristik Wilayah

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis posisi astronomis Kabupaten Dharmasraya berada pada 00° 48' 25,4" Lintang Selatan (LS) sampai dengan 1° 41' 40,3" Lintang Selatan (LS) dan 101° 8' 32,5" Bujur Timur (BT) sampai dengan 101° 53' 30,2" Bujur Timur (BT). Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

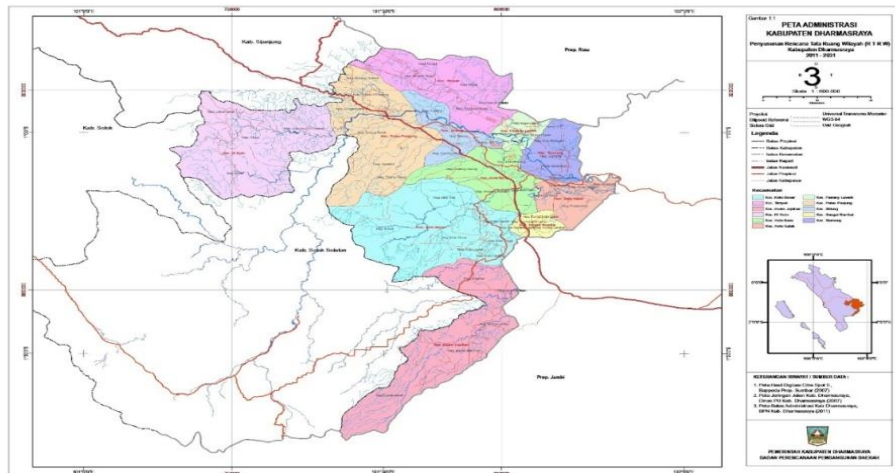
Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, yaitu 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 pada RTRW Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 3.025,99 km² (302.599) Ha.

Secara administratif, Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan dan 52 (lima puluh dua) nagari, dengan batas-batas administrasi adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat

Untuk melihat gambaran posisi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

Secara rinci luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Terhadap Luas Kab (%)	Jumlah Nagari
1	Koto Baru	251.35	7,31	4
2	Pulau Punjung	482.50	14,65	6
3	Sungai Rumbai	47.63	1,69	4
4	Sitiung	87.68	4,12	4
5	Sembilan Koto	454.80	16,54	4
6	Timpeh	237.93	10,67	5
7	Koto Salak	464.39	4,01	5
8	Tiumang	129.18	4,44	4
9	Padang Laweh	59.76	2,00	4
10	Asam Jujuhan	257.72	16,04	5
11	Koto Besar	488.19	18,53	7
Kab. Dharmasraya		296.113	100	52

Sumber : Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003

b. Topografi Wilayah

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berada pada kawasan perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada ketinggian 100-1500 meter diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian dari permukaan laut mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.500 meter dpl pada bagian kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah

barat. Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar (2007), diperoleh data kelerengan lahan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya

Kelerengan Lahan	Lereng (derajat)	Luas	
		(Ha)	(%)
Datar	0-3	23.155	7,65
Agak Landai	3-8	68.786	22,73
Landai	8-15	72.339	23,91
Agak Curam	15-25	74.730	24,70
Curam	25-40	29.023	9,59
Sangat Curam	40-60	34.567	11,42

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 -2031

c. Kondisi Klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan.

d. Kondisi Geologi

Berdasarkan RTRW, Struktur geologi yang ada di daerah Dharmasraya relatif aman. Adanya interpretasi struktur geologi /kelurusan-kelurusan geologi yang terdapat di daerah dekat sungai Batanghari yaitu di Koto Baru arah ke Solok/Padang terdapat jalur Sesar Turun (diperkirakan) yang memanjang dengan arah Barat laut – Tenggara, dimana daerah Gunung Medan merupakan sebagian dari jalur sesar tersebut. Ditemukan juga perlipatan-perlipatan kecil, dimana struktur yang ada hanya sebagian saja yang tidak stabil. Daerah sesar ini merupakan bagian dari sesar Sumatera Fault Zone yang terbentang sepanjang pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi tersebut maka Kabupaten Dharmasraya, khususnya daerah bagian barat daya-barat laut yang mengikuti arah pulau Sumatera termasuk daerah rawan gempa/bencana alam meskipun dengan intensitas yang kecil.

E. Kondisi Hidrologi

Ditinjau dari aspek hidrogeologi secara umum, daerah Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor air permukaan, curah hujan pada daerah aliran sungai (*catchment*) area dan banyaknya sungai yang mengalir, sangat mempengaruhi pelepasan (*discharge*) air di bawah permukaan daerah ini. sebagian wilayah tersusun oleh batuan vulkanik dan dataran rendah ditutupi oleh endapan alluvium dengan cadangan air yang melimpah terutama di daerah-daerah yang dilalui oleh dua sungai besar yang hulunya dari dataran tinggi/pegunungan. Daerah dengan batuan vulkanik (beku) mempunyai cadangan (*aquifer*) setempat dan pada rekahan (*joint*), umumnya cadangan air langka. Di daerah sedimen yang didominasi pasir lepas merupakan daerah yang mempunyai jenis *aquifer* dengan produktivitas tinggi dan penyebarannya luas. Secara keseluruhan Kabupaten Dharmasraya mempunyai cadangan air yang relatif banyak. Khususnya di daerah lembah/dataran rendah merupakan daerah yang mempunyai cadangan (*aquifer*) yang tinggi.

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 tercatat sebanyak 214.592 Jiwa. Adapun lebih detail mengenai jumlah penduduk dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Struktur Penduduk Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2019*

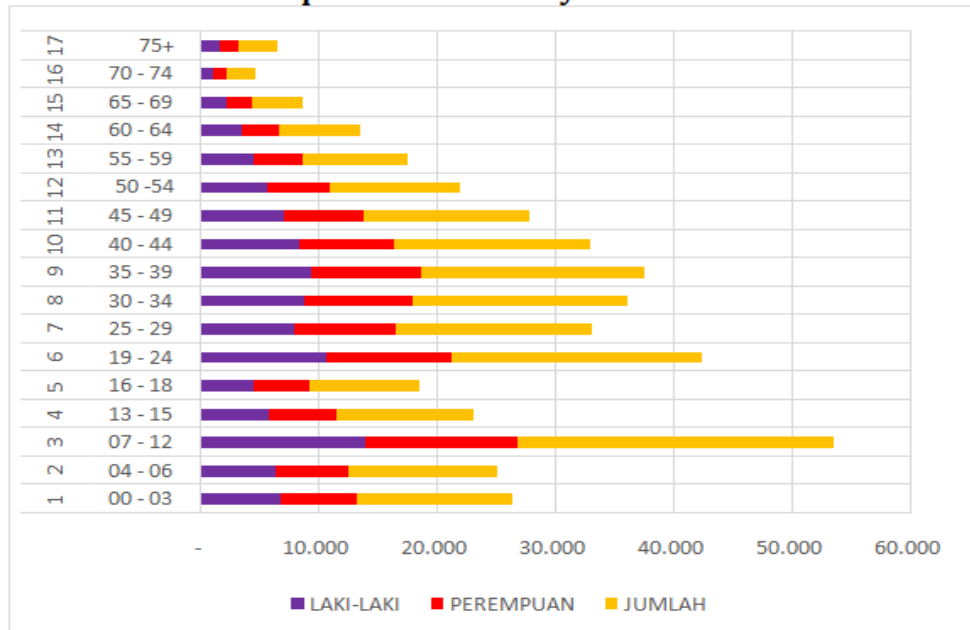
No	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	00 - 03	6.789	6.395	13.184
2	04 - 06'	6.359	6.208	12.567
3	07 - 12'	13.900	12.846	26.746
4	13 - 15	5.905	5.652	11.557
5	16 - 18	4.509	4.785	9.294
6	19 - 24	10.704	10.476	21.180
7	25 - 29	8.051	8.512	16.563
8	30 - 34	8.829	9.180	18.009
9	35 - 39	9.353	9.388	18.741
10	40 - 44	8.384	8.060	16.444
11	45 - 49	7.165	6.725	13.890
12	50 - 54	5.705	5.255	10.960
13	55 - 59	4.563	4.175	8.738
14	60 - 64	3.502	3.257	6.759
15	65 - 69	2.322	2.030	4.352
16	70 - 74	1.121	1.224	2.345
17	75+	1.651	1.612	3.263
TOTAL		108.812	105.780	214.592

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Dharmasraya, Tahun 2020

Keterangan: * = kondisi jumlah penduduk per- 30 Juni 2019

Dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki melebihi jumlah penduduk perempuan. Untuk melihat piramida penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada gambar di bawah :

Gambar 1.1
Piramida Penduduk berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018



Dari gambar di atas, penduduk terbesar ada di kelompok umur 7-12 tahun, dan semakin tinggi usia kelompok umur maka piramida penduduknya semakin meruncing ke atas. hal ini menggambarkan bahwa usia harapan hidup masih relatif rendah. Daerah yang memiliki usia harapan hidup tinggi cenderung gambar piramida penduduknya relatif tidak terlalu meruncing ke atas.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Sebagai daerah yang realtif berkembang lebih cepat dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya selama empat tahun terakhir selalu lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat. Sejalan dengan relatif tingginya pertumbuhan PDRB tersebut juga berdampak pada PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya yang saat ini sedikit berada di bawah PDRB perkapita

Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2016 tercatat PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp 36,77 juta, sedangkan PDRB perkapita Provinsi Sumbar sebesar Rp 37,34 juta.

Secara umum perkembangan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari potensi ekonomi daerah yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Dilihat dari struktur ekonomi, sektor pertanian masih sangat berperan dalam pembentukan PDRB, yaitu sebesar 31,6 persen, terutama pada sub sektor perkebunan untuk komoditi kelapa sawit dan karet, jauh diatas sektor lainnya, sedangkan sektor terbesar kedua yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan kontribusi sebesar 13,6 persen, diikuti oleh sektor konstruksi dan sektor pertambangan dan penggalan masing-masing sebesar 13 persen dan 8 persen.

Berdasarkan hasil kajian sebelumnya baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dalam penetapan produk unggulan daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Karet dan Kelapa Sawit

Karet merupakan tanaman yang paling banyak ditanam oleh masyarakat (perkebunan karet rakyat) di Dharmasraya yaitu 40.908,70hektar. Kelapa sawit merupakan tanaman kedua yang terbanyak yaitu 32.261,64 hektar.

Tabel. 1.6
Luas Tanaman dan Produksi Karet dan Kelapa Sawit
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

Kecamatan	Luas Tanaman (Ha)		Produksi (Ton)		Produktivitas	
	Karet	Kelapa Sawit	Karet	Kelapa Sawit	Karet	Kelapa Sawit
Sungai Rumbai	4.300,00	737,00	2.479,06	9.250,93	0,81	6,12
Koto Besar	5.895,00	6.380,75	5.777,65	12.224,73	1,12	4,21
Asam Jujuhan	5.484,82	3.449,70	3.625,37	9.250,93	0,84	3,39
Koto Baru	3.741,40	684,80	1.989,38	2.482,49	0,64	5,22
Koto Salak	3.732,50	1.622,50	2.405,21	6.195,35	0,76	7,58
Tiumang	1.284,00	1.974,25	385,66	3.759,64	0,37	3,78
Padang Laweh	1.537,00	2.360,00	1.606,05	5.944,63	1,29	4,23
Sitiung	2.257,73	3.355,64	1.270,27	10.494,42	0,70	3,64
Timpeh	1.815,00	7.256,00	1.486,67	36.348,38	0,87	5,52
Pulau Punjung	6.976,00	3.525,00	5.611,94	9.204,96	0,93	4,60
Sembilan Koto	3.888,00	1.052,00	2.708,16	4.939,97	0,84	5,20
Jumlah Total	40.911,90	32.397,64	29.615,42	104.626,02	0,87	4,68

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, untuk luas tanaman perkebunan karet terbesar ada di Kecamatan Pulau Punjung, namun produksi terbesar ada di kecamatan Koto Besar, hal ini menggambarkan produktivitas tanaman perkebunan karet di pulau punjung masih di bawah produktivitas perkebunan karet di Kecamatan Koto Besar.

Sedangkan untuk tanaman Kelapa Sawit, untuk luas dan produksi terbesar ada di kecamatan Timpeh dengan luas tanaman perkebunan kelapa sawit tercatat seluas 7.256 hektar dengan nilai produksi sebesar 36.348 ton

Selanjutnya dilihat dari angka produktivitas, produktivitas tanaman karet terbesar ada di kecamatan Koto Besar dengan nilai 1,21 ton/ha/tahun, sedangkan untuk kelapa Sawit nilai produktivitas tertinggi ada di Kecamatan Sungai Rumbai sebesar 4,54 ton/ha/tahun. Sedangkan daerah yang memiliki produktivitas rendah untuk karet ada di Kecamatan Sitiung, Kecamatan Asam Jujuhan dan Kecamatan IX Koto. Untuk tanaman kelapa sawit produktivitas lebih rendah tercatat yaitu Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Besar dan Kecamatan Asam Jujuhan

2. Batik Tanah Liek

Batik tanah liek di Kabupaten Dharmasraya awalnya berasal dari seorang pengusaha batik di Blok B Kecamatan Sitiung kemudian berkembang dan diikuti oleh beberapa daerah di Kabupaten Dharmasraya yang memproduksi batik tanah liek seperti di Bukit Mindawa Kecamatan Pulau Punjung dan produksi batik di Kecamatan Koto Besar.

3. Keripik Tempe

Diproduksi secara rumah tangga di Blok B Sitiung I Kecamatan Sitiung dengan merek dagang “Mulya” dan yang bersal Blok D Kecamatan Koto Baru adalah keripik tempe “Matahari”. Kedua produk ini telah sering diikutsertakan pada berbagai pameran baik skala lokal maupun nasional. Produk ini cukup menjanjikan baik dari sisi rasa maupun penerimaan dari masyarakat.

4. Rendang Paku

Diproduksi secara rumah tangga di Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung dengan merek dagang “Rendang Paku Rang Kito”. Rendang Paku ini merupakan produk yang merupakan hasil keragaman pangan yaitu sayur pakis dan ikan. Produk ini telah sering berpartisipasi di berbagai event yang di adakan baik pemerintah kabupaten maupun provinsi. Produk ini sangat banyak diminati masyarakat terlihat dari tingginya permintaan baik untuk di konsumsi sendiri maupun dijadikan oleh-oleh.

5. Sektor Pariwisata

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang memiliki potensi wisata yang sangat potensial. Potensi wisata tersebut meliputi potensi wisata alam, budaya dan wisata buatan yang tersebar di beberapa kecamatan yang dapat dijangkau dari segala arah dan didukung prasarana jalan yang memadai. Beberapa potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.7
Potensi Wisata Kabupaten Dharmasraya Menurut Kecamatan

Kecamatan	Nama Objek	Jenis	Nagari
Koto Baru	Talago Baranang Siang (danau cinta)	Alam	Koto Baru
Pulau Punjung	Rumah Gadang Rajo Pulau Punjung	Budaya	Pulau Punjung
	Rumah Gadang Rajo Sungai Dareh	Budaya	Sungai Dareh
	Tugu Perjuangan	Sejarah	Sungai Kambut
	Bendungan Batang Mimpi	Alam	
	Bendungan Batu Bakawuik	Alam	
	Air Terjun Timbulun Indah	Alam	Empat Koto Pulau Punjung
	Gua Cigak	Alam	Gunung Selasih
Sitiung	Candi Padang Roco	Budaya	Siguntur
	Candi Pulau Sawah	Budaya	
	Rumah Kerajaan Siguntur	Budaya	
	Masjid Tua Siguntur	Budaya	
	Makam Raja-Raja Siguntur	Budaya	
	Bumi Perkemahan Siguntur	Alam	
	Puncak Gunung Medan	Budaya	Gunung Medan
Sembilan Koto Timpeh	Selaju Sampan	Budaya	Pulai/ Sitiung
	Air Terjun Koto Silago	Alam	Silago
	Gua Gadang Bunga Tika	Alam	Timpeh



Kecamatan	Nama Objek	Jenis	Nagari
	Air Terjun Tujuh Tingkek	Alam	
	Puncak Timpeh	Alam	
	Air Terjun Sungai Pinang	Alam	
Tiumang	Pantai Guli-Gulu Koto Beringin	Alam	Koto Beringin
Padang Laweh	Rumah Kerajaan Padang Laweh	Budaya	Padang Laweh
	Rumah Kerajaan Tiang Panjang	Budaya	
	Rumah Gadang Puti Bulian	Budaya	
Asam Jujuhan	Air Terjun Sungai Suil	Alam	Asam Jujuhan
Koto Besar	Rumah Gadang Kerajaan Koto Besar	Budaya	Koto Besar
	Bendungan Batang Siat	Alam	Abai Siat
	Makam Rajo Koto Besar	Budaya	
	Makam Syech Abdul Rahman Alif Ba	Budaya	
	Makam Rajo Kuek Kuaso	Budaya	

Sumber : RTRW Kab. Dharmasraya Tahun 2011 - 2031

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Dalam bahasan pertumbuhan ekonomi memuat nilai PDRB Tahun 2018 yang terdiri dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK). Bagian ini antara lain mencakup nilai PDRB, PDRB perkapita, pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

Tabel 1.8
PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Tahun 2018 (juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.394.924,88	2.664.538,19	2.852.040,00	2.949.570,00
B	Pertambangan dan Penggalan	762.091,10	684.589,75	674.400,00	700.490,00
C	Industri Pengolahan	454.602,82	509.994,98	564.907,91	578.751,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.315,94	1.901,47	2.200,50	2.371,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.047,66	1.155,37	1.265,30	1.343,69
F	Konstruksi	994.511,83	1.094.244,29	1.242.481,06	1.368.732,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.017.082,34	1.144.040,84	1.309.136,86	1.431.109,11
H	Transportasi dan Pergudangan	449.949,54	494.720,46	556.334,00	606.728,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	67.558,79	80.081,22	90.275,81	98.432,60
J	Informasi dan Komunikasi	400.236,26	447.286,33	546.480,60	604.748,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	177.984,51	194.795,27	208.172,57	218.323,35
L	Real Estat	169.449,64	186.751,97	204.116,27	219.837,17
M, N	Jasa Perusahaan	1.630,58	1.810,81	1.921,52	2.055,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	453.372,60	505.994,31	540.821,72	594.587,38
P	Jasa Pendidikan	196.627,02	224.760,10	262.198,82	287.288,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	123.177,80	135.148,05	154.792,33	172.267,78
R, S, T, U	Jasa lainnya	53.125,66	61.726,42	70.837,91	80.380,33
TOTAL		7.718.688,97	8.433.539,83	9.282.383,18	9.917.019,28
PDRB perkapita (Rp)		34.595.580	36.777.417	39.419.657	41.052.193
persentase penduduk miskin (persen)		7,17	7,16	6,68	6,42

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2019

Dilihat dari tabel di atas, maka dapat dilihat adanya peningkatan nilai PDRB, jika di tahun 2015 hanya sebesar 7,71 trilyun rupiah, di tahun 2018 meningkat menjadi 9,91 trilyun rupiah. Peningkatan nilai PDRB terjadi hampir pada setiap sektor, kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan dari 762 milyar rupiah di 2015 menjadi 700 milyar rupiah di tahun 2018. Sejalan dengan meningkatnya nilai PDRB ini juga adanya peningkatan nilai PDRB perkapita, jika di tahun 2015 hanya sebesar 34,59 juta rupiah, di tahun 2018 sudah berada pada angka 41,05 juta rupiah, atau masih berada di bawah Provinsi Sumbar sebesar 42,83 juta rupiah, hal ini memperlihatkan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk. Seiring dengan naiknya tingkat kesejahteraan penduduk tersebut juga diikuti oleh penurunan persentase penduduk miskin, jika di tahun 2015 tercatat sebesar 7,17 persen, maka di tahun 2018 tercatat sebesar 6,42, atau sedikit lebih kecil dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Sumbar sebesar 6,65 persen.

Tabel 1.9
PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan 2010
(ADHK) Tahun 2018

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.829.949,36	1.930.023,18	2.007.350,00	2.108.210,00
B	Pertambangan dan Penggalian	645.612,91	586.131,87	553.870,00	541.530,00
C	Industri Pengolahan	394.361,46	411.432,99	431.941,57	442.570,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	971,86	1.162,35	1.210,22	1.260,35
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	860,70	902,96	940,71	963,82
F	Konstruksi	748.673,82	818.749,69	898.155,37	959.615,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	792.839,93	855.588,98	926.933,18	989.660,57
H	Transportasi dan Pergudangan	367.215,96	397.856,14	431.346,78	465.299,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47.999,13	52.941,38	56.589,70	60.268,39
J	Informasi dan Komunikasi	420.857,80	464.229,97	510.602,43	552.726,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	134.403,35	142.123,72	145.886,87	147.722,84
L	Real Estat	128.101,14	135.337,23	144.328,46	151.176,84
M,N	Jasa Perusahaan	1.245,41	1.322,99	1.361,50	1.424,69
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	367.082,24	388.216,10	401.578,15	427.271,25
P	Jasa Pendidikan	142.525,69	154.884,99	169.772,38	183.440,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	95.910,14	102.295,99	111.635,38	120.366,84
R, S, T, U	Jasa lainnya	40.989,22	45.466,61	50.628,02	54.826,82
TOTAL		6.159.600,12	6.488.667,14	6.844.130,72	7.208.335,47
Pertumbuhan PDRB		5,80	5,34	5,48	5,32

Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2019

BAB II

PENJABARAN APBD

Sesuai ketentuan dalam penyusunan APBD, Kabupaten Dharmasraya pada Tahun Anggaran 2019, telah melakukan sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang secara substansi memuat kebijakan-kebijakan umum daerah seperti:

1. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
2. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
3. Kebijakan Pendapatan Daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran Pendapatan Daerah untuk Tahun 2019 serta strategi pencapaiannya;
4. Kebijakan Belanja Daerah yang mencerminkan Program dan Kebijakan serta langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
5. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya,

Selain dari pada itu, dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Dharmasraya juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dalam perencanaan

APBD, harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mengaktualisasikan sinergitas dengan instrumen-instrumen perencanaan pembangunan daerah. Anggaran yang direncanakan merupakan satu kesatuan perencanaan yang memaduserasikan hasil Musrenbang, RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019, arah kebijakan Provinsi serta kebijakan dan prioritas Pemerintah Pusat;

2. Tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mulai dari tahap penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan APBD;
3. APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu dalam merencanakan program dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar SKPD guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan;
4. APBD Tahun Anggaran 2019 dalam perencanaannya harus memaduserasikan prioritas program sesuai Renstra SKPD. Rencana anggaran disusun berdasarkan perkiraan maju yang memperhitungkan kebutuhan dana tahun anggaran berikutnya sesuai rencana target pencapaian kinerja.

Selanjutnya dalam penentuan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019 yang merupakan pengejawantahan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 yang bertemakan “*Memperkuat Sistem Pemerintahan dan Peran Serta Masyarakat Menuju Kemandirian Daerah*” dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2017 dan 2018 yang menunjukkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang bersifat mendesak dan harus segera diatasi pada tahun 2019;
2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam 9 (sembilan) agenda pembangunan (NAWA CITA) yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019;

3. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Propinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD Propinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019;
4. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 pada tahun ke empat dan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019;
5. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Berikut adalah tabel Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional untuk tahun Tahun 2019:

KABUPATEN DHARMASRAYA	PROVINSI SUMATERA BARAT	NASIONAL
1. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan memperkuat sektor pertanian, perikanan perindustrian, perdagangan dan pariwisata 2. Pemberdayaan masyarakat dan aparatur nagari 3. Inventarisasi dan pelestarian khasanah warisan budaya dan sejarah daerah 4. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah 5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan kualitas guru 6. Peningkatan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan, promotif, preventif serta SDM bidang kesehatan 7. Peningkatan profesionalisme aparatur, pengembangan sistim informasi daerah dan sistim perencanaan berbasis IT 8. Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam memelihara lingkungan hidup	1. Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat 2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan 3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis 6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi 7. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan 8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta penanganan Daerah Tertinggal 9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur 10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman 3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry, dan jasa produktif. 4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan. 5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Sumber: Bappeda Kabupaten. Dharmasraya Tahun 2019

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah, RKPD, KUA dan PPAS tahun 2019, selanjutnya disusunlah Peraturan Daerah tentang APBD yakni Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019.

Seiring dengan ditetapkannya kedua Peraturan Daerah tersebut di atas juga ditetapkan Peraturan Bupati sebagai Penjabaran atas kedua Peraturan Dearah dimaksud. Dan untuk penjabaran APBD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Dharmasraya Tahun Anggaran 2019.

Akan tetapi sesuai perkembangan anggaran global yang mengharuskan dilakukan pergeseran anggaran seperti adanya tambahan dana transfer dari pusat yang juga berpengaruh pada perubahan belanja daerah, maka sesuai ketentuan pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mengakomodir penambahan dana transfer dan belanja yang mempengaruhinya, selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Tahun 90 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019, sehingga struktur APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019	Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019	Bertambah/ (berkurang)
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN DAERAH	1.057.719.781.183,00	1.064.900.986.783	7.181.205.600,00
A	Pendapatan Asli Daerah	100.170.000.000,00	100.170.000.000,00	-
1	Pajak Daerah	27.926.281.048,00	27.926.281.048,00	-
2	Retribusi Daerah	5.635.697.267,00	5.635.697.267,00	-
3	Hasil Pengel. Kekayaan Daerah yg dipisahkan	4.641.438.934,00	4.641.438.934,00	-
4	Lain-lain PAD yang sah	61.966.582.751,00	61.966.582.751,00	-
B	Dana Perimbangan	778.378.915.000,00	781.832.120.600,00	3.453.205.600,00
1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	22.378.118.000,00	22.378.118.000,00	-
2	Dana Alokasi Umum	522.603.733.000,00	524.890.763.000,00	2.287.030.000,00
3	Dana Alokasi Khusus	233.397.064.000,00	234.563.239.600,00	1.166.175.600,00
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	179.170.866.183,00	182.898.866.183,00	3.728.000.000,00
1	Pendapatan Hibah	30.666.400.000,00	34.394.400.000,00	3.728.000.000,00
2	Dana Bagi Hasil dari Provinsi	48.899.228.183,00	48.899.228.183,00	-
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	97.546.293.000,00	97.546.293.000,00	-
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	2.058.945.000,00	2.058.945.000,00	-
II	BELANJA DAERAH	1.078.808.572.259,00	1.085.989.777.859,00	7.181.205.600,00
A	Belanja Tidak Langsung	534.926.743.425,75	536.092.919.025,75	1.166.175.600,00
1	Belanja Pegawai	399.100.287.435,75	399.100.287.435,75	-
2	Belanja Hibah	11.234.100.000,00	12.809.900.000,00	1.575.800.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	-
4	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/	3.188.000.000,00	3.188.000.000,00	-



	Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.			
5	Belanja Bantuan Keuangan pada pemerintah Kabupaten/Kota dan Partai Politik	116.994.731.590,00	116.994.731.590,00	-
6	Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00	800.000.000,00	-
B	Belanja Langsung	543.881.828.833,25	549.896.858.833,25	6.015.030.000,00
1	Belanja Pegawai	48.750.243.200,00	48.750.243.200,00	-
2	Belanja Barang dan Jasa	249.761.976.140,0	252.142.686.140,0	2.380.710.000,00
3	Belanja Modal	245.369.609.493,25	249.003.929.493,25	3.634.320.000,00
III	PEMBIAYAAN DAERAH			
A	Penerimaan Pembiayaan	23.588.791.076,00	23.588.791.076,00	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23.588.791.076,00	23.588.791.076,00	
B	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	
	Penyertaan Modal Pemerintah daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	
C	Pembiayaan Netto	21.088.791.076,00	21.088.791.076,00	

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

A. PENGELOLAHAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah harus merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan Pendapatan diarahkan pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah:

- 1) Melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya;
- 2) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi

Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- 4) Pemanfaatan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dengan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah dengan mempermudah proses penyewaan aset Daerah seperti alat berat, sewa gedung kantor dan menambah pengadaan aset daerah dan perawatan secara berkala;
- 5) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis LainLain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;
- 6) Pemungutan pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 7) Penghasilan pengelolaan BPSPAM.

b. Kebijakan Dana Perimbangan

- 1) Meningkatkan Akurasi dan Validasi Data teknis pada: DBH, DAU dan DAK non fisik sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam Dana Perimbangan;
- 2) Penyelarasan kebijakan daerah dengan Nasional melalui Pengusulan DAK Fisik sesuai dengan Prioritas Nasional;
- 3) Meningkatkan Koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat;
- 4) Peningkatan Kualitas pelaporan dan penyampaian tepat waktu.

c. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

- 1) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan keputusan Gubernur tentang alokasi dan sekolah penerima dana BOS sekolah SD dan SMP;
- 2) Peningkatan komitmen dana hibah dari pihak ketiga ke Pemerintah Daerah melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dengan pihak ketiga;
- 3) Validasi data objek pajak sebagai optimalisasi sumber pendapatan bagi hasil pajak provinsi pada Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit

10%, termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 4) Peningkatan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat pada Pajak Rokok bagian kabupaten/kota, yang dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana amanat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah.

Pada APBD Tahun Anggaran 2019, Target Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar Rp. 1.064.900.986.783,- dengan realisasi sebesar Rp. 982.101.062.835,35 atau 92.85% (*sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI*), dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, dari target sebesar Rp.100.170.000.000,- terealisasi sebesar Rp.70.165.894.862,35,- atau 70.05%.
- b. *Dana Perimbangan*, dari rencana penerimaan sebesar Rp.781.832.120.600,- terealisasi sebesar Rp.759.345.973.880,- atau 97.55%.
- c. *Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah*, sebesar Rp.182.898.866.183,- terealisasi sebesar Rp.146.698.483.360,- atau 81.88%.

Untuk lebih jelasnya Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Dharmasraya pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
I	PENDAPATAN DAERAH	1.057.719.781.183	976.210.442.102,35	92.29
A	Pendapatan Asli Daerah	100.170.000.000	70.165.984.862,35	70.05
1	Pajak Daerah	27.926.281.048	19.185.081.999,67	68.70
2	Retribusi Daerah	5.635.697.267	3.055.358.082	54.21
3	Hasil Pengel. Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.641.438.934	3.590.314.080	77.35
4	Lain-lain PAD yang sah	61.966.582.751	44.335.230.700,68	71.55
B	Dana Perimbangan	781.832.120.600	759.345.973.880	97.55
1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	22.378.118.000	15.828.178.551	70.73
2	Dana Alokasi Umum	524.890.763.000	522.603.733.000	100.00
3	Dana Alokasi Khusus	233.397.064.000	220.914.062.329	94.65
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	182.898.866.183	146.698.483.360	81.88



1	Pendapatan Hibah	34.394.400.000	1.554.052.869	5.07
2	Dana Bagi Hasil dari Provinsi	48.899.228.183	47.598.137.491	97.34
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	97.546.293.000	97.546.293.000	100.00
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	2.058.945.000	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

3. Permasalahan dan Solusi.

Capaian pendapatan daerah pada sebesar 92.85%, merupakan hasil riil yang diterima di tahun 2019. Rendahnya capaian tersebut merupakan akumulasi permasalahan klasik yang dialami setiap tahunnya, diantaranya adalah:

- Penetapan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih terlalu tinggi;
- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan PAD;
- Koordinasi Perangkat Daerah, Instansi Pendukung, dan Wajib Pajak / Wajib Retribusi Daerah masih belum maksimal;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Meningkatkan Pendapatan Daerah berdasarkan kajian dan perhitungan potensi ekonomi untuk meningkatkan Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- Meningkatkan Kualitas layanan Publik yang lebih efektif dan maksimal sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan Publik yang ditawarkan ke masyarakat;
- Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD;
- Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga diperoleh dana perimbangan yang memadai;
- Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan belanja digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib

terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Selain dari pada itu, belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah dengan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada pengelolaan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, dan Belanja Langsung (BL) yang merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

- 1) Pengalokasian belanja tidak langsung pada belanja pegawai yaitu gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati;
- 2) Alokasi Dana Desa / Nagari masih mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;

b. Kebijakan Belanja Langsung

- 1) Mempedomani RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 yang telah dijabarkan dalam prioritas pembangunan tahun keempat, program prioritas tahun 2019 dan kegiatan prioritas sesuai dengan target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

- 2) Dukungan RPJMN Tahun 2015–2019 dan RKP Tahun 2019;
- 3) Penggunaan dana fungsi pendidikan 20% dan penggunaan dana fungsi kesehatan 10% dari total belanja;
- 4) Pengalokasian belanja bersifat khusus berdasarkan pendapatan daerah yang dialokasikan pada belanja-belanja tertentu diantaranya :
 - a. Pengalokasian bantuan keuangan provinsi ke kabupaten/kota,
 - b. Pengalokasian bantuan keuangan kabupaten ke pemerintahan desa;
 - c. Pengalokasian belanja bantuan kepada partai politik
 - d. kegiatan yang berasal dari pendanaan bagi hasil dan DAK;
- 5) Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
- 6) Lanjutan kegiatan-kegiatan strategis yang tertunda dan belum selesai.

2. Target dan Realisasi Belanja

Dari anggaran sebesar Rp. 1.085.989.777.859,- pada APBD Tahun Anggaran 2019 telah terealisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 999.945.759.931,427 atau 94,61%, dengan rincian sebagai berikut:

1. *Belanja Tidak Langsung* sebesar Rp. 536.092.919.025,75 dengan realisasi sebesar Rp. 519.198.028.287,- atau 97.06%.
2. *Belanja Langsung*, sebesar Rp. 549.896.858.833,25 dengan realisasi sebesar Rp. 480.747.731.644,42 atau 92.11%.

Berikut adalah anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
II	BELANJA DAERAH	1.085.989.777.859,00	999.945.759.931,42,00	94.61
A	Belanja Tidak Langsung	536.092.919.025,75	519.198.028.287,00	97.06
1	Belanja Pegawai	399.100.287.435,75	383.764.494.070,00	96,06
2	Belanja Hibah	12.809.900.000,00	12.370.683.300,00	110,12
3	Belanja Bantuan Sosial	3.200.000.000,00	3.132.000.000,00	97,88
4	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.	3.188.000.000,00	3.170.650.000,00	99,46
5	Belanja Bantuan Keuangan pada pemerintah Kabupaten/Kota dan Partai Politik	116.994.731.590,00	116.736.023.992,00	99,78
6	Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00	24.176.925,00	3,02
B	Belanja Langsung	549.896.858.833,25	480.747.731.644,42	92.11
1	Belanja Pegawai	48.750.243.200,00	46.346.909.869,00	95.07
2	Belanja Barang dan Jasa	252.142.686.140,0	214.642.028.395,51	64.22
3	Belanja Modal	249.003.929.493,25	219.758.793.379,91	89.56

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

Sedangkan anggaran dan realisasi keuangan dari pelaksanaan urusan dan bidang pemerintahan Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
A	Urusan Pemerintahan Wajib			
I	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
	1. Bidang Pendidikan	83.415.617.323,00	52.971.235.076,77	63,50
	2. Bidang Kesehatan	126.026.854.248,00	118.490.698.754,40	94,02
	3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	142.882.324.442,25	131.884.154.766,34	92,30
	4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.958.488.440,00	4.793.092.698,93	96,66
	5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	9.734.045.875,00	9.574.838.968,00	98,36
	6. Bidang Sosial	3.945.132.776,00	3.901.645.166,00	98,90
II	Urusan Pemerintahan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
	7. Bidang Tenaga Kerja	944.904.700,00	855.390.675,00	90,53
	8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	868.540.900,00	854.591.221,00	98,39
	9. Bidang Pangan	1.535.068.500,00	1.492.723.147,00	97,24
	10. Bidang Pertanahan	269.362.000,00	251.881.394,00	93,51
	11. Bidang Lingkungan Hidup	3.614.329.360,00	3.588.106.994,00	99,27
	12. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.943.215.250,00	3.894.564.183,00	98,77
	13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.787.181.500,00	2.775.041.081,00	99,56
	14. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.876.558.250,00	3.771.720.883,00	97,30
	15. Bidang Perhubungan	3.788.936.000,00	3.453.099.584,00	91,14
	16. Bidang Komunikasi dan Informatika	5.930.381.350,00	5.844.978.450,00	98,56
	17. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1.792.822.250,00	1.766.988.038,00	98,56
	18. Bidang Penanaman Modal	1.647.342.100,00	1.610.463.452,00	97,76
	19. Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.377.952.500,00	5.313.798.012,00	98,81
	20. Bidang Statistik	207.485.000,00	206.910.946,00	99,72
	21. Bidang Persandian	104.520.000,00	101.301.655,00	96,92
	22. Bidang Kebudayaan	3.461.120.425,00	3.379.152.364,00	97,63
	23. Bidang Perpustakaan	1.322.714.950,00	1.284.579.287,00	97,12
	24. Bidang Kearsipan	213.218.000,00	213.033.250,00	99,91
B	Urusan Pemerintahan Pilihan			
	25. Bidang Kelautan dan Perikanan	2.148.729.698,00	2.108.695.386,00	98,14
	26. Bidang Pariwisata	2.681.041.200,00	2.481.417.683,85	92,55
	27. Bidang Pertanian	14.613.719.750,00	14.135.416.797,30	96,73
	28. Bidang Perdagangan	3.852.072.000,00	3.394.954.622,56	88,13
	29. Bidang Perindustrian	30.379.541.000,00	26.400.220.095,00	86,90
	30. Bidang Transmigrasi	1.055.936.000,00	903.348.287,00	85,55
C	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan			
	31. Bidang Administrasi Pemerintahan	59.156.942.646,00	56.780.905.255,00	95,98
	32. Bidang Pengawasan	2.117.202.000,00	2.081.784.159,00	98,33
	33. Bidang Perencanaan	5.219.092.300,00	5.101.993.462,00	97,76
	34. Bidang Keuangan	6.778.973.250,00	6.488.749.922,00	95,72
	35. Bidang Kepegawaian	3.230.462.850,00	2.998.208.324,00	92,81

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

3. Permasalahan dan Solusi.

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang dibiayai dengan Belanja Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah pelaksana urusan, seringkali mengalami permasalahan, diantaranya adalah:

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tidak sesuai jadwal pelaksanaan pada Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Banyaknya pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana sesuai jadwal yang direncanakan pada (DPA) sebagai akibat dari:

1. kurang matangnya perencanaan pelaksanaan Kegiatan;
2. Tertundanya pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan karena keterbatasan keuangan yang ada pada Bendahara Pengeluaran sebagai akibat Ganti Uang (GU) yang tidak mencukupi, dan tidak berani memanfaatkan sistem Tambah Uang (TU);
3. Adanya keragu-raguan PA / KPA / PPTK untuk melaksanakan Program dan Kegiatan, yang menyebabkan penundaan, atau melaksanakan secara 100%, atau bahkan tidak melaksanakannya sama sekali.

b. Pemanfaatan Anggaran yang tidak sesuai peruntukannya.

Pencantuman jenis item terkecil pada DPA tidak terlaksana sesuai yang direncanakan, seperti:

1. Kurangnya pemahaman tentang rekening belanja, sehingga banyak belanja yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan maksud pengalokasiannya;
2. Pemborosan belanja, seperti tidak selektif dalam penggunaan, serta efektif penggunaannya.

c. tidak adanya indikatornya yang jelas dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan.

Banyaknya kegiatan yang terlaksana tidak sesuai dengan indikator yang termaktub dalam Program dan Kegiatan yang bersangkutan, sehingga Program dan Kegiatan menjadi tepat baik sasaran, output (keluaran), maupun outcome (manfaat) dari Program dan Kegiatan dimaksud.

Untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengelolaan belanja termasuk permasalahan yang dikemukakan di atas, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengikat para Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dalam suatu perjanjian kinerja yang merupakan komitmen dari Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran;
- b. menginstruksikan kepada seluruh SKPD untuk merancang Program dan Kegiatan dengan indikator yang jelas sehingga Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan indikatornya;
- c. melakukan sosialisasi, monitoring, dan rekonsiliasi yang berkesimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawabannya sehingga penatausahaan dan pelaporan pelaksanaan APBD dapat lebih mudah ditata, dikontrol, dan dipertanggungjawabkan.

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan-kebijakan Pembiayaan dipengaruhi oleh Surplus atau Defisit APBD dengan memperhatikan unsur-unsur kebijakan-kebijakan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hal ini dapat dipahami bahwa Pembiayaan merupakan unsur penyeimbang APBD karena secara formulasi APBD adalah “Pendapatan ditambah Penerimaan Pembiayaan sama dengan Belanja ditambah Pengeluaran Pembiayaan”

1. Kebijakan Umum Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran, dalam arti pengeluaran Pembiayaan timbul

sebagai upaya pemanfaatan surplus atau defisit anggaran ditambah SiLPA tahun lalu dan unsur penerimaan pembiayaan lainnya.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2019 diperuntukan dalam rangka pembentukan investasi penyertaan modal pada Lembaga Keuangan Milik Daerah.

2. Target dan Realisasi

Untuk target dan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
III	PEMBIAYAAN DAERAH			
A	Penerimaan Pembiayaan	23.588.791.076,00	16.151.686.969,98	68,47
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23.588.791.076,00	16.151.686.969,98	68,47
B	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00
	Penyertaan Modal Pemerintah daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00
C	Pembiayaan Netto	21.088.791.076,00	13.651.686.969,98	64,73

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada PT. Bank Pembangunan Sumatera Barat (Bank Nagari).

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyertaan modal daerah terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaannya, antara lain:

- Pemerintah Daerah hanya bisa menyertakan modal pada Bank Nagari sesuai besaran kuota maksimal yang ditetapkan pada RUPS setiap tahunnya;
- Dalam hal Deviden, masih terdapat permasalahan dalam penerimaannya, seperti tidak transparannya penerimaan deviden dari PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat sebagai BUMD yang modalnya didukung sesuai komitmen Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Dari permasalahan di atas, khususnya penyertaan modal daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai leading sektor penyertaan modal pada BUMD tersebut.

**BAB
III****PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Selanjutnya, pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 dijelaskan juga bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan tersebut memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penganggaran belanja daerah pada masing masing Perangkat Daerah disusun dengan pembahasannya mengutamakan prioritas dan plafon anggaran dan mengedepankan urusan pemerintahan yang ditata dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing masing Perangkat Daerah yang juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019. Seiring dengan ditetapkannya kedua Peraturan Daerah tersebut di atas juga ditetapkan Peraturan Bupati sebagai Penjabaran atas kedua Peraturan Daerah dimaksud. Dan untuk penjabaran APBD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019. Akan tetapi sesuai perkembangan anggaran global yang mengharuskan dilakukan pergeseran anggaran seperti adanya tambahan dana transfer dari pusat yang juga berpengaruh pada perubahan belanja daerah, maka sesuai ketentuan pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun



2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mengakomodir penambahan dana transfer dan belanja yang mempengaruhinya, selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Tahun 90 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019

Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan, yang selanjutnya akan dijabarkan pada poin-poin di bawah ini.

A. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

a. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terdiri dari urusan Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; serta Sosial. Urusan-urusan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PENDIDIKAN

Urusan pendidikan yang dilaksanakan dengan berbagai program yakni:

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Program ini dilaksanakan melalui 13 kegiatan sebagai berikut:

1) Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir



Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan sarana pendidikan berupa Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir yang dilaksanakan di 23 Sekolah dalam 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Punjung, Sembilan Koto, Padang Laweh, Sungai Rumbai, Sitiung, Tiumang, Koto Baru, dan Koto Salak Dengan Anggaran Pembangunan Rp. 165.130.950,-. Realisasi dari kegiatan tersebut Rp. 164.081.150,- atau sebesar (99,45%).

2) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan visi dan misi Dinas Pendidikan. Narasumber berasal dari LPMP yaitu Feri Frened, S.Pd, MM dan dari UNP yaitu Dr. Dadan Suryanna, M.Pd. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari TK sebanyak 14 orang dan KB sebanyak 26 orang. Anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 30.857.000,-. Realisasi kegiatan tersebut Rp. 30.070.000,- atau sebesar (97,45%).

3) Jambore PAUD

Kegiatan jambore PAUD ditujukan untuk pencapaian hasil peningkatan mutu yang berkualitas, memotifasi kompetensi profesi inovatif dan berkreatifitas sebagai pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatan Jambore PAUD ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Kabupaten Dharmasraya tanggal 07 s.d. 08 Agustus 2019 dengan peserta Jambore yaitu peserta didik dari TK dan KB se-Kabupaten Dharmasraya. Masing-masing kecamatan mengirim utusan untuk setiap kegiatan. Anggaran kegiatan ini yaitu Rp. 27.703.000,-. Realisasi kegiatan tersebut Rp. 27.634.025,- atau sebesar (99,75%).

4) Operasional HIMPAUDI

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi antara Bunda PAUD Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2019 yang berupa kegiatan IGTK, Pendidik dan tenaga pengelola PAUD hal ini dapat menampung segala aspirasi baik yang menyangkut insentif maupun mutu pendidikan anak usia dini selain itu juga dipergunakan dalam rangka koordinasi ke pusat untuk mendapatkan tunjangan fungsional, daerah khusus, kualifikasi dana dari pusat. Anggaran yang ada sebesar



Rp. 79.793.450,- dapat terealisasi sebesar Rp. 78.106.950,- atau sebesar (97,99%).

5) Pengadaan Alat Bermain PAUD

Kegiatan ini merupakan sebuah pengadaan alat bermain PAUD yang akan ditujukan ke RA Babussalam Pulau Punjung, RA Baiturahman Pulau Punjung, RA Alhasnah Pulau Punjung, RA Alfalaq Pulau Punjung, RA As-Sallam 02 Pulau Punjung, TK Harapan Bunda Koto Tinggi Koto Besar, TK Kartini Kampung Baru Pulau Punjung, TK Amanah Jorong Padang Candi Nagari Sungai Dareh, TK Aisiyah 02 Kampung Surau, TK Bundo Kandung Bukit Berangin Sikabau, TK Tunas Harapan Sungai Kilang Nagari Sungai Dareh, TK Aisiyah 07 Ampang Kuranji Silago, TK Dharma Bakti Durian Simpai Nagari Kotonan 4 diateh, TK Islam Bakti 138 Lubuk Pauh Padang Hilalang, TK Pertiwi Nagari Silago, TK Islam Terpadu Sungai Rumbai, TK Aisyah 08 Nagari Lubuk Karak, TK Dahlia Indah Sungai Rumbai, PAUD Mutiara Hati Kurnia Koto Salak, TK Islam Bakti 71 Sialang Gaung. Anggaran kegiatan ini yaitu Rp. 154.223.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 153.823.000,- atau sebesar (99,75%).

6) Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN)

Kegiatan Hari Anak Nasional dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan Gebyar PAUD yang dengan membawa jumlah peserta anak-anak 5 Orang, pendamping 8 Orang, serta 10 Orang Bunda PAUD, Penilik 11 Orang. Dengan dana yang tersedia sebesar Rp. 29.880.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.880.000,- atau sebesar (100%).

7) Bantuan Operasional Pengawas (Penilik) PAUD Kabupaten Dharmasraya

Kegiatan Bantuan Operasional Penilik PAUD Kabupaten Dharmasraya untuk meningkatkan kinerja penilik PAUD, dan diharapkan meningkatnya kualitas Pendidik PAUD. Kegiatan ini mengharuskan penilik mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan dan karakteristik kurikulum 2013 yang meliputi kompetensi lulusan pembelajaran dan penilaian kurikulum 2013. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 36.350.000,- dengan realisasi Rp. 35.853.600,- atau sebesar (98,62%).



8) Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi

Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi untuk meningkatkan motivasi dan semangat pada PTK PAUD untuk selalu memberikan prestasi dan meningkatkan kualitas pendidikan PAUD. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 47.839.500,- dengan realisasi Rp. 47.645.400,- atau sebesar (99,59%).

9) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana pendidikan agar bisa mendorong motivasi siswa untuk semangat dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Pada pengadaan ini yang diadakan yaitu Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD untuk seluruh PAUD se-Kabupaten Dharmasraya. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 630.960.000,- dengan realisasi Rp. 406.720.818,- atau sebesar (64,53%).

10) Pengembangan Akreditasi PAUD dan PNF

Akreditasi PAUD dan PNF dimulai sejak tahun 2008, setelah badan nasional terkait dibentuk pada bulan Desember tahun 2006. Bermula dengan kuota yang terbatas dan relatif sangat kecil dibanding keberadaan jumlah PAUD dan PNF yang pertumbuhannya sangat besar khususnya PAUD. Pada tahun 2015 pertama kali kuota sasaran akreditasi dinaikan sekitar 50% maka pelaksanaan akreditasi mulai terbagi antara terpusat dan sebagian pada beberapa provinsi yang telah membentuk badan perbantuan (pokja). Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 23.327.150,- dengan realisasi Rp. 23.327.150,- atau sebesar (100%).

11) Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK)

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan mutu sekolah khususnya dan mutu pendidikan pada umumnya, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pembelajaran. Untuk itu dilakukan penambahan ruang kelas bagi TK Negeri di Kabupaten Dharmasraya. Adapun kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK) ini dilaksanakan oleh 4 Sekolah TK Negeri di Kabupaten Dharmasraya yaitu: TKN Pembina Koto Baru, TKN 01 Sitiung, TKN 02 Sungai



Rumbai, dan TKN 02 Tiumang. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 721.892.000,- dengan realisasi Rp. 713.267.000,- atau sebesar (98,2%).

12) Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah TK (DAK)

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan sarana pendidikan berupa perbaikan ruang kelas. Adapun sekolah yang mendapatkan bantuan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah TK (DAK) ini terdiri dari 3 sekolah yaitu: TKN Pembina Pulau Punjung, TKN Pembina Sitiung, dan TKN Pembina Sungai Rumbai. Dengan Anggaran rehab Rp. 242.115.000,-. Realisasi dari kegiatan tersebut Rp. 233.610.000,- atau sebesar (96.54%).

13) Penambahan Ruang Kelas Baru TK

Kegiatan ini merupakan salah satu penunjang sarana pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam kegiatan penambahan RKB ini ada 2 sekolah yang ditambah ruang kelas barunya, yaitu: TK Islam Bakti 110 Bonjol Koto Besar dan Lanjutan dari pembangunan kelas baru Doa Bunda Sungai Kemuning. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 211.973.000,- dengan realiasi Rp. 211.145.000,- atau sebesar (99.62%).

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD (DAK)

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan sarana pendidikan berupa penambahan ruang kelas SD di Kabupaten Dharmasraya yaitu: SDN 24 Pulau Punjung, SDN 08 Sungai Rumbai, SDN 05 Sungai Rumbai, SDN 03 Pulau Punjung, dan SDN 09 Sungai Rumbai. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.710.331.200,- dengan realiasi Rp. 1.684.928.990,- atau sebesar (98,90%).

2) Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

Kegiatan ini ditujukan untuk pembangunan taman, Lapangan upacara dan fasilitas parkir. Adapun sekolah yang mendapatkan dana untuk pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir ini yaitu: pembangunan pagar SDN 05 Sembilan Koto, pembangunan pagar SDN 17 Pulau Punjung, Paving blok taman SDN 14 Koto Baru,



Pembangunan pagar SDN 04 Koto Baru, pembangunan pagar SDN 07 Koto Baru, Pemasangan paving blok taman SDN 01 Pulau Punjung, Pembangunan pagar SDN 03 Sungai Rumbai, Pembangunan pagar SDN 13 Koto Baru dan Pagar SDN 11 Koto Baru, Pagar SMP 6 Pulau Punjung, Pagar SDN 03 Koto Salak, Paving blok taman SMP 3 Koto Baru, Pagar SDN 05 Sitiung, Pagar SDN 09 Tiumang, Pemasangan paving blok taman SDN 18 Pulau Punjung, Pendataran lokasi SMP Jorong Koto Tuo Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar, Pembangunan pagar SMPN 1 Padang Laweh, dan Pembangunan rumah dinas SDN 10 Sembilan Koto Lubuk Labu. Anggaran pada kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 1.543.172.250,-, dengan realisasi Rp. 1.525.642.750,- atau sebesar (98,96%)

3) Pembangunan Ruang Ibadah

Kegiatan ini ditujukan untuk salah satu pendukung meningkatkan akreditasi pada sekolah dan pembentukan karakter siswa. Adapun sekolah yang mendapatkan pembangunan yaitu SDN 06 Koto Baru dengan nama kegiatan lanjutan pembangunan mushalla SDN 06 Koto Baru. Alokasi anggaran dana pada kegiatan ini Rp. 26.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 26.350.000,- atau sebesar (99,43%).

4) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa

Pengadaan alat praktek dan peraga siswa ini ditujukan untuk meningkatkan sarana pendidikan di Kabupaten Dharmasraya yang berupa pengadaan media pembelajaran, Pengadaan peralatan laboratorium, Pengadaan peralatan laboratorium komputer dan pengadaan alat praktik dan peraga siswa. Kegiatan ini dilaksanakan di 2 sekolah yaitu SDN 01 Koto Baru dan SMPN 1 Koto Besar dengan anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dengan realisasi dari kegiatan tersebut Rp. 64.700.000,- atau sebesar (99,54%).

5) Sharing Anggaran Pengadaan Mobiler SD

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sharing informasi mengenai cara menggunakan anggaran pengadaan mobiler SD agar tepat pada sasaran. Kegiatan sharing anggaran pengadaan mobiler ini merupakan kegiatan yang penting dilakukan agar penganggaran untuk pengadaan mobiler bisa digunakan dengan tepat sasaran. Alokasi anggaran dana



pada kegiatan ini Rp. 20.000.000,-, dengan realisasi Rp. 19.478.000,- atau sebesar (97,39%).

6) Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan Sekolah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang sarana pendidikan agar bangunan sekolah selalu terawat sesuai standar Pendidikan Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan di 2 sekolah di Kabupaten Dharmasraya yaitu Rehab SDN 01 Koto Besar dan Rehab SDN 05 Koto Baru. Alokasi anggaran pada kegiatan ini Rp. 70.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 70.144.000,- atau sebesar (99,50%).

7) Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Ibadah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang sarana pendidikan agar bangunan selalu terawat dan bisa membuat siswa nyaman dalam beribadah. Kegiatan ini dilaksanakan di SDN 07 Koto Baru dan SDN 06 Timpeh dengan nama kegiatan Rehab Mushalla SDN 07 Koto Baru dan Rehab Mushalla SDN 06 Timpeh. Alokasi anggaran pada kegiatan ini Rp. 20.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 19.940.000,- atau sebesar (99,70%).

8) Pembinaan dan Olympiade SAINS (OSN) SMP

Kegiatan ini merupakan sebuah pembinaan pada peserta yang akan mengikuti kejuaraan tingkat SMP. Adapun lomba yang diadakan yaitu di Bidang Studi Matematika, IPA dan IPS. Lomba Bidang Studi Matematika yang memperoleh juara I yaitu M. Fauzil Irsyad (SMP 1 Koto Baru), juara II yaitu Syauqiatus Syifa Ramadhan (SMPN 2 Koto Baru), dan juara III yaitu Aqila Dwi Hanifa Windra (SMPN Unggul Dharmasraya). Sedangkan untuk Bidang Studi IPA yang memperoleh juara I yaitu Desi Sulistyani (SMPN 1 Sitiung), juara II yaitu Vanessa Aqila (SMPN Unggul Dharmasraya), dan juara III yaitu Akhy Wahyudi (SMPN 1 Timpeh). Untuk Bidang Studi IPS yang memperoleh juara I yaitu Amanda Bilbina Syaiful (SMPN Unggul Dharmasraya), juara II yaitu Putri Rahma Aulia (SMPN 3 Pulau Punjung) dan juara III yaitu Hafidz Aulia Faturrahman (SMPN 1 Pulau Punjung). Alokasi anggaran pada kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 49.080.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 48.202.500,- atau sebesar (98,21%).



9) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD

Kegiatan ini merupakan sebuah kejuaraan yang diikuti oleh tingkat SD. Adapun cabang lomba yang dilaksanakan yaitu Cabang lomba menyanyi tunggal, Cabang lomba seni tari, Cabang lomba pantonim dan Cabang lomba gambar bercerita. Untuk cabang lomba menyanyi tunggal yang memperoleh juara I yaitu Safa Amaudi Latisa (SDIT Sakinah Sungai Rumbai), juara II yaitu Rozan Muhammad Ikhsan (SDIT Al Bina Koto Baru), dan juara III yaitu Andini Putri (SDN 08 Pulau Punjung). Sedangkan untuk cabang lomba seni tari yang memperoleh juara I yaitu SDN 20 Sitiung, juara II yaitu SDN 01 Koto Baru, dan juara III yaitu SDN 13 Pulau Punjung. Sementara itu, untuk cabang lomba pantonim yang memperoleh juara I yaitu Muhammad Al Fadillah (SDN 13 Koto Baru), juara II yaitu Dani (SDN 08 Tiumang), dan juara III yaitu Fadhil Ardiansyah (SDN 01 Timpeh). Dan untuk cabang lomba gambar bercerita yang memperoleh juara I yaitu Nafla Dian Syakira (SDN 20 Sitiung), juara II yaitu Reza Agus Salafudin (SDN 01 Tiumang) dan juara III yaitu Zikra Andiaستی (SDIT Al Bina 01). Alokasi anggaran pada kegiatan ini Rp. 38.429.900,- dengan jumlah dana yang terealisasi sebesar Rp. 38.184.900,- atau sebesar (99,36%).

10) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP

Kegiatan ini merupakan sebuah kejuaraan yang diikuti oleh tingkat SMP. Adapun cabang lomba dalam kegiatan FLS2N ini yaitu lomba solo song, lomba kreativitas musik tradisional, lomba desain poster dan lomba story telling. Untuk lomba solo song yang memperoleh juara I yaitu Anaya Fatihah Rahmi (SMPN 1 Sungai Rumbai), juara II yaitu Zahratul Najiha (SMPN 3 Koto Baru) dan juara III yaitu Syafana Maharani (SMPN 1 Pulau Punjung). Sedangkan lomba kreativitas musik tradisional yang memperoleh juara yaitu SMPN 2 Koto Baru, lomba desain poster yang memperoleh juara yaitu Raifan Wahyu Satria (SMPN Unggul Dharmasraya) dan lomba story telling yang memperoleh juara I yaitu Miftahul Jannah (SMPN 1 Sitiung), juara II yaitu Mulia Nazwa (SMPN 1 Pulau Punjung), dan juara III yaitu Yuli Maryanti (SMPN 2 Sungai Rumbai). Alokasi anggaran pada kegiatan



ini Rp. 39.910.000,- dengan jumlah dana yang terealisasi sebesar Rp. 39.714.500,- atau sebesar (99,51%).

11) Pembinaan Olimpiade sains Nasional (OSN) SD

Kegiatan ini merupakan sebuah pembinaan pada peserta yang akan mengikuti kejuaraan tingkat SD. Adapun cabang lomba pada kegiatan ini yaitu Bidang studi Matematika dan IPA, untuk Bidang studi Matematika yang memperoleh juara I yaitu Najwa Salsabila Hendri (SDN 20 Sitiung), juara II yaitu Zhel Gino Rizazi (SDN 06 Pulau Punjung), dan juara III yaitu M. Fabian Gusti Sumantri (SDN 01 Padang Laweh). Sedangkan untuk Bidang studi IPA yang memperoleh juara I yaitu Puti Fadya Lenggogeni (SDN 06 Sungai Rumbai), juara II yaitu Pradhita Anggun Lesatari (SDN 05 Timpeh), dan juara III yaitu Nazla Dwi Utari (SDN 04 Sitiung). Jumlah Alokasi anggaran pada kegiatan ini Rp. 49.170.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 48.544.000,- atau sebesar (98,73%).

12) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (DAK Tahun 2019)

Kegiatan ini merupakan salah satu pendukung sarana dan prasarana pendidikan non formal agar bisa memberikan fasilitas yang baik untuk peserta siswa didik seperti paket A, B dan C. Adapun sarana dan prasarana yang disediakan yaitu Pembangunan ruang praktik / bengkel kerja baru beserta perabotnya, Rehabilitasi ruang penunjang lainnya, beserta perabotnya, Pembangunan jamban beserta sanitasinya, Pengadaan buku koleksi perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidik), Pengadaan peralatan pendidikan, dan Pengadaan media pendidikan. Alokasi anggaran pada kegiatan ini Rp. 899.845.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 591.331.182,- atau sebesar (65,71%).

13) Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra UASDA/UASDA SD/MI

Kegiatan ini merupakan tahunan yang harus dilaksanakan oleh sekolah-sekolah dibawah pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya. Untuk pelaksanaan tahun 2019 jumlah peserta Ujian



Sekolah Berstandar Nasional (USBN) jenjang SD adalah 4213 dengan presentasi kelulusan adalah 100% dari 158 SD/MI. Tahapan ujian yang dilakukan siswa kelas VI adalah:

1. Pra USBN dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 27 Maret 2019.
2. USBN dilaksanakan pada tanggal 06 s.d. 09 Mei 2019.

Pelaksanaan Pra USBN dan USBN dilaksanakan pada sekolah penyelenggara. Dengan alokasi anggaran dana Rp. 383.471.000,- dengan jumlah dana yang terealisasi Rp. 331.466.136,- atau sebesar (86,44%).

14) Pelatihan Kurikulum 2013 SD

Kegiatan ini merupakan pelatihan mengenai kurikulum yang diberikan keguru-guru SD yang dilaksanakan bertahap yang sesuai dengan jadwal yang di buat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya. Dengan jumlah alokasi anggaran dana Rp. 173.070.000,- dengan jumlah dana yang terealisasi Rp. 164.289.00,- atau sebesar (94,93%).

15) Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD

Kegiatan ini merupakan sebuah kejuaraan yang diikuti oleh tingkat SD. Adapun cabang lomba OOSN SD ini adalah Olahraga Atletik Putra, Olahraga Atletik Putri, Olahraga Bulu Tangkis Putra, Olahraga Bulu Tangkis Putri, Olahraga Karate Putra, Olahraga Karate Putri, Olahraga Pencak Silat Putra, Olahraga Pencak Silat Putri, Olahraga Renang Putra, Olahraga Renang Putri, dan di tingkat Provinsi Olahraga Renang Putra dan Putri. Alokasi anggaran pada kegiatan ini Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 49.913.000,- atau sebesar (99,83%).

16) Penyelenggaraan Pra UN, UN dan US Tingkat SLTP

Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan dan pengadaan naskah soal yang akan diselenggarakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang ditujukan kepada siswa dan guru. Pelaksanaan UN tingkat SMP dilaksanakan dengan sistem komputer, yang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 25 April 2019, secara mandiri dan bergabung. Jumlah peserta ujian Nasional tingkat SMP sebanyak 2.720 siswa dari 38 SMP se-Kabupaten Dharmasraya, Dengan jumlah alokasi anggaran dana



Rp. 281.350.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 248.533.500,- atau sebesar (88,34%).

17) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP

Kegiatan ini merupakan sebuah kejuaraan yang diikuti oleh tingkat SMP. Adapun cabang lomba pada kegiatan ini yaitu olahraga atletik putra dan putri, olahraga bulu tangkis putra dan putri, olahraga karate putra dan putri, olahraga pencak silat putra dan putri, olahraga renang putra dan putri, dan untuk POPDA yaitu olahraga loncat tinggi putri, olahraga pencak silat putri, olahraga renang putra dan olahraga karate putra. Alokasi anggaran pada kegiatan ini Rp. 39.895.000,- dan realisasi keuangan Rp. 39.568.000,- atau sebesar (99,18%).

18) Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum SMP (DAK)

Kegiatan ini ditujukan untuk penunjang sarana pendidikan yang berupa pembangunan Laboratorium IPA dan Ruang Pratikum SMP. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum SMP (DAK) ini dilaksanakan di 3 sekolah yaitu SMPN 4 Timpeh, SMP Terpadu Asy-Syahdatain, SMPN 3 Koto Baru, dan SMPN 3 Koto Besar. Alokasi anggaran pada kegiatan ini Rp. 1.362.345.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.360.363.580,- atau sebesar (99,85%).

19) Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (DAK)

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan sarana pendidikan berupa perbaikan bangunan sekolah. Adapun sekolah yang melaksanakan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK) yaitu terdiri dari 7 sekolah sebagai berikut: SMPN 1 Sungai Rumbai, SMPN 1 Koto Baru, SMPN 2 Sitiung, SMPN 1 Timpeh, SMPN 2 Pulau Punjung, SMPN 1 Asam Jujuhan, dan SMPN 1 Koto Besar. Dengan anggaran rehab Rp. 1.534.085.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.533.602.240,- atau sebesar (99,97%).

20) Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK)

Kegiatan ini ditujukan untuk pengadaan buku perpustakaan SD. Adapun sekolah mendapatkan pengadaan buku perpustakaan SD (DAK) yaitu seluruh SD di Kabupaten Dharmasraya. Dalam pengadaan buku perpustakaan ini jumlah alokasi anggaran Rp. 4.577.250.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 4.570.289.443,- atau sebesar (99,85%).



21) Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)

Kegiatan ini ditujukan untuk rehabilitasi ruang kelas rusak pada bangunan sekolah. Adapun sekolah yang mendapatkan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK) yaitu SMPN 1 Sungai Rumbai, SMPN 4 Koto Baru, SMPN 1 Koto Baru, SMPN 2 Sembilan Koto, SMPN 2 Timpeh, SDN 06 Pulau Punjung, SDN 08 Timpeh, SDN 10 Timpeh, SDN 16 Koto Baru, SDN 06 Tiumang, SDN 05 Koto Besar, SDN 09 Koto Baru, SDN 14 Koto Baru, SDN 09 Koto Besar, SDN 01 Koto Salak, SDN 09 Sitiung, SDN 08 Koto Besar, SDN 08 Sitiung, SDN 03 Padang Laweh, SDN 10 Pulau Punjung, SDN 07 Sitiung, SDN 10 Tiumang, SDN 04 Sitiung, SDN 14 Koto Besar, SDN 01 Pulau Punjung, dan SDN 05 Tiumang. Jumlah alokasi anggaran Rp. 9.195.310.000,- dengan realisasi keuangan Rp.9.188.744.374,- atau sebesar (99,93%).

22) Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru SD (DAK)

Kegiatan ini ditujukan untuk rehabilitasi ruang guru rusak pada bangunan sekolah dasar. Adapun sekolah yang mendapatkan rehabilitasi sedang/berat ruang guru SD (DAK) yaitu SDN 03 Pulau Punjung, SDN 01 Sungai Rumbai, SDN 06 Pulau Punjung, dan SDN 09 Koto Salak. Dengan jumlah anggaran Rp. 441.735.000,- dengan terealisasi keuangan Rp. 439.641.530,- atau sebesar (99,53%).

23) Pembangunan Ruang Kelas Baru SD

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan sarana pendidikan berupa penambahan ruang kelas belajar. Pembangunan ruang kelas baru ini dilaksanakan di SDN 02 Pilial Sembilan Koto dengan nama kegiatan yaitu Pembangunan RKB SDN 02 Pilial Sembilan Koto. Dengan jumlah anggaran Rp. 198.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 197.468.158,- atau sebesar (99,73%).

24) Rehabilitasi Sedang / Berat Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (DAK)

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan sarana pendidikan berupa rehabilitasi ruang laboratorium dan ruang pratikum sekolah. Rehabilitasi ruang laboratorium dan ruang pratikum ini dilaksanakan di SMPN 1 Koto Baru. Dengan jumlah anggaran Rp. 290.385.000,- dengan realisasi Rp. 264.932.320,- atau sebesar (91,23%)



25) Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan SD (DAK)

Kegiatan ini ditujukan untuk rehabilitasi ruang perpustakaan rusak pada bangunan perpustakaan Sekolah Dasar. Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan SD (DAK) ini sangat penting dilaksanakan, karena ini menyangkut kenyamanan siswa dalam membaca buku di perpustakaan. Adapun sekolah yang mendapatkan rehabilitasi sedang/berat perpustakaan SD (DAK) yaitu SDN 06 Koto Besar, dan SDN 06 Sitiung. Dengan jumlah anggaran Rp. 220.735.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 218.930.500,- atau sebesar (99,18%).

26) Pembangunan Perpustakaan SMP (DAK)

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan sarana pendidikan berupa Pembangunan perpustakaan. Untuk kenyamanan siswa dalam menimba ilmu dan membaca di perpustakaan maka dibangunlah sebuah perpustakaan untuk tempat membaca. Adapun sekolah yang mendapatkan pembangunan perpustakaan yaitu SMPN 2 Koto Salak dan SMPN 3 Koto Besar. Anggaran kegiatan ini Rp. 652.580.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 651.541.496,- atau sebesar (99,84%).

27) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD (DAK)

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan sarana pendidikan berupa pengadaan alat praktik dan peraga siswa sekolah dasar. Adapun alat praktik yang diadakan untuk sekolah-sekolah yaitu Pengadaan alat kesenian tradisional, Pengadaan peralatan seni budaya SD, dan Pengadaan sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) SD. Dengan alokasi anggaran Rp. 1.956.360.800,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.850.498.250,- atau sebesar (94,59%).

28) Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi SD (DAK)

Kegiatan ini ditujukan untuk rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi sekolah. Sekolah yang mendapatkan rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi SD (DAK) yaitu 9 sekolah, adapun sekolah yang melaksanakan rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi SD (DAK) ini yaitu sebagai berikut: SDN 09 Koto Besar, SDN 09 Koto Baru, SDN 09 Sitiung, SDN 06 Tiurang, SDN 16 Koto Baru, SDN 03 Koto Baru, SDN 03 Padang Laweh, SDN 14 Koto Baru, dan SDN 10 Koto Baru. Dengan jumlah anggaran Rp.



214.590.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 213.566.280,- atau sebesar (99,52%).

29) Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah (DAK)

Kegiatan ini merupakan pembangunan fasilitas sekolah yaitu pembangunan jamban siswa/guru sekolah. Adapun sekolah yang mendapatkan bantuan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi SD (DAK) yaitu ada 23 sekolah sebagai berikut: SDN 09 Koto Salak, SDN 06 Tiumang, SDN 05 Tiumang, SDN 13 Koto Baru, SDN 01 Koto Salak, SDN 07 Koto Salak, SDN 09 Pulau Punjung, SDN 10 Koto Baru, SDN 08 Sungai Rumbai, SDN 07 Tiumang, SDN 03 Padang Laweh, SDN 01 Asam Jujuhan, SDN 04 Sitiung, SDN 05 Asam Jujuhan, SDN 09 Tiumang, SDN 05 Pulau Punjung, SDN 09 Timpeh, SDN 09 Sungai Rumbai, SDN 07 Timpeh, SDN 03 Koto Besar, SDN 08 Timpeh, SDN 02 Koto Baru, dan SDN 05 Sitiung. Dengan jumlah anggaran Rp. 2.284.095.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.283.098.710,- atau sebesar (99,96%).

30) Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan SMP (DAK)

Kegiatan ini merupakan rehabilitasi ruang perpustakaan rusak yang ditujukan untuk bangunan perpustakaan Sekolah Menengah Pertama. Adapun sekolah yang mendapatkan rehabilitasi sedang/berat perpustakaan SMP (DAK) yaitu SMPN 6 Pulau Punjung dan SMPN 1 Koto Besar. Dengan jumlah anggaran Rp. 472.735.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 469.574.990,- atau sebesar (99,33%).

31) Penambahan Ruang Kelas SMP (DAK)

Penambahan ruang kelas SMP bersumber dari Dana Alokasi Khusus, penambahan ini bisa meningkatkan sarana pendidikan di Kabupaten Dharmasraya. Adapun sekolah mendapatkan penambahan ruang kelas yaitu SMPN 3 Sungai Rumbai, SMPN 2 Sungai Rumbai, SMPN 3 Sitiung, dan SMPN 2 Koto Baru. Dengan jumlah anggaran Rp. 1.343.155.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.341.988.480,- atau sebesar (99,91%).

32) Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru SMP (DAK)

Kegiatan ini bertujuan untuk merehab ruang guru yang rusak sedang atau berat. Adapun sekolah yang mendapat bantuan SMPN 1 Sungai Rumbai, SMPN 2 Sitiung, SMPN 2 Pulau Punjung, SMPN 1 Timpeh, SMPN 1 Koto Besar, SMPN 1 Koto Baru, SMPN 3 Pulau Punjung, dan SMPN 1 Asam



Jujuhan. Dengan jumlah anggaran Rp. 1.819.260.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.818.296.510,- atau sebesar (99,95%).

33) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP (DAK)

Kegiatan pengadaan buku perpustakaan yang ditujukan untuk SMP yang bersumber dari DAK. Penerima pengadaan buku perpustakaan tersebut adalah seluruh SMP se-Kabupaten Dharmasraya. Dalam pengadaan buku perpustakaan ini jumlah anggaran Rp. 312.110.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 303.656.605,- atau sebesar (97,29%).

34) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP (DAK)

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan sarana pendidikan berupa pengadaan alat praktik dan peraga siswa sekolah menengah pertama. Adapun alat praktik dan peraga siswa SMP (DAK) yang diadakan yaitu Pengadaan peralatan laboratorium komputer SMP, Pengadaan peralatan laboratorium IPA Fisika SMP, Pengadaan peralatan laboratorium IPA Biologi SMP, Pengadaan peralatan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) SMP, Pengadaan Peralatan Seni Budaya SMP, Pengadaan Alat Kesenian Tradisional, Pengadaan Media Pendidikan SMP, Pengadaan Peralatan Alat Peraga Matematika, dan Pengadaan Peralatan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dengan jumlah anggaran Rp. 4.251.200.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 4.065.603.997,- atau sebesar (95,63%).

35) Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi SMP (DAK)

Kegiatan ini merupakan rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi sekolah yang bersumber dari DAK, sekolah yang mendapat bantuan yaitu: SMPN 1 Koto Besar, SMPN 2 Sitiung, SMPN 2 Koto Baru, SMPN 3 Pulau Punjung, SMPN 1 Pulau Punjung, SMPN 6 Pulau Punjung, SMPN 2 Sungai Rumbai, SMPN 1 Asam Jujuhan dan SMPN 2 Sembilan Koto. Dengan jumlah anggaran Rp. 673.360.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 673.104.780,- atau sebesar (99,96%).

36) Peningkatan Kualitas Siswa SMP Unggul Dharmasraya

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas siswa SMP Unggul Dharmasraya. Adapun anggaran pada kegiatan peningkatan



kualitas siswa SMP unggul Dharmasraya digunakan untuk kegiatan keunggulan yang dilaksanakan pada SMP unggul yaitu:

1. Pembinaan Olimpiade Siswa (mata pelajaran IPA, Matematika, IPS). Sasaran: seluruh siswa SMP Unggul dengan ketentuan memilih salah satu mata pelajaran IPA, Matematika atau IPS;
2. English Club, sasaran: seluruh siswa SMP Unggul Dharmasraya;
3. TOEFL, sasaran: seluruh siswa SMP Unggul Dharmasraya;
4. Tahfiz Al-Quran, sasaran: seluruh siswa SMP Unggul Dharmasraya.

Kegiatan keunggulan SMP Unggul Dharmasraya, dibimbing oleh guru/pengajar yang ditunjuk khusus sesuai dengan program tersebut. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 193.560.000,- dengan realisasi Rp. 186.260.000,- atau sebesar (96,23%).

c. Program Pendidikan Non Formal

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal (DAPODIK PAUD Dikmas)

Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan data dan informasi pendidikan non formal dilaksanakan berupa:

1. Pelatihan dan workshop pengelolaan data pokok pendidik PAUD dikmas. Peserta diundang ke Dinas Pendidikan secara bergantian.
2. Setelah pelatihan dilakukan, diiringi dengan helpdesk ke lembaga yang bermasalah dalam sinkronisasi DAPODIK.
3. Untuk PKBM dan SPNF pelatihan DAPODIK dilakukan sampai pengisian data long list untuk mendapatkan BOP DAK kesetaraan.
4. Sinkronisasi DAPODIK bagi lembaga dilaksanakan 2 x Setahun yakni diawal semester genap.
5. Kesuksesan pengelolaan DAPODIK ditandai dengan sinkronisasi di info manajemen DAPODIK PAUD Dikmas.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 25.001.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 24.549.500,- atau sebesar(98,19%).



2) Operasional Mobil Pintar

Kegiatan Operasional mobil pintar berguna untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat luar sekolah. Bentuk operasional kegiatan mobil pintar adalah dengan mengunjungi lembaga PAUD dan dikmas yang tersebar di 11 kecamatan. Kunjungan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dalam 1 bulan selama 10 bulan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program mobil pintar adalah:

1. Pembinaan karakter peserta didik;
2. Pembinaan pendidik PAUD;
3. Pembinaan pengelola/tutor PKBM;
4. Pembinaan literasi kepada warga belajar paket A, B, C.

Jumlah anggaran pada kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 39.900.000,- dengan realisasi Rp. 39.900.000,- atau sebesar (100%).

3) Penyelenggaraan Paket C Setara SMA

Terlaksananya kegiatan Paket C setara SMA di Lembaga PKBM dan SKB. Bentuk kegiatan dalam penyelenggaraan paket C setara SMA. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp. 222.987.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 211.506.000,- atau sebesar (94,85%).

4) Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Terlaksananya kegiatan Paket B setara SMP di Lembaga PKBM dan SKB, Pelaksanaan program kegiatan Paket B setara SMP dalam upaya mengentaskan program wajib belajar 9 tahun. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini Rp. 79.935.000,- dengan realisasi Rp. 74.115.000,- atau sebesar (92,72%).

5) Penyelenggaraan Paket A Setara SD

Terlaksananya kegiatan Paket A setara SD guna meningkatkan pendidikan masyarakat setara SD. Pelaksanaan program kegiatan Paket A setara SD dalam upaya mengentaskan program wajib belajar 9 tahun. Alokasi anggaran kegiatan Rp. 29.120.000,- dengan realisasi Rp. 25.707.300,- atau sebesar (88,28%).



6) Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Terlaksananya kegiatan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ini bertujuan untuk menjadi wadah bagi kegiatan belajar yang non formal seperti paket A, B, dan C. Dengan Jumlah anggaran Rp. 46.349.000,- dengan realisasi Rp. 30.749.000,- atau sebesar (66,34%).

7) Pelaksanaan Pendidikan Karakter PAUD

Kegiatan ini bertujuan untuk penerapan pola pendidikan karakter, yaitu melaksanakan semacam simulasi dan percontohan seperti: “Biasakan Budaya Antri sejak usia dini” kegiatan yang disajikan berupa:

1. Senam bersama;
2. Antri duduk;
3. Nonton film budaya antri;
4. Penjelasan narasumber tentang budaya antri;
5. Antri menerima makanan;
6. Budaya buang sampah pada tempatnya;
7. Budaya terima hadiah berupa paket mewarnai.

Dengan alokasi anggaran Rp. 17.850.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 17.850.000,- atau sebesar (100%).

d. Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

Terlaksananya sosialisasi, seleksi dan pemberkasan dokumen guru SD dan SMP peserta sertifikasi di Kabupaten Dharmasraya. Dengan anggaran sebesar Rp. 34.900.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 33.819.138,- atau sebesar (96,90%).

2) Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan ini merupakan suatu ujian atau pelatihan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan agar bisa memberikan pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu. Pelatihan uji kompetensi guru TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Dharmasraya diikuti sebanyak 40 orang peserta yang terdiri dari 3 orang guru TK, 24 orang guru SD dan 13 orang guru SMP. Untuk narasumber, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan PSDM yayasan Pendidikan Islam Andalas



Cendikia. Dengan anggaran sebesar Rp. 58.929.000,- realisasi keuangan Rp. 53.010.000,- atau sebesar (89,96%).

3) Gebyar Pendidikan

Kegiatan gebyar pendidikan ini bertujuan untuk memberikan suatu kegiatan yang berupa perlombaan, Dinas Pendidikan Dharmasraya menyelenggarakan kegiatan ini secara mandiri. Dengan kegiatan lomba tari, nyanyi dan mewarnai. Dengan peserta dari siswa dan guru. Adapun kegiatan lomba ini dilaksanakan di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 s.d. 28 November 2019. Kegiatan ini melibatkan seluruh siswa SD dan SMP se-Kabupaten Dharmasraya yang diutussekolahmasing-masing. Jumlah alokasi dana anggaran Rp. 47.312.500,- dengan jumlah dana yang terealisasi Rp. 44,100,250,- atausebesar(93,21%).

4) Lomba-Lomba Kreatifitas Guru

Kegiatan ini merupakan lomba-lomba kreatifitas guru untuk memberikan wadah kepada guru yang kreatif untuk membuat sebuah karya-karya yang bisa di kembangkan. Kegiatan inimenghadirkan narasumber yang berkompeten.Peserta kegiataniniterdiri dari 23 orang guru yang merupakan perwakilan dari KB, TK, SD dan SMP se-Kabupaten Dharmasraya

- TK 7 orang
- KB 2 orang
- SD 8 orang
- SMP 6 orang

Alokasi Anggaranpada kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 33.217.000,- realisasi anggaran Rp. 31.717.000,-atau sebesar (95,48%).

5) Lomba Guru Berprestasi

Kegiatan ini merupakan suatu perlombaan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidik dan bersaing dalam menciptakan prestasi-prestasi yang bisa memberikan energi positif untuk mengembangkan peserta didik. Pemilihan guru SD berprestasi tahun 2019 dengan tema “membangun guru pendidikan dasar yang unggul untuk meningkatkan pembelajaran abad 21 dan era revolusi industri 4.0” merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah.



- Seleksi bahan pada tanggal : 22 s.d 28 Mei 2019 di SDN 20 Sitiung
- Lomba ditingkat Kabupaten : 10 s.d 13 Juni 2019
- Lomba ditingkat provinsi : 14 s.d 17 Juni 2019

Kegiatan ini dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 49.842.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 45.469.100,- atau sebesar (91,23%).

6) Pelatihan Manajemen Bantuan Operasional sekolah (BOS)

Pelatihan manajemen bantuan operasional sekolah (BOS) diikuti oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah, Sosialisasi BOS dilaksanakan di setiap kecamatan yang ada di Kab. Dharmasraya. Pelatihan Manajemen BOS ini bertujuan untuk manajemen penggunaan dana BOS yang sebelum/sudah disalurkan ke sekolah-sekolah. Alokasi Anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 26.503.017,- atau sebesar (88,34%).

7) Sosialisasi dan Diseminasi Kurikulum 2013 (SD)

Kegiatan ini merupakan Sosialisasi dan Diseminasi Kurikulum 2013 (SD) ini dilaksanakan ke sekolah-sekolah agar seluruh sekolah di Kabupaten Dharmasraya dapat memahami penerapan kurikulum 2013 ini di sekolah masing-masing. Dengan alokasi anggaran Rp. 46.675.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 36.880.000,- atau sebesar (79,01%).

8) Pelatihan Operator Sekolah

Kegiatan Pelatihan Operator Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pemahaman bagi operator-operator sekolah untuk mengoperasikan aplikasi pendataan baik untuk guru maupun siswa disekolahnya masing-masing. Untuk kegiatan ini dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 30.010.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 15.929.000,- atau sebesar (53,08%).

9) Pembinaan UKS

Kegiatan ini bertujuan pembinaan terhadap sekolah sehat yang nantinya akan dilombakan tingkat TK/RA, SD/MIN, SMP/MTS dan SMA/MA/Manse-Kab. Dharmasraya. Adapun sekolah yang memenangkan lomba sekolah sehat ini yaitu sebagai berikut : Tingkat SMA, juara I yaitu SMAN 1 Koto Baru, Juara II yaitu SMAN 2 Pulau Punjung, juara III yaitu SMAN 1 Timpeh. Sedangkan untuk Tingkat SMP, juara I yaitu SMPN 1 Koto Baru, juara II yaitu SMPN 1 Sitiung, juara III yaitu MTs Pembangunan Pulau



Punjung. Untuk Tingkat SD, juara I yaitu MIN 2 Dharmasraya, juara II yaitu SDN 01 Timpeh, juara III yaitu SDN 01 Padang Laweh. Dan untuk Tingkat TK, juara I yaitu TK Islam Bakti 52 Koto Salak, juara II yaitu TK Islam Bakti 81 Padang Laweh, juara III yaitu TK Islam Bakti 60 Sungai Rumbai.

Alokasi dana kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 42.252.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 41.996.211,- atau sebesar (99,39%).

10) Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan dan PGRI

Kegiatan Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan sarana bagi dewan pendidikan dan PGRI untuk mengembangkan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya. Alokasi dana kegiatan Rp. 155.040.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 50.297.875,- atau sebesar (32,44%).

11) Pembinaan PTK berprestasi TK, SD, dan SMP

Kegiatan ini merupakan pembinaan kepada PTK berprestasi TK, SD dan SMP. Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 orang peserta yang terdiri dari 6 orang Pengawas, 13 orang Kepala Sekolah dan 21 orang guru. Untuk narasumber, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP Sumatera Barat. Dengan Alokasi dana kegiatan ini Rp. 53.550.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 53.493.250,- atau sebesar (99,89%).

12) Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah dan Pengawas

Kegiatan ini merupakan salah satu penunjang peningkatan mutu Pendidikan, karena dengan mengetahui kapasitas atau kualitas suatu pengawas dan kepala sekolah bias memberikan suatu gambaran baiknya suatu pimpinan di sekolah. Salah satu upaya peningkatan kompetensi kepala sekolah harus memiliki kompetensi yang memadai untuk menggerakkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di sekolah sehingga terjadi perubahan positif yang bisa dilihat dari hasil belajar siswa. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 10 s.d 12 September 2019, bertempat di Wisma Al-Jannah Sungai Dareh Pulau Punjung. Alokasi dana kegiatan ini sebesar Rp. 55.065.000,- dengan realisasi kegiatan Rp. 49.237.600,- atau sebesar (89,42%).

13) Lomba Guru Pembina Olympiade Sains Nasional (OSN)



Kegiatan ini merupakan Perlombaaan guru pembina olympiade sains nasional untuk meningkatkan mutu pembina atau pelatih. Kegiatan olympiade guru nasional (OGN) pendidikan dasar merupakan satu sarana peningkatan mutu pendidikan khususnya kompetensi profesional dan pedagogik guru SD dan SMP melalui ajang lomba yang kompetitif. Kegiatan OGN Dikdas ini diharapkan dapat memotivasi guru untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, profesionalisme, dan kinerja guru pendidikan dasar diseluruh pelosok tanah air. Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan akan berdampak positif terhadap karier guru dan mutu pendidikan.

- Lomba ditingkat kabupaten : 26 Februari 2019 di SMPN 2 Koto Baru
- Lomba ditingkat provinsi : 04 s.d 05 April 2019

Jumlah alokasi anggaran kegiatan ini Rp. 44.996.500,- dengan jumlah dana yang terealisasi Rp. 44.677.250,- atau sebesar(99,29%).

14) Aneka Tunjangan Guru Tingkat PAUD, SD dan SMP

Kegiatan ini merupakan salah satu penunjang operasional tenaga pendidik untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan, di jenjang masing-masing diantaranya:

1. Peserta dari jenjang PAUD
 - a. TK sebanyak 275 orang
 - b. KB sebanyak 353 orang
 - c. Pengelolasebanyak 97 orang
2. Pesertadari SD sebanyak 430 orang
3. Pesertadari SMP sebanyak 241 orang

Dengan alokasi anggaran dana kegiatan RP. 5.420.003.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.025.512.900,- atau sebesar (92,72%).

15) Pembinaan Kelompok Kerja KKG dan MGMP

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi guru melalui KKG dan MGMP. Dengan mengadakan BinteK tentang E-Modul guru sudah bias menyajikan bahan belajar mandiri yang disusun secara sistematis kedalam unit pembelajaran tertentu, yang disajikan dalam format



elektronik, dimana setiap kegiatan pembelajaran didalamnya dihubungkan dengan tautan (link) sebagai navigasi yang membuat peserta didik menjadi lebih interaktif dengan program, dilengkapi dengan penyajian video tutorial, animasi dan audio untuk memperkaya pengalaman belajar. Kegiatan dilaksanakan tanggal 17 s.d 19 November 2019, bertempat di Hotel Sakato Jaya Pulau Punjung. Jumlah alokasi anggaran kegiatan ini Rp. 97.945.500,- dengan jumlah dana yang terealisasi Rp. 90.160.500,- atau sebesar (92.05%).

e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

Kegiatan ini merupakan salah satu penunjang kenaikan pangkat bagi tenaga pendidik dan mendukung akreditasi sekolah. Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara. Selain itu, kenaikan pangkat PNS juga sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian. Dengan alokasi anggaran Rp.167.580.000,- dengan realisasi Rp. 159.135.550,- atau sebesar (94,96%).

2) Penunjang operasional administrasi dan PBM SMP

Operasional PBM SMP ini ditujukan ke 34 SMP Negeri Se- Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SMP ini sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Dengan alokasi anggaran pada kegiatan ini Rp.660.000.000,- jumlah dana yang terealisasi Rp.660.000.000,- atau sebesar (100%).

3) Penunjang operasional administrasi dan PBM SD

Operasional PBM SD ini ditujukan ke seluruh SD Negeri Se- Kabupaten Dharmasraya. Sama halnya Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SMP, namun operasional administrasi dan PBM SD ini ditujukan untuk seluruh SD di Kabupaten Dharmasraya, dengan Jumlah anggaran pada kegiatan ini yaitu sebesar Rp.2.175.000.000,- jumlah dana yang terealisasi Rp.2.175.000.000,- atau sebesar (100%).

4) Penunjang operasional administrasi dan PBM TK



Operasional PBM TK ini di tujukan ke seluruh TK Negeri Se- Kabupaten Dharmasraya. Sama halnya dengan Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SMP dan Operasional administrasi dan PBM SD, namun penunjang operasional administrasi dan PBM TK ini ditujukan kepada seluruh TK yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Jumlah anggaran pada kegiatan ini Rp.320.000.000,- jumlah anggaran dana yang terealisasi Rp. 319.975.000,-atau sebesar (99,99%).

5) Supervisi dan Operasional Pengawas Sekolah

Kegiatan supervision perasional pengawas ini memiliki tujuan pengawasan terhadap sekolah sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Dharmasraya. Peran pengawas sangat penting, terutama bagaimana merekam emberikan motivasi baik kepada sekolah binaannya masing-masing.

Untuk data pengawas SD dan SMP diantaranya sebagai berikut:

1. Pengawas SD sebanyak 17 orang
2. Pengawas SMP sebanyak 7 orang
3. Pengawas PAI sebanyak 4 orang

Setelah diadakan kegiatan supervisi dan operasional pengawas dilingkungan Dinas Pendidikan, kita berharap Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya akan meningkat dari tahun ketahunnya, baik kualitas guru maupun peserta didiknya. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.900.000,- realisasi fisik kegiatan 100 % dan keuangan sebesar Rp. 61.750.000,-atau sebesar (99,76%).

6) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Negeri/DAK 2019

Bantuan Operasional Pendidikan PAUD / TK diperuntukkan untuk TK Negeri se-Kabupaten Dharmasraya. Bentuk kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Negeri Tahun 2019 :

1. Sosialisasi Juknis BOP DAK Non Fisik Tahun 2019
2. Bimtek Penyusunan Proposal BOP
3. Bimtek Penyusunan Laporan BOP
4. Memproses Pencairan BOP TK Negeri
5. Memproses Pencairan BOP TK Swasta / KB / TPA / dan TPS



6. Mengawasi Penggunaan Dana BOP DAK Non Fisik tahun 2019

Sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Jumlah Anggaran Rp. 536.865.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 507.764.600,- atau sebesar (94,58%).

7) Penyusunan Profil dan Data Pokok Kependidikan

Kegiatan ini merupakan pengumpulan, pengolahan dan penerbitan Data Pokok Kependidikan yang berhubungan dengan Data Guru (NUPTK), Siswa (NISN), Sekolah (NPSN) yang digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pendidikan, dengan alokasi anggaran Rp. 31.635.000,-. Jumlah dana yang terealisasi Rp. 31.382.400,- atau sebesar (99,20 %).

2. KESEHATAN

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan berserta beberapa jajaran yang berada di bawahnya, yaitu Labkesda, Instansi Farmasi Kabupaten, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesri, dan Posyandu. Disamping itu juga termasuk program kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD adapun Program dan Kegiatannya dapat digambarkan sebagai berikut.

a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Evaluasi Kinerja Pegawai

Program ini dilaksanakan dengan tujuan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara meliputi :

- 1) Pengawasan terhadap kedisiplinan ASN mengenai kehadiran, Pakaian, perilaku kerja dan pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.



- 2) Penyusunan Bezzeting dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) di setiap periode naik pangkat berdasarkan format yang telah ditentukan oleh BKPSDM.
- 3) Penghitungan jumlah pegawai berdasarkan metode analisa beban kerja (ABK) sesuai format yang telah ditentukan oleh Kabupaten.
- 4) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
- 5) Analisis Jabatan (Anjab) dan E-vajab untuk penyusunan analisa jabatan untuk setiap tenaga terdiri dari pejabat eselon, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan.
- 6) Sosialisasi SKP Online sesuai edaran Bupati serta pengawasan aplikasi tersebut ke UPT dilingkungan Dinas Kesehatan.
- 7) Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin ASN dan Cuti ASN dengan Narasumber dari BKPSDM Kabupaten Dharmasraya.

Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan :

Untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 131.803.650,- di DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya. Realisasi capaian keuangan sebesar Rp. 131.256.576,- dengan realisasi 99,6 %.

Permasalahan :

- a) Adanya beberapa ASN yang masih melanggar disiplin baik itu kehadiran kepegawaian, prilaku kerja dan tentang pelayanan.
- b) Masih kurangnya pemahaman pengelola Bezzeting, DUK, ABK, SOP, Anjab/E-Vajab dan SKP Online tentang cara pengisian format yang telah disediakan dan pengisian pada aplikasi tersebut.

Solusi :

- a) Adanya tindak lanjut terhadap ASN yang melanggar disiplin dengan adanya teguran lisan, tertulis dan panggilan agar diproses serta diberi sanksi sesuai aturan.
- b) Melakukan pembinaan lebih Inten terhadap pengelola yang kurang memahami cara pengisian format mengoperasikan aplikasi.

2) Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan

Program ini dilaksanakan dengan tujuan pembinaan terhadap ASN yang memegang Jabatan Fungsional Tertentu meliputi:



- 1) Pembuatan Dupak per semester, laporan harian, bulanan dan semester.
- 2) Pemahaman terhadap pengisian angka kredit berdasarkan Juknis fungsional berlaku yang disesuaikan dengan butir kegiatan yang dilakukan dan adanya dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- 3) Penekanan terhadap ASN Jabatan Fungsional Tertentu agar disiplin dalam pembuatan Dupak dan Pengusulan PAK per semesternya sehingga tidak adanya penumpukan pada saat naik pangkat.
- 4) Adanya workshop Tim Penilai Angka kredit yang diadakan di Hotel Sakato Jaya dengan narasumber yang didatangkan dari provinsi dan sharing ilmu dari pejabat penilai angka kredit. Tujuan acara adalah untuk menambah pemahaman dan keseragaman dalam penilaian Dupak di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan :

Untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.35.005.250,- dari DPA Dinas Kesehatan Kab. Dharmasraya. Realisasi capaian keuangan sebesar Rp. 34.729.000,- dengan realisasi sebesar 99,2 %.

Permasalahan:

- a) Ada beberapa ASN yang tidak memahami tata cara pengisian Dupak sehingga memerlukan bantuan orang lain.
- b) Ada beberapa ASN dalam pengusulan pembuatan PAK tidak melampirkan laporan harian, bulanan dan buku kegiatan.
- c) Banyaknya ASN yang tidak disiplin dalam pembuatan Dupak dan Pengusulan PAK sehingga menumpuk pada saat kenaikan pangkat sehingga menyulitkan Tim Penilaian angka kredit dan Tim verifikasi angka kredit dalam waktu yang terbatas.

Solusi:

- a) Memberikan pembinaan secara inten terhadap ASN yang tidak memahami tata cara pengisian Dupak.



- b) Menekankan agar ASN selalu melampirkan buku kegiatan dan dokumen pendukung Dupak pada saat pengusulan pembuatan PAK.
- c) Menekankan agar ASN disiplin dalam pembuatan Dupak dan Pengusulan pembuatan PAK per semester sehingga tidak adanya penumpukan pada saat kenaikan pangkat.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan pelatihan formal merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi atau pengetahuan aparatur yang dilaksanakan oleh hibah pem prov masrayakat dalam bentuk pembayaran kontribusi. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini telah digunakan untuk pembayaran kegiatan kontribusi jabatan fungsional dan kontribusi seminar.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan:

Untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 33.000.000- dari DPA Dinas Kesehatan Kab. Dharmasraya. Realisasi capaian keuangan sebesar Rp. 32.800.000,- dengan realisasi 99,4 %.

2) Kegiatan Pelatihan Tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional (HATRA)

Asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA) dan *acupressure* merupakan upaya kesehatan tradisional yang dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat/keluarga dalam mengatasi gangguan kesehatan ringan yang ada dalam keluarga, sehingga dengan asuhan mandiri kesehatan tradisional dapat mewujudkan keluarga sehat secara mandiri. Untuk melakukan asuhan mandiri kesehatan tradisional secara baik dan benar maka perlu adanya pengetahuan dan keterampilan yang diberikan secara berjenjang mulai dari Kementerian Kesehatan sampai ke tingkat puskesmas. Petugas puskesmas yang sudah dilatih akan memberikan sosialisasi kepada kader dan masyarakat.

Tujuan:



- a) Terlaksananya pelatihan Asuhan Mandiri (Asman) dan *acupressure* untuk pengelola hatra serta kader hatra Puskesmas di Kabupaten Dharmasraya.
- b) Terpantaunya pelayanan kesehatan tradisional di 14 (empat belas) Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan:

Dana yang dialokasikan untuk program Hatra sebesar Rp. 26.655.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.445.250 atau realisasi sebesar 99.2%.

Permasalahan:

- a) Adanya keterlambatan pelaksanaan pelatihan Asuhan Mandiri (Asman) dan *acupressure* dikarenakan sulitnya menyesuaikan jadwal dengan narasumber dari Provinsi.
- b) Pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional di puskesmas belum maksimal karena belum ada ruangan tersendiri.
- c) Kurangnya sosialisasi tentang Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di Masyarakat.

Solusi:

- a) Perlunya koordinasi dari awal dengan narasumber, sehingga hal serupa tidak terjadi.
- b) Perlunya disediakan ruangan untuk pelayanan kesehatan tradisional di puskesmas yang petugas hatranya sudah mendapatkan pelatihan.
- c) Perlunya meningkatkan sosialisasi/penyuluhan sekaligus membuat (TOGA) percontohan di puskesmas.

c. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

a) Pengadaan Obat dan Pembekalan Kesehatan

Program pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK Fisik) meliputi pengadaan obat, reagen, bahan medis habis pakai pelayanan kefarmasian, obat gizi dan bahan medis habis pakai pemeriksaan HIV serta pengadaan alat rumah tangga UPT Instalasi Gudang Farmasi



yang dibutuhkan oleh puskesmas dan jaringannya dalam memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat. Hasil dari kegiatan ini adalah ketersediaan obat, reagen, bahan medis habis pakai pelayanan kefarmasian, obat gizi dan bahan medis habis pakai pemeriksaan HIV untuk seluruh puskesmas dan jaringannya di UPT Instalasi Gudang Farmasi.

Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah 14 (empat belas) Puskesmas dan jaringannya. Proses pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dilakukan melalui rangkaian kegiatan dari usulan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dari seluruh puskesmas yang kemudian dibahas oleh Tim Perencanaan Obat Terpadu (TPOT) Kabupaten. Selanjutnya daftar kebutuhan obat dimaksud dilaksanakan pengadaannya melalui E-Purchasing untuk sediaan E-Katalog dan melalui E-Lelang untuk sediaan Non E-Katalog.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan:

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.797.995.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.507.027.132,- atau realisasi sebesar 89,6%.

b) Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Pembekalan Kesehatan

Tujuan Kegiatan adalah melakukan Peningkatan Penggunaan Obat Rasional di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Pemerintah/Puskesmas melalui Pelayanan Kefarmasian yang berkualitas untuk tercapainya Pelayanan Kesehatan yang Optimal, dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola vaksin tentang pengelolaan dan distribusi vaksin dari puskesmas kelapangan.

c) Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

Kegiatan ini dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kefarmasian di puskesmas. diharapkan dengan monitoring dan evaluasi ini dapat meningkatkan pengetahuan tenaga farmasi atau pengelola program dalam mutu penggunaan obat rasional dan



pelayanan informasi obat kepada pasien sehingga petugas lebih memahami pentingnya pemberian informasi penggunaan obat, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadi kesalahan pengobatan (*Medication Error*). Kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kefarmasian dilaksanakan pada bulan Maret, yang diikuti oleh seluruh tenaga farmasi atau pengelola obat di 14 (empat belas) Puskesmas dan tenaga farmasi di IGFK, sebanyak 35 orang.

Permasalahan:

- a) Peresepan obat terlalu banyak.
- b) Kebocoran obat tinggi, karena ambil obat tanpa resep.
- c) Pengambilan vaksin langsung bidan desa ke pengelola farmasi.
- d) Masih ada puskesmas yang belum punya Fornas di puskesmas, dan belum ada regulasi tentang item obat apa saja yang bisa diberikan ke bidan desa.
- e) Peresepan antibiotik tinggi dari poli KIA (bidan).
- f) Peresepan psikotropika tidak dari dokter.
- g) Sampah medis dari posyandu tidak terkelola.
- h) Kegiatan posyandu lansia setip bulan turun di semua jorong, dan pemakaian obat terlalu banyak/seperti puskel.
- i) Ketidak rasionalan peresepan di puskesmas.
- j) Laporan dibuat ketika permintaan obat ke gudang obat, dengan alasan beban ganda pekerjaan.
- k) Persepsi dokter yang tidak mau berubah dalam penggunaan obat.
- l) Penggunaan obat program pencatatan kurang baik, masih ada puskesmas pengelolaan obat tidak satu pintu.
- m) Pasien memaksa untuk diberikan obat lebih, sesuai dengan obat yang didapat awal (pasien PRB).
- n) Kunci gudang di tinggal di puskesmas, obat keluar tanpa pencatatan.

Solusi:



-
- a) Penekanan kapus, untuk menunjuk satu orang pengelola PIO dan ada kesamaan persepsi dalam program.
 - b) Menyarankan puskesmas untuk membuat regulasi tentang item pemberian obat ke pustu, poskesri dan polindes.
 - c) Penanggung jawab IGD, harus bertanggung jawab terhadap mutasi obat IGD, di bawah koordinasi tenaga kefarmasian di puskesmas (harus ada kartu stok di IGD, Monitoring obat di IGD), untuk IGD dengan rawatan diberlakukan KIO (Kartu Intruksi Obat).
 - d) Koordinasi dengan pengelola program imunisasi, dalam pemberian/pengeluaran vaksin dari gudang obat (tingkat Kabupaten sampai puskesmas). Sebaiknya ada permintaan vaksin dari pengelola imunisasi ke penanggung jawab gudang obat, Koordinasi tertuang dalam SOP.
 - e) Untuk item obat di bidan desa, obat yang boleh diberikan sebatas kewenangannya kecuali daerah tertentu dan kebijakan tertentu dari puskesmas.
 - f) Untuk obat Psikotropika wajib melalui resep dokter.
 - g) Pelaksanaan POR di masing–masing puskesmas harus sesuai dengan standar program kefarmasian.
 - h) Vaksin carier tidak boleh diletakkan di gudang obat, dan dalam pengelolaan limbah medis, koordinasi dengan kesling dan harus ada penanganan dari kapus.
 - i) Koordinasi dengan pengelola lansia kabupaten, menekankan pada kapus dalam pemberian obat di lapangan.
 - j) Pencatatan di gudang obat dan pengelola program tentang obat program harus sinkron.
 - k) Edukasi, germa cermat, DAGUSIBU di setiap nagari dan jorong.
 - l) Penanggung jawab IGD menghitung kebutuhan obat di IGD, permintaan ke penanggung jawab gudang, lakukan evaluasi penggunaan/pemakaian obat di IGD.
 - m) Kroscek pemakaian obat rasional/POR di puskesmas.
 - n) Harus ada tim Perencanaan obat tingkat puskesmas yang melibatkan lintas program.
-



d) Melakukan Pemantauan Indikator Kinerja Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas, antara lain:

- 1) Memantau % Penggunaan Antibiotika pada penyakit ISPA Non Pneumoni di Puskesmas, untuk tahun 2019 % Rata-rata Kabupaten adalah 4,27% dan batas toleransi yang diperbolehkan secara Nasional 20%.
- 2) Memantau % Penggunaan Antibiotika pada penyakit Diare Non Spesifik di Puskesmas, untuk tahun 2019 % Rata-rata kabupaten adalah 1,96% dan batas toleransi yang diperbolehkan secara Nasional 8%.
- 3) Memantau % Penggunaan Injeksi Pada Myalgia di puskesmas, untuk tahun 2019 % Rata-rata Kabupaten adalah 0% dan batas toleransi yang diperbolehkan secara Nasional 1%.
- 4) Memantau rata-rata Jumlah Item Obat/Resep di puskesmas, untuk tahun 2019 Rata-rata Kabupaten adalah 2,1 item dan batas toleransi yang diperbolehkan secara Nasional 2,6 item.

Permasalahan:

- a. Masih tingginya rata-rata jumlah item obat/resep di puskesmas dari toleransi yang diperbolehkan secara nasional.
- b. Masih Kurangnya Pengetahuan Petugas di puskesmas mengenai Penggunaan Obat Rasional.
- c. Seringnya penggantian petugas di bagian BP, sehingga pelatihan yang diberikan kepada petugas tidak berjalan dengan baik.
- d. Swamedikasi yang tidak tepat.
- e. Ketidak patuhan pasien.

Solusi:

- a. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, melalui program magang tenaga kefarmasian ke RS Ahmad Muhtar.
- b. Sosialisasi melalui media promosi.
- c. Selalu meningkatkan pembinaan mengenai penerapan standar terapi pengobatan ke puskesmas.



- d. Koordinasi dengan Organisasi Profesi terutama Profesi Dokter dan Bidan.
- e. Pengumpulan Data Indikator Peresepan yang akurat untuk penyakit yang dimonitor yaitu: ISPA nonPneumonia, Diare nonSpesifik dan Penyakit Sistem Otot&Jaringan (Myalgia).
- f. Pelaksanaan gema cermat di setiap nagari/jorong dan di sekolah SLTP dan SLTA dalam wilayah kerja puskesmas

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sumber dana/anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pertemuan Penggunaan Obat Rasional (POR) dan monev Pelayanan Informasi Obat (PIO) adalah APBD Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp. 39.169.550,- realisasi keuangan sebesar Rp.39.159.250,- atau 99,97% .

d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Program Kesehatan Jiwa

- 1) Pelatihan Deteksi Dini Jiwa.
- 2) Monev Keswa dan Napza.
- 3) Workshop Kesehatan Jiwa.
- 4) Screening Napza di sekolah-sekolah.
- 5) Sosialisasi Napza di Nagari.
- 6) Sosialisasi program Jiwa ke puskesmas.
- 7) Bimbingan teknis program keswa di puskesmas.
- 8) Peningkatan Kapasitas petugas keswa&napza di Tingkat Provinsi.

Realisasi Pelaksanaan kegiatan:

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 64.990.000,- dengan realisasi Rp. 64.758.250,- atau 99,6%. SILPA sebanyak 0,4%.

Permasalahan:

- a) Harga BBM pada DPA melebihi harga yang sebenarnya, dan adanya tim integrasi program yang turun ke lapangan, sehingga dana bersisa Rp 31.750,-



- b) Anggaran belanja sewa ruang rapat/pertemuan pada DPA melebihi harga sewa kamar yang ready saat pertemuan, sehingga menyebabkan dana bersisa Rp. 100.000
- c) Anggaran perjalanan dinas luar daerah sisa Rp. 160.000,-. Ada perjalanan luar daerah dengan pagu eselon sedangkan yang melakukan perjalanan noneselon, sehingga anggaran bersisa.
- d) Belum semua puskesmas teintegrasi dengan lintas sektor dalam penanggulangan permasalahan kesehatan jiwa di wilayahnya.
- e) Belum adanya Tim Kabupaten dalam penanggulangan ODGJ, sehingga penanganan ODGJ belum maksimal.

Solusi:

- a) Sebaiknya Pagu BBM disesuaikan dengan Pagu Kegiatan sehingga tidak terjadi SILPA.
- b) Pagu sewa tempat/ruang melebihi harga sewa kamar yang tersedia, sebaiknya kegiatannya disesuaikan dengan sewa kamar
- c) Kontrol scedul kegiatan agar disesuaikan dengan ASN yang melakukan perjalanan dinas, sehingga anggaran dapat terserap sesuai perencanaan dengan baik.
- d) Sebaiknya puskesmas bersama lintas sektor membentuk Satgas dalam penanggulanagan ODGJ terutama ODGJ yang dipasung.
- e) Tim Kabupaten bersama OPD lain membentuk TPKJM (Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat), sehingga penanganan kesehatan jiwa bisa terintegrasi dengan baik.

b. Pembinaan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat

Program dan Kegiatan:

Perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan puskesmas. Perkesmas dilakukan dengan penekanan pada upaya pelayanan kesehatan dasar. Pelaksanaan perkesmas bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi, sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal.

Sasaran perawatan kesehatan masyarakat adalah individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mempunyai masalah



kesehatan akibat ketidaktahuan, ketidak mauan, maupun ketidak mampuan dalam menyelesaikan masalah kesehatannya.

1) Program Perkesmas

- a. Agar semua KK Rawan yang ada di puskesmas dapat terjaring dan dimaping sesuai dengan permasalahannya.
- b. Agar KK Rawan yang terjaring dapat terbina sesuai dengan permasalahannya secara terpadu dan terintegrasi dengan program terkait.
- c. Dapat meningkatkan capaian SDGs Seperti: menurunkan AKI, AKB, balita dengan gizi buruk, kasus TB Paru, meningkatkan cakupan jorong UCI dan meningkatkan tingkat kemandirian keluarga dalam bidang kesehatan.
- d. Terlaksananya Monitoring Evaluasi Program Perawatan Kesehatan Masyarakat.
- e. Program Indonesia sehat merupakan salah satu program dari agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program Indonesia sehat selanjutnya menjadi program utama pembangunan kesehatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

2) Program PIS-PK

- 1) Terlaksananya kunjungan intervensi awal program PIS-PK oleh Puskesmas Lokus tahun 2019.
- 2) Terlaksananya kunjungan intervensi lanjut program PIS-PK oleh Puskesmas Lokus tahun 2018.
- 3) Terintegrasinya program PIS-PK dengan lintas program dan lintas sektor Tingkat Puskesmas dan Tingkat Kabupaten.
- 4) Meningkatnya capaian Indeks Keluarga Sehat untuk Puskesmas Lokus tahun 2018 yang sudah melakukan intervensi lanjut di tahun 2019.

Realisasi Pelaksanaan kegiatan:



Dana yang dialokasikan untuk program Perkesmas sebesar Rp. 164.955.000,- dengan realisasi sebesar Rp.164.847.500 ,- Realisasi Anggaran 99,9 %.

Permasalahan:

3) Program Perkesmas

1. Kurangnya alokasi dana untuk program perkesmas di Kabupaten dan di puskesmas, sehingga capaian program di puskesmas masih rendah.
2. Kurangnya koordinasi lintas program di puskesmas, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada keterpaduan program, sehingga kesulitan dalam meningkatkan kemandirian keluarga.
3. Fungsi koordinator program di puskesmas belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga masing-masing program berjalan sendiri-sendiri.

4) Program PIS-PK

4. Kurangnya alokasi dana program PIS-PK di Kabupaten, sehingga pelaksanaan monev PIS-PK masih digabung dengan program perkesmas.
5. Masih ada Puskesmas Lokus tahun 2019 yang belum total coverage melakukan kunjungan intervensi awal kepada keluarga di wilayah kerjanya dikarenakan kurangnya tenaga dan banyaknya kegiatan puskesmas.
6. Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan intervensi lanjut untuk puskesmas lokus tahun 2019, sehingga Indeks Keluarga Sehat tidak mengalami peningkatan.
7. Kurangnya pemahaman di puskesmas tentang 12 indikator program PIS-PK.
8. Belum dilakukannya Verifikasi Kunjungan keluarga yang sudah dilakukan oleh puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

Solusi:

5) Program Perkesmas



- a. Meningkatkan kerja sama lintas program di puskesmas, dengan lebih memfungsikan peran pimpinan dan koordinator program di puskesmas.
- b. Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan di puskesmas, sehingga semua KK Rawan yang ada dapat dimaping dengan baik.
- c. Pelatihan secara terpadu dengan melibatkan pimpinan, koordinator program dan koordinator puskesmas di puskesmas.

6) Program PIS-PK

- a. Perlunya alokasi dana untuk pelaksanaan monitoring evaluasi program PIS-PK, sehingga semua permasalahan di puskesmas dapat dicarikan solusi bersama.
- b. Melaksanakan Bimtek ke puskesmas yang bersangkutan dan perlunya ketegasan dari Kepala Puskesmas.
- c. Perlunya komitmen bersama dan membuatkan SK Bupati untuk Intervensi lanjut program PIS-PK di Tingkat Kabupaten dan SK Kepala Puskesmas di Tingkat Puskesmas dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait.
- d. Melakukan kala karya di Puskesmas untuk penyegaran program PIS-PK.
- e. Perlunya alokasi dana untuk pelaksanaan verifikasi keluarga sehat di masing-masing wilayah kerja puskesmas yang sudah lokus.
- f. Perlunya mengadakan pelatihan intervensi lanjut program PIS-PK dengan peserta lintas program Tingkat Kabupaten dan pengelola PIS-PK Puskesmas serta Kepala Puskesmas dan Koordinator Program.

e) Program Pengawasan Obat dan Makanan

1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Pengawasan dan Pembinaan Sarana Distribusi Obat, Jamu dan Kosmetik



Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai Desember 2019. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk investigasi dan pembinaan ke lapangan (apotek, toko obat, industri rumah tangga, depot jamu dan pasar).

Kegiatan ini berbentuk pengawasan dan pembinaan ke sarana distribusi obat, jamu dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya pada apotek, toko obat, toko kosmetik dan penjual obat/jamu di lapak-lapak pasar, sebanyak 30 buah sarana.

Permasalahan:

- a. Masih ditemukan toko obat yang belum punya izin, (13 buah toko).
- b. Pedagang di lapak-lapak pasar menjual obat-obat dengan daftar K, obat/jamu sudah/hampir kadaluarsa dan yang tidak memiliki izin edar atau izin edar palsu dijual bebas ke masyarakat.
- c. Ada depot jamu yang masih menjual jamu yang tidak ada izin edar, walaupun sudah diberi peringatan keras oleh BPOM.
- d. Belum ada pembinaan dan pengawasan secara berkala dari puskesmas kepada penjual obat/jamu di pasar.

Solusi:

- a. Kerja sama dengan BPOM dalam pengawasan dan pembinaan kepada sarana distribusi obat/jamu yang ada di masyarakat.
- b. Kerja sama dengan lintas sector terkait (pihak kepolisian/bareskrim) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ke distribusi obat/jamu.
- c. Meminta pedagang untuk membuat surat pernyataan, sebagai tindak lanjut dari temuan yang didapatkan (tidak menjual lagi obat yang tidak boleh dijual bebas dan jamu yang tidak ada izin edar).



- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan berkala.
- e. Melakukan evaluasi dari hasil pembinaan dan pengawasan.
- f. Kepada pelaku usaha/penanggung jawab bisa memeriksa izin edar obat, makanan melalui situs www.pom.go.id atau melalui aplikasi android cek BPOM.

2. Kegiatan Pertemuan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka SPP-IRT, terhadap produsen Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) bertujuan meningkatkan pengetahuan produsen P-IRT tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dan BTP berbahaya agar tercipta pangan yang aman, bermutu dan bergizi serta diperolehnya sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP). Kegiatan Pertemuan Penyuluhan Keamanan Pangan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 Maret 2019 yang dihadiri oleh 35 orang. Sebagai narasumber kegiatan penyuluhan keamanan pangan adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Kumperdag dan Loka POM Kabupaten Dharmasraya. Hasil kegiatan Pertemuan Penyuluhan Keamanan Pangan didapatkan peserta mulai memahami pentingnya memproduksi pangan sesuai dengan CPPB-IRT dan tidak menambahkan BTP berbahaya, diketahui dari nilai pre test/post test yaitu rata-rata 77,44.

Permasalahan

- a. Masih banyak industri rumah tangga yang belum memiliki izin P-IRT
- b. Masih ada P-IRT dalam pengolahan industri rumah tangga menggunakan bahan tambahan berbahaya, atau pemanis buatan yang melebihi standar aman
- c. Industri rumah tangga masih banyak yang belum layak kesehatan, seperti standar sanitasi lingkungan dan



personal hygiene pekerja masih belum sesuai dengan standar kesehatan

- d. Masih ada industri rumah tangga dalam memproduksi, tidak memperhatikan kadaluarsa produk yang dijual ke masyarakat

Solusi:

- a. Harus ada data terpilah jumlah P-IRT seKabupaten Dharmasraya, yang sudah punya izin dan yang belum punya izin
- b. Meminta puskesmas untuk mendata ulang jumlah P-IRT yang ada di wilayah kerja masing–masing puskesmas, dan menyampaikan ke Dinas Kesehatan P-IRT yang belum mengikuti penyuluhan keamanan pangan
- c. Meminta puskesmas untuk melakukan pembinaan secara berkala ke P-IRT yang ada di wilayah kerja
- d. Meminta puskesmas untuk mengalokasikan dana kegiatan pembinaan dan pengawasan pada P-IRT yang ada dalam wilayah kerja puskesmas
- e. Bagi P-IRT yang belum mempunyai izin, disarankan untuk mengurus izin P-IRT secepatnya
- f. Bagi P-IRT yang sudah punya izin, tapi personal hygienen yang masih kurang, puskesmas segera melaporkan ke Dinas Kesehatan, agar dapat dilaksanakan pembinaan terpadu.

3. Pengawasan dan Pemeriksaan Pangan yang dicurigai Mengandung Bahan Berbahaya

Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dilakukan dengan pengambilan dan pemeriksaan sampel makanan yang terdiri dari, makanan dan minuman dari pasar pabukoan, pasar tradisional, hasil industri rumah tangga. Sampel tersebut diambil dan diperiksa dengan menggunakan alat *Food Contamination Kit*. Dari hasil pemeriksaan bisa terdeteksi penggunaan bahan berbahaya seperti: Formalin (Pengawet mayat), Rhodamin B (pewarna



pakaian), Metanil Yellow (pewarna Pakaian), boraks (penjernih air) dan pemakaian siklamat dan sakarin (Pemanis buatan) yang melebihi batas yang dibolehkan (batas kadar siklamat: 500 mg-3g/kg bahan, sakarin: 50 mg- 300 mg/kg bahan). Kegiatan dilaksanakan dari bulan Januari sampai bulan Desember 2019, sampel diambil di 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya, dengan jenis pemeriksaan, Boraks, Formalin, Rhodamin B dan Metanyl Yellow dengan jumlah sampel awal 400 sampel dalam pelaksanaan terealisasi sebanyak 486 sampel. Di bawah ini dapat dilihat hasil pemeriksaan makanan dan minuman yang di laksanakan.

Tabel
Hasil pemeriksaan makan dan minuman
di Kecamatan se-Kab. Dharmasraya Tahun 2019

No	Tempat/ Lokasi	Jumlah Sampel	HasilPengujianSampel				%
			Boraks	Formalin	Methani I Yellow	Rodhamin B	
1	Tiumang	84	28	7		13	57,14
2	Koto Baru	66	15			1	24,24
3	Sitiung	116	28	15		15	50
4	Sungai Rumbai	107	32	3		4	36,45
5	Pulau Punjung	67	18			3	31,34
6	Koto Besar	22	8				36,36
7	Sitiung II	24	5			1	25
JUMLAH		486	134	25		37	37,22

Permasalahan:

- a. Masih banyaknya BTP berbahaya yang ditambahkan ke makanan dan miunuman



-
- b. Penambahan BTP berbahaya tidak dilakukan oleh pedagang eceran/grosir tetapi dari pemasok yang bukan berasal dari Kabupaten Dharmasraya.
 - c. Beredarnya banyak jenis nama boraks di masyarakat seperti bleng/pijer bahkan bumbu soda atau sada yang biasa digunakan sudah mengandung BORAKS, dan masyarakat yang memproduksi soda atau pengembang yang berasal dari kerang ada yang menambahkan hasil olahannya dengan senyawa boraks.
 - d. Masih banyak dijual BLENG di tempat/kedai bumbu masakan
 - e. Produsen makanan dan minuman yang memakai bleng seperti untuk kerupuk atau mie jawa/kuning meminta solusi apa yang harus mereka gunakan sebagai pengembang kalau tidak boleh menggunakan bleng
 - f. 486 sampel makanan dan minuman yang diperiksa ditemukan 196 sampel positif atau 37,22% mengandung bahan berbahaya, yang ditemukan pada pangan/makanan seperti ikan laut/udang, cendol, delima, mie jawa/kuning, rumput laut, kolang-kaling, agar-agar, kerupuk, kerupuk makaroni, mutiara, anggur dan semangka
 - g. Dari 196 sampel makanan dan minuman yang positif, masih ada pedagang – pedagang yang sebelumnya sudah diperiksa.

Solusi:

- a. Peningkatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat, seperti:
- b. Pembuatan BALIHO di setiap pasar tentang BTP berbahaya yang tidak boleh ditambahkan di makanan dan minuman
- c. Pembuatan leaflet/newsletter atau pamphlet tentang BTP berbahaya baik jenis, ciri-ciri di makanan dan akibat bila mengkonsumsinya.
- d. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terpadu ke masyarakat
- e. Radio interaktif
- f. Membentuk tim pengawasan terpadu di Tingkat Kabupaten, untuk pemantauan dan pengawasan secara berkesinambungan
- g. Untuk makanan/pangan yang penambahan BTP berbahaya di luar Kabupaten Dharmasraya perlu ditindaklanjuti secara terpadu di Tingkat Kabupaten



-
- h. Perlu ditingkatkan sidak ke toko-toko yang menjual bumbu makanan yang menjual BTP berbahaya
 - i. Pengganti untuk bleng/boraks bisa digunakan senyawa/bahan kimia STPP (*Sodium Triphloyphospat*)
 - j. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di sekolah
 - k. Memberitahu dan mengajarkan ke pemilik/penanggung jawab sarana distribusi untuk memeriksa izin edar obat dan makanan yang mereka jual.

4. Pertemuan Pengawasan Produksi dan Distribusi Obat Tradisional

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka rencana pengembangan obat tradisional di Kecamatan Sitiung khususnya wilayah kerja puskesmas Sitiung 1, kegiatan ini bertujuan menyosialisasikan manfaat pengobatan herbal bagi masyarakat. Kegiatan sosialisasi tentang obat tradisional dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2019 di hadiri oleh kader, penyuluh pertanian wilayah kerja Nagari Sitiung dan Nagari Sungai Duo, pedagang–pedagang jamu, madu, dan wanita kelompok tani, dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang.

Permasalahan

- a) Belum adanya lahan tanaman obat yang mencukupi di masyarakat, pedagang-pedagang jamu yang ada di nagari untuk produksi masih membeli bahan mentah dari pasar
- b) Belum adanya regulasi dari kenagarian menetapkan masing–masing keluarga harus memiliki minimal 10 (sepuluh) macam tanaman obat di antaranya jahe merah
- c) Belum ada petugas kesehatan yang terlatih di Puskesmas Sitiung 1, baik tenaga medis, perawat dan tenaga farmasi tentang pengobatan herbal

Solusi

- a) Menyarankan nagari untuk membuat regulasi/himbauan yang mewajibkan setiap keluarga menanam minimal sepuluh jenis tanaman obat, salah satunya jahe merah



- b) Menganggarkan dana untuk memfasilitasi pertemuan dengan lintas sektor terkait dalam rangka pengembangan pengobatan herbal
- c) Membuat surat permohonan untuk pelatihan bagi tenaga medis tentang pengobatan herbal ke Litbangkes Kementerian Kesehatan

Realisasi Pelaksanaan kegiatan

Sumber dana/anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya adalah DAK Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp. 76.411.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 76.326.000,- atau 99,08%.

1. Pengawasan dan Pembinaan Penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT :

Tabel
Kelengkapan Data ASPAK Puskesmas
se-Kab. Dharmasraya Tahun 2019

No	Nama Puskesmas	Status	Kelengkapan			Kumulasi
			Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
1	Sitiung I	Ranap	100	54,72	45,65	73,73
2	Gunung Medan		66,67	43,4	43,84	55,21
3	Sungai Dareh		100	50,94	38,08	70,33
4	Sungai Limau	Ranap	100	37,74	28,84	65,31
5	Sungai Rumbai	Ranap	69,05	50,94	25,65	49,88
6	Koto Baru	Ranap	100	56,6	23,62	65,11
7	Sitiung II		93,75	47,17	23,52	61
8	Timpeh	Ranap	100	52,83	23,33	64,62
9	Koto Besar		93,75	43,4	22,56	60,24
10	Beringin		94,87	37,74	21,44	59,79



	Sakti					
11	Padang Laweh	Ranap	100	43,4	20,58	62,57
12	Sialang		79,49	33,96	17,28	50,05
13	Silago	Ranap	97,62	32,08	17,25	58,92
14	Tiumang		84,62	45,28	13,12	52,08

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Sumber dana/anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT adalah Dana DAK non-Fisik Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp. 31.479.500,- realisasi keuangan sebesar Rp.31.434.500,- atau 99,97%.

Permasalahan:

- Data aspak di puskesmas belum sesuai dengan Permenkes No 75 Tahun 2014, masih ada alat kesehatan yang tertumpuk di suatu unit layanan.
- Masih ada alat kesehatan yang belum dimasukkan ke dalam Aplikasi Aspak.
- Di beberapa puskesmas ada alat kesehatan yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi.
- Masih kurangnya anggaran di puskesmas dalam pemenuhan standar Aspak di puskesmas sesuai dengan Permenkes No 75 Tahun 2014.

Solusi:

- Adanya anggaran untuk melengkapi Aspak sesuai dengan Permenkes No 75 Tahun 2014.
- Melakukan verifikasi Aspak di setiap puskesmas agar data Aspak yang dimasukkan di dalam Aplikasi Update dan apa yang menjadi kebutuhan puskesmas lebih jelas.

f) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,**a. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan**

Kegiatan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan setiap orang yang mengabdikan diri di dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan



kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. adapun tugas pokok Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah melaksanakan pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian atau penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka pengembangan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019 adalah Pertemuan Digital Marketing di mana peserta berasal dari Pengelola Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dan Tenaga Promotor. Tujuan dari Pertemuan Digital Marketing adalah bagaimana seorang tenaga kesehatan memasarkan informasi kesehatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mau mendengarkan tenaga promosi dan mau mengubah perilaku dari tidak sehat menjadi sehat.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 44.666.400,- dengan realisasi keuangan RP. 44.152.000 (98,84 %). Dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 514.400,- yang berasal dari rek BBM dan Perjalanan Dinas

Permasalahan

Dana yang tidak terealisasi berasal dari BBM dan Perjalanan dinas yang perjalanan dinasnya tidak mencukupi untuk direalisasikan

- a. Waktu pertemuan digital marketing masih kurang karena terkendala anggaran
- b. Narasumber pertemuan Digital Marketing berasal dari Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya, tidak sesuai dengan yang direncanakan karena terkendala Anggaran
- c. Tidak adanya Narasumber Ahli dari pertemuan Digital Marketing

Solusi



-
- a. Perlu perencanaan lebih tepat untuk kegiatan yang akan dilakukan.
 - b. Perlu adanya Narasumber Ahli untuk kegiatan Digital Marketing, sehingga kegiatan yang dilakukan tercapai dan bisa direalisasikan di masing-masing Puskesmas.
 - c. Perlu adanya dukungan dana yang maksimal untuk kegiatan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan.

b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan PHBS Dan Nagari Siaga

Program pengembangan PHBS dan Nagari Siaga meliputi kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), revitalisasi nagari siaga, di mana kegiatan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) adalah implementasi germas di OPD dan masyarakat serta melanjutkan kegiatan germas. Kegiatan revitalisasi nagari siaga berupa pertemuan Revitalisasi nagari siaga, sosialisasi dan pembinaan ke nagari siaga percontohan. Pertemuan revitalisasi nagari siaga bertujuan untuk mengingatkan kembali program nagari siaga kepada wali nagari, kader nagari siaga dan pengelola program promosi dan pemberdayaan masyarakat sehingga nagari siaga aktif. Posyandu remaja bertujuan untuk memantau kesehatan dan memberikan informasi kesehatan bagi remaja. Di Kabupaten Dharmasraya posyandu remaja telah dibentuk pada tahun 2017, di mana posyandu remaja sudah ada di 14 Puskesmas.

Realisasi Pelaksanaan kegiatan

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 39.590.000.- dengan realisasi keuangan Rp.39.139.400

Permasalahan

- a. Dana yang tidak terealisasi disebabkan karena anggarannya tidak cukup untuk di SPJ kan
- b. Nagari siaga tidak aktif karena nagari siaga setelah dibentuk, kegiatan yang ada di nagari siaga tidak jalan secara maksimal



-
- c. Masih adanya posyandu remaja yang belum maksimal kegiatannya

Solusi

- a. Perlu perencanaan lebih tepat untuk kegiatan yang akan dilakukan
- b. Diharapkan kegiatan Nagari Siaga yang ada di Kabupaten Dharmasraya berjalan sesuai dengan rincian kegiatan nagari siaga.

c. Orientasi krida Saka Bakti Husada (SBH)

Program Saka Bakti Husada yaitu wadah pengembangan pengetahuan, pembinaan keterampilan, penambahan pengalaman dan pemberian kesempatan untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Kegiatan Orientasi Krida Saka Bakti Husada (SBH) berupa : pembinaan SBH ke sekolah dan puskesmas, Perkemahan Bakti Daerah (Pertida), Perkemahan Bakti cabang (Percab). Setiap Puskesmas memiliki anggota saka bakti husada, dimana anggota Saka bakti husada berasal dari Anak SMA/SMK sederajat yang ada di wilayah kerja Puskesmas tersebut. Anggota Saka Bakti Husada diseleksi dan yang terpilih diberikan pengetahuan tentang ilmu kesehatan. Anggota Saka Bakti Husada adalah Kader kesehatan dimana perpanjangan tangan Puskesmas untuk membantu mempromosikan kesehatan kepada Siswa sekolah dan masyarakat. Perkemahan Bakti Daerah (Pertida) dilaksanakan sekali dalam satu tahun, dimana tahun 2019 Pertida dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya dan tahun 2020 di Kota Sawahlunto, Begitu juga perkemahan bakti cabang (Percab) yang membedakan adalah pertida seluruh kab/kota yang ada di provinsi Sumatera Barat dan perticab perkemahan yang dilaksanakan oleh Kabupaten.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 67.345.000'- dengan realisasi keuangan Rp. 66.717.500 (99,06%).

Permasalahan



-
- a. Dana yang tidak teralisasi disebabkan berasal dari kegiatan BBM, Makan minum, perjalanan dinas dalam daerah, Perjalanan dinas luar daerah
 - b. Anggota Saka Bakti Husada (SBH) sering berganti karena Siswa kelas tiga (3) tidak boleh ikut serta karena harus Fokus melaksanakan ujian akhir nasional
 - c. Masih ada Puskesmas yang meikutsertakan siswa SMP sederajat menjadi Anggota Saka Bakti Husada (SBH), sementara syarat menjadi anggota SBH harus SMA/ SMK Sederajat
 - d. Kakak pembina dari dinas kesehatan sebagian besar belum mendapatkan Pelatihan Kursus Mahir Dasar (KMD)

Solusi

- a. Perlu perencanaan lebih tepat untuk kegiatan yang akan dilakukan
- b. Mensosialisasikan kesehatan kepada Anggota Saka Bakti Husada (SBH) diantaranya 6 krida SBH :
 - Krida bina keluarga sehat
 - Krida bina penanggulangan penyakit
 - Krida bina lingkungan sehat
 - Krida bina gizi
 - Krida bina obat
 - Krida bina phbs
- c. Mencari dan melatih Anggota Saka Bakti Husada (SBH) yang baru sebelum kelas tiga keluar dari Anggota Saka Bakti Husada (SBH)
- d. Pembinaan ke sekolah dan Puskesmas lebih ditingkatkan lagi
- e. Meanggarkan dana untuk kegiatan kursus mahir dasar (KMD) Saka Bakti Husada (SBH) dan Kursus Mahir Lanjutan (KML)

2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

- a. **Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (Gaky), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya**



Program Perbaikan Gizi Masyarakat merupakan salah satu program prioritas di Dinas Kesehatan, yang bertujuan untuk mengurangi dan menanggulangi kasus gizi kurang dan gizi buruk. Dimana sasarannya adalah bayi, anak balita, ibu hamil dan menyusui serta remaja, bentuk kegiatan gizi di tahun 2019 dalam bentuk perjalanan dinas, makanan pendamping ibu hamil KEK dan Balita Gizi Buruk Yang di rawat di RSUD dan TFC. Dinas kesehatan provinsi Sumatera Barat juga melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten yaitu melaksanakan penimbangan massal dengan software e-PPGBM di wilayah kerja puskesmas kabupaten Dharmasraya.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah dana program ini sebesar Rp 32.239.000,- dengan realisasi keuangan Rp 28.961.345,- (89,83%) dan dana tersisa sebesar Rp 3.277.655,-.

Permasalahan

- a. Masih tingginya kasus gizi kurang.
- b. Masih Tingginya stanting di wilayah kerja Puskesmas yaitu 18,6 %.
- c. Kurangnya dukungan lintas program dan lintas sektor.
- d. Tingginya kejadian anemia pada remaja.
- e. Jumlah kasus ibu hamil KEK masih cukup tinggi.

Solusi

- a. Membentuk Pos pemulihan gizi di seluruh puskesmas.
- b. Memastikan seluruh kasus gizi kurang dan buruk memiliki kartu jaminan kesehatan.
- c. Mengusulkan penambahan jumlah tenaga gizi di puskesmas.
- d. Melakukan advokasi ke sekolah SMP dan SMA tentang pentingnya konsumsi tablet Fe untuk remaja putri.
- e. Perencanaan Survey pemeriksaan HB pada remaja putri.
- f. Mengadakan kunjungan rumah bumil KEK serta pemberian PMT pemulihan.
- g. Konseling gizi bagi calon ibu hamil dan calon pengantin untuk persiapan kehamilan.



-
- h. Melakukan pertemuan dan advokasi dengan lintas sektor dan program terkait dalam penanggulangan kasus gizi kurang dan buruk.

b. Revitalisasi Nagari Sadar Gizi (DAK Non Fisik)

Kegiatan lain dalam program perbaikan gizi masyarakat adalah pembentukan nagari sadar gizi di setiap nagari wilayah kerja puskesmas se kab Dharmasraya. Nagari sadar gizi adalah nagari yang melaksanakan 5 kegiatan utama keluarga sadar gizi yaitu :

- a. Seluruh keluarga menimbang berat badan secara teratur setiap bulannya
- b. Mengonsumsi Garam beryodium
- c. Makan sayur dan Buah
- d. Seluruh anggota keluarga peduli dengan masalah gizi
- e. Mengonsumsi suplemen gizi

Pada tahun 2018 sudah dibentuk 15 Nagari dari 14 Puskesmas yang ada, maka pada tahun 2019 ini direvitalisasi nagari yang sudah terbentuk sehingga kegiatan gizi yang ada pada nagari sadar gizi dilakukan secara rutin. Salah satu kegiatan dalam nagari sadar gizi yang direvitalisasi adalah masalah PMT AS, di mana pada tahun 2019 diharapkan seluruh sekolah di wilker Puskesmas membuat menu PMT AS sendiri dari pangan lokal dengan mengaktifkan kantin sekolah.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah dana program ini sebesar Rp 39.914.000,- dengan realisasi keuangan Rp 39.687.750,- (99.44%) dan dana tersisa sebesar Rp 226.250,-. Dana yang tidak terealisasi sebesar 0,56 % yaitu dana perjalanan dinas.

Permasalahan

- a. Masih belum semua nagari sadar gizi memiliki keluarga yang sadar akan gizi keluarganya
- b. Masih ada sekolah yang belum memiliki kantin sekolah sadar gizi
- c. Masih rendahnya D/S yaitu masih 78 %.

Solusi



1. Mensosialisasikan kantin sekolah sehat
2. Membentuk nutrisionist cilik
3. Membuat menu PMT AS di sekolah
4. Memberikan pelatihan pemantauan pertumbuhan, KP ASI, PMBA di puskesmas bagi kader posyandu.

3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Lingkungan merupakan salah satu variabel yang kerap mendapat perhatian khusus dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat. Bersama dengan faktor perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik, lingkungan menentukan baik buruknya status derajat kesehatan masyarakat. Untuk menggambarkan keadaan lingkungan, diperlukan indikator-indikator seperti : rumah sehat, rumah/bangunan yang diperiksa dan bebas jentik nyamuk *Aedes*, akses terhadap air bersih, akses terhadap sanitasi dasar, tempat-tempat umum dan pengelolaan makanan yang sehat serta institusi dibina kesehatan lingkungannya. Pembinaan ke Tempat – tempat umum dan Tempat Pengolahan Makanan, pembinaan forum kecamatan sehat di seluruh kecamatan. Yang menjadi Kelompok Sasaran dalam hal ini adalah Sanitarian Puskesmas se-Kabupaten Dharmasraya, Pemilik TTU dan TPM serta pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Hasil akhir dari kegiatan ini diharapkan nantinya dapat Meningkatkan kepedulian dari pelaku pasar, pemilik TTU dan TPM peduli terhadap masalah lingkungan dan terwujudnya Kabupaten Dharmasraya sehat.

Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Pagu dana sebesar Rp. 50.000.000,- Realisasi realisasi keuangan sebesar Rp. 49.906.565,- atau 99,81%. Sisa dana sebesar Rp. 93.435,-

Permasalahan

- a. Sisa dana disebabkan adanya selisih antara volume perjalanan dinas yang dilakukan dengan volume BBM yang digunakan, serta sisa Belanja perjalanan dinas



-
- b. Masih rendahnya perilaku pemilik TTU dan TPM dalam mengurus sehingga bisa memenuhi syarat dan layak di konsumsi oleh masyarakat

Solusi

- a. Dalam menyusun RKA perlu membuat Perencanaan yang lebih tepat.
- b. Perlu dibentuk Tim Pokja Kabupaten serta Peraturan sebagai payung hukum
- c. Perlu ditingkatkan pengawasan terhadap Tempat- Tempat Umum (TTU) dan Tempat – Tempat Pengolahan Makanan (TPM)

b. Peningkatan Sanitasi Dasar Masyarakat (DAK Non Fisik)

STBM adalah program nasional dibidang sanitasi yang bersifat lintas sektor. Program ini telah dicanangkan pada bulan Agustus 2008 oleh Menteri Kesehatan RI. STBM merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.

Adapun salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan tahun ini berupa pertemuan depot air minum, Pemicuan STBM dan Pertemuan Natural Leder, dimana hasil dari kegiatan ini adalah adanya komitmen untuk ODF 2020, adanya perubahan perilaku masyarakat untuk Stop BAB Sembarangan telah terbentuk asosiasi pengurus Depot air minum isi ulang. Hal ini ini disebabkan karena banyaknya depot Air minum yang tidak melakukan registrasi ulang sehingga tidak lagi memiliki izin yang berlaku.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pagu dana sebesar Rp. 91.000.000,- Realisasi keuangan sebesar Rp.90.518.250,-atau 99,47%. Sisa dana sebesar Rp.481.750 ,-

Permasalahan



-
- a. Sisa dana disebabkan adanya selisih antara volume perjalanan dinas yang dilakukan dengan volume BBM yang digunakan, serta sisa Belanja perjalanan dinas
 - b. Masih tingginya persoalan sanitasi di Kab. Dharmasraya, seperti banyaknya warga yang buang air besar sembarangan (BABS), terutama disungai sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan dan sumber air.
 - c. Rendahnya komitmen dari seluruh stakeholder terkait dalam mewujudkan dan mendeklarasikan Odf (Open Defecasi Free) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan
 - d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan nagari STBM
 - e. Masih Rendahnya Kesadaran Pemilik Depot Air Minum untuk melakukan registrasi ulang sehingga banyak DAMU yang tidak memiliki izin operasional yang berlaku
 - f. Masih lemahnya pengawasan Depot Air Minum dari stakeholder terkait.

Solusi

- a. Dalam menyusun RKA perlu membuat Perencanaan yang lebih tepat.
- b. Perlu dibentuk Tim Pokja Kabupaten serta Peraturan sebagai payung hukum
- c. Perlu dibentuk Tim Pokja Kabupaten yang akan menangani permasalahan STBM
- d. Komitmen bersama dalam upaya percepatan ODF
- e. Pembentukan TIM terpadu dalam upaya pengawasan Depot Air Minum

4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. **Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**
 1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan P2M
 2. Workshop Pengendalian TBC dan PPM
 3. Workshop Laboratorium TBC Puskesmas



-
4. Workshop Pengendalian TBC dan KOPI TBC
 5. Supervisi Program P2M
 6. Konsultasi dan menghadiri pertemuan serta acara ke Propinsi.

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan program pelayanan pencegahan penanggulangan penyakit menular (P2M) sebesar Rp. 61.487.506,- dengan realisasi Rp. 61.294.500,- atau 99,7%. SILPA sebanyak 0,3% (Rp. 193.006,-) dengan keterangan sebagai berikut :

Permasalahan.

- a) Harga BBM yang tertulis di DPA melebihi harga yang sebenarnya, serta adanya integrasi perjalanan dinas antar program, sehingga BBM bersisa Rp.98.006,-
- b) Anggaran perjalanan dinas dalam daerah sisa sebanyak Rp. 25.000,- karna adanya yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dengan pagu yang dianggarkan tidak sesuai sehingga anggaran bersisa.
- c) Anggaran perjalanan dinas luar daerah sisa Rp.70.000,-. Ada perjalanan luar daerah dengan pagu Esselon sedangkan yang melakukan perjalanan non Esselon, sehingga anggaran sisa.
- d) Masih banyak puskesmas yang belum memiliki tenaga terlatih dan pertukaran pengelola sehingga berdampak terhadap pencapaian Program.
- e) Beban kerja atau rangkap program dari petugas sehingga kurang fokus dalam pelaksanaan Program.

Solusi.

- a) Sebaiknya Pagu BBM sesuaikan dengan Pagu Kegiatan sehingga tidak terjadi SILPA.
- b) Kontrol scedul kegiatan agar disesuaikan dengan ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah sehingga anggaran dapat terserap sesuai perencanaan dengan baik.
- c) Sebaiknya petugas yang telatih tidak di mutasi sehingga pelaksanaan program tercapai sesuai dengan target.



-
- d) Sebaiknya program terutama yang masuk dalam indikator SPM tidak di berikan rangkap Program sehingga petugas bisa lebih fokus dalam pelaksanaan Program.

b. Peningkatan Imunisasi

1. Dialog tentang pandangan Islam terhadap imunisasi oleh MUI/ Kemenag Tingkat Kabupaten
2. Workshop Petugas dalam rangka pelaksanaan Program imunisasi terintegrasi program KIA dan Promkes
3. Sosialisasi program inovasi KOPI MANIS
4. Data Quality Self assesment imunisasi ke puskesmas
5. Supervisi supportive program Imunisasi ke Puskesmas
6. Konsultasi dan menghadiri acara pertemuan ke propinsi.

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan.

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 91.262.500,- dengan realisasi Rp. 91.045.500,- atau 99,8%. SiLPA sebanyak 0,2%

Permasalahan.

- a) Harga BBM pada DPA melebihi harga yang sebenarnya dan adanya tim integrasi program yang turun ke lapangan dengan sehinga sisa dana sebanyak Rp. 17.000,-.
- b) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi tersisa sebanyak Rp. 75.000,- disebabkan karena biaya perjalanan dinas ke Propinsi berdasarkan golongan yang melakukan perjalanan dinas.
- c) Honor Narasumber tersisa sebanyak Rp. 100.000,- disebabkan karena pagu tidak sesuai dengan SBA.
- d) Perlunya dukungan Lintas Sektor terkait dalam peningkatan Imunisasi serta tim dalam penanganan penyebaran kabar Hoaks terkait Imunisasi.
- e) Perlunya tim dari setiap kecamatan melalui Puskesmas dalam pelaksanaan peningkatan Imunisasi terutama Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

Solusi.



- a) Harga BBM pada DPA melebihi harga yang sebenarnya, dan adanya tim integrasi program yang turun kelapangan sehingga menyebabkan Silpa
- b) Kontrol scedul kegiatan agar disesuaikan dengan ASN yang melakukan perjalanan dinas sehingga anggaran dapat terserap sesuai perencanaan dengan baik.
- c) Seharusnya dalam pembuatan pagu Honor narasumber sangat perlu memperhatikan SBA sehingga tidak terjadi silpa.
- d) Membentuk Tim Kabupaten antar OPD dalam pencapaian peningkatan Imunisasi.
- e) Perlunya koordinasi antar puskesmas dan Lintas sektor dalam peningkatan pencapaian imunisasi terutama IDL.

c. Peningkatan Surveilans

1. Workshop Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans PD3I dan SKDR
2. Pelacakan kasus tersangka KLB.
3. Pemantauan bencana alam Banjir ke lokasi kejadian
4. Pemantauan wilayah setempat kasus potensial KLB melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon
5. Supervisi ke Puskesmas
6. Konsultasi dan menghadiri acara di Dinas Kesehatan Propinsi

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 25.150.000,- dengan realisasi Rp. 25.098.250,- atau 99,8%. SiLPA sebanyak 0,2 % dengan keterangan sebagai berikut :

Permasalahan

- a) Harga BBM pada DPA melebihi harga yang sebenarnya dan adanya tim integrasi program yang turun ke lapangan dengan sehingga sisa dana sebanyak Rp. 26.750,-.
- b) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi tersisa sebanyak Rp.25.000,- disebabkan karena biaya perjalanan dinas ke Propinsi berdasarkan golongan yang melakukan perjalanan dinas.



- c) Kerjasama lintas OPD belum maksimal, sehingga penanganan KLB masih belum optimal
- d) Kurangnya jumlah SDM petugas Surveilans terutama dalam penanggulangan Bencana dan KLB dilingkup Kabupaten.

Solusi

- a) Mewaspadaai kenaikan harga BBM atau Sebaiknya pemerintah tidak terlalu sering merubah harga BBM sehingga anggaran dapat kita rencanakan sesuai dengan harga yang sebenarnya dan sesuaikan pagu BBM dengan Kegiatan sehingga tidak terjadi Silpa.
- b) Kontrol scedul kegiatan agar disesuaikan dengan ASN yang melakukan perjalanan dinas sehingga anggaran dapat terserap sesuai perencanaan dengan baik.
- c) Meningkatkan kerjasama antar lintas OPD dalam penanggulangan KLB.
- d) Menambah jumlah SDM Petugas terutama petugas Epidemiologi dan Bencana di Lingkupp Kabupaten, sehingga bisa mengatasi permasalahan Surveilans di Kabupaten.

b. Pelayanan Kesehatan Matra

Kegiatan dalam Program matra adalah pelayanan kesehatan jemaah calon haji dan P3K posko lebaran serta hari besar dan even-even lainnya yang diselenggarakan di Kabupaten Dharmasraya.

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah calon haji dilakukan dalam tiga tahap yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Labkesda, RSUD dan tahap terakhir di KKP di Asrama Haji. Pemeriksaan kesehatan tersebut mertupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang diagnosa dan penetapan diagnosa serta pelaksanaan pembinaan sampai berangkat dengan kondisi yang sehat (memenuhi syarat istitha'ah kesehatan)

Tujuan :



-
- a. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan haji tahun 2018 dan persiapan pelayanan kesehatan haji tahun 2019
 - b. Terlaksana dan terpantaunya pelayanan pemeriksaan kesehatan jemaah calon haji tahap pertama dan tahap ke dua di masing-masing puskesmas, labkesda dan rumah sakit dan di entri ke aplikasi siskohatkes
 - c. Terlaksana dan terpantaunya pemberian Vaksin meningitis kepada seluruh jemaah calon haji dan dientri ke aplikasi siskohatkes
 - d. Mengantar dan menjemput jemaah haji ke asrama haji padang
 - e. Terlaksana dan terpantaunya P3K piket poskotis lebaran di titik yang sudah di tentukan
 - f. Terlaksana dan terpantaunya P3K hari – hari besar dan even lainnya

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan

Dana yang dialokasikan untuk program Matra sebesar Rp. 95.293.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 94.667.050 ,- Realisasi Anggaran 99,3 %.

Permasalahan

- a. Petugas mengalami kesulitan dalam proses pengentrian hasil pemeriksaan kesehatan ke aplikasi siskohatkes karena jaringan yang tidak mendukung
- b. Keterbatasan jumlah petugas kesehatan yang mampu mengentrikan data jemaah haji ke dalam aplikasi siskohatkes dibanding dengan jumlah jemaah haji yang cukup banyak
- c. Adanya kesulitan dalam pelaksanaan pemberian vaksin meningitis karena kurang koordinasi dengan kemenag dan petugas KKP

Solusi



- a. Proses pengentrian hasil pemeriksaan kesehatan ke aplikasi siskohatkes dilakukan di Dinas Kesehatan karena jaringan yang tidak mendukung di Puskesmas
- b. Mengusulkan ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengikuti pelatihan Aplikasi Siskohatkes bagi beberapa orang pengelola Program haji Dinas Kesehatan Kabupaten
- c. Meningkatkan koordinasi dengan kemenag dan KKP sehingga hal serupa tidak terjadi

c. Pengendalian Penyakit Tidak Menular

1. Pertemuan Lintas Sektor Kasus Kanker
2. Workshop Upaya Berhenti Merokok
3. Surveilans PTM Berbasis WEB
4. Monev P2PTM
5. Sosialisasi FR PTM
6. Pembinaan program PTM ke Psukesmas
7. Sosialisasi Posbindu dan faktor resiko PTM serta Portal web PTM ke Puskesmas dan Nagari
8. Pemeriksaan kadar CO untuk anak sekolah
9. Penilaian Kawasan Tanpa Rokok di sekolah
10. Peningkatan kapasitas Seksi PTM ke tingkat Provinsi

Realisasi Pelaksanaan kegiatan.

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 85.136.000,- dengan realisasi Rp. 84.847.000,- atau 99,7 %. SILPA sebanyak 0,3 % dengan rincian sebagai berikut:

Permasalahan

- a) Harga BBM pada DPA melebihi harga yang sebenarnya, dan adanya tim integrasi program yang turun kelapangan sehingga dana bersisa Rp 9.000,-
- b) Anggaran perjalanan dinas luar daerah sisa Rp. 80.000,-. Ada perjalanan luar daerah dengan pagu Esselon sedangkan yang melakukan perjalanan non Esselon, sehingga anggaran sisa.
- c) Kunjungan posbindu masih banyak di hadiri oleh lansia sehingga usia produktif masih banyak yang belum



terdeteksi PTM, sehingga pencapaian program tidak tercapai.

- d) Masih kurangnya kesadaran Masyarakat untuk melakukan deteksi dini PTM dan Kanker Serviks (IVA test)
- e) Alat posbindu yang belum memadai, sehingga tidak bisa digunakan untuk masyarakat banyak.

Solusi.

- a) Penggunaan BBM tidak seimbang dengan jumlah kegiatan sehingga menyebabkan SILPA, di harapkan anggaran BBM bisa di sesuaikan dengan jumlah kegiatan Dinas Luar baik dalam kabupaten Atau dalam Propinsi.
- b) Sebaiknya apapun kegiatan yang direncanakan di Provinsi di komunikasikan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota sehingga masing-masing Kab/Kota dapat menyiapkan anggaran untuk mendukung kegiatan Dinkes Provinsi.
- c) Perlunya Sosialisasi terhadap masyarakat dan Lintas Sektor untuk peningkatan kunjungan deteksi dini PTM dan IVA test
- d) Perlunya penambahan Alat Posbindu KIT untuk menunjang kegiatan deteksi dini Penyakit Tidak Menular

d. Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang (DAK Non Fisik)

Kegiatan ini berorientasi pada 5 jenis penyakit yaitu : DBD, Malaria, Rabies, Kusta, dan Filariasis.

1. Workshop 1 Rumah 1 Jumantik
2. Monitoring Program P2B2
3. MBS Malaria
4. Pembinaan Program P2B2 ke Puskesmas
5. Monitoring dan evaluasi program P2B2
6. Investigasi dan screening kasus positif malaria



-
7. Konsultasi dan menghadiri acara pertemuan ke Propinsi

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi Rp. 33.712.750,- atau 96,3 %. SILPA sebanyak 3,7 % dengan keterangan sebagai berikut :

Permasalahan.

- a) Harga BBM pada DPA melebihi harga yang sebenarnya dan adanya tim integrasi program yang turun ke lapangan dengan sehingga sisa dana sebanyak Rp. 97.250,-
- b) Anggaran perjalanan dinas luar daerah sisa Rp. 40.000,-. Ada perjalanan luar daerah dengan pagu Esselon sedangkan yang melakukan perjalanan non Esselon, sehingga anggaran sisa.\
- c) Masih banyak puskesmas yang belum melibatkan lintas sector dalam pengendalian dan pencegahan penyakit berbasis binatang

Solusi

- a) Sebaiknya Pagu BBM sesuaikan dengan Pagu Kegiatan sehingga tidak terjadi SILPA.
- b) Kontrol scedul kegiatan agar disesuaikan dengan ASN yang melakukan perjalanan dinas sehingga anggaran dapat terserap sesuai perencanaan dengan baik.
- c) Sebaiknya Puskesmas meningkatkan Kerjasama dengan lintas sector sehingga pencegahan penyakit berbasis binatang bisa teratasi.

- 10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dilaksanakan melalui kegiatan :**



a. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan merupakan kegiatan untuk pertemuan persiapan ISO 9001;2015. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan perlu diterapkan dalam menjalankan sebuah organisasi agar mampu mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan yang ada didalam organisasi tersebut.

Realisasi Pelaksanaan Progran dan Kegiatan :

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.890.000,- Dengan realisasi sebesar Rp. 7.890.000,- dengan realisasi 100 %.

b. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa kegiatan pertemuan pemuktahiran, analisa dan pengolahan data yang tersusun untuk penyusunan profil dan sistem informasi puskesmas (e-Puskesmas). Sistem e-puskesmas merupakan bagian dari sistem e-goverment yang diharapkan dapat memberi gambaran data terupdate Dinas Kesehatan.

Realisasi Pelaksanaan Progran dan Kegiatan :

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.73.804.500 ,- Dengan realisasi sebesar Rp. 73.776.750,- dengan realisasi 99,6 %

Permasalahan :

- a) Belum semua puskesmas yang menggunakan sistem e-puskesmas
- b) Terbatasnya jaringan optik yang disediakan oleh Telkom

Solusi :



Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kab. Dharmasraya tentang jaringan Telkom untuk daerah puskesmas yang belum terjangkau dengan jaringan optik

c. Akreditasi Puskesmas

Akreditasi puskesmas adalah proses penilaian eksternal oleh komisi akreditasi dan/atau perwakilan di Provinsi terhadap puskesmas untuk menilai apakah system manajemen mutu dan system penyelenggaraan pelayanan dan upaya pokok sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini dapat memacu puskesmas untuk memenuhi standar yang ditetapkan sehingga memberikan jaminan kepada pelanggan/masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan oleh puskesmas telah sesuai standar. Terbinanya puskesmas dalam rangka memperbaiki system pelayanan, mutu dan kinerja. Kegiatan Pembinaan Akreditasi Puskesmas dalam rangka membantu puskesmas mempersiapkan dokumen – dokumen yang dibutuhkan di penilaian akreditasi puskesmas.

Tujuan :

- a. Agar puskesmas dapat menyiapkan regulasi – regulasi yang berkaitan dengan akreditasi puskesmas
- b. Agar puskesmas dapat menyiapkan SOP program yang ada di elemen penilaian akreditasi
- c. Agar puskesmas dapat menyiapkan/memperbaiki sarana dan prasarana seperti ; alur layanan, kotak saran, polatarif, dokumen layanan publik.

Realisasi Pelaksanaan kegiatan

Dana yang dialokasikan untuk persiapan Akreditasi Puskesmas sebesar Rp. 1.315.780.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1,211,105,900 ,- Realisasi 91,7 %

Permasalahan

- a. Masih Kurangnya Pengetahuan Petugas Puskesmas tentang Akreditasi Puskesmas.



- b. Masih kurangnya komitmen puskesmas dalam melaksanakan proses akreditasi.
- c. Masih Kurangnya Dukungan dan Keterlibatan dari Lintas Sektor Terkait.
- d. Masih Kurangnya Dukungan Alokasi dana untuk Kegiatan Akreditasi Puskesmas.

Solusi :

Perlu adanya dana pendukung dalam persiapan Akreditasi Puskesmas, terutama untuk mengikuti diklat pendampingan akreditasi, workshop akreditasi, bimbingan dalam menyiapkan assesment akreditasi, buku panduan atau pedoman dalam menyiapkan puskesmas untuk terakreditasi

d. Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan

Pengelolaa jasa pelayanan kesehatan merupakan kegiatan yang memanfaatkan pengembalian lima puluh persen dari pendapatan dari Labkesda. Kegiatan ini digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan dan biaya operasional Labkesda lainnya yang tidak terpenuhi di anggaran operasional Labkesda.

Realisasi Pelaksanaan program dan Kegiatan :

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 79.494.832,- Dengan realisasi sebesar Rp. 79.488.800,- dengan realisasi 99.9 %.

e. Pengelolaan Perizinan Bidang Kesehatan (Sarana)

Program dan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan perizinan bidang sarana kesehatan yang terdiri dari :

1. Perizinan Sarana Kesehatan yang terdiri dari izin Klinik, Industri Rumah Tangga, Depot Air Minum, Toko Obat, Apotek dan sarana kesehatan lainnya.
2. Peninjauan /cek fisik permohonan izin sarana kesehatan serta pembinaan ke sarana yang akan dan yang telah terbit izinnya.



-
3. Jumlah pemohon izin pada tahun 2018 untuk sarana kesehatan sebanyak 150 izin dan telah dilakukan cek fisik atas permohonan tersebut serta telah dilakukan juga pembinaan ke hampir seluruh sarana yang telah dikeluarkan izin operasionalnya.

Realisasi Pelaksanaan kegiatan

Dana awal yang dialokasikan sejumlah Rp. 30.990.450.- dengan realisasi sejumlah Rp. 30.990.450,- atau 100% untuk realisasi keuangan dan realisasi fisik.

Permasalahan

- a) Masih adanya sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan namun belum mempunyai izin dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP).
- b) Toko Obat yang menjual obat daftar K, hal ini disebabkan karena pemilik sarana yang tidak mengetahui tentang peraturan dan tenaga kefarmasian yang tidak stand by atau tidak bekerja lagi di toko obat.
- c) Masih ada beberapa jenis izin tenaga kesehatan dan klinik yang belum dilimpahkan wewenangnya untuk penerbitan izin pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP)
- d) Melakukan pelayanan di luar wewenang.

Solusi:

- a) Memberikan pembinaan kepada pemilik sarana kesehatan yang melakukan praktik mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) terkait izin yang belum dilimpahkan kewenangannya.
- c) Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat terkait izin praktek klinik dan tenaga kesehatan sehubungan dengan regulasi terbaru.



f. Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA)

Program dan Kegiatan

a. Workshop Persiapan Akreditasi Laboratorium

Kesehatan

- a. Kebijakan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
- b. Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan
- c. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK bidang Kesehatan
(PMK No.3 Thn. 2019)
- d. Penyusunan Dokumen Akreditasi Labkes
- e. Audit Internal
- f. Membangun Komitmen
- g. Standar dan Parameter Akreditasi Labkes
- h. Self Assesment
- i. Tour the Lab.

b. Bimbingan Teknis Akreditasi Laboratorium Kesehatan

- a. Melengkapi SOP Pemeriksaan
- b. Format SOP diperbaiki
- c. Pelaksanaan uraian tugas dibuktikan dengan Buku Kerja (Buku Harian)
- d. Perbaiki sistim control social (KepuasanPelanggan), sehingga dapat dipantau
- e. Perbaiki Pedoman Program orientasi Pegawai
- f. Lengkapi evaluasi dan rencana tindak lanjut
- g. Lengkap sertifikat pelatihan baik internal maupun eksternal
- h. Lengkapi evaluasi Pemantapan mutu internal

c. Bimbingan Teknis Akreditasi Laboratorium

Kesehatan li

- a. Melengkapi proses desiminasi
- b. Perbaiki beberapa SOP
- c. Melengkapi perencanaan tahunan
- d. Bedakan struktur organisasi dan struktur dengan Tupoksi
- e. Rapikan pengetikan SK



-
- f. Lengkapi evaluasi dan rencana tindak Lanjut
 - g. Lengkapi evaluasi Pemantapan mutu internal dengan grafik Wesdgart
 - h. Survey Akreditasi Laboratorium Kesehatan

Realisasi Pelaksanaan Program

Dana yang dialokasikan untuk program Akreditasi Labkesda dari DAK Non Fisik sebesar Rp. 400.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.275.889.058 ,- sisa Anggaran Rp.124.110.942,-

Permasalahan

- a) Pada Bimtek 1 dan ke 2 pembimbing yang datang tidak sesuai dengan perencanaan (dalam perencanaan 3 orang pembimbing yang datang 2 orang pembimbing) sehingga dana honor dan akomodasi nara sumber berlebih.
- b) Dana untuk pendampingan berlebih karena pendamping dari perovinsi tidak datang dikarenakan pendamping akreditasi provinsi untuk laboratorium hanya satu , yang mendamping 5 labkes di Sumbar yang ikut akreditasi.

Solusi

Untuk proses akreditasi dimasa yang akan datang diharapka kegiatan akreditasi laboratorium sebaiknya menyesuaikan dengan rencana anggaran yang sudah dibuat, karena banyak Labkes yang belum di akreditasi sebaiknya di tahun yang akan datang Kemenkes menunjuk beberapa orang pendamping di Provinsi, dan ditentukan Labkes yang didampinginya sehingga pendampingan dari Provinsi berjalan maksimal.



11. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

a. Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil Dan Sunatan Masal

Program dan Kegiatan

Arah tujuan pembangunan kesehatan antara lain untuk meningkatkan jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat di daerah terpencil. Dalam rangka meningkatkan jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan tersebut perlu dilaksanakan pelayanan kesehatan di daerah terpencil.

Tujuan :

- a. Terlaksananya pelayanan kesehatan daerah terpencil dan sunatan massal pada anak dari keluarga miskin
- b. Terlaksananya pemberian makanan penunjang (PMT) bagi ibu hamil dan menyusui, bayi 6-12 bulan, anak balita dan lansia

Realisasi Pelaksanaan kegiatan

Dana yang dialokasikan untuk program Yancil sebesar Rp. 27.835.150,- dengan realisasi sebesar Rp. 27,813,250 ,- Realisasi Anggaran 99,9 %.

Permasalahan

- a. Kekurangan tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan dikarenakan antusias warga yang tinggi
- b. Masih ada daerah terpencil di Kabupaten Dharmasraya yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan daerah terpencil tahun ini

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh Puskesmas dan Organisasi Profesi terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan daerah terpencil
- b. Pelaksanaan pelayanan daerah terpencil dilakukan bergantian setiap tahun



12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

a. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Program dan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada puskesmas Sungai Rumbai, Puskesmas Koto Besar dan puskesmas Sungai Limau(Lanjutan) serta pembayaran perencanaan dan pengawasan pembangunan/rehabilitasi tahun 2018. Kegiatan Rehabilitasi pada puskesmas Sungai Rumbai, Puskesmas Koto Besar dan puskesmas Sungai Limau(Lanjutan) telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100 %. Tetapi pembayaran perencanaan dan pengawasan pembangunan/rehabilitasi tahun 2018 tidak terealisasi karena tidak dilengkapinya persyaratan administrasi oleh pihak ketiga.

Realisasi Pelaksanaan kegiatan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 671.591.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 619.788.300,-

b. Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)

Program dan Kegiatan

Kegiatan ini berupa pengadaan Ambulance, alat kesehatan, pengadaan alat IPAL dan kontruksinya. Semua pekerjaan terealisasi dengan capaian fisik 100 %.

Realisasi Pelaksanaan kegiatan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.781.056.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.566.577.002,-

c. Pembangunan Pagar Puskesmas

Program dan Kegiatan

Kegiatan ini berupa Pembangunan pagar puskesmas Tiumbang, Puskesmas Padang Laweh, Puskesmas Koto



Gadang. Semua pekerjaan terlaksana dengan baik dengan capaian fisik 100 %.

Realisasi Pelaksanaan kegiatan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 500.096.004,- dengan realisasi sebesar Rp. 498.212.324,90,-

d. Pembangunan Pustu/Polindes/Poskesri

Program dan Kegiatan

Kegiatan ini berupa Pembangunan Pustu Koto Ranah (Lanjutan). Pekerjaan terlaksana dengan baik dengan capaian Fisik 100 %. Realisasi Pelaksanaan kegiatan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 198.389.000,-

e. Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan

Program dan Kegiatan

Kegiatan ini merupakan pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan di puskesmas Koto Gadang dan puskesmas Beringin Sakti. Semua pekerjaan terlaksana dengan baik dengan capaian fisik 100 %.

Realisasi Pelaksanaan kegiatan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 754.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 665.951.776,20,-

13. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

a. Pembangunan Rumah Sakit

Program dan Kegiatan :

Program ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan maksimal serta merata bagi masyarakat meliputi :

1. Pembangunan Gedung Laboratorium
2. Pembangunan Ruang Operasi
3. Pembangunan Ruang Radiologi
4. Rehabilitasi IGD



Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan :

Untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 5.476.322.053,- dari DAK Dinas Kesehatan Kab. Dharmasraya. Realisasi capaian keuangan sebesar Rp. 5.188.628.000,- dengan realisasi capaian fisik sebesar 94,8 %.

Permasalahan :

- a) Secara umum tidak terjadi kendala berarti di lapangan. Hanya saja terjadi keterlambatan terkait tenaga kerja yang berakibat terlambatnya pencairan di termin kedua 8%.
- b) Sampah material bangunan menumpuk sehingga sedikit menghambat pelayanan.
- c) Terjadi keterlambatan alat dan material bangunan.

Solusi :

- a. Mengganti tenaga kerja yang berkompeten di bidangnya, sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan dengan efektif.
- b. Memanfaatkan sampah material berupa kayu yang terbuang untuk membuat perabotan Rumah Sakit, seperti rak pamlet obat dan meja computer.
- c. Kontraktor menjalin kerjasama dengan pihak terkait penyedia alat dan material bangunan agar semua alat dan material yang dibutuhkan cepat tersedia. Disamping itu pekerja juga memaksimalkan waktu yang tersedia sehingga pekerjaan bias selesai tepat waktu.

b. Pengadaan Ambulan/ Mobil Jenazah**Program dan Kegiatan :**

Program pengadaan ambulance terdiri dari 2 (dua) unit kendaraan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk Pengangkutan penderita/pasien untuk menyelamatkan nyawa dan diperkirakan tidak akan timbul kegawatan selama dalam perjalanan. peran ambulan gawat darurat khususnya dalam pelayanan gawat darurat pra rumah



sakit merupakan suatu sistem yang sangat dibutuhkan dan diperlukan dalam mengurangi timbulnya korban yang sia sia.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan :

Untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 947.184.000,- dari DAK Dinas Kesehatan Kab. Dharmasraya. Realisasi capaian keuangan sebesar Rp. 936.100.000,- dengan realisasi capaian fisik sebesar 98,83 %

Permasalahan :

Dalam pengadaan ambulance hampir tidak ditemukan kendala karena proses pengadaan mulai pemesanan sampai unit datang tidak ditemukan permasalahan. Tetapi pada tahap pemeliharaan terjadi kendala antara lain:

Subsidi anggaran APBD/dana BLUD sering terlambat di awal tahun sehingga pemeliharaan kendaraan harus menunggu, sedangkan kendaraan harus dilakukan pemeliharaan.

Solusi :

- a) Bekerjasama dengan pihak bengkel, sehingga proses pemeliharaan kendaraan bisa dilakukan dahulu tidak menunggu anggaran pemeliharaan cair.
- b) Melakukan pemeliharaan kendaraan secara berkala agar kondisi kendaraan tetap baik dan maksimal.

c. Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit (DAK)

Program dan kegiatan :

Pengadaan alat Rumah Sakit merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memudahkan pelaksanaan perawatan pasien dan sistem manajemen di Rumah Sakit. Peralatan yang diadakan di Rumah Sakit tergolong canggih, meliputi :

- 1. Pengadaan Sistem Informasi untuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- 2. Pengadaan alat kesehatan perawatan meliputi :



-
3. Alat Kesehatan IGD
 4. Alat Kesehatan rawat Jalan
 5. Alat Kesehatan Instalasi Radiologi
 6. Alat Kesehatan Instalasi Laboratorium
 7. Alat Kesehatan Central Sterile Service Departement (CSSD)
 8. Alat Kesehatan Instalasi Laundry

d. Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel/Genset

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan :

Untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 8.094.068.387,- dari DAK Dinas Kesehatan Kab. Dharmasraya. Realisasi capaian keuangan sebesar Rp. 7.351.625.227,- dengan realisasi capaian fisik sebesar 90,8 %.

Permasalahan :

- a. Terjadi keterlambatan administrasi dalam pengadaan genset terkait surat pernyataan kesesuaian spesifikasi, karena terjadi perbedaan kode barang.
- b. Dalam pengadaan SIMRS, terkait warna unit berdasarkan spesifikasi tidak sesuai dengan warna unit yang tersedia. Sehingga harus adendum.
- c. Terjadi sedikit kendala dalam proses pemeriksaan barang pengadaan oleh tim teknis karena jarak tim teknis cukup jauh ke Rumah Sakit, sehingga proses pemeriksaan barang sedikit terlambat.

Solusi :

- a. Adendum spesifikasi barang bahwa spesifikasi barang sesuai hanya kode barang yang tidak sama.
- b. Adendum dengan dilampirkan surat pernyataan bahwa tidak tersedia warna unit sesuai dengan spesifikasi. Yang ada adalah warna lain dengan spesifikasi unit yang sama.
- c. Mengatur jadwal tim teknis ke Rumah Sakit, sehingga proses pemeriksaan bias berjalan baik dan efektif.



Untuk kedepannya pihak UPT Rumah Sakit akan membuat tim teknis sendiri, sehingga proses pemeriksaan barang bisa berjalan lancar dan lebih efektif.

14. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu

Program dan Kegiatan

Kegiatan Kemitraan Pengobatan bagi pasien Kurang Mampu adalah jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Dharmasraya. Peserta yang didaftarkan oleh Dinas Sosial ke BPJS Kesehatan adalah peserta penerima bantuan iuran (PBI). Pada awal tahun anggaran jumlah peserta PBI adalah 24.075 jiwa.

Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Alokasi anggaran untuk kegiatan kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.372.885.400,- dengan realisasi keuangan Rp 5.350.308.741,- (94%) dan dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 22,576,659,- (6%) dikarenakan adanya kelebihan bayar premi kepada BPJS kesehatan pada tahun 2018 dan dikembalikan lagi oleh BPJS kesehatan pada pembayaran premi tahap II bulan Desember 2019 dan menjadi tambahan saldo pada tahun 2019 sehingga pagu premi melebihi dengan jumlah kepesertaan tahun 2019.

Permasalahan:

1. Masih ada penduduk miskin yang belum terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (Peserta PBI).
2. Data hasil validasi masih banyak yang tidak punya NIK dan tidak berdasarkan by name by address.
3. Masih terdapat Pekerja Swasta/masyarakat mampu yang terdaftar menjadi peserta PBI.
4. Tidak ada pelaporan kepesertaan PBI yang sudah meninggal untuk menon aktifkan kartu kepesertaannya.



Solusi:

Harus dilakukan kembali pendataan penerima bantuan iuran agar tepat sasaran dan didapatkan data yang lengkap dengan NIK dan berdasarkan by name by address dan dilakukan rekonsiliasi 1 kali 3 bulan antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan Solok.

15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia**Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia (DAK Non Fisik)****Program dan kegiatan**

Program Pemeliharaan kesehatan Lansia merupakan salah satu program yang mendeteksi permasalahan kesehatan Lansia melalui posyandu Lansia di 14 Puskesmas, di mana kegiatan program lansia tahun 2019 meliputi pelatihan Geyatrik dan gizi Lansia peserta untuk pelatihan ini adalah pengelola Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Kab Dharmasraya. Diharapkan dengan ada pelatihan Lansia ini kesehatan Lansia dapat terdeteksi dari dini dan Lansia lebih aktif dan ceria dalam menghabiskan masa tuanya.

Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Jumlah dana program ini sebesar Rp 15.955.000,- dengan realisasi keuangan Rp 15.228.500,- (95%) dan dana tersisa sebesar Rp 726.500,-. Dana yang tidak terealisasi sebesar 10.1 % yaitu dana untuk perawatan kasus gizi buruk di RSUD dan TFC karena tidak kasus gizi buruk yang dirawat di TFC dan RSUD.

Permasalahan

- a) Masih rendahnya kunjungan Lansia ke posyandu Lansia terutama Lansia Laki-laki
- b) Penyakit terbanyak pada Lansia adalah masalah tekanan darah, dan masalah dengan penglihatan dan pendengaran.
- c) Sering terjadi pergantian pada pengelola Lansia
- d) Kurangnya dukungan lintas program dan lintas sektor.



Solusi

- a) Menyesuaikan jadwal posyandu Lansia dengan aktifitas Lansia
- b) Memastikan lansia terpantau kesehatanya secara menyeluruh
- c) Bekerjasama dengan pengelola gizi pada pemantauan gizi Lansia

16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

a. Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus Resiko Tinggi pada Maternal Perinatal

Program dan Kegiatan

Audit Maternal Perinatal merupakan salah satu program upaya Kementerian Kesehatan untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak. Audit Maternal Perinatal bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu Pelayanan KIA melalui upaya penerapan tata kelola klinik yang baik. Kegiatan ini diharapkan dapat menggali permasalahan yang terkait dengan kejadian kesakitan maupun kematian yang disebabkan masalah pasien/keluarga, petugas kesehatan, manajemen pelayanan, sistem rujukan maupun kebijakan pelayanan. Audit Maternal dan Perinatal yang dilaksanakan di Kabupaten melibatkan Tim Pengkaji yang sudah di SK kan oleh Bupati dengan menghadirkan Narsumber Ahli (Dokter Spesialis) dalam kegiatan tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini di Tahun 2019 sebanyak 3 kali setahun. Kegiatan ini diawali dengan Pengkajian Kasus Kematian Ibu maupun kasus kematian neonatus yang melibatkan seluruh Tim Pengkaji, dan selanjutnya dilakukan pembelajaran dengan menghadirkan pengelola KIA di Puskesmas, Bidan Koordinator di Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas.



Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Jumlah Pagu Dana Kegiatan ini sebesar Rp.28.430.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.28.385.000,- (99,8%).

Permasalahan

- a) Masih Ada kasus Kematian Ibu sebanyak 6 orang
- b) Masih ada kasus Kematian Bayi
- c) Penyesuaian jadwal dengan dokter Spesialis
- d) Anggaran yang kurang (Minimal pelaksanaan 1 x 3 bulan)
- e) Kompetensi Petugas Kesehatan
- f) Manajemen Pelayanan
- g) Sistem Rujukan

Solusi

- a. Menambah pagu dana untuk kegiatan AMP minimal 3x setahun
- b. Penyusunan Kembali Jadwal pertemuan dengan Tim Pengkaji
- c. Pembaharuan SK Bupati
- d. Perbaiki Sistem Rujukan
- e. Mengadakan Pelatihan – Pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi petugas kesehatan dalam menangani kasus kegawatdaruratan Maternal dan neonatal
- f. Perbaiki Manajemen Pelayanan.

b. Pertemuan review pemantapan P4K Nagari

Program Dan Kegiatan :

Patwal bumil (pria tangguh kawal ibu hamil)

Kegiatan Patwal Bumil ini adalah salah satu program inovasi yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten. Yang mana kegiatan ini merupakan salah satu komponen dari P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi). Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan peran suami



maupun pemuka masyarakat dalam mendeteksi kasus-kasus ibu hamil dengan resiko tinggi, selain itu para suami maupun pemuka masyarakat yang dianggap sebagai pengambil keputusan dalam keluarga mampu nantinya dalam mengambil keputusan yang tepat dalam kasus yang memerlukan rujukan pada ibu hamil dan bersalin resiko tinggi sehingga ibu tidak mengalami keterlambatan dalam rujukan dan bayi yang dilahirkan selamat.

Pelaksanaan Kegiatan P4K di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 belum berjalan dengan maksimal karena ada di beberapa nagari belum ada data pendonornya, ambulan desa, tabulin maupun dana sosial yang diperuntukkan untuk Ibu hamil.

Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Jumlah Pagu Dana Kegiatan ini sebesar Rp. 38.975.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 38.949.500 (99,9%).

Permasalahan :

- a. Masih ada keterlambatan dalam rujukan karena para pengambil keputusan terlalu lama berembuk
- b. Masih ada Nagari yang belum mempunyai data pendonor
- c. Masih ada Nagari yang belum mempunyai tabulin dan dasolin
- d. Kader Pendamping ibu hamil resti yang tidak berjalan dengan baik
- e. Kurangnya peran kader
- f. Ibu dan masyarakat masih ada yang belum paham tentang tujuan Notifikasi Stiker P4K

Solusi

- a. Pemberian pemahaman dan edukasi kepada para pengambil kebijakan tentang tanda bahaya ibu hamil, bersalin maupun nifas



-
- b. Membentuk tim PATWAL BUMIL (Pria Tangguh Kawal Ibu Hamil)
 - c. Melakukan Kegiatan Pemantapan P4K di nagari
 - d. Menyusun Perangkat P4K nagari
 - e. Membuat daftar data pendonor darah di nagari dan di tempel di kantor wali nagari dan pustu maupun polindes
 - f. Peningkatan peran kader pendamping dalam penemuan dan pemantauan kasus resti pada ibu hamil
 - g. Melakukan Edukasi kepada ibu dan masyarakat sehubungan dengan P4K di Posyandu, Kelas ibu hamil, puskesmas, pustu, poskesri maupun di polindes

17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

a. Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat di UPT Puskesmas dan Labkesda

Program dan Kegiatan :

Kegiatan ini merupakan dukungan dana untuk operasional Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) selama 1 tahun dan adanya pembelian bahan obat-obatan serta pembelian alat laboratorium . Alokasi dana untuk mendukung kegiatan ini melalui APBD dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan :

Anggaran yang ada sebesar Rp. 897.863.823,- dengan realisasi Rp. 724.713.724,-.

Permasalahan :

Tidak terealisasinya beberapa pengadaan /pembelian alat laboratorium setelah adanya DPA perubahan.

Solusi :

Mempercepat pelaksanaan pengadaan/pembelian alat laboratorium



b. Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di UPT Puskesmas dan Instalasi Gudang Farmasi**Program dan Kegiatan:**

Operasional di UPT Instalasi Gudang Farmasi meliputi biaya belanja peralatan dan barang yang diperlukan dalam rangka operasional UPT agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya, antara lain: biaya peralatan kantor, listrik, air, pemeliharaan kendaraan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke puskesmas. Hasil dari kegiatan ini adalah lancarnya pelaksanaan operasional UPT Instalasi Gudang Farmasi sehingga kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas dapat terpenuhi.

Sasaran dari kegiatan ini adalah UPT Instalasi Gudang Farmasi yang mempunyai tugas pokok memenuhi ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan seluruh puskesmas dan jaringannya dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan :

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 242.261.824,- dengan realisasi keuangan Rp. 221.572.185,-.

c. Operasional program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)

Terhitung 2 Januari 2018 ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang penetapan unit pelaksana teknis Puskesmas sebagai unit kerja untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah secara bertahap di Kabupaten Dharmasraya. Penggunaan anggaran UPT Puskesmas mengacu pada Permendagri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014



tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran yang tersedia Rp. 10. 518. 389. 803,- dengan realisasi sebesar Rp. 10. 299.153. 850, 83.

d. Operasional rumah sakit umum daerah type D Sungai Rumbai

Program dan kegiatan :

Program ini dilaksanakan dengan tujuan terpenuhinya operasional Rumah Sakit Sungai Rumbai dalam peningkatan pelayanan publik meliputi :

Belanja barang dan jasa sebagai penunjang kegiatan meliputi ATK, BBM, peralatan kebersihan, alat kesehatan habis pakai kedokteran, obat-obatan, telepon dan Speedy, Listrik, cetak blangko pelayanan, makan minum pasien dan perjalanan dinas.

- a. Bimbingan teknis BLUD dan akreditasi Rumah Sakit
- b. Belanja Pemeliharaan meliputi pemeliharaan gedung dan bangunan serta kendaraan roda 4.
- c. Belanja modal meliputi belanja alat kantor, alat rumah tangga, alat pendingin, alat dapur, home use, pengadaan computer, pengadaan alat kedokteran, pembangunan lanjutan rawat inap lantai 2 dan peningkatan daya listrik

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan :

Untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 849.293.500,- dari APBD Dinas Kesehatan Kab. Dharmasraya. Realisasi capaian keuangan sebesar Rp. 816.729.954,- dengan realisasi capaian fisik sebesar 96,2 %.

Permasalahan :

- a) Dalam kegiatan operasional Rumah Sakit, kendala secara umum adalah belum terpenuhinya sarana prasarana dan sumber daya manusia, karena



Rumah Sakit Sungai Rumbai masuk tahun kedua operasional, sehingga system pelayanan dan manajemen sedang dimaksimalkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh subsidi APBD yang belum bisa mengakomodir operasional Rumah Sakit.

- b) Alat Radiologi dan Genset belum berizin karena belum ada anggaran dalam pengurusan izin operasional.
- c) Dalam pembelian obat, distributor tidak menindaklanjuti penunjukkan oleh Penyedia/Pabrikan sehingga ada beberapa obat yang tidak terpenuhi tepat waktu.
- d) Adanya diskon belanja penambahan daya listrik dalam program gebyar kemerdekaan, sehingga terjadi sisa lebih pagu anggaran Rp. 17.040.000,-. Hal tersebut berpengaruh terhadap capaian realisasi anggaran.
- e) Belanja listrik terjadi sisa lebih pagu anggaran Rp. 4.000.000,-, dikarenakan belanja listrik Rumah Sakit tidak melebihi pagu yang dianggarkan.

Solusi :

- a) Membuat standar operasional prosedur dan dipedomani dalam setiap tindakan dan kegiatan, sehingga system pelayanan dan manajemen dapat berjalan dengan maksimal.
 - b) Membuat proposal dana melalui BLUD/subsidi APBD untuk pengurusan izin operasional Radiologi dan Genset dan operasional lainnya.
 - c) Mengupayakan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang belum dapat dipenuhi oleh Penyedia/Pabrikan melalui permintaan Buffer Stok ke Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan
 - d) Selalu koordinasi dengan pihak terkait dengan mengevaluasi belanja setiap bulan dalam
-



penganggaran belanja listrik, sehingga belanja lebih efektif dan tidak terjadi SILPA.

18. Program Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja

a. Peningkatan dan Pengembangan Kesehatan Anak dan Remaja

Untuk mengatasi masalah kesehatan remaja diperlukan pendekatan yang adolescent friendly (peduli Remaja), baik dalam penyampaian informasi maupun dalam penyediaan layanan kesehatan . Hal ini dilakukan dengan pengembangan puskesmas menjadi puskesmas yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan masalah dan memenuhi kebutuhan remaja. Guna meningkatkan wawasan dan keterampilan petugas kesehatan dalam memberikan pembinaan dan pelayanan kesehatan kepada remaja dan juga meningkatkan kemampuan remaja agar dapat menjadi konselor sebaya yang mampu berperan strategis sebagai mediator atau penghubung antara remaja dan petugas kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, perlu dilaksanakan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) bagi petugas kesehatan dan konselor sebaya. Peningkatan wawasan dan keterampilan pada petugas PKPR dan konselor sebaya ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kelompok remaja, serta memberikan pengaruh baik terutama dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan remaja.

Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan :

Jumlah dana program ini dari Dana DAK non Fisik sebesar Rp. 4.012.000,- realisasi Rp. 3.109.750,-



Permasalahan :

- a) Masih kurangnya pemahaman pemuda di karangtaruna tentang arti pentingnya Peduli Kesehatan Remaja
- b) Kurangnya koordinasi, kerjasama dan dukungan lintas program dan lintas sektor.
- c) Masih banyaknya para pemuda dikarang taruna yang belum mendapatkan pelatihan PKPR.
- d) Kurangnya sosialisasi tentang kesehatan remaja kepada tokoh masyarakat dan karang taruna di nagari.
- e) Masih rendahnya kunjungan remaja ke puskesmas
- f) Masih kurang aktif nya remaja dalam mengeluarkan pendapatnya dalam menggerakkan k
- g) arang taruna dan posyandu remaja
- h) Peserta yang hadir dalam kegiatan kader kesehatan remaja kurang disiplin dalam kehadirannya

Solusi :

- a) Melakukan koordinasi dan kerjasama Bidang Kesra, Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama dalam pembinaan sekolah sehat mulai dari pembentukan Tim Pembina UKS tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten yang beranggotakan dari berbagai lintas sektor terkait.
- b) Mengupayakan pelatihan KPR dengan berbagai lintas sektor termasuk dengan Bidang Kesra yang memiliki anggaran dana untuk mengadakan pelatihan UKS bagi tenaga guru dan tenaga kesehatan.
- c) Melakukan desiminasi informasi kepada Tim Pembina UKS kecamatan agar tokoh masyarakat ikut berperan terutama wali nagari, ninik mamak



tentang kesehatan remaja sehingga permasalahan kesehatan pada remaja dapat dikurangi.

- d) Belum terlaksananya sosialisasi Manajemen terpadu Pelayanan Kesehatan remaja di fasilitas kesehatan tingkat pertama
- e) Melakukan pembinaan terhadap peer konselor/konselor sebaya baik di dalam maupun di luar sekolah.
- f) Mengalokasikan dana untuk membuat posyandu remaja, membuat alur pelayanan kesehatan remaja dan membuat ruangan konsultasi remaja di karangtaruna.
- g) Mendorong pihak sekolah agar menganggarkan dari dana BOS dan dana komite serta memfasilitasi sekolah dalam pemenuhan sarana dan prasarana berupa obat-obatan dan P3K.
- h) Harus ada kominmen yang kuat untuk kehadiran remaja dalam pertemuan

19. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di bagian keuangan dan aset.

2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keuangan dan Aset
adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam bentuk monitoring dan evaluasi dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke Puskesmas se-Kabupaten Dharmasraya dengan cara melakukan pertemuan dengan pengelola keuangan dan aset pada Puskesmas.

**Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan**

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Output	%
1.	Monitoring dan Evaluasi Keuangan dan Aset	100.562.849,-	100.440.342,-	1 Dokumen	99,88
TOTAL		100.562.849,-	100.440.342,-		99,88

Permasalahan

Secara keseluruhan realisasi anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi keuangan dan aset tidak ada permasalahan yang ditemui walaupun penyerapan anggaran tidak mencapai 100% tetapi mencapai 99,88%. Hal ini disebabkan karena pembayaran biaya belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah tidak bisa di realisasikan secara keseluruhan.

20. Program Jaminan Persalinan (Jampersal)**Rumah tunggu bumil,bulin dan bufas (DAK Non Fik)****Program dan kegiatan :**

Program jaminan persalinan (jampersal) adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Jampersal diperuntukkan bagi seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan.

Tujuan :

1. Meningkatkan akses pemeriksaan kehamilan (antenatal), persalinan dan pelayanan nifas dan bayi baru lahir (postnatal) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan menghilangkan hambatan finansial dalam rangka menurunkan AKI dan AKB.



2. Memberikan kemudahan akses pemeriksaan kehamilan (antenatal), persalinan dan pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir ke tenaga kesehatan.
3. Mendorong peningkatan pemeriksaan kehamilan, persalinan dan pelayanan nifas ibu dan bayi baru lahir ke tenaga kesehatan.
4. Mengurangi hambatan finansial yang dihadapi masyarakat yang selama ini tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan :

Dana yang dialokasikan untuk program Jampersal sebesar Rp. 1.916.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.075.662.981,- Realisasi Anggaran 0,6 %.

Permasalahan :

1. Masih adanya masyarakat yang belum terpapar informasi tentang program jampersal
2. Masih ada beberapa puskesmas yang belum memanfaatkan fasilitas rumah tunggu yang sudah dianggarkan di Dinas Kesehatan Kabupaten.

Solusi :

1. Meningkatkan sosialisasi tentang program jampersal kepada masyarakat baik ditingkat kabupaten maupun di tingkat Puskesmas.
2. Membuat komitmen dengan seluruh Kepala Puskesmas untuk pemanfaatan fasilitas rumah tunggu sehingga mempermudah dan membantu keluarga yang menunggu pasien saat proses maupun pasca persalinan.

21. Program Bantuan Operasional Kesehatan Dilaksanakan Melalui Kegiatan

a. Bantuan operasional kesehatan (Manajemen)

Program dan kegiatan :

DAK Nonfisik bidang Kesehatan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang



merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

Kegiatan dukungan manajemen satuan kerja pengelola BOK dan jampersal di dinas kesehatan kabupaten/kota, kegiatan dukungan manajemen dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan satuan kerja pengelola BOK termasuk pengelola BOK dipuskesmas sebagai bagian dari satuan kerja Dinas Kesehatan kabupaten/kota meliputi : pengelolaan satker, administrasi satker, pembinaan, pelaporan, sosialisasi, koordinasi dan verifikasi laporan BOK, termasuk biaya langganan internet untuk penyelenggaraan sistem informasi kesehatan di kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, dana dukungan manajemen dapat disusun dan diusulkan menjadi kegiatan tersendiri dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Tujuan :

1. Mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan bersumber DAK untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan.
2. Mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Provinsi/kabupaten/Kota.
3. Mendukung Pelaksanaan Rencana Kerja pemerintah (RKP).

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan :

Dana yang dialokasikan untuk program Perkesmas sebesar Rp. 605.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.603.954.495 ,- Realisasi Anggaran 99,8% .

Permasalahan :

Masih kurangnya pengetahuan petugas puskesmas tentang pemanfaatan dana BOK



Solusi :

Meningkatkan pemberian Informasi tentang pemakaian dana BOK kepada petugas puskesmas.

b. Bantuan operasional kesehatan puskesmas (BOK)

Program dan Kegiatan:

BOK Merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional bidang kesehatan, khususnya kegiatan promotif dan preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.

Pemanfaatan BOK bukan hanya untuk operasional puskesmas dan fungsi manajemen tetapi juga untuk peningkatan peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota : 1. Sebagai fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat (UKM) sekunder termasuk Balai Kesehatan Masyarakat sebagai Puskesmas. Kegiatan peningkatan distribusi obat ke puskesmas.

Tujuan :

1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja, yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan keluarga menuju keluarga sehat.
2. Mendukung pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan obat, vaksin dan BMHP yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan dasar pemerintah;
3. Meningkatkan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder dan terseier dalam mendukung pelayanan upaya kesehatan masyarakat primer di puskesmas.
4. Menyelenggarakan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga
5. Menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif utamanya pelayanan diluar gedung.



6. Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat
7. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral dalam mendukung program kesehatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan :

Dana yang dialokasikan untuk program BOK Puskesmas sebesar Rp. 9.373.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.097.524.300 ,- dengan realisasi 97.06 %.

Permasalahan :

Masih kurangnya pengetahuan petugas puskesmas tentang pemanfaatan dana BOK

Solusi :

Meningkatkan sosialisasi tentang pemanfaatan dana BOK Puskesmas.

c. Bantuan operasional kesehatan E-Logistik Farmasi

Program dan Kegiatan :

Program bantuan operasional kesehatan melalui E-logistik Farmasi meliputi kegiatan distribusi obat dari UPT. Instalasi Gudang Farmasi ke seluruh Puskesmas dan pemanfaatan aplikasi sistem e-logistik obat dan perbekalan kesehatan di UPT. Instalasi Gudang Farmasi. Kegiatan distribusi obat yang dilaksanakan meliputi pengambilan obat, repacking dan pengantaran ke puskesmas dengan memanfaatkan sistem e-logistik yang dijalankan oleh operator. Hasil dari kegiatan ini adalah terdistribusinya obat dan perbekalan kesehatan sehingga ketersediaannya di puskesmas dan jaringannya dapat terjamin untuk memberikan pelayanan kesehatan pada seluruh masyarakat.

Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah 14 Puskesmas yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Distribusi obat dan perbekalan kesehatan diawali dari permintaan puskesmas melalui laporan rutin LPLPO yang dianalisa di UPT.

Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten. LPLPO puskesmas



merupakan salah satu data dasar yang diinput pada sistem e-logistik. Sistem e-logistik dijalankan oleh seorang operator yang bertanggung jawab terhadap implementasi sistem hingga integrasi data ke bank data Kementerian Kesehatan. Pemanfaatan sistem e-logistik ini sangat membantu dalam pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di UPT. Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 109.971.000- dengan realisasi keuangan Rp. 109.266.000,- (99,3%).

Permasalahan :

- a. Beberapa puskesmas masih terlambat untuk mengirimkan LPLPO, sehingga proses distribusi obat dan perbekalan kesehatan terganggu.
- b. Masih ada beberapa LPLPO puskesmas yang datanya tidak valid akibat laporan rutin dari unit-unit puskesmas yang kurang tepat.

Solusi

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepala Puskesmas dan Pengelola obat terkait untuk pengiriman LPLPO tepat waktu.
- b. Melakukan pembinaan dan supervisi pada pengelola obat puskesmas terhadap format LPLPO yang telah diberikan agar dapat dimanfaatkan untuk menjamin validitas data.
- c. Melakukan rekonsiliasi terhadap data-data LPLPO seluruh puskesmas.



B. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yaitu :

1. Kerjasama antar daerah

1. Kebijakan : Permenkes RI No. 71 th 2016 tentang juknis Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan th 2017
2. Kegiatan : Rumah Tunggu Bumil, Bulin dan Bufas
3. Realisasi : Pemberian Pelayanan bagi ibu hamil pelaksanaan /bersalin tidak mampu yang belum kegiatan mempunyai Jaminan Pembiayaan oleh JKN/KIS atau Jaminan Kesehatan lainnya, berdasarkan Permenkes RI No 71 th 2016
4. Permasalahan : Masih rendahnya pemanfaatan dana jampersal oleh masyarakat, dikarenakan masih rendahnya pemanfaatan RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) oleh Ibu Hamil /Bersalin dan rendahnya cakupan ibu hamil/Bersalin yang memanfaatkan dana jampersal, disamping itu sudah banyak masyarakat yang terjamin oleh Asuransi Kesehatan
5. Solusi : Perlu menetapkan sasaran dengan tepat dan perlu menyusun anggaran yang sesuai dengan sasaran

2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga

1. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Solok tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
 - a. Kebijakan dan Kegiatan
Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
 - b. Realisasi Pelaksanaan kegiatan :



- 1) Kegiatan berupa Pembayaran Premi Peserta Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (PBI Daerah)
- 2) Jumlah Peserta sebanyak 24.075 jiwa dengan besaran premi Rp. 23.000,- dan Pembayaran untuk bulan Januari s/d Desember 2018
- 3) Premi yang dibayarkan bersumber dari dana Sharing APBD Provinsi Sumatera Barat (20%) dan APBD Kabupaten Dharmasraya (80%) dengan Jumlah pembayaran sebesar Rp. 6.644.700.000,- X 80% = Rp. 5.315.760.000,-
- 4) Pelaksanaan pembayaran dilaksanakan secara 2 (dua) tahap yakni semester I (bulan Mei) sebesar Rp. 2.657.880.000,- dan semester II (bulan Desember) sebesar Rp. 1.664.953.902,- dengan sisa Rp. 992.926.098 dibayar langsung dari pajak rokok ke BPJS Pusat.

c. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat permasalahan

Urusan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh adalah:

RSUD Sungai Dareh

1. Urusan Kesehatan

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Program dan Kegiatan :

Kegiatan ini meliputi honorarium pegawai honorer/tidak tetap, dan belanja perangko, materai dan benda pos lainnya.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 635.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 554.965.000,- (87,33%).

Permasalahan:

Secara keseluruhan realisasi anggaran kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan tidak ada permasalahan yang ditemui.

Solusi:



B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dilaksanakan melalui kegiatan :

b. Pengadaan Mebeleur

Program dan Kegiatan :

Kegiatan ini meliputi belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meubelair

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.100.891.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 65.814.010,- (5, 98%).

Permasalahan:

Rendahnya capaian fisik hanya 40,29% disebabkan karena keterlambatan pengiriman barang yang disebabkan proses pabrik yang overload. Dan diberi tambahan waktu penyelesaian pekerjaan selama 50 hari dengan dikenakan denda 1/1000 perhari, sedangkan untuk realisasi keuangan masih rendah sekitar 5% karena pembayaran kontrak yang dilaksanakan 100% setelah pekerjaan selesai

Solusi:

Dilaksanakan monitoring dan percepatan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia yang diawasi oleh kontraktor pengawas dan pengelola kegiatan secara intensive

c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (lanjutan)

Program dan Kegiatan :

Kegiatan ini meliputi Honorarium tim pengadaan barang dan jasa , belanja modal peralatan dan mesin, pengadaan alat kantor lainnya seperti genset dan Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat pendingin

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.732.882.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.722.261.000,- (99,39%).



Permasalahan:

Secara keseluruhan realisasi anggaran kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor (lanjutan) tidak ada permasalahan yang ditemui.

Solusi : -

d. Pengadaan Instalasi Air Bersih

Program dan Kegiatan:

Kegiatan ini meliputi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan instalasi air minum /air bersih

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 288.800.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 10.580.000,- (3,66%).

Permasalahan:

Kegiatan pengadaan air bersih sudah terlaksana 100% hanya karena pada akhir tahun terjadinya kekurangan anggaran pada kas daerah, maka realisasi anggaran belum dapat dibayarkan.

Solusi :

Dibayarkan pada anggaran pergeseran tahun anggaran 2020.

C. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Program dan Kegiatan :

a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Kegiatan ini meliputi belanja modal peralatan dan mesin pengadaan pompa, Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat laboratorium lainnya dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 668.413.357,- dengan realisasi keuangan Rp. 473.480.000,- (70,84%).



Permasalahan:

Pengadaan mesin STP belum diadakan, karena sistem pengolahan limbah rumah sakit baru belum berfungsi, apabila alat mesin STP dipakai bisa menyebabkan mesin tersebut rusak.

Solusi :

Mesin STP bisa diadakan apabila rumah sakit baru sudah operasional.

b. Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (DAK)

Program dan Kegiatan :

Kegiatan ini meliputi belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kedokteran umum.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.668.413.357,- dengan realisasi keuangan Rp. 4.407.975.480,- (97,20%).

Permasalahan dan Solusi :

1. Permasalahan :

Secara keseluruhan realisasi anggaran kegiatan pengadaan alat- alat rumah sakit (DAK) tidak ada permasalahan yang ditemui.

2. Solusi :-

c. Lanjutan Pembangunan Gedung Baru (DAK)

Program dan Kegiatan :

Kegiatan ini meliputi belanja modal gedung dan bangunan gudang untuk bengkel dan belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan kesehatan bangunan rumah sakit umum.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 11.906.032.813,- dengan realisasi keuangan Rp. 10.431.863.725,- (87,62%).

Permasalahan:

Kegiatan lanjutan pembangunan gedung baru (DAK) secara fisik terlaksana 100%, namun realisasi anggaran 95% karena biaya



untuk retensi jaminan pemeliharaan sebesar 5% belum dapat dibayarkan. Hal ini terjadi karena penyedia belum memberikan jaminan pemeliharaan yang aslinya.

Adanya penundaan pembayaran kegiatan yang telah selesai 100% yaitu kegiatan DED lanjutan RSUD 2020, pekerjaan pengadaan plank merk dan konsultan pengawasnya karena kurangnya kas pada anggaran daerah.

Solusi :

Retensi jaminan pemeliharaan sebesar 5% akan dicairkan setelah penyedia memberikan jaminan pemeliharaan yang aslinya.

Hutang dibayarkan pada anggaran pergeseran tahun anggaran 2020.

d. Pengadaan Ambulance dilaksanakan melalui kegiatan :

Program dan Kegiatan :

Kegiatan ini meliputi belanja modal peralatan dan mesin pengadaan kendaraan bermotor khusus mobil ambulance.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 626.300.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 625.700.000,- (99,90%).

Permasalahan dan Solusi :

1. Permasalahan :

Secara keseluruhan realisasi anggaran kegiatan pengadaan ambulance tidak ada permasalahan yang ditemui.

2. Solusi :

-

D. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan(BLUD) dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Pelayanan Kesehatan (BLUD).

Kegiatan ini dilaksanakan agar pelayanan kesehatan di RSUD Sungai Dareh dapat terlaksana. Dimana untuk melaksanakan hal tersebut kegiatan ini terdiri dari belanja Barang dan Jasa serta



belanja Modal. Untuk belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

- Belanja Pegawai PNS dan Non PNS.
- Belanja Jasa Pelayanan.
- Belanja Jasa.
- Belanja Barang Administrasi Kantor.
- Belanja Barang Administrasi Umum.
- Belanja Perjalanan Dinas.
- Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan.
- Belanja Barang Pelayanan Kesehatan.
- Belanja Pemeliharaan Kesehatan.

Dan belanja modalnya adalah pembelian barang pelayanan kesehatan seperti alat kesehatan maupun peralatan penunjang lainnya.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 42.890.955.951,- (Empat puluh dua milyar delapan ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 42.559.291.810,- (Empat puluh dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratussembilan puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau 99,23%.

Permasalahan dan Solusi :

1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan permasalahan dan kendala yaitu :

Kurang tersedianya anggaran yang mencukupi untuk membiayai biaya operasional di RSUD Sungai Dareh. Hal ini dapat dilihat dimana sudah beberapa tahun belakangan ini RSUD Sungai Dareh mempunyai hutang untuk pembelanjaan. Dimana pada tahun 2019 ini RSUD Sungai Dareh mempunyai hutang sebesar Rp. 5.928.791.307,- (Lima milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah) yang terdiri dari :



- a. Jasa Pelayanan sebesar Rp. 1.137.584.442,- (Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
- b. Obat – obatan sebesar Rp. 2.327.899.615,- (Dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah).
- c. Bahan Habis Pakai Medis sebesar Rp. 1.576.894.440,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- d. Bahan Kimia Labor sebesar Rp. 843.820.810,- (Delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- e. Gas Medis sebesar Rp. 42.592.000,- (Empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Adanya kegiatan dalam pengerjaan (KDP)/ pekerjaan belum selesai pada tahun 2019 ini yaitu Jasa perizinan Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk gedung lanjutan rumah sakit baru sebesar Rp. 548.604.000,- (Lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat ribu rupiah). Hal ini dikarenakan ada beberapa data pendukung yang diperlukan dalam pengurusan izin tersebut belum tersedia. Dan Pihak RSUD Sungai Dareh sedang menyiapkan data pendukung tersebut.

RSUD Sungai Dareh mempunyai piutang pendapatan sebesar Rp. 6.469.697.092,-, dimana pihak BPJS pada tahun 2019 ini tidak membayarkan tagihan pelayanan kesehatannya kepada RSUD Sungai Dareh sebesar tersebut diatas. Hal ini mengakibatkan target pendapatan yang telah direncanakan oleh pihak RSUD Sungai Dareh tidak dapat tercapai.

2. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut :

Seperti yang telah diamanatkan dalam Undang – Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dimana pendapatan rumah sakit dapat digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional rumah sakit itu sendiri. Sehingga untuk penganggaran



belanja BLUD itu sendiri seharusnya tidak dibatasi besarnya, disesuaikan dengan besaran pendapatan dari rumah sakit itu sendiri.

- Pihak BPJS agar tepat waktu untuk melakukan pembayaran tagihannya kepada pihak RSUD Sungai Dareh.
- Pihak RSUD Sungai Dareh harus telah melakukan perhitungan Unit Cost untuk semua kebutuhannya, sehingga biaya operasional RSUD Sungai Dareh tersebut dapat ditekan untuk lebih efisien lagi.

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pada urusan pekerjaan umum telah dilaksanakan program dan kegiatan
Sebagai berikut:

A. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

1. Kegiatan Pembangunan Jalan (Dana APBD)

APBD Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan dana sebesar Rp. **19.302.383.372.89** untuk pelaksanaan pembangunan jalan, dana tersebut terdiri dari biaya umum dan operasional sebesar Rp.**161,500,000.00** ,- belanja jasa konsultan Rp.**506,500,000.00,-** (terdiri dari perencanaan Rp. **345,000,000.00,-** dan pengawasan Rp. **250.000.000,-** dan belanja modal fisik yang dilaksanakan menggunakan jasa pihak ke tiga (kontrak) sebesar Rp. **19,140,883,372.89,-** yang terdiri dari:

- a. Paket I, terdiri dari 4 ruas, yaitu :
 - Aspal Hotmix Pulau Punjung - Kampung Surau
 - Aspal Hotmix Jalan Simp. Lintas – SPBU
 - Lanjutan Aspal Hotmix Jalan Lingkar Belakang Kejaksaan
 - Lanjutan Jalan Jorong Padang Sari Tebing Tinggi (700m)
 - Peningkatan Jalan RSUD
- b. Paket II, terdiri dari 3 ruas, yaitu :
 - Pembangunan Jalan Lingkar Padang Laweh - Kantor Camat



-
- Peningkatan Jalan Simp. 14 - Batu Rijal (Koto Beringin Padang Laweh)
 - Lanjutan Jalan SMA 2 Koto Baru
 - Lanjutan Aspal Simp. Lintas Sport Center - Simp. SMK I Koto Baru
 - Aspal Jalan Kantor Wali Nagari Koto Beringin
- c. Paket III, terdiri dari 3 ruas, yaitu :
- Aspal Jalan Lingkar Sungai Rumbai
 - Aspal Jalan Kurnia Selatan - Jaya Murni
 - Aspal Jalan Sungai Rumbai - Koto Besar(Jorong Tanah Abang)
 - Aspal Jalan Lingkar Abai SiaT - Ranah Baru
 - Trotoar / Median Jalan Pulau Punjung - Sungai Rumbai
- d. Jalan Kabupaten Lain – lain terdiri dari ... ruas, yaitu :
- Peningkatan Jalan Pendekat Jembatan Sungai Tantang Nagari Abai Siat
 - Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Kabupaten
 - Pengkerekelan Jalan SMK II Pulau Punjung - Kampung Surau
 - Pembukaan Jalan Padang Bungur
 - Pembangunan Jalan Baru Jr. Bukit Aman Nagari Abai Siat
 - Pengadaan Lahan Jalan Sport Center - Koto Padang
 - Pembukaan Jalan Jr. Ranah Baru Nag. Abai Siat
 - Pembukaan Jalan Jorong Lubuk Patin Nag. Koto Baru Kec. Koto Baru

Lanjutan Kegiatan TA. 2018

- Lanjutan Paket V - Pembukaan dan Pengerasan Jalan Menuju Renc. Jembatan Padukuan TA. 2018
- Lanjutan Peningkatan Jalan Banai - Padang Hilalang (DAK Prioritas Pembangunan Daerah TA. 2018)
- Lanjutan Pengadaan Lahan Jalan Sport Center TA. 2018
- Lanjutan Ganti Rugi Tanah dan Bangunan Sungai Rumbai TA. 2018

Ditargetkan dengan dana tersebut dapat menangani ruas jalan berupa pekerjaan hotmix, pekerjaan pengkerekelan dan pengerasan, serta pekerjaan pembukaan jalan sehingga



transportasi ke daerah menjadi lancar sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Dalam pelaksanaannya hingga akhir Tahun Anggaran 2019 target keuangan yang dicapai secara keseluruhan sebesar 97,00 %.

2. Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK Reguler TA. 2019)

Anggaran Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 26,341,717,000.00 ,- dan belanja modal fisik yang dilaksanakan menggunakan jasa pihak ke tiga (kontrak) dengan realisasi sebesar Rp. 26,323,761,950.00 - yang terdiri dari 3 ruas, yaitu :

- Peningkatan Jalan SP 8 - Simpang Panyubarangan nilai kontrak Rp. 4,316,183,613.46 ,- dengan target 1.872 m dengan realisasi 100%
- Pelebaran Jalan Simpang Lintas Abai Siat nilai kontrak Rp. 15,084,905,695.13,- dengan target 7. 674 m dengan realisasi 100 %
- Peningkatan Jalan Simpang Batu Kangkung - Lubuk Besar nilai kontrak Rp. 4,828,638,254.76,- dengan target 2,8 Km dengan realisasi 100%

Survey Kondisi Jalan kabupaten (Tahap II) nilai kontrak Rp. 100.000.000,-Dan pada akhir tahun anggaran realisasi keuangan Rp. 26,323,761,950.00,- sebesar 99.93 %.

3. Kegiatan Pembangunan Jembatan

APBD Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan dana sebesar Rp. 3,068,599,000.00,- Dana tersebut terdiri dari biaya umum dan operasional sebesar Rp. 136,900,000.00 belanja konsultan Rp. 280,000,000.00,- (terdiri dari perencanaan Rp. 215.000.000,-,- dan pengawasan Rp. 65.000.000,-) dan belanja modal fisik sebesar Rp 3,068,599,000.00 ,- yang terbagi atas:

10 Pembangunan Jembatan Paket I :

- Pembuatan Jembatan Layang Jr. Kuat Sakato Nag. Koto Nan IV di Bauh Kec. IX Koto
- Lanjutan Jembatan Gantung Nagari tabiang Tinggi Kec. Pulau Punjung



-
- Jembatan Pengairan Jr. Karya Harapan Nag. Sei. Langkok Kec. Tiumang
 - Pembangunan Jembatan Beton Koto Gadang Sitiung IV
 - Pembangunan Jembatan Poros Sopan Jaya
 - Pembangunan Jembatan Gantung Jr. Ranah Baru Abai Siat
 - Lanjutan Pembangunan Jembatan Muaro Sopan Kec. Padang Laweh TA. 2018
 - Pembangunan Jembatan Jr. KM. 6 Nag. Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung

Dana tersebut ditargetkan dapat menangani pembangunan jembatan di daerah yang masih terisolir sehingga dengan adanya jembatan dapat membuka akses ke daerah tersebut yang nantinya akan berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di daerah itu.

Realisasi dari pelaksanaan kegiatan ini dibantu dengan jasa pihak ketiga. Dari kesemua unit jembatan yang ditargetkan selesai di tahun 2019, Sehingga sampai akhir tahun anggaran realisasi fisik pekerjaan ini mencapai 100% dengan realisasi keuangan Rp. 3,054,702,420.67

B. PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

1. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Jalan Kabupaten yang telah ada sudah banyak rusak karena pengaruh keadaan cuaca yang ekstrem dan karena peningkatan volume lalu lintas serta beban berlebih kendaraan yang melebihi tonase yang diizinkan untuk klas jalan. Untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan yang rusak tersebut, Tahun 2019 dianggarkan dana dari APBD sebesar Rp. 2,229,050,000.00-. Pengalokasian dana tersebut terdiri dari biaya umum dan operasional kegiatan sebesar Rp. 79,050,000.00 ,- dan belanja modal fisik sebesar Rp. 2,150,000,000.00 ,- yang terdiri atas:

1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket I
2. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket II
3. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket III
4. Rehab Jalan Pinang Makmur - Marga Makmur



Dari dana yang dianggarkan tersebut ditargetkan dapat meningkatkan dan mempertahankan kondisi jalan di Kabupaten Dharmasraya. Sehingga batas layan kondisi jalan tersebut masih dapat diterima dan nilai konstruksi jalan berada diatas batas bawah kemantapan konstruksi jalan. Realisasi dari pelaksanaan kegiatan ini dilakukan menggunakan jasa pihak ketiga (kontrak). Dan pada akhir tahun anggaran realisasi fisik pekerjaan ini mencapai 100% dengan realisasi keuangan Rp. 2,197,176,500.00,-.

2. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

Kondisi jembatan di beberapa daerah di Kabupaten Dharmasraya masih banyak yang memprihatinkan dibawah batas layan dan ada yang mencapai batas kritis sehingga dapat membahayakan bagi pengguna jalan yang melewatinya. Untuk mengembalikannya pada kondisi yang layak maka diperlukan perbaikan rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menganggarkan dana sebesar Rp. 3,707,400,000.00 ,- Pengalokasian dana tersebut terdiri dari biaya umum dan operasional sebesar Rp. 67.700.000,- dan belanja modal fisik sebesar Rp. 1.800.000.000,- , - yang terdiri atas:

1. Rehab Jembatan Jr. KM. 6 Nagari Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung
2. Rehab Jembatan Muaro Mau Nagari Sei. Kambut Kec. Pulau Punjung
3. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Paket I
4. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Paket II
5. Rehab Jembatan Pulai
6. Rehab Jembatan Gantung Jr. Ranah Baru Abai Siat
7. Rehab Jembatan Simpang Tabek & Padukuan

Kegiatan ini selesai dilaksanakan dengan realisasi keuangan Rp 2,791,569,500.00,- dan bobotnya adalah 100%.

Permasalahan pada Kegiatan Pembangunan Jalan :

1. Anggaran untuk penanganan jalan masih kurang
2. Tingkat pertumbuhan lalu lintas semakin tinggi



3. Kapasitas kendaraan yang lewat sudah banyak yang tidak sesuai dengan tonase yangizinkan sehingga mempercepat kerusakan jalan
4. Cuaca yang cukup ekstrem seperti musim hujan yang cukup panjang sehingga drainase yang ada tidak mampu menampung genangan air sehingga air tergenang di jalan

Permasalahan Pada Kegiatan Pembangunan Jembatan :

1. Masih terbatasnya anggaran terhadap penanganan jembatan
2. Aliran Sungai sudah banyak yang berubah alur sehingga butuh normalisasi sungai agar aliran air tidak langsung menghantam ABT Jembatan
3. Jembatan Kayu yang sudah ada tidak mampu lagi menampung kapasitas lalu lintas yang lewat sehingga butuh peningkatan menjadi jembatan permanen

Solusi :

1. Pembatasan Jumlah Tonase Kendaraan berat yang melewati jalan Kabupaten
2. Normalisasi sungai secara rutin dan berkala
3. Peningkatan kondisi jalan baik rehab rutin, periodic dan rekonstruksi
4. Peningkatan jembatan semi permanen menjadi jembatan permanen
5. Meningkatkan status jalan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi dan Nasional

C. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Dengan anggaran Rp. 48,420,564,335.00,- yang terdiri dari biaya umum Rp.480,422,000.00,- belanja konsultan Rp. 1.425.930.000,-,- (terdiri dari perencanaan Rp. 1,104,470,000.00,- dan pengawasan Rp.321.460.000,-) dan untuk belanja modal fisik sebesar Rp. 42,067,202,635,- direncanakan dapat menyelesaikan berbagai kegiatan pembangunan, antara lain :

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga :



6. Pembangunan Mesjid Al Ikhlas Jorong Karya Tama, Nagari Gunung Medan Kec. Sitiung
7. Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna Nagari Koto Padang
8. Rehab Mesjid Al Muhajrin Padang Bintungan Sialang Gaung
9. Pembangunan Hall Badminto Jorong Padang Bungur Barat, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar
10. RKB Rumah Tahfiz Al -Kautsar Jr. Taratak Nagari Siguntur\
11. Lanjutan Pemb. Mushola Al-Fatah Jr. Pasir Putih Sei. Kambut Pulau Punjung
12. Pembanguan MCK Mesjid Jami" Taqwa Batang Tabek Tebing Tinggi Pulau Punjung
13. Rehab Mesjid Al Almuhajiring Jr. Piruko Utara Sitiung
14. Pembanguan Pendopo Komplek Makam Kerajaan Koto Besar
15. Pembangunan Balai Jorong Muaro Momong Sei. Kambut
16. Pembangunan Lanjutan Kantor , Pagar dan Gerbang Balitan
17. Lanjutan Stadio Mini Sungai Rumbai
18. Pondasi Pagar Mushalla Padang Bintungan VI Sialang Gaung
19. Lanjutan Pembangunan Masjid Nurul Aman Jorong Koto, Nagari Gunung Medan, Kec. Sitiung
20. Rehab Mesjid Al-Farqan Jorong Piruko Selatan , Nagari Sitiung, kec. Sitiung
21. Pekerjaan Pemasangan Paving Blok dan Rehab TK Aisylan dan Tk Putra I Pulau Punjung
22. Lanjutan Pekerjaan Rumah Kepala Bagian Reskim Polres Dharmasaya
23. Lanjutan Rehab Mesjid Sei Dareh
24. Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Rumah Kepala Bagian Sunda Polres Dharmasaya
25. Pasangan AC. Kaca dan Pintu Pos Jaga Lalu Lintas Simpang Silago Pulau Punjung.
26. Pasangan Sumur Bor Rumah Kepala Bagian Sunda Polres Dharmasraya
27. Pembangunan Pagar Halaman Kantor Wali Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar



-
28. Rehab Hall Badminto Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar
 29. Lanjutan Pembangunan Mushalla Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya
 30. Pembangunan Balai Pemuda Gunung Medan Nagari Gunung Medan Kec. Sitiung
 31. Pemasangan Paving Blok SMPN 1 Pulau Punjung Jr. Sungai Kambut Pulau Punjung
 32. Pemasangan Atap Kantor Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung
 33. Rehab MCK Masjid Agung Babusalam Pulau Punjung
 34. Rehab Mushalla Al Firdaus Jr. Pulau Sangik Nagari Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung
 35. Pembangunan WC Hall Ranah Baru Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar
 36. Rehab Rumah Gadang Dt. Kayo Bosou
 37. Rehab Rumah Gadang Dt. Raju Medan
 38. Rehab Rumah Gadang Suku Tigo Nini Dt. Rajo Mangkuto - Nagari Sikabau
 39. Rehab Masjid Sarano - Nagari Lubuak Karak
 40. Rehab MCK/Loteng /Pintu Paud Nagari Sungai Kambut
 41. Pemboran Sumur Bor di Kediaman Wakil Bupati
 42. Pemboran Sumur Bor Kawasan Candi Kenagarian Siguntur
 43. Rehab Mushalla Al Fallah Pulau Punjung Nag. IV Koto Pulau Punjung
 44. Pembangunan Pagar Kantor Wali Nagari Simalidu Kec. Koto Salak (BKK)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah.

1. Pembangunan Masjid Agung (Multi Years)
2. Manajemen Kontruksi Pemb. Masjid Agung Dharmasraya (Multi Years)

Pada akhir tahun anggaran realisasi keuangan Rp. 42,561,899,748.00,- dengan realisasi fisik pekerjaan mencapai 74,24 %.



2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Tahun 2019 kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional menganggarkan dana sebesar Rp. **299,060,000,-** dan realisasi akhir tahun anggaran adalah Rp. 211,164,383.00,-.

3. Pengadaan Mebeleur

Tahun 2019 kegiatan Pengadaan Mebeleur menganggarkan dana sebesar Rp.88.700.000,- dan realisasi akhir tahun anggaran adalah Rp.88.700.000,- dengan bobot 100%.

Permasalahan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan konstruksi yang dianggarkan pada Anggaran perubahan 2019 tidak dapat berjalan secara efektif dan maksimal karena waktu pelaksanaan yang tidak memadai
2. Ada beberapa pekerjaan yang masuk kegiatan gedung kantor tidak sesuai dengan kegiatan pembangunan gedung kantor
3. Perencanaan fisik pada tahun berjalan sehingga mulai kegiatan fisik konstruksi mengalami keterlambatan dari jadwal yang direncanakan

Solusi :

1. Untuk DPA Perubahan kegiatan fisik konstruksi sebaik nya dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan selesai.
2. Penempatan penganggaran kegiatan untuk lebih selektif dan disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan.
3. Perencanaan fisik konstruksi sebaiknya dilaksanakan pada tahun sebelumnya

D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk kegiatan tersebut dianggarkan dana



sebesar Rp.111.000.000,- dan penyerapan dana sebesar Rp. 94,402,884.00

E. PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

1. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Untuk pembangunan jalan dan jembatan perdesaan, APBD mengalokasikan dana Rp. **7,671,850,000.00** ,- yang terdiri dari biaya umum Rp.**105.000.000,-** belanja konsultan perencanaan Rp. **180,760,000.00,-** dan pengawasan Rp.**180.760.000,-** dan untuk belanja modal fisik sebesar Rp. **7,398,200,000.00,-** direncanakan dapat menyelesaikan berbagai kegiatan pembangunan, antara lain :

2. Kawasan Sembilan Koto

- Baru Nagari Tanjung Alam Kec. Asam Jujuhan
- Pengerasan Jalan Koto Lamo Nagari Lubuk Karak Kec. IX Koto

3. Kawasan Pulau Punjung

- Pembukaan Jalan Nagari Tebing Tinggi , Kec. Pl. Punjung
- Pengerasan jalan nagari sungai dareh, Kec. Pulau Punjung
- Rigit Beton Jr. Gansima Nag. Tabiang Tinggi Pulau Punjung Rigit Beton Jr. Gansima Nag. Tabiang Tinggi Pulau Punjung
- Pengerasan Jalan Sungai Nili Nagari Sungai Kambut Pulau Punjung
- Rigit Beton Jr. Pasir Putih Nag. Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung
- Rigit Beton Jln Khamter Jr. Sei Kambut Nag. Sei Kambut Kec. Pulau Punjung
- Pembukaan Jalan Baru Nag. Sei Kambut Kec. Pulau Punjung
- Rigit Beton Jl. Trans I Sei. Kambut Nag. Sei Kambut Kec. Pulau Punjung
- Pengerasan Jalan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan Taratak Kec. Pulau Punjung
- Perbaikan Jalan Bukit Tambun
- Dam tebing jalan bukit tambun
- Rigid Beton Jalan Jr. Muaro Mau Nagari Sungai Kambut



4. Kawasan Sitiung

- Aspal Lapen Jorong Taluak Sikai, Nagari Sei Duo Kec. Sitiung
- Pembukaan Jalan Baru Jr. Koto Nag. Gunung Medan Kec. Sitiung
- Pembukaan Jalan Baru Jr. Kampung Dondan Nag. Gunung Medan Kec. Sitiung
- Pembukaan dan pengerasan jalan lingkungan Jr. Taratak Nag. Siguntur Kec. Sitiung
- Pembangunan jalan jorong ganting nag. gunung medan
- Pembangunan Jalan Lingkar dan Land Clearing Kawasan Candi Nagari Siguntur

5. Kawasan Koto Baru

- Jalan Lingkar Jorong Koto Kec. Koto Baru
- Pembukaan Jalan Baru Jr. Psr Sialang Gaung Nag. Sialang Gaung Koto Baru
- Rigit Beton Jr. Koto Ujung Tanjung Nag. Koto Baru, Koto Baru
- Rigit Beton Bahu Jalan Jr. Koto Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru
- Rigit Beton Jorong Pandaleh Sialang Gaung Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru

6. Kawasan Koto Salak

- Pembukaan Jalan Nagari Padukukan Kec. Koto Salak
- Pembukaan Jalan Jor. Sungai Lembur (Utara) Nag. Pulau Mainan Kec. Koto Salak
- Aspal Lapen Nag. Koto Salak Kec. Koto Salak
- Lanjutan Aspal Lapen Jor. Sungai Klukup (Selatan) Nag. Pulau Mainan Kec. Koto Salak
- Aspal lapen Jor. Sungai Lembur Selatan, Nagari Pulau Mainan Kec. Koto Salak
- Lanjutan Lapen Jorong Sungai Makmur Timur Nagari Pulau Mainan Kec. Koto Salak
- Lanjutan Aspal Lapen Jr. Lubuk Lesung Nag. Pulau Mainan Kec. Koto Salak



-
- Pengerasan Jalan Jorong Sungai Makmur (Barat) Nag. Pulau Mainan Kec. Koto Salak
 - Aspal Lapen Jor. Sungai Lembur (Utara) Nag. Pulau Mainan Kec. Koto Salak
 - Rigit Beton di Jorong Pakan Senayan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak (BKK)

7. Kawasan Tiumang

- Jalan Lingkar Jorong Koto Kec. Koto Baru
- Aspal Lapen Jr. Rejo Sari, Nagari Tiumang Kec. Tiumang
- Rigit Beton Jr. Harapan Mulya Nag. Koto Beringin Tiumang
- Rigit Beton Jr. Sei Kalang II Nag. Tiumang Kec Tiumang
- Rigit Beton Jr. Sukoharjo Nag. Tiumang Kec. Tiumang
- Rigit Beton Jr. Sei Kalang I Nag. Tiumang Kec. Tiumang
- Tembok Penahan Tanah Jr. Sei Kalang I Nag. Tiumang Kec. Tiumang
- Rigit Beton SP3 Tiumang Nagari Tiumang
- Rigit Beton Jalan Jorong Sungai Kilang I Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang (BKK)

8. Kawasan Sungai Rumbai

- Jalan Lingkar Jorong Koto Kec. Koto Baru
- Pembukaan Jln Tembus dari Sungai Rumbai Ke Kurnia Nagari Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai
- Pengerasan Jalan Jorong Cahaya Koto Nagari Kurnia Selatan Kec. Sungai
- Rumbai Rigit Beton Jorong Ranah Minang Nagari Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai
- Pembukaan Jalan Blok C Sitiung III

9. Kawasan Koto Besar

- Pembukaan Jalan Nagari Padukukan Kec. Koto Salak
 - Pengerasan Jalan Sungai Bilang Ke Saluran Irigasi, Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar
 - Pembukaan Jalan Baru Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar
 - Rigit Beton Jr. Koto Agung Nag. Koto Tinggi Kec. Koto Besar
-



-
- Pembukaan Jalan Jr Bonjol Nag. Bonjol Kec.Koto Besar
 - Pembukaan Jalan Jr Bukit Aman Nag. Abai Siat Kec. Koto Besar
 - Pembukaan Jalan Baru Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar
 - Rigit Beton di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar (BKK)
 - Rigit Beton di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar (BKK)

10. Kawasan Padang Laweh

- Pengerasan Jalan Jor. Sopan Jaya Kec. Padang Laweh

11. Kawasan Timpeh

- Pembuatan Jalan Baru Pustu Nagari Taratak Tinggi Timpeh
- Pembukaan Jalan Jor. Trimulya Nag. Panyubarangan Kec. Timpeh
- Pembukaan Jalan Baru Nag. Ranah Palabi Kec. Timpeh
- Rigit Beton Jr. Suka Mulya Tinggi Nagari Tabek Kec. Timpeh
- Pembukaan Jalan Baru Jr. Suka Mulya Tinggi Nagari Tabek Kec. Timpeh
- Pembukaan Jalan Baru Nagari Panyubarangan

12. Kawasan Asam Jujuhan

- Pembukaan Jalan Baru Kec. Asam Jujuhan
- Pembangunan Rigit Beton Jalan di Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan (BKK)

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan jasa pihak ke tiga (kontrak) , - dan bobotnya 100 %.

Permasalahan pada Program Infrastruktur Pedesaan

- Pembebasan lahan/tanaman yang terkena pekerjaan

Solusi

- Ikut Peran serta perangkat daerah dan instansi terkait terutama perangkat nagari.



F. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG – GORONG

1. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Program ini bertujuan untuk membangun saluran pembuangan sehingga mengurangi daerah yang digenangi air. Dengan anggaran Rp. 2,802,200,000.00 ,- termasuk biaya umum Rp79.000.000,- dan biaya konsultan Rp. 212,600,000,- (terdiri dari perencanaan Rp.124.080.000,- dan pengawasan Rp.88.520.000,-) dan untuk belanja modal fisik sebesar Rp 2,660,600,000 ,- direncanakan dapat menyelesaikan paket pekerjaan berupa pembangunan saluran drainase dan gorong – gorong yang dikontrakkan menggunakan jasa pihak ketiga.

Anggaran yang direncanakan dapat menyelesaikan berbagai kegiatan pembangunan, antara lain :

1. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong – Gorong Kawasan Kecamatan Pulau Punjung, (terdiri dari 7 paket)
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong – Gorong Kawasan Kecamatan Tiumang, (terdiri dari 3 paket)
3. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong – Gorong Kawasan Kecamatan Koto Baru, (terdiri dari 3 paket)
4. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong – Gorong Kawasan Kecamatan Sungai Rumbai, (terdiri dari 2 paket)
5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – Gorong Kawasan Kecamatan Koto Salak, (terdiri dari 4 paket)
6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – Gorong Kawasan Kecamatan Koto Besar, (terdiri dari 4 paket)
7. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – Gorong Kawasan Kecamatan Timpeh, (terdiri dari 2 paket)
8. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – Gorong Kawasan Kecamatan Sitiung, (terdiri dari 1 paket)

Diakhir tahun anggaran realisasi keuangan mencapai 93 % dengan bobot Fisik 100 %.

Permasalahan pada Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong

1. Drainase yang ada (existing) tidak dipelihara oleh masyarakat Solusi
2. Pembebasan lahan/tanaman yang terkena pekerjaan



Solusi :

1. Sosialisasi ke masyarakat oleh pihak nagari tentang kebersihan lingkungan
2. Peran serta perangkat daerah terutama perangkat nagari

G. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

Kegiatan Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) APBD mengalokasikan Rp. 71.150.000,- untuk Kegiatan Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), peranan TKPRD dalam membantu tugas kepala daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sangat diperlukan. penataan ruang Khususnya untuk penerbitan perizinan berusaha. Fungsi dan kewenangan TKPRD terkait perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang .

Begitu juga saat ada rencana pemanfaatan ruang atau rencana investasi yang pengaturan ruangnya belum jelas dalam rencana tata ruang. “Sehingga, membutuhkan pertimbangan dan masukan dari TKPRD,” kabupaten/kota yang belum membentuk TKPRD segera mengacu Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017.

H. PROGRAM PEMBINAAN TEKNIS JASA KONSTRUKSI

1. Kegiatan perencanaan dan pembinaan teknis ke PU an

APBD mengalokasikan Rp. 44.713.650,- untuk Kegiatan perencanaan dan pembinaan teknis ke PU an dengan belanja bimbingan teknis sebesar Rp. 10.000.000,- dan realisasi akhir tahun anggaran sebesar Rp 18.564.000,-. Dengan realisasi keuangan sebesar 42.00%

2. Kegiatan pembinaan jasa konstruksi

APBD mengalokasikan Rp. 63.750.000,- Kegiatan **pembinaan jasa konstruksi untuk** pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi dengan belanja bimbingan teknis sebesar Rp. 10.000.000,- dan realisasi akhir tahun anggaran sebesar Rp. 32.922.464,- dengan realisasi keuangan 45%.



I. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN**1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat – Alat Berat**

Sedangkan untuk pemeliharaan dan rehabilitasi alat-alat berat dianggarkan dana sebesar Rp.1.301.400.000,- . Kegiatannya terdiri dari Mobilisasi alat, bahan bakar, belanja jasa servis, perbaikan, penggantian suku cadang dan penggantian rutin suku cadang. Dan untuk penyerapan dana di kegiatan ini mencapai realisasi Rp. 1,293,834,750.00,- dengan bobot 99,41 %.

2. Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

Untuk pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan dianggarkan dana sebesar Rp.136.150.000,- Dan untuk penyerapan dana sebesar Rp. 123,788,-

J. PROGRAM PENGEMBANGAN/ PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA.**a. Kegiatan Pengembangan/ Pemeliharaan Alur Sungai**

APBD menganggarkan Rp. 1,807,872,100.00,- termasuk biaya umum dan operasional Rp.24.252.000,- dan biaya konsultan Rp.78.950.000.- , untuk 7 paket pekerjaan, antara lain :

1. Normalisasi Sungai dan Saluran Air Tabek Kec. Timpeh
2. Batu Bronjong Jrg. Banai Nag. Banai Kec. Sembilan Koto
3. Batu Bronjong Jorong Ranah Kayu Kalek Nag. Silago Kec. Sembilan Koto
4. Pengaman Pinggir Sungai Siat Depan Mushola Nurul Taqwa Nag. Koto Baru
5. Pengendalian Banjir Sungai di Ampang Kuranji
6. DAM Pinggir Sungai Slat Nag. Koto Baru
7. Bronjong Sungai Balun Pekan Jum'at Nag. Koto Besar

Sampai pada akhir tahun anggaran realisasi keuangan mencapai Rp. 1,766,037,979.00,- dan bobotnya 97,68 %



b. Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK Penugasan TA. 2019)

Agar aliran air ke petak – petak sawah tetap lancar dan terjaga dengan baik, melalui kegiatan Pembangunan Irigasi (DAK Penugasan TA. 2019) mengalokasikan dana sebesar Rp. 2,866,854,000.00 , - diharapkan mampu memaksimalkan aliran air diberbagai daerah irigasi kabupaten Dharmasraya sebanyak 8 Daerah Irigasi yaitu :

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Baru
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ranah/Tabek
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lubuk Tunggal
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sarana Baru
5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Empang Samsi
6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tarok Jaya
7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sei. Kambang Mani
8. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sei. Tabuan

Hingga akhir tahun anggaran dari 8 paket pekerjaan yang dikontrakkan pada pihak ketiga tersebut yang selesai 100%

c. Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (APBD 2019)

Agar aliran air ke petak – petak sawah tetap lancar dan terjaga dengan baik, melalui kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi (APBD 2019) mengalokasikan dana sebesar Rp. 1,154,068,600.00,-,- diharapkan mampu memaksimalkan aliran air diberbagai daerah irigasi kabupaten Dharmasraya yang terangkum dalam paket pekerjaan. Hingga akhir tahun anggaran, ke paket pekerjaan yang dikontrakkan pada pihak ketiga tersebut selesai 100% dan realisasi keuangan Rp. 940,292,518.00 , -.

Paket-paket pekerjaan tersebut, antara lain :

1. Jaringan Irigasi Jrg. Batang Tabek Nag. Tebing Tinggi
2. Saluran Irigasi Ampang Kec. Koto Baru
3. Pembuatan Saluran Irigasi Sei. Kambut Pulau Punjung
4. Jaringan Irigasi Komplek Tani Berkat Yakni Ma. Momong Sai Kambut



Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (APBD 2019) mengalokasikan dana sebesar Rp 436.750.000,- diharapkan mampu memaksimalkan aliran air diberbagai daerah irigasi kabupaten Dharmasraya yang terangkum dalam paket pekerjaan. Hingga akhir tahun anggaran, paket pekerjaan pemeliharaan rutin tersebut selesai 100% dan realisasi keuangan Rp. 340,020,257.00,-

Permasalahan pada Pengembangan /Pengelolaan Jaringan Irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya:

- Tinggi nya curah hujan pada saat pelaksanaan kegiatan antara bulan september-desember menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang dijadwalkan

Solusi :

1. Pelaksanaan Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya
2. Kondisi (cuaca) yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan pekerjaan, perlu penyesuaian terhadap masa pelaksanaan pekerjaan

K. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

a. Kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan dan Distribusi Air Minum (Operasional UPT SPAM)

Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 1,035,305,000.00,- yang terdiri dari belanja pemeliharaan bangunan WTP, pemeliharaan jaringan pipa, pemeliharaan pekarangan WTP, pemeliharaan panel listrik, aksesoris jaringan pipa,. Hingga akhir tahun anggaran semua pekerjaan mencapai 82,80 % pelaksanaannya. Realisasi keuangan hingga akhir tahun anggaran Rp. 857,281,588.00,-.

b. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah tahun 2019

Dari Dana APBN dianggarkan sebesar Rp.1,094,353,444.00,- Anggaran yang direncanakan dapat menyelesaikan berbagai kegiatan pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah tahun 2019 antara lain :



Sharing Program HKP

1. Jorong Bukit Mindawa (ex. Padang Sari) Kecamatan Pulau Punjung
2. Jorong Trimulya Kecamatan Timpeh

Sharing Program Pamsimas Reguler

1. Jorong Batas Baru Kecamatan Sungai Rumbai
2. Jorong Sungai Makmur Timur Kecamatan Koto salak
3. Jorong Mulya Jaya Kecamatan Timpeh
4. Jorong Sungai Sonsang Kecamatan Pulau Punjung
5. Pengembangan SPAM Nagari Taratak Tinggi (Lanjutan 2018) Kecamatan Timpeh

Hingga akhir tahun anggaran realisasi keuangan Rp. 1,083,366,694.00 ,- dengan bobot keuangan 98,99 %.

c. Kegiatan Rehabilitasi/Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Tahun Anggaran 2019 dianggarkan dana sebesar Rp. 50.000.000 ,- Untuk Perencanaan Optimalisasi IPLT, dengan realisasi 100 %, dan untuk belanja pendukung kegiatan Rp. 107.319.000,- (termasuk belanja pemeliharaan dan perawatan IPLT)

d. Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah (Operasional IPLT)

Untuk Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah (Operasional IPLT) Tahun Anggaran 2018 dianggarkan dana sebesar Rp. 191,262,200 ,- biaya umum Rp. 96,862,200 ,- Pada akhir tahun anggaran realisasi keuangan mencapai Rp. 154,799,025 ,- dengan bobot keuangan 80,93%.

e. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK Fisik Tahun 2019)

- Jaringan Air Limbah (DAK Sanitasi Reguler)
- Jaringan Air Limbah (DAK Sanitasi Penugasan)

Dana yang dianggarkan untuk kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum **(DAK Fisik Tahun 2019)** sebesar Rp. 3,381,996,500.00 dengan paket pekerjaan, terdiri dari :

- Belanja Modal Rp.50.000.000,-



- Perencanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum IKK Pulau Punjung

Belanja Barang yang Akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga:

1. Peningkatan Kapasitas SPAM Silombik Nagari Koto Nan IV Dibawah Kec. IX Koto Kab. Dharmasraya
2. Pengembangan Jaringan Perpipa SPAM Jorong Saiyo Nagari Taratak Tinggi Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya
3. Pengembangan Jaringan Perpipa SPAM Lubuk Besar Nagari Lubuk Besar Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya
4. Pengembangan Jaringan Perpipa SPAM Jorong Marga Jaya Nagari Taratak Tinggi Kab. Dharmasraya
5. Peningkatan Kapasitas SPAM Jorong Koto Baru Nagari Koto Nan IV Dibawah Kec. IX Koto Kab. Dharmasraya
6. Peningkatan Kapasitas SPAM Tri Mulya II Nagari Panyubarangan Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya
7. Peningkatan Kapasitas SPAM Harapan Mulya I Nagari Koto Beringin Kec. Tiumang Kab. Dharmasraya
8. Peningkatan Kapasitas SPAM Harapan Mulya II Nagari Koto Beringin Kec. Tiumang Kab. Dharmasraya
9. Peningkatan Kapasitas SPAM Jorong Tanah Abang Nagari Sungai Rumbai Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya
10. Peningkatan Kapasitas SPAM Jorong Sipangkur Nagari Sipangkur Kec. Tiumang Kab. Dharmasraya

Hingga akhir tahun anggaran realisasi keuangan Rp 97,13 % ,
dengan bobot Fisik 100 %.

f. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan Air Limbah

a. (DAK Sanitasi Reguler Tahun 2019)

Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan Air Limbah (DAK Sanitasi Reguler Tahun 2019) terdiri dari :

1. Pembangunan IPAL Komunal Skala Permukiman Nagari Tiumang Kec. Tiumang (DAK Sanitasi Reguler TA.2019)
2. Pembangunan IPAL Komunal Skala Permukiman Nagari Sungai Langkok Kec. Tiumang (DAK Sanitasi Reguler TA.2019)



3. Pembangunan IPAL Komunal Skala Permukiman Nagari Sipangkur Kec. Tiumang (DAK Sanitasi Reguler TA.2019)

b. (DAK Penugasan Tahun 2019)

1. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Nagari IV Koto Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung (DAK Sanitasi Penugasan TA.2019)
2. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Nagari Tebing Tinggi Kec. Pulau Punjung (DAK Sanitasi Penugasan TA.2019)
3. Pembangunan MCK++ Pondok Pesantren Pembangunan Pulau Punjung Nagari Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung (DAK Sanitasi Penugasan TA.2019)
4. Pembangunan MCK++ Pondok Pesantren Darussalam Sungai Duo Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung (DAK Sanitasi Penugasan TA.2019)
5. Pembangunan Tangki Septik Individual Program Hibah Air Limbah Setempat

Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan Air Limbah ini dengan anggaran sebesar Rp.5,155,650,500.00 terdiri dari belanja Fisik dan belanja pendukung kegiatan dengan realisasi Fisik 95,12 % dan realisasi keuangan sebesar 99,81 %.

Permasalahan pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah:

1. Pada Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum POKJAPL/ POKJA Sanitasi kurang aktif sehingga koodinasi antar sector tidak berjalan sebagaimana mestinya sementara kegiatan dibidang AMPL berkaitan dengan tupoksi dinas lainnya seperti Dinas Kesehatan, Pemberdayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan BAPPEDA sebagi coordinator
2. Belum adanya pendataan dan survey kelayakan air minum dan sanitasi
3. Kurangya Anggaran APBD terhadap Program Air Minum dan Air Limbah



4. Masih kurangnya kepedulian Masyarakat terhadap air minum layak dan penggunaan Tanki septic sesuai teknis
5. Masyarakat lebih mementingkan membangun sarana dan prasarana lainnya disbanding pmbangunan sarana dan prasarana Air Minum dan Sanitasi
6. Kurangnya anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sarana sanitasi dan Air Minum berbasis masyarakat

Solusi :

1. Kurangnya anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sarana sanitasi dan Air Minum berbasis masyarakat
2. Peran aktif dari POKJAPL/ POKJA Sanitasi dan koodinasi antar sektor
3. Tersedianya Anggaran untuk pendataan dan survey kelayakan air minum dan sanitasi
4. Penambahan Anggaran APBD terhadap Program Air Minum dan Air Limbah
5. Sosialisasi antar sektor pada Masyarakat terhadap air minum layak dan penggunaan Tanki septic sesuai teknis
6. Penambahan anggaran APBD untuk kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sarana sanitasi dan Air Minum berbasis masyarakat

c. PROGRAM PENGEMBANGAN TATA RUANG

a. Kegiatan Penataan RTH

Pada tahun anggaran 2018, untuk kegiatan penataan RTH APBD mengalokasikan dana sebesar Rp. ,840.350.000,-. Terdiri dari Belanja Pemeliharaan, Perawatan dan Peralatan RTH sebesar Rp. 100.000.000,-, biaya umum pendukung kegiatan sebesar Rp. 40.350.000 ,- belanja fisiknya sebesar Rp. 639.950.000 ,- dan belanja jasa konsultan baik konsultan perencanaan dan pengawasan sebesar Rp.60.050.000,-.

Kegiatan Penataan RTH tersebut terdiri dari :



-
- RTH Simpang Tabek
 - Penataan Kawasan (Land Scape RSUD)
 - Taman embung Nagari Sitiung

Hingga akhir tahun realisasi Fisik 100 %, diharapkan kegiatan RTH ini terciptanya taman kota dan terpenuhinya sarana penunjang RTH.

d. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGA LISTRIKAN

a. Kegiatan Pembayaran Rekening Listrik PJU

Pada tahun anggaran 2019, untuk kegiatan Pembayaran Rekening Listrik PJU APBD mengalokasikan dana sebesar Rp. 5,316,337,500.00,-. Hingga akhir tahun anggaran realisasi sebesar Rp. 5,171,824,593.00,-,- dengan bobot 97,28 %.

b. Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan PJU

Tahun Anggaran 2018 dianggarkan dana sebesar Rp. 333.650.000,- ,- untuk Kegiatan **Pemeliharaan dan Perawatan PJU**,. Hingga akhir tahun anggaran realisasi sebesar Rp. 298,681,550.00,-,- dengan bobot 89,52 %.

c. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan

Untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan pada tahun 2019 dianggarkan dana sebesar Rp. 846.500.000,- .Dimana biaya umum sebesar Rp,- belanja fisik kegiatan sebesar Rp. 765.000.000,-,-. Hingga akhir tahun anggaran realisasi sebesar Rp. 801,382,253.00,- dengan bobot keuangan 94,67 %.

Dengan kegiatan pengadaan Jaringan listrik pada :

1. Pengadaan lampu jalan daerah Kec. Koto Baru
 2. Listrik di jaringan solar cell Nagari Sungai Nili Kec. Pulau Punjung
 3. Bantuan listrik masyarakat miskin nag. Siguntur Kec. Sitiung
 4. Lampu jalan nag. Koto baru
 5. Tiang listrik Nag. Koto Laweh Kec. Koto Besar
 6. Pengadaan dan Pemasangan lampu jalan PJU Kec. Sembilan Koto
-



7. Pengadaan dan Pemasangan lampu jalan PJU Kec. Pulau Punjung
8. Bantuan Pengadaan lampu jalan jr. tri mulya nag. Panyubarangan kec. Timpeh
9. Pengadaan lampu jalan pasar nagari, jr. koto tuo, nag. Koto ranah kec. Koto besar
10. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan PJU kec. Koto besar
11. Penambahan Jaringan Listrik Nagari Bonjol kec. Koto besar

d. Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan PJU

Tahun Anggaran 2018 dianggarkan dana sebesar Rp. 325,125,000 ,- untuk Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan PJU. Hingga akhir tahun anggaran realisasi sebesar Rp. 312,425,650 ,- dengan bobot 96%.

Permasalahan :

1. Kurangnya peralatan perbaikan PJU
2. Kurangnya SDM
3. Kurangnya Sarana Transportasi operasional

Solusi

1. Karena PJU jumlahnya sangat banyak dan tersebar sangat diperlukan kendaraan operasional dan peralatan PJU
2. Penambahan Anggaran untuk peralatan PJU

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

a. Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Sasaran dari Kegiatan **Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu** ini adalah mendukung operasional rumah susun sederhana sewa (rusunawa), meliputi pembuatan pintu pengaman, penggantian meteran listrik, pembuatan sumur bor, pengadaan genset, penyusunan dokumen UKL UPL Rusun Sungai Rumbai dan Rusus Sitiung, serta honorarium



pengelola rusuwana, yang terdiri dari penjaga malam, petugas kebersihan dan tenaga administrasi.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 813.515.000,- untuk lanjutan pembangunan fasilitas rusunawa dan biaya operasionalnya selama 12 (duabelas) bulan. Lanjutan Pembangunan fasilitas rusunawa antara lain pembuatan sumur bor, pemasangan penangkal petir, pemasangan instalasi listrik serta pengadaan ginset dan gorden. Sampai akhir Desember 2019, realisasi anggaran sebesar Rp. 675.130.954,- (82,99% Rp. 754.990.954,- (92,81%). Adapun sisa anggaran disebabkan oleh pembayaran honorarium tenaga kebersihan yang dibayarkan untuk 2 orang, sedangkan dalam penganggaran dialokasikan untuk 3 orang.

Permasalahan dan Solusi :

1. Permasalahan

- Belum semua satuan rumah susun (sarusun) dapat dimanfaatkan, karena beberapa kendala, antara lain adanya kamar yang rusak dan sebagian kamar terpakai untuk kegiatan Pamalayu.
- Masih adanya beberapa fasilitas pendukung rusunawa yang perlu diperbaiki.
- Adanya sisa dana untuk pembayaran honorarium pembantu pengelola rusunawa, dan pembayaran rekening listrik juga belum optimal.

2. Solusi

- Memberitahukan dan merekomendasikan kepada Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat untuk perbaikan sarusun (kamar) yang mengalami kerusakan.
- Mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Dharmasraya untuk lanjutan pembangunan fasilitas rusunawa.
- Menempatkan penjaga malam dan petugas keamanan untuk mengamankan infrastruktur Rusunawa tersebut.



- Menguapayakan percepatan hibah asset pemerintah menjadi asset pemerintah daerah kabupaten Dharmasraya.
- Mengusulkan revitalisasi rusunawa ke Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

b. Pendamping Program Pengembangan Perumahan (Pendamping Program BSPS)

Sasaran dari Kegiatan **Pendamping Program Pengembangan Perumahan (Pendamping Program BSPS)** ini adalah mendukung operasional program bedah rumah dari Kementerian PUPR, dengan menyediakan tim fasilitator dan tim teknis besertanya honorariumnya.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 204.262.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 203.722.950,- (99,74 %). Dimana anggaran tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung program BSPS untuk rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sebanyak 1005 (Seribu lima) unit rumah.

Permasalahan dan Solusi :

1. Permasalahan

- SNVT (SATUAN NON VERTIKAL TERTENTU) Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat menginstruksikan agar Pemerintah Kabupaten/Kota agar mengalokasikan biaya honorarium koordinator fasilitator dan fasilitator lapangan selama 2 (dua) bulan pada anggaran perubahan dengan pembiayaan 1 (satu) orang koordinator fasilitator dan 12 (dua belas) orang fasilitator lapangan, karena SNVT Penyediaan Perumahan hanya menyediakan honorarium hanya sampai bulan Oktober sedangkan pelaksanaan program ini diidentifikasi sampai bulan Desember.

2. Solusi

- mengalokasikan anggaran koordinator fasilitator dan fasilitator lapangan di anggaran perubahan.



2. PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

a. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman

Sasaran dari Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman adalah dalam upaya meningkatkan kualitas prasarana dan sarana umum di kawasan permukiman, seperti ketersediaan drainase yang baik, kondisi jalan lingkung yang layak dan sarana umum lainnya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan perumahan yang bersih dan sehat serta memudahkan pengawasan pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.967.114.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.951.208.959,- (99,46 %).

Permasalahan dan Solusi :

1. Permasalahan

- Belum semua kegiatan terkonsentrasi pada kawasan permukiman.
- Kegiatan pembangunan masih bersifat sporadis dan insidentil.
- Anggaran secara keseluruhan belum memenuhi usulan dari masyarakat.

2. Solusi

- Perlu pendataan tentang kondisi kawasan permukiman.
- Menyiapkan dokumen perencanaan penataan kawasan permukiman.
- Perlu penambahan biaya alokasi anggaran untuk identifikasi, penyusunan DED dan pembangunan infrastruktur.



5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dalam aktifitasnya, selain kegiatan yang bersifat rutin, Satuan Polisi Pamongpra ja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan beberapa:

a. Program PeningkatanKeamananandanKenyamananLingkungan

1) Pelatihan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kegiatan ini adalah pelatihan pertahanan pagi personil linmas nagari. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya yang diikuti oleh 2 (dua) orang utusan personil Linmas di tiap nagari. Anggaran yang disediakan untuk pelatihan Linmas ini adalah sebesar Rp. 147.080.000,- Realisasi anggaran pada kegiatan ini Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 145.768.000,- atau sebesar (99,11%).

Permasalahan

1. Masih adanya Linmas yang belum terlatih.
2. Banyak personil linmas yang sudah berusia lanjut yang sulit terkoneksi denganTeknologi.
3. Kurang aktifnya personil linmas dalam laporan kegiatan ke Satpol PP dan Damkar

Solusi

4. Mendata dan meminta kembali usulan personil Linmas kesetiap Nagari dengan membatasi criteria umur.
5. Menjadwalkan pertemuan minimal 3 bulan sekali dengan Personil Linmas Nagari.

2) Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat.

Kegiatan ini adalah Patroli Rutin Satpol PP untuk pemantauan wilayah di Kabupaten Dharmasraya. Patroli dilakukan dengan Patroli keliling Satpol PP dengan menggunakan Mobil Patroli.



Selama Tahun 2019 patroli dilakukan sebanyak 44 kali. Anggaran yang tersedia untuk Patroli ini adalah sebesar Rp. 25.180.000,-. Realisasi anggaran pada tahun 2017 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 21.896.750,- atau sebesar (86,96%).

Permasalahan

1. Masih banyak ditemukan Pegawai dan Pelajar yang berkeliaran pada jam Kerjadan Jam Pelajaran.
2. Masih ada pedagang yang berjualan di Trotoar dan dibadan jalan.

Solusi

3. Bekerjasama dengan pihak sekolah tentang aturan pelajar yang keluar pada jam pelajaran.
4. Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian tentang penertiban Pegawai.
5. Melakukan pendekatan persuasive dengan pihak pedagang kaki lima yang berjualan di Trotoar dan badan jalan.

3) Pengendalian Keamaman Lingkungan

Kegiatan ini adalah Pengamanan Hari Besar Nasional. Pengamanan dilakukan dengan menempatkan personil untuk piket sekaligus pengamanan di Pos Taktis dalam Operasi Ketupat Pengamanan Hari Raya Idul Fitri dan pengaman Natal dan Tahun Baru. Pengamanan juga dilakukan pada kegiatan daerah lain nya seperti HUT Kabupaten, HUT RI dan kegiatan masyarakat lainnya. Pengamanan ini adalah kerjasama dengan Pihak Kepolisian dan TNI yang juga menempatkan personilnya di masing-masing Pos Pengamanan. Pada kegiatan ini juga terdapat operasional Penanggulangan Kebakaran. Pada Tahun 2109 kejadian kebakaran di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 129 kali yang semuanya dapat ditaatasi oleh petugas Pemadam Kebakaran. Dana yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 800.579.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 720.137.718 atau (89,95%).



Permasalahan

1. Dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran adalah jarak tempuh Pos Pemadam Kebakaran dengan lokasi kebakaran masih jauh dikarenakan Pos Pemadam Kebakaran saat ini yang di 5 Pos Pemadam Kebakaran.
2. Kurangnya Mobil Pemadam Kebakaran serta jumlah personil yang sedikit.

Solusi

1. Pengusulan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran sehingga disetiap kecamatan terdapat minimal 1 Pos Pemadam Kebakaran dengan 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran.
2. Penambahan personil Pemadam Kebakaran sesuai dengan Unit Mobil Pemadam Kebakaran.
3. Mengadakan Pelatihan dan Pendidikan Formal bagi Personil Pemadam Kebakaran

b. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Pada program ini merupakan kegiatan Operasi Penertiban Pekat, Perda, Keputusan Bupati, IMB dan DMJ sebagai garda terdepan dalam penegakan Perda dan upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Satuan Polisi Pamong praja telah menjalankan operasi-operasi untuk menegakkan Perda dengan berkoordinasi dengan instansi dan OPD lainnya. Realisasi kegiatan ini adalah Razia rutin untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, mengamankan peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah serta menjaga aset-aset daerah serta operasi Penertiban Pekat. Dalam rangka penegakan Perda dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Satpol PP Kabupaten Dharmasraya selalu diikutkan oleh OPD terkait seperti pengurusan IMB oleh DPMPTSP, Pemungutan pajak dan retribusi oleh BKD maupun OPD lainnya. Selain operasi diatas, Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Dharmasraya juga melakukan operasi rutin razia pegawai yang berkeliaran pada jam kerja dan operasi penertiban anak sekolah yang berkeliaran pada jam pelajaran.



Dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 123.338.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 117.287.400,- atau sebesar 95,09%.

Permasalahan

1. Masih ada Cafe atau tempat hiburan malam yang disinyalir adanya pelanggaran Peraturan Daerah seperti Praktek Prostitusi dan Pornografi.
2. Masih adanya hotel yang menerima pasangan luar nikah untuk menginap di kamar-kamar hotel.

Solusi

1. Melakukan Sosialisasi dan Musyawarah dengan pemilik Cafe dan juga tokoh masyarakat untuk penutupan Café dan tempat hiburan malam.
2. Operasi penertiban Pekat yang dilakukan secara berkala.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak perhotelan dan melakukan razia secara berkala serta memberikan penyuluhan terutama terhadap generasi muda tentang bahaya pergaulan bebas di luar nikah.
4. Melakukan Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

6. SOSIAL.

Pada Tahun 2019 Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan berbagai program dan kegiatan-kegiatan yakni sebagai berikut :

A. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Peningkatan Kemampuan (capacity building) petugas dan pendampingan sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 102.860.000,- (Seratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebanyak Rp.102.530.000 (Seratus dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau 99,68%.

Permasalahan dan Solusi :**1. Permasalahan**

Dalam pelaksanaan kegiatan ini ditemukan suatu kendala dimana dengan adanya keterbatasan anggaran mengakibatkan pengganti transportasi untuk PSM hanya 4 bulan dari 12 bulan dan TSKS sebanyak 10 bulan dari 12 bulan, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan dan pengambilan data kurang lancar.

2. Solusi

Solusi yang sudah dilaksanakan adalah memberikan pembinaan secara berkala serta memberikan motivasi terhadap PSM dan TSKS sehingga Tenaga Relawan dilapangan bisa bekerja secara maksimal

2) Monitoring dan Evaluasi Bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 43.745.000,- (Empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 43.449.500,- (Empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau 99,32%.

Permasalahan dan Solusi :**1. Permasalahan**

Dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan permasalahan dan kendala yaitu :

- a. Masih ada 1.572 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum tersalurkan;
- b. Belum lengkapnya mesin EDC yang disediakan di E-Warong oleh pihak Himbara (Bank Mandiri).



2. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah menyurati pihak Kementerian Sosial RI untuk mengusulkan perpanjangan waktu untuk pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan selain itu juga dilakukan koordinasi dengan pihak Himbara untuk e-Warong yang belum ada mesin EDC setiap pencairan BPNT pihak Himbara langsung ke e-Warong dengan menggunakan mesin EDC off Line setiap pencairan setiap bulannya.

B. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Verifikasi dan validasi data fakir miskin dan PMKS lainnya

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 115.460.000,- (Seratus lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 115.284.718 (Seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) atau 99,85%

Permasalahan dan Solusi :

1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan permasalahan

- a. Masih banyaknya petugas yang kurang paham dengan tugas yang akan mereka kerjakan baik sebagai pendata maupun operator;
- b. Belum terakomodirnya anggaran untuk petugas pendata setiap bulanya;
- c. Masih ada jorong dan Nagari yang belum melakukan verifikasi.

2. Solusi

- d. melakukan peningkatan kapasitas petugas pendataan dan operator
 - e. Mengalokasikan anggaran untuk honorarium petugas pendataan dan Operator
 - f. Melihat edaran percepatan pendataan.
-



C. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial,
dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Program dan Kegiatan :

Kegiatan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Dharmasraya bertujuan untuk kesejahteraan sosial bagi masyarakat Dharmasraya terutama masyarakat kurang mampu dan memberikan dukungan pemberdayaan kepada keluarga tertinggal diseluruh nagari dan jorong di Kabupaten Dharmasraya. Bentuk kegiatan yang sudah terlaksana adalah pembinaan terhadap posdaya yang sudah terbentuk dan mengaktifkan posdaya yang sudah terbentuk tapi tidak aktif, disamping itu juga ada kegiatan fasilitasi pembagian hewan qurban kepada seluruh nagari untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Kegiatan ini bekerjasama dengan Pemda kabupaten Dharmasraya. Selain LKKS, juga ada kegiatan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mana kegiatan ini merupakan pendampingan terhadap keluarga yang bermasalah seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan. Pendampingan dimulai dari keluarga sampai ke badan hukum dan persidangan, dilengkapi dengan bantuan/dampingan psikologi. Tahun 2019 ada 6 kasus yang didampingi.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 51.481.500,- (lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 50.953.750 (Lima puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 99,97 %.



Permasalahan dan Solusi :

1. Permasalahan

Permasalahan yang ditemukan terkait kegiatan kelembagaan ini adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan, disamping itu masyarakat juga masih belum mau untuk melaporkan kasus-kasus yang belum terdampangi

2. Solusi

Solusi yang sudah dilaksanakan adalah dengan memberikan kepada masyarakat serta memberikan sosialisasi kepada semua pihak tentang keberadaan LK3 dan LKKS.

A. BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial, dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.

Program dan Kegiatan :

Kegiatan ini berupa cepat, tanggap darurat terhadap bencana alam maupun bencana sosial.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Dana tersedia sebesar Rp.76.585.000,- terealisasi Rp.74.699.750,- atau serapan dana 97,54 %. Keberhasilan kegiatan 100 %. Kegiatan ini berupa pengurusan biaya jenazah termasuk biaya sewa Pemakaman, pendistribusian barang-barang logistik bencana kepada korban bencana alam dan bencana sosial, jasa transportasi petugas kebencanaan, pembukaan dapur umum lapangan dan evakuasi korban bencana serta perjalanan dinas. Total KK yang terdampak korban bencana sebanyak 682 KK.

Permasalahan dan Solusi :

1. Permasalahan

- a. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait masalah kebakaran



2. Solusi

Membentuk tim cepat tanggap darurat daerah Kabupaten Dharmasraya

2) Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak

Program dan Kegiatan :

Yakni kegiatan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum (usia 1 s/d 18 tahun) terhadap kasus : penelantaran anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pencabulan, penganiayaan dan pencurian baik anak sebagai palaku, korban maupun saksi. Wujud kegiatan pendampingan adalah : pendampingan saat mem-BAP di Polsek/polres, mengembalikan fungsi anak di masyarakat, meminimalisir tingkat stress anak dalam menghadapi masalah, proses persidangan dan tindak lanjut/terminasi. Selama 2019 telah melakukan pendampingan sebanyak 14 (empat belas) kasus dengan jumlah anak yang didampingi 32 (tiga puluh dua) orang.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Adapun dana yang tersedia terhadap pendampingan kegiatan tersebut sebesar Rp.23.590.000,- terealisasi Rp.22.513.500,- atau serapan dana 95,44. Keberhasilan kegiatan 100 %. Resapan dana dipergunakan untuk jasa pengganti transportasi tim profesi, bantuan sidang, perjalanan dinas, makan minum rapat acara Peksos Go School dalam rangka peningkatan motivasi, edukasi, komunikasi, penyebaran informasi dan perubahan perilaku terhadap siswa-siswi sekolah tentang perlindungan anak, KDRT, narkoba, kenakalan remaja, motivasi belajar dan informasi lain yang dianggap penting. Target pendampingan 20 (dua puluh) orang, ada penurunan kasus anak di Tahun 2019 sebanyak 14 (empat belas) kasus dengan jumlah anak ABH 32 (tiga puluh dua) orang.

Permasalahan dan Solusi:

1. Permasalahan

- a. Masih adanya sebagian masyarakat yang masih merasa takut untuk melaporkan kasusnya ke aparat;



- b. Kurangnya SDM yang membidangi masalah perlindungan anak (psikolog, psikiater, peksos professional)
- c. Belum adanya rumah aman/rumah singgah bagi anak-anak yang harus dilindungi.

2. Solusi :

- a. Peningkatan laporan SDM terkait perlindungan anak
- b. Pembangunan rumah aman/rumah tinggal bagi anak

3) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, anak Cacat dan Anak Nakal.

Program dan Kegiatan:

yakni kegiatan fasilitasi untuk anak-anak terlantar dan anak-anak putus sekolah yang akan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dipanti-panti sosial dibawah UPTD Kemensos RI maupun di UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Anak-anak yang dikirim sangat bervariasi ada yang masa pembinaan 6 (enam) bulan, bahkan ada yang sampai umur 35 (tigapuluh lima) tahun. Adapun kegiatan di UPTD tersebut disesuaikan dengan kemampuan anak, misal: berlatih komputer, message, menjahit, bordir, las, elektronika, listrik, membuat batik dan bahkan ada yang mengikuti program sekolah formal.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Adapun dana yang tersedia untuk kegiatan fasilitasi tersebut sebesar Rp.9.775.200,- terealisasi Rp.9.769.000,- atau serapan dana 99,94%. Keberhasilan kegiatan 100 %. Resapan dana dipergunakan untuk fasilitasi anak-anak kepanci sosial berupa makan minum anak diperjalanan.

Permasalahan dan Solusi :

- 1. Permasalahan
 - a. Angka anak putus sekolah tinggi, anggaran, sarana dan prasarana untuk melatih anak di tingkat kabupaten sangat terbatas.



-
- b. Belum adanya panti yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, padahal harapan masyarakat sangat tinggi terhadap adanya panti social milik Pemda.
 - c. Kurang minat nya masyarakat untuk membuka panti-panti sosial.
2. Solusi
- a. Peningkatan sarana dan prasarana di panti sosial
 - b. Perlunya sosialisasi kemasyarakat tentang ikut sertanya masyarakat dalam pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang ada di lingkungannya.

4) Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia

Program dan Kegiatan :

Yakni kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia yang kehidupannya kurang beruntung dengan, misal lansia yang ditinggalkan keluarga, lansia dalam kondisi sakit/memiliki potensi, lansia penyandang disabilitas, lansia yang masih potensial tetapi tidak mempunyai modal usaha dan sebagainya. Sasaran kegiatan ini adalah sebanyak 3.402 (tiga ribu empat ratus dua) orang.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Adapun dana yang tersedia untuk kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia tersebut sebesar Rp.81.115.000,- terrealisasi Rp.80.894.750,- atau serapan dana 99,73%. Keberhasilan kegiatan 100 %. Resapan dana dipergunakan untuk Bantuan Perumahan Lansia sebanyak 104 (seratus empat) orang, Home Care Lansia 20 (dua puluh) orang, Alat Bantu Lansia 26 (dua puluh enam) orang dan peringatan Hari Lanjut Usia Tingkat Nasional ke 23 Tingkat Provinsi Sumatera Barat,

Permasalahan dan Solusi :

- 1. Permasalahan
 - a. Masih adanya Lansia yang belum tersentuh oleh bantuan, hal ini dikarenakan letak lokasi yang terlalu jauh, tidak



memiliki identitas kependudukan, belum melakukan sidik jari sehingga masih memakai identitas yang lama.

- b. Anggaran/dana yang tidak mencukupi, untuk kegiatan sosialisasi menghadapi masa lansia yang mandiri karena angka harapan hidup semakin lama semakin meningkat sehingganya akan muncul masalah sosial yang baru.

2. Solusi

- c. Sudah disampaikan ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan tentang belum adanya identitas kependudukan bagi warga Lansia.
- d. Bagi Lansia yang terlalu jauh jangkauan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan siap untuk melayani sampai dengan tingkat nagari.

5) Pelayanan dan Pendampingan Penyandang Disabilitas di Luar Panti

Program dan Kegiatan

Yakni kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan para Penyandang Disabilitas yang kehidupannya kurang beruntung dan penuh keterbatasan, terutama bagi penyandang disabilitas berat. Jenis penyandang disabilitas yang diberikan bantuan adalah cacat ganda (fisik dan mental), cacat fisik, cacat mental, netra, runguwicara.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Adapun dana yang tersedia untuk kegiatan Pelayanan dan Pendampingan Penyandang Disabilitas di Luar Panti tersebut sebesar Rp.34.365.000,- terealisasi Rp.34.137.500,- atau serapan dana 99,34%. Keberhasilan kegiatan 100 %. Resapan dana dipergunakan untuk Bantuan Permakanan Penyandang Disabilitas sebanyak 104 (seratusempat) orang, perjalanan dinas untuk distribusi bantuan.



6) Pelayanan dan Pembinaan bagi Tuna Sosial dan PMKS lainnya di Luar Panti

Program dan Kegiatan

Yakni kegiatan dalam rangka memfasilitasi para penyandang tuna sosial (gelandangan, pengemis) termasuk di dalam nya orang terlantar dalam perjalanan, gangguan psikotik/mental, eks. Gangguan psikotik dan pengguna napza baik dipulangkan ketempat asal, ke Rumah Sakit Jiwa, kepusat-pusat Rehabilitasi Sosial.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Adapun dana yang tersedia untuk kegiatan Pelayanan dan Pembinaan Tuna Sosial dan PMKS lainnya di Luar Panti tersebut sebesar Rp 34.365.000,- terealisasi Rp.34.137.500,- atau serapan dana 99,34%. Keberhasilan kegiatan 100 %. Resapan dana dipergunakan untuk bantuan transportasi dan perjalanan dinas untuk mengantar dan memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ketempat-tempat sesuai dengan masalahnya. Target sasaran 30 (tigapuluh) orang, sedangkan realisasi untuk orang terlantar 21 (duapuluhsatu) orang, eks. Gangguan kejiwaan 1 (satu) orang dan gangguan mental 1 (satu) orang. Target yang ditentukan ini sesuai dengan kondisi di lapangan.

Permasalahan dan Solusi :

1. Permasalahan

- a. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab terhadap penyelamatan orang dengan gangguan kejiwaan.
- b. Anggaran/dana yang tidak mencukupi, sehingga penyelamatan terhadap orang dengan gangguan kejiwaan kadang-kadang hanya sebatas kemampuan keuangan saja.

2. Solusi

- a. melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait gangguan jiwa Dinas Kesehatan, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan.



b. Penambahan alokasi anggaran gangguan Jiwa

D. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

2) Jaminan Sosial untuk Anak Yatim

Program dan Kegiatan:

yakni bantuan paket alat tulis sekolah untuk anak yatim, yatim-piatu, piatu, anak miskin Dengan jumlah sasaran 260 (dua ratus enam puluh) orang.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Adapun dana yang tersedia untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.50.001.450,-,- realisasi Rp.49.867.250,- atau sekitar 99,73%. Realisasi fisik kegiatan 100 %. Serapan dana dipergunakan untuk pengadaan alat tulis sekolah dan perjalanan dinas untuk distribusi paket.

Permasalahan Dan Solusi :

1. Permasalahan

- a. Masih banyaknya anak yatim dari keluarga yang belum mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan paket ATK sekolah.

2. Solusi

- a. Penambahan alokasi Anggaran tentang terkait ATK sekolah bagi anak yatim dari keluarga miskin
- b. Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan

Program dan Kegiatan :

Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI melalui seleksi dan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Indeks bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat adalah sebagai berikut :

**Bantuan Tetap Setiap Keluarga :**

- | | | | |
|-------------|------------------------|---|---------------------------------------|
| - REGULER | Rp. 550.000,-/Klg/ | } | Dibayarkan hanya 1 kali dalam setahun |
| - PKH AKSES | Rp. 1.000.000,-/Klg/Th | | |

Bantuan Komponen Setiap Jiwa :

- | | | | | |
|----------------------|-----------------|---|---|--|
| 1. IBU HAMIL | Rp. 2.400.000,- | } | - | Dibayarkan 4 kali dalam setahun, maksimal 4 komponen pilih yang paling besar |
| 2. ANAK USIA DINI | Rp. 2.400.000,- | | | |
| 3. SD | Rp. 900.000,- | | | |
| 4. SMP | Rp. 1.500.000,- | | | |
| 5. SMA | Rp. 2.000.000,- | | | |
| 6. DISABILITAS BERAT | Rp. 2.400.000,- | | | |
| 7. LANJUT USIA | Rp. 2.400.000,- | | | |

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Realisasi fisik 100 %, sedangkan realisasi keuangan dengan dana tersedia Rp.85.845.000,- realisasi Rp.85.643.900,- atau sekitar 99,77 %. Resapan dana dipergunakan untuk Jasa Pengganti Transportasi dan Akomodasi Pendamping PKH, makan minum rapat koordinasi pendamping PKH dengan Korwil dan perjalanan dinas. Sedangkan jumlah anggaran dari Kemensos RI untuk program PKH mulai tahap I s/d IV terealisasi sebesar Rp.17.254.525.000,- dengan total KPM 4.622.

Permasalahan dan Solusi :

1. Permasalahan
 - a. Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan program PKH
2. Solusi
 - a. Melakukan Pendataan ulang tentang BDT



b. URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**1. Tenaga Kerja**

Urusan tenaga kerja, merupakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

f. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

- 14)** Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Rp. 93.059.000,- Realisasi Anggaran sampai 31 Desember 2019 Rp. 85.817.538,-
- 15)** Operasional Administrasi BLK Rp. 63.680.000,- Realisasi Anggaran sampai 31 Desember 2019 Rp. 54.745.249,-

g. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- 1) Kegiatan Penyaluran Penempatan Tenaga Kerja Rp. 240.752.200,- Realiasi Anggaran sampai 31 Desember 2019 Rp. 232.799.835,-
- 2) Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja Rp. 28.086.750 Realiasi Anggaran sampai 31 Desember 2019 Rp. 25.957.950,-
- 3) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Rp. 45.025.000,- Realisasi Anggaran sampai 31 Desember 2019 Rp. 29.692.753,-

h. Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja

- 1) Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Rp. 402.826.500,- Realiasi Anggaran sampai 31 Desember 2019 Rp. 386.542.900,-

i. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- 1) Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial Rp. 23.551.200,- Realiasi Anggaran sampai 31 Desember 2019 Rp. 18.745.000,-
- 2) Kegiatan Pendataan Perusahaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Rp. 17.128.750,- Realiasi Anggaran sampai 31 Desember 2019 Rp. 10.119.150,-
- 3) Kegiatan Pembinaan P2K3 dan LKS Bipartite Rp. 30.795.000,- Realisasi Anggaran sampai 31 Desember 2019 Rp. 10.971.000,-



2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, merupakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1) Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus anak. Kegiatan pengembangan KLA meliputi kegiatan pemenuhan hak anak atas 5 (lima) kluster hak anak diantaranya hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang serta hak perlindungan khusus.

Kegiatan pengembangan KLA yang dilaksanakan tahun 2019 dalam rangka pemenuhan hak sipil dan kebebasan diantaranya melalui peningkatan kapasitas (Capacity Building) forum anak, keterlibatan forum anak dalam musrenbang serta sosialisasi program kegiatan forum anak ke beberapa sekolah. Pemenuhan hak anak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan kegiatan Sosialisasi Puskesmas Ramah Anak dan telah ditetapkan 6 dari 14 puskesmas di Kabupaten Dharmasraya menjadi puskesmas ramah anak antara lain Puskesmas Sungai Dareh, Puskesmas Sitiung I, Puskesmas Sungai Rumbai, Puskesmas Gunung Medan, Puskesmas Koto Baru dan Puskesmas Timpeh. Pemenuhan hak anak atas pendidikan dengan kegiatan Sosialisasi Sekolah Ramah Anak serta menginisiasi sekolah – sekolah untuk menjadi sekolah ramah anak. Pada tahun



2019, telah ditetapkan 26 sekolah menjadi sekolah rintisan pengembangan sekolah ramah anak. Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Nagari melalui Sosialisasi Kecamatan dan Nagari layak anak serta telah dilakukan pembinaan terhadap seluruh kecamatan dan nagari untuk menuju Kecamatan dan Nagari Layak Anak. Evaluasi KLA dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahun, pada tahun 2019 Kabupaten Dharmasraya telah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Pratama. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 110.415.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 108.949.500 (98,67%).

Permasalahan

- a. Masih kurangnya pemahaman, koordinasi, kerjasama serta dukungan dari OPD terkait tentang data dukung KLA;
- b. Sulitnya mendapatkan data terpilah di OPD terkait;
- c. Masih kurangnya sosialisasi KLA pada Stakeholder;
- d. Belum semua sekolah dan puskesmas menginisiasi menjadi sekolah dan puskesmas ramah anak;
- e. Keterlibatan forum anak dalam perencanaan anggaran masih terbatas.

Solusi

- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait berkaitan dengan data dalam rangka percepatan KLA;
- b. Mendorong semua sekolah dan puskesmas untuk menjadi sekolah dan puskesmas ramah anak;
- c. Mengupayakan kegiatan sosialisasi KLA kepada semua unsur terkait;
- d. Melakukan diseminasi informasi kepada pemerintah kecamatan dan nagari untuk melibatkan forum anak dalam musrenbang.

b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

- 1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).**



P2TP2A merupakan sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. Kegiatan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak meliputi pelatihan peningkatan kapasitas pengurus P2TP2A, pembinaan P2TP2A dan pembentukan jejaring di kecamatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengurus P2TP2A dalam memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Kelompok sasarannya adalah seluruh pengurus P2TP2A kabupaten dan sekretaris kecamatan dalam rangka membuat jejaring P2TP2A. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 50.637.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 45.108.732,- atau (89,08%).

Permasalahan

- a. Belum memadainya sekretariat P2TP2A di Kabupaten Dharmasraya
- b. Masih rendahnya tingkat kehadiran pengurus P2TP2A dalam rapat dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas SOSP3APPKB.
- c. Masih kurangnya pemahaman pengurus P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak
- d. Masih lemahnya jejaring P2TP2A di kecamatan
- e. Masih kurangnya sosialisasi dan koordinasi P2TP2A kabupaten kepada Jejaring kecamatan

Solusi

- a. Mengupayakan pelatihan, rapat dan koordinasi pada pengurus P2TP2A untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak serta mengupayakan sekretariat P2TP2A dengan berkoordinasi dengan Pemda Dharmasraya.
- b. Untuk meningkatkan kehadiran pengurus perlu upaya pendekatan dan penegasan pentingnya P2TP2A dalam



mencegah dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

- c. Melakukan desiminasi informasi dan pembinaan kepada jejaring kecamatan

2) Kegiatan Penguatan kelembagaan PUG

Arah kebijakan PUG dalam RPJM 2015- 2019 (Perpres No.2 Tahun 2015) salah satunya adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kegiatan penguatan kelembagaan PUG ini meliputi sosialisasi PUG dan pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi seluruh OPD diharapkan dapat menghasilkan anggaran responsif gender dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodir kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 77.602.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 77.586.500,- atau (99,98%).

Permasalahan

- a. Kurangnya koordinasi antar OPD sementara pembentukan Pokja sudah dilaksanakan
- b. Adanya keterlambatan pengesahan peraturan Bupati tentang rencana aksi daerah PUG (RAN PUG)

Solusi

- a. Mengupayakan Pelatihan Analisis Gender bagi Pokja PUG
- b. Mempercepatan pengesahan Peraturan Bupati tentang RAN PUG

c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan,

1) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan meliputi seminar kapasitas building, Bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi perempuan, seminar hari ibu serta biaya rapat untuk kegiatan organisasi. Sasaran dari kegiatan ini adalah semua organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Jumlah



dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 629.885.900,- dengan realisasi keuangan Rp. 622.946.489 (97,98%).

Permasalahan

- a. Tidak semua organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Dharmasraya memiliki akta pendirian dan terdaftar di Kesbangpol.
- b. Masih kurangnya pemahaman organisasi perempuan dalam kepengurusan akta pendirian.

Solusi

- a. Mengupayakan desiminasi informasi kepada semua organisasi perempuan dalam kepengurusan akta.

Pangan

Urusan pangan, merupakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Perikanan dengan beberapa program sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1) Lomba Cipta Menu B2SA tingkat Kabupaten dan Provinsi dan Nasional

Dalam rangka untuk memperoleh Sumberdaya Manusia yang sehat dan berkualitas, maka sumber makanan yang beragam, seimbang, bergizi dan aman merupakan hal yang sangat penting untuk dipenuhi. Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, seimbang dan aman dapat terpenuhi dari pangan yang ada di lingkungan kita. Oleh sebab itu, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami pentingnya Konsumsi Pangan yang Bergizi, Beragam, seimbang dan aman ini perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengedukasi masyarakat terutama ibu-ibu sebagai pelaku utama dalam mengatur pola konsumsi pangan tingkat rumah tangga. Pagu dana yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 71.865.000,- dengan realiasi Fisik 100% dan serapan dana sebesar Rp. 71.669.000,- atau (99,72%).

Permasalahan



- a. Kurangnya konsumsi makanan beragam, bergizi, seimbang dan Aman di tengah masyarakat dikarenakan terbatasnya pengetahuan pengolahan makanan yang B2SA
- b. Masih kurang termanfaatkannya Pangan Lokal dalam menu B2SA (seperti Ubi, Jagung, pisang dll)

Solusi

Terus dilakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi Makanan B2SA kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan ibu-ibu Rumah Tangga dan organisai wanita (PKK, KWT, Dasa Wisma) seperti Lomba Masak.

2) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar

Penggunaan bahan-bahan Non Pangan berbahaya pada makanan pada saat ini marak dilakukan dan banyak ditemukan beredar di tengah masyarakat. Makanan dengan menggunakan zat seperti Borax, Siklamat, Rhodamin B serta zat berbahaya lainnya beredar dengan leluasa di tengah masyarakat terutama di pasar-pasar tradsional. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mayarakat tentang dampak mengkonsumsi zat-zat berbahaya tersebut bagi tubuh. Kegiatan Peningkatan mutu dan Keamanan Pangan Segar memuat komponen berupa Pengawaan terhadap makanan yang berpotensi menggunakan bahan non pangan berbahaya pada pasar-pasar tradisional dan jajanan anak sekolah. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara pengambilan sampel bahan makanan dan dilakukan pengujian serta melakukan sosialisasi kepada mesyarakat tentang dampak dari konsumsi bahan non pangan berbahaya tersebut. Pada kegiatan ini realisasi Fisiknya 100% sedangkan keuangannya 88,36% dengan dana yang terealisasi Rp.50.377.500,- dari pagu dana Rp.57.010.000,-.

Permasalahan :

- a. Masih tingginya penggunaan bahan kimia sebagai tambahan makanan yang sangat berbahaya bagi tubuh(Formalin, Borax. Rhodamin B dan Methanil Yellow serta adanya unsur daging babi pada makanan.



-
- b. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pelaku pengolahan makanan tentang dampak penggunaan bahan tambahan makanan yang berbahaya bagi kesehatan
 - c. Masih kurang intensivenya pengawasan dan pengujian sampel dikarenakan terbatasnya biaya pengujian dan ketersediaan peralatan uji (Rapid test)

Solusi

- a. Terus meningkatkan Pengawasan dan pengujian sampel untuk mengurangi laju penggunaan bahan berbahaya pada makanan tersebut
- b. Mengalokasikan anggaran yang lebih memadai sesuai kebutuhan untuk pembelian peralatan uji dan pengiriman sampel uji ke laboratorium sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih intensive dengan frekuensi yang lebih banyak.
- c. Terus mengedukasi masyarakat dan pengolah makanan untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang di beli dan pengolah makanan lebih bijak dalam melakukan usaha/kegiatannya.

3) Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan Pangan

Dalam rangka untuk meningkatkan konsumsi pangan yang beragam ditengah masyarakat dalam rangka untuk mencapai tujuan peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), maka Pekarangan dapat di jadikan salah satu alternative pemenuhan pangan keluarga. Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan Pangan dilakukan melalui pengembangan KRPL yaitu Kawasan Rumah Pangan Lestari bekerjasama dengan Kelompok Wanita Tani (KWT).

Untuk menjaga keberlanjutan Kawasan Rumah Pangan Lestari sebagai sumber bahan pangan keluarga maka terus dilakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan untuk pengembangan pangan melalui Baliho. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan ini di dukung dana sebesar Rp. 41.400.000, dengan realisasi sebesar Rp. 41.312.500,- (99,78%)

Permasalahan



- a. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan Pangan sehingga pekarangan yang ada tidak termanfaatkan secara maksimal
- b. Kurangnya pengetahuan teknis kelompok dalam budidaya tanaman
- c. Tidak maksimalnya kelompok untuk memanfaatkan demplot sebagai laboratorium pangan

Solusi

- a. Perlu terus dilakukan sosialisasi dan ajakan untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan
- b. Memberikan pengetahuan melalui pelatihan tentang budidaya tanaman pekarangan
- a. Mengalokasikan anggaran untuk Kawasan Ruah Pangan Lestrai (KRPL)

4) Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok

Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok bertujuan untuk mendapatkan data harga pangan dengan cepat, mudah, dan aktual dan secara kontinyu (time series) yang berhubungan dengan kondisi pasokan, harga, dan ketersediaan aktual komoditas bahan pangan. Mengidentifikasi potensi permasalahan yang berhubungan dengan komoditas bahan pangan yang menyebabkan terganggunya pasokan dan harga komoditas pangan di kabupaten/kota. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data harga pangan eceran di pasar tradisional se Kabupaten Dharmasraya, tersedianya data harga pangan ditingkat pedagang besar se Kabupaten Dharmasraya, terdapatnya informasi tentang faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang mempengaruhi distribusi dan harga pangan, seperti kondisi ketersediaan pasokan, permintaan, dan stok bahan pangan pokok strategis. Pada kegiatan ini realisasi Fisiknya 100% sedangkan keuangannya 97,39 % dengan dana yang terealisasi Rp.18.499.750,- dari pagu dana Rp.18.995.000,-.



5) Operasional Dewan Ketahanan Pangan

Kegiatan Operasional Dewan Ketahanan Pangan ini merumuskan kebijakan meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi. Pada kegiatan ini realisasi Fisiknya 100% sedangkan keuangannya 90,86 % dengan dana yang terealisasi Rp.11.517.000,- dari pagu dana Rp.12.675.000,-.

6) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebar informasi situasi pangan dan gizi. Kegiatan SKPG memiliki tujuan menganalisis situasi pangan dan gizi dan meningkatkan kemampuan petugas dalam menganalisis situasi pangan dan gizi. Hasil dari kegiatan SKPG ini berupa rumusan dan kebijakan dalam mewaspadaai situasi pangan dan gizi masyarakat.

Sasaran kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi adalah terpetakannya tingkat kerawanan pangan dimasyarakat pada tingkat kecamatan-kecamatan. Dalam Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ini juga dilakukan pemberian bantuan bahan pangan untuk keluarga yang rawan pangan dengan sasaran penerima adalah Balita yang mengalami gizi kurang. Pada Tahun 2019, bantuan yang diberikan sebanyak 80 Paket yang diberikan kepada 10 Balita di Kec. Timpeh, 22 Balita di Kec. Koto Besar, 19 Balita di Kec. Sungai Rumbai dan 29 Balita di Kec. Koto Baru. Pada kegiatan ini realisasi Fisiknya 100% sedangkan keuangannya 94,49 % dengan dana yang terealisasi Rp.64.097.750,- dari pagu dana Rp.64.660.000,-.

Permasalahan

Setelah dilakukan evaluasi pada tahap pelaksanaan Pemberian Bahan/Makanan Tambahan terhadap balita Gizi Kurang (80 balita sasaran), bahwa masih banyak ditemui dalam pemanfaatan bantuan yang diterima di tingkat Rumah Tangga yang kurang tepat. Dimana



bahan/makanan tambahan yang diberikan masih banyak yang dimanfaatkan bukan untuk balita sasaran, melainkan oleh orang tua maupun anggota keluarga lainnya.

Solusi

- a. Diberikan pemahaman dan penumbuhan kesadaran terhadap orang tua balita.
- b. Dilakukan pendampingan dan pengawasan oleh petugas kesehatan dilapangan (bidan desa).
- c. Mencari pertimbangan bentuk/teknis lain dalam pemberian bahan/makanan tambahan pada tahun yang akan datang.

3. Pertanahan

Urusan pertanahan, merupakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

1) Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah aset pemerintah daerah sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan daerah. Pada tahun 2019 ini, telah dilaksanakan pengurusan administrasi pertanahan (sertipikat tanah) milik Pemerintah Daerah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya sebanyak 38 bidang tanah. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 160.155.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 157.310.994,- (98,22 %). Target Sertifikat tanah milik Pemda terselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 20 sertifikat, sedangkan realisasi sertifikat yang terselesaikan sebanyak 29 sertifikat.

Permasalahan



- a. Adanya efisiensi anggaran karena tidak semua proses sertifikasi tanah Pemda dikenai biaya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 25 tahun 2016, salah satu itemnya menyatakan bahwa pendaftaran pertama tanah Pemda dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nol rupiah.
- b. Belum semuanya usulan pensertipikatan tanah milik Pemerintah Daerah (Pemda) dapat diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya. Hal ini disebabkan adanya tanah aset Pemerintah Daerah dikuasi oleh masyarakat.
- c. Batas tanah yang dikuasai Pemda belum sepenuhnya dapat ditunjukkan secara jelas saat pengukuran ulang dengan petugas Kantor Pertanahan.
- d. Dokumen Asli kepemilikan tanah/ alas hak/ berita acara ganti rugi tidak ditemukan lagi.

Solusi

- a. Melakukan koordinasi secara intensif dengan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya guna percepatan penerbitan sertipikat tanah milik Pemda.
- b. Melakukan dialog dengan masyarakat dengan fasilitasi Pemerintah Nagari.
- c. Melaksanakan rapat pembahasan pensertipikatan tanah milik Pemda dengan OPD terkait.

b. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

1) Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi dan meminimalisir permasalahan yang akan muncul pada tanah milik Pemda. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 109.207.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 94.570.400,- (86,60 %). Target konflik tanah pemda yang terfasilitasi/terselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 10 (sepuluh)



konflik tanah, namun konflik tanah yang terdaftar hanya 9 kasus dan telah difasilitasi sebanyak 8 kasus (Daftar kasus terlampir).

Permasalahan

- a. Masih ada beberapa tanah Pemda yang tidak memiliki dokumen pendukung untuk penerbitan sertifikat tanah.
- b. Dalam penyelesaian konflik tanah Pemda belum ditemukan kesepakatan setelah beberapa kali mediasi antara Tim Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Solusi

- a. Melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat agar terdapat titik temu permasalahan tanah Pemda.
- b. Melakukan penertiban terhadap aset tanah Pemerintah Daerah.
- c. Dilakukan pemagaran, pemasangan patok dan plank merek pada tanah Pemda yang belum terkelola dengan baik.
- d. Melakukan proses sertifikasi untuk seluruh tanah Pemda sesegera mungkin.

4. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup, merupakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan

1) Kegiatan Penyusunan Manajemen Pengelolaan Persampahan

Kegiatan Penyusunan Manajemen Pengelolaan Persampahan bertujuan agar tersusun kebijakan daerah dalam pengelolaan sampah, berupa Perbup dan SOP dengan salah satu dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Pada kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun Perbup Revisi tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, Realisasi dari kegiatan ini tercapai 100% dengan terbitnya Perbup No. 13 Tahun 2019. Anggaran dari kegiatan ini berasal dari APBD tahun 2019 sebanyak Rp. 19.996.000,- dengan realisasi sebanyak Rp. 19.846.500,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,25%.

Permasalahan



Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait Penyesuaian tarif retribusi pelayanan persampahan, hal ini disebabkan karena tidak cukupnya anggaran untuk kegiatan sosialisasi di Tingkat Kecamatan dan nagari.

Solusi

telah disampaikan materi sosialisasi terkait perbub di atas melalui rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan atau nagari

2) Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan persentase penanganan pengelolaan sampah dan timbulan sampah yang tertangani. Pelayanan Pengelolaan Persampahan dilaksanakan dengan sasaran sebagai berikut:

- Kecamatan Pulau Punjung (Pasar, Perumahan Padang Duri, Nag. IV koto, Nag. Sungai Kambut, SMA 1 Pulau Punjung, Wisma Agung, RSUD Sungai Dareh, Perumahan Vilatama, Perumahan Sikabau Permata Indah, Perumahan Bumi Indah, Perumahan Sakinah).
- Kecamatan Sitiung (Perumahan Mega Permai 1, Pasar Blok B, Pasar Senggol Blok B, Perumahan Taratak Garden)
- Kecamatan Tiumbang (Pasar Blok E)
- Kecamatan Koto Salak (Pasar Ampalu)
- Kecamatan Koto Baru (MTSN Koto Baru, SPBU Abai, SMA Unggul Dharmasraya)

Metode yang digunakan berupa pengangkutan melalui:

- Becak motor meliputi Nagari Pulau Punjung, Perumahan Sakinah dan Wisma Agung.
- Dump Truck meliputi Nag. IV Koto Pulau Punjung, Nag. Sungai Kambut dan Pasar Pulau Punjung
- Pengangkutan dengan Arm Roll meliputi seluruh Pasar, Sekolah, SPBU dan Perumahan yang memiliki kontainer.



Hasil capaian kegiatan dari total jumlah penduduk Kab. Dharmasraya tahun 2019 sebanyak 214.592 orang menghasilkan sampah 150,214 kg perhari sama dengan 54,828 Ton per tahun sama dengan 166.146 m^3 per tahun. Dalam pengelolaannya sampah yang baru tertangani/terkelola sebanyak 86,345 m^3 . Maka untuk persentase penanganan sampah per tahunnya telah tertangani sebanyak 51,97 %, diperoleh dari perbandingan jumlah sampah yang tertangani dengan jumlah sampah per tahun 2019. Jika dibandingkan dengan Renja tahun 2019 dengan target hanya 42% maka persentase sampah yang tertangani telah melebihi target sebanyak 9,97 %, dengan capaian 123%. Anggaran dari kegiatan ini berasal dari APBD tahun 2019 sebanyak Rp. 405.266.600,- dengan realisasi sebanyak Rp. 395.540.500,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 97,60%.

Permasalahan

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana operasi pengolahan sampah
- b. Masih kurangnya petugas kebersihan/pasukan kuning
- c. Kurangnya SDM pengelolaan UPT Persampahan
- d. Kurangnya Anggaran UPT persampahan

Solusi

Mengefektifkan anggaran dan pemanfaatan sarana dan prasarana persampahan dengan cara memprioritaskan lokasi-lokasi yang strategis untuk dilakukan pelayanan dan memberdayakan warga masyarakat baik melalui kelompok-kelompok dasawisma, PKK maupun kelompok-kelompok peduli sampah lainnya.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,

1) Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura;

Merupakan kegiatan nasional yang bertujuan meningkatkan Peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, asri dan hijau dengan salah satu dasar hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang



Pedoman Pelaksanaan Program Adipura. Pada kegiatan ini dilaksanakan pada pusat ibu kota kabupaten dengan menetapkan beberapa titik pantau yang menjadi sasaran kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan menuju Adipura dengan anggaran yang sangat terbatas, sehingga dari anggaraan yang tersedia hanya cukup untuk pengadaan kontainer sampah beserta komposter. Anggaran dari kegiatan ini berasal dari APBD tahun 2019 sebanyak Rp. 152.970.000,- dengan realisasi sebanyak Rp. 151.044.204,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 98,74%.

Permasalahan

Masih banyak Masyarakat yang tidak mengerti dan paham dengan pengelolaan sampah, Kurangnya Anggaran untuk melakukan pembinaan ke titik pantau.

Solusi

telah dilakukan pendekatan melalui pemerintah nagari agar pengelolaan sampah pada titik pantau Adipura dapat diprogramkan kegiatan pemberdayaan nagari melalui anggaran Nagari.

2) Pemantauan Kualitas Lingkungan;

Kegiatan ini dilakukan 2 kali setahun dalam melakukan pemantauan, pengambilan sampel dan pengujian sampel baik dilapangan maupun di laboratorium. Pemantauan kualitas lingkungan terdiri dari pemantauan kualitas air permukaan (sungai), dan Pemantauan kualitas udara ambient.

Untuk Pemantauan Kualitas Air Permukaan (Sungai) terdiri dari 22 titik pantau yaitu Sungai Batang Hari; Batang Hari Batu Bakawuik, Batang Hari Sungai Dareh, Batang Hari Siguntur, Batang Hari Pulau, Batang Hari Teluk Lancang (berbatasan dengan Kab. Tebo). Untuk Sungai lainnya adalah; Hulu dan Hilir Batang Momong, Hulu Batang Pangian (Takung), Hilir Batang Pangian (Jl. Baru Pulau Punjung), Hulu Batang Timpeh (Kec. Padang Laweh), Hilir Batang Timpeh (Kec. Timpeh), Batang Piruko Gunung Medan, Sungai Koto Balai, Batang Mimpi 2 (Jemb. Sikabau), Batang Mimpi 1 (Inlet PDAM), Batang Siat 1 (abai Siat), Batang Sinabuhan, Batang Siat 2 (RM



Suci), Batang Siat 3 (Jemb. Pulau Mainan), Sungai Betung, Batang Asam dan Batang Sinamar di Kec. Asam Jujuhan.

Untuk Pemantauan Kualitas Udara Ambien terdiri dari 11 titik pantau yang tersebar di tiap kecamatan. Titik pantau tersebut adalah ; depan Kantor Bupati (Kecamatan Pulau Punjung), depan Kantor Walinagari IV Koto Nan Dibawah (Kec. IX Koto), depan Kantor Camat Sitiung (Kecamatan Sitiung), depan Kantor Walinagari Muaro Sopan (Kecamatan Padang Laweh), depan kantor camat Timpeh (Kecamatan Timpeh), depan Kantor Walinagari Ampalu (Kecamatan. Koto Salak), depan Kantor Camat Sungai Rumbai (Kecamatan Sungai Rumbai), depan Kantor Camat Koto Baru (Kecamatan Koto Baru), depan Kantor Camat Koto Besar (Kecamatan Koto Besar), depan Kantor Camat Tiumang (Kecamatan Tiumang) dan depan Kantor Camat Asam Jujuhan (Kecamatan Asam Jujuhan). Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 16.443.800,- (enam belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 16.245.500,- (enam belas juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau dengan persentase realisasi 98,79%.

Permasalahan

data kualitas air permukaan dan kualitas udara ambien baru sebatas analisis beberapa parameter untuk memperoleh data primer dan belum mencakup ke perhitungan beban pencemaran dan indeks kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator baik tidaknya suatu lingkungan. Selain itu, beberapa lokasi titik pantau sungai yang masih sulit dijangkau membutuhkan kehati-hatian dan perlengkapan keselamatan dan keamanan kerja saat di lokasi pemantauan.

Solusi

ke depan yang diharapkan adalah dilakukan perhitungan beban pencemaran dan indeks kualitas lingkungan dari data primer yang telah dihimpun selama 1 (satu) tahun sehingga data dapat digunakan untuk kajian mutu sungai di masa mendatang dan indikator peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya



3) Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun kebijakan, perencanaan dan kajian strategis lingkungan yang berkaitan dengan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran dan keluaran dari kegiatan ini yaitu adanya kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dalam upaya pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Target kegiatan ini yaitu awalnya adalah 1 dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dan 1 dokumen draft Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Akan tetapi karena keterbatasan dana dan ada juga kegiatan lain yang perlu diprioritaskan sehingga target kegiatan dirubah menjadi 1 Dokumen DDDTLH, 1 dokumen KLHS RTRW dan Sosialisasi kebijakan terkait lingkungan hidup kepada *stakeholder* terkait.

Hasil kegiatan ini yaitu adanya hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten Dharmasraya yang tertuang dalam bentuk buku peta dan buku kajian analisis DDDTLH, kebijakan yang tertuang dalam bentuk laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam revisi RTRW Kab. Dharmasraya 2011-2030 dan sosialisasi hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kepada instansi terkait. Selanjutnya juga dilaksanakan pelatihan penyusunan peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan metode terbaru (sistem grid) dengan melibatkan narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan P3E Sumatera. Selain itu, kegiatan ini juga berupa koordinasi dan fasilitasi kegiatan terkait penyusunan DDDTLH, dokumen RPPLH dan sosialisasi peraturan terkait KLHS dan kebijakan lainnya tentang pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat dan KLHK-RI Jakarta.

Pagu dana kegiatan ini dengan total sebesar Rp.207.034.000,- (dua ratus tujuh juta tiga puluh empat ribu rupiah). Realisasi kegiatan



pada tahun ini yaitu sebesar Rp.206.362.792,- (dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) atau 99.68% dari pagu kegiatan.

Permasalahan

- a. Penyusunan dokumen perencanaan seperti Dokumen DDDTLH dan laporan KLHS revisi RTRW ini membutuhkan biaya yang cukup besar dengan melibatkan tim penyusun yang terdiri dari tim ahli dan tim teknis yang kompeten di bidangnya masing-masing.
- b. Sedangkan untuk penyusunan draft RPPLH dibatalkan karena anggaran yang tidak mencukupi.

Solusi

- a. Berkoordinasi dengan Bappeda selaku penyusun Kebijakan Rencana Program yang perlu KLHS terkait pendanaan penyusunan laporan KLHS kedepannya.
- b. Menghimpun informasi dengan melakukan koordinasi konsultasi ke DLH provinsi dan mengikuti kegiatan konsultasi publik terkait penyusunan Dokumen RPPLH agar dapat mengadopsi proses pelaksanaan kegiatan tersebut untuk dapat membuat perencanaan kegiatan dan anggaran yang ideal untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ditahun berikutnya.

4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup;

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk terbentuknya kelompok masyarakat peduli lingkungan dengan harapan kelompok masyarakat tersebut dapat berkontribusi dalam hal menjaga lingkungan setempat. Bila dilihat dari target Renja 2019 dengan target 3 kelompok masyarakat maka capaian kegiatan ini 2 kelompok masyarakat dengan persentase 66,66%. Adapun dua kelompok masyarakat peduli lingkungan tersebut adalah masyarakat Hutan Adat yang berlokasi di Nagari Koto Besar dan Bumrag Tebing Tinggi (Kegiatan LAT). Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini berasal dari APBD 2019 sebesar Rp. 4.341.050,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.965.500,- atau persentase realisasi sebesar 91,34%.



Permasalahan

luasnya Kabupaten Dharmasraya dan kurang tersedianya dana untuk memotivasi masyarakat dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Solusi

Solusi yang telah dilakukan ialah koordinasi lintas sektor dalam rangka memotivasi masyarakat untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

5) Pengkajian dampak lingkungan dan Pengawasan Jenis Usaha/Kegiatan

Tujuan kegiatan ini yaitu untuk melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap komitmen dalam pengelolaan lingkungan hidup pada usaha/kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan yang dilakukan minimal setiap semester atau sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, dan selain itu juga melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan. Kegiatan ini mencakup Program Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan (PROPER) dan pengawasan rutin terhadap usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan berpotensi merusak lingkungan.

Pada tahun 2019 ditargetkan 13 usaha/kegiatan diusulkan untuk mengikuti PROPER namun sesuai dengan kriteria PROPER dari KLHK-RI hanya 8 perusahaan yang lolos menjadi objek PROPER 2019 yang meliputi 5 usaha/kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit, 2 usaha/kegiatan pabrik kelapa sawit dan 1 usaha/kegiatan pabrik pengolahan karet. Dari 8 perusahaan objek PROPER, 6 (enam) diantaranya verifikasi lapangan dilakukan oleh tim PROPER DLH Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan DLH Kabupaten Dharmasraya sedangkan 2 (dua) perusahaan verifikasi lapangan dilakukan oleh DLH Provinsi Sumatera Barat. Hasil akhir penilaian PROPER 2019 akan diumumkan pada tahun 2020. Kegiatan



PROPER ini tidak ada anggaran khusus yang menompang pada kegiatan ini

Target kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dan Pengawasan Jenis Usaha/Kegiatan rutin adalah 15 (lima belas) usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan berpotensi merusak lingkungan. Realisasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 dilakukan pengawasan terhadap 22 perusahaan dengan persentase 146,66%, terdiri dari 5 usaha/kegiatan pabrik dan Perkebunan Kelapa Sawit meliputi perusahaan Incasi Raya Grup (PT Binapratama Sakatojaya; PT Sumbang Andalas Kencana; PT Incasi Raya Pangian; PT Selago Makmur Plantation) dan PT Andalas Wahana Berjaya (PT AWB), 2 usaha/kegiatan Pabrik Kelapa Sawit yakni PT. Dharmasraya Lestarindo (PT. DL) dan PT. Dharmasraya Sawit Lestari (PT. DSL), 1 usaha/kegiatan pabrik pengolahan karet PT Transco Pratama, 1 usaha/kegiatan Perkebunan HTI PT Bukit Raya Mudisa (PT BRM), 1 Pertamina yaitu PT. Jefri Abidin, 4 usaha/kegiatan stone crushing yaitu PT Kalidareh Cipta Sarana, PT Trijaya, PT Kharisma Wijaya Perkasa dan PT Batanghari Jaya Abadi, 6 usaha/kegiatan Fasyankes yaitu Puskesmas Koto Baru, UPT Puskesmas Sitiung I, Klinik Pratama Nurjinis, RSUD Sungai Rumbai, UPT Puskesmas Gunung Medan dan Puskesmas Padang Laweh, 1 usaha/kegiatan pertambangan batubara yaitu PT Sinamarinda Lintas Nusantara (PT SLN) dan 1 Instalasi Pengolahan Limbah Tinja.

Hasil yang dicapai dari Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup yaitu meningkatnya upaya pengendalian pencemaran dan berkurangnya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas usaha/kegiatan dan meningkatnya kesadaran akan pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan usaha/kegiatan dan masyarakat sekitar.

Pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari APBD TA 2019 sebesar Rp.34.504.500,-(tiga puluh empat juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah). Realisasi dana yaitu sebesar Rp.34.228.242,-(tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) atau terealisasi sebesar 99.19%



Permasalahan

- a. Masih terbatasnya anggaran pengawasan untuk melakukan pengawasan ke seluruh usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan di Kabupaten Dharmasraya, dan harus dilakukan pengawasan rutin 1x 6 bulan sesuai dengan dokumen pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan LH, serta diperlukan tindak lanjut kembali dari hasil pengawasan pada semester sebelumnya terhadap item yang belum memenuhi kategori taat;
- b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten karena kegiatan ini menuntut pemahaman teknis yang spesifik dan pernah melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis PPLHD. Dengan dinamika perkembangan saat ini, regulasi pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan sering mengalami perubahan dan perkembangan. Masih kurangnya pendanaan untuk peningkatan personil di bidang pengawasan lingkungan;
- c. Pada tahun 2019 telah tersedia jabatan fungsional tertentu pengawas lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya, akan tetapi personil yang mengisi jabatan tersebut belum mengikuti diklat dan belum disahkan secara hukum melalui pelantikan pejabat fungsional sehingga belum bisa melaksanakan fungsi jabatan untuk penerbitan sanksi administrasi secara tata laksanaanya berdasarkan verifikasi atau Berita Acara pengawasan oleh pejabat fungsional tertentu pengawas lingkungan hidup;
- d. Perlu dilakukan monev dan pembinaan bersama antara DLH kabupaten dan DLH provinsi terhadap usaha/kegiatan yang kurang taat.
- e. Perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan untuk mendorong pembuatan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan menyampaikannya ke DLH Kabupaten Dharmasraya.

Solusi



- a. pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen dan izin lingkungan dengan keterbatasan anggaran yang lebih minim dibanding tahun lalu namun dengan target yang sama;
- b. Perlunya peningkatan kapasitas personil dan Optimalisasi kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- c. JFT Pengawas Lingkungan Hidup yang telah ada perlu difasilitasi untuk menjalani serangkaian proses tahapan menuju pengukuhan JFT Pengawas lingkungan hidup hingga nantinya layak dan bisa disahkan secara hukum melalui Surat Keputusan Bupati.
- d. Melakukan tindak lanjut pengawasan, dan monev serta pembinaan bersama Tim DLH Provinsi dalam tindakan penataan terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup usaha/kegiatan.
- e. Melakukan sosialisasi secara khusus terkait pembuatan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke penanggungjawab usaha/kegiatan dengan pembinaan dan interaksi langsung kepada personil penanggungjawab lingkungan perusahaan.

6) Pendukung Operasional Laboratorium;

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin di UPT. Laboratorium Lingkungan, yang berfungsi mendukung kegiatan pemantauan, pengujian, pengawasan dan pengambilan sampel di UPT. Laboratorium. Kegiatan ini terdiri dari Pengadaan Alat-alat laboratorium, Alat dan Bahan Pembersih, bimtek, dan bahan kimia.

Pada tahun 2019, kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 84.465.000,- (delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 84.089.536,- (delapan puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) atau persentase realisasi sebesar 99,55%.

Permasalahan



laboratorium lingkungan harus melakukan akreditasi oleh KAN, dengan memenuhi persyaratan tersedianya kuantitas dan kualitas SDM yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi, memenuhi struktur organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan yang telah ditetapkan dalam PERBUP LABLING, harus dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang memenuhi standar dan tersedianya bahan kimia untuk analisis parameter-parameter kualitas air dan parameter kualitas udara, penyusunan dokumen laboratorium lingkungan sesuai dengan ISO17025.

Solusi

kedepan yang diharapkan adalah dilakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis, merekrut pegawai untuk memenuhi formasi struktur organisasi UPTD LABLING, tenaga analis dan tenaga yang berkompeten lainnya di bidang analisis lingkungan, dan diharapkan juga memberikan anggaran khusus untuk percepatan pelaksanaan UPTD Laboratorium yang terakreditasi.

7) Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3;

Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi Usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan Limbah B3 sasaran dari kegiatan ini adalah Usaha/Kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan TPS Limbah B3 di Kabupaten Dharmasraya dan penerbitan Izin limbah B3 yang baru.

Perusahaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan tahun 2019 sebanyak 12 perusahaan yaitu: PT. SAK, PT. Bina Pratama Sakato Jaya, PT. Transco Pratama, PT. SMP, PT. Pangian, RSUD Sungai Dareh, PT. TKA, PT. DL, PT. AWB, PT. Intercom, PT. DSL, PT. BRM.

Dari data perusahaan diatas beberapa perusahaan telah memperbaharui izin pengelolaan limbah B3 sebanyak 7 perusahaan (PT. SMP, PT. SAK, PT. Bina Pratama SJ, Pt. Transco, PT. TKA, PT. Pangian, PT. BRM) , 4 perusahaan masih izin lama hanya dilakukan pengawasan (PT. DL, DSL, AWB, RSUD Sungai Dareh) dan 1 perusahaan izin baru (PT. Intercom).



Jika dibandingkan target Renja 2019 yaitu 10 perusahaan terealisasi sebanyak 12 perusahaan atau 120%. Anggaran untuk kegiatan ini berasal dari APBD 2019 sebesar Rp. Rp. 17.218.750 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.109.500 atau 99,36%

Permasalahan

pada kegiatan ini Masih ada TPS Limbah B3 di pelaku Usaha/kegiatan yang belum sesuai regulasi

Solusi

Melakukan pembinaan dan sosialisasi kesetiap pelaku Usaha/Kegiatan agar pelaku Usaha/kegiatan mengerti dengan pentingnya pengelolaan Limbah B3 dan selalu Update dengan regulasi-regulasi baru.

8) Gerakan sumbar bersih (GSB)

Merupakan kegiatan untuk mendukung gerakan Sumatera Barat Bersih dengan sasaran kecamatan serta nagari yang ada di kabupaten Dharmasraya yang bertujuan meningkatkan Peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, asri dan hijau. Sasaran kegiatan GSB tahun 2019 di kabupaten Dharmasraya adalah Kec. Sungai Rumbai (Kurnia Selatan, Sungai Rumbai timur) yang meliputi beberapa titik pantau yang akan menjasi sasaran penilaian seperti: Perkantoran (Kantor Wali nagari, Kantor camat, kantor prtanian) Sekolah (SMP 2 SR, SDN 02 SR, SMP 1 SR), Puskesmas SR, Mesjid Al Iklas dan Al Ikhwan, Pemukiman jor. Tawakal, Pustu cahaya Murni, Salter Mulya Bakti) , Pasar Sungai Rumbai. Setelah dilakukan pembinaan dan penilaian oleh tim penilai GSB Provinsi mendapatkan lima besar nominasi tingkat Provinsi. Jika dibandingkan dengan target pada Renja 2019 yaitu 1 kecamatan sungai rumbai, maka kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dengan prestasi 5 besar tingkat Provinsi (100%). Anggaran dari kegiatan ini berasal dari APBD tahun 2019 sebanyak Rp. 64.923.000,- dengan realisasi sebanyak Rp. 64.310.500,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,05%.

Permasalahan



Masih ada titik pantau yang belum maksimal pengelolaan sampahnya, seperti titik pantau Pasar dan pemukiman.

Solusi

Melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah nagari agar melalui dana nagari dapat dianggarkan kegiatan terkait pengelolaan persampahan melalui pemberdayaan masyarakat termasuk pengeurus Pasar dan pembentukan kelompok masyarakat peduli sampah di tingkat jorong.

c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Program Penanaman Pohon pada Lahan di Luar Kawasan,

1) Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Penanaman Pohon Bambu dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air (DBHDR);

Kegiatan bertujuan melakukan koordinasi dalam rangka mendukung kegiatan perlindungan terhadap kawasan sumber daya air, kawasan sumber daya lahan dan mengurangi lahan kritis.

Sasaran kegiatan ini dilaksanakan di lokasi lahan akses terbuka Nagari Tebing Tinggi, Pulau Punjung melalui kegiatan Penanaman Bambu dan Normalisasi sungai. Dengan harapan menurunnya lahan kritis serta melindungi kawasan sumber daya air dan sumber daya lahan. Berdasarkan target Renja 2019 pada kegiatan Perlindungan terhadap kawasan sumber daya air sebanyak 5 Ha (0,025%) dan terealisasi 4,8 Ha atau 96%, perlindungan terhadap sumber daya lahan dengan target 5 ha (0,025%) tercapai 4,8 Ha atau 96% demikian juga dengan pengurangan lahan kritis tercapai 4,8 Ha atau 96%. Anggaran untuk kegiatan Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam berasal dari APBD 2019 sebesar Rp. 36.556.050,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.350.550,- atau 99,43%. Sedangkan kegiatan Penanaman Pohon Bambu dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air (DBHDR) anggaran berasal dari dana DBHDR sebesar Rp. 952.188.160,- dengan realisasi sebesar Rp. 951.818.000,- atau 99,96%

Permasalahan



Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini terutama terkait dengan status tanah serta masih adanya masyarakat melakukan penambangan emas secara ilegal (ilegal mining).

Solusi

Melakukan pendekatan melalui Pemerintah Nagari, Tokoh Masyarakat/Ninik Mamak agar bersama-sama berperan aktif dalam hal pemecahan masalah tersebut sehingga masalah tersebut tidak berkembang menjadi masalah yang besar.

2) Pengembangan Dampak Perubahan Iklim;

Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya adaptasi/mitigasi terhadap perubahan iklim sehingga diharapkan terbentuknya kampung iklim di setiap jorong. Sasaran kegiatan ini adalah kelompok masyarakat yang peduli dengan lingkungan hidup. Untuk tahun 2019 sasaran pembentukan kampung iklim adalah jorong piruki tengah Nagari Sitiung, Jorong Koto Hilalang Nagari Tiumang. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari program nasional kementerian Lingkungan Hidup yang setiap tahunnya dilakukan penilaian baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Realisasi dari kegiatan ini dengan cara pendampingan dan pembinaan ditetapkan beberapa titik pantau pada wilayah nagari di atas secara terus-menerus berdasarkan indikator tertentu maka dua nagari tersebut mendapatkan prestasi baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional yaitu penghargaan utama tingkat provinsi dan penghargaan utama tingkat pusat. Jika dibandingkan dengan target pada rencana yaitu 2 penghargaan tingkat provinsi dan pusat untuk dua lokasi tercapai 100%. Anggaran untuk kegiatan ini dengan jumlah pagu Rp. 36.537.500,- dengan realisasi Rp. 36.515.750,- atau 99,94%.

Permasalahan

pada kegiatan ini masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Solusi

telah dilakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat dan perangkat pemerintahan tingkat kecamatan, nagari dan jorong pada



setiap rapat-rapat umum disampaikan terkait dengan pentingnya program ini dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

3) Fasilitasi Pengaduan Masyarakat;

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi setiap pengaduan masyarakat terhadap kasus-kasus lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan yang terjadi dengan memberikan data dan keterangan yang akurat ke bagian pengaduan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. Sasaran dari kegiatan ini adalah adanya tindak lanjut dari pengaduan masyarakat tersebut agar dapat dilakukan segera pencegahan, pembinaan dan tindakan hukum terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keluaran dari kegiatan ini yaitu adanya tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh kegiatan dan/atau usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan target 3 kasus pengaduan pada tahun 2019. Hasil capaian kegiatan tersebut yaitu hanya ada 2 (dua) kasus pengaduan masyarakat, dimana satu kasus adalah tindak lanjut terhadap kasus yang terjadi pada tahun 2018 yaitu kasus jebolnya IPAL PT Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan ke Sungai Pauh dan Sungai Suir hingga merugikan masyarakat Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan dan satu kasus baru yang dilaporkan pada DLH Kabupaten Dharmasraya yaitu pengaduan Camat Asam Jujuhan perihal jebolnya tanggul Pit 2 PT SLN sehingga teralihkannya aliran Sungai Suir melalui Pit 2 penambangan batubara PT Sinamarinda Lintas Nusantara. Kedua kasus telah dilakukan tindak lanjut dan dapat diselesaikan beserta upaya pembinaan dan penegakan hukum yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain penanganan pengaduan kasus lingkungan terselesaikan 100%.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu dana sebesar Rp.8.595.750,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima



puluh rupiah), dan realisasi kegiatan sebesar Rp.7.456.750,- (tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atau dengan persentase sebesar 86.75% dari pagu kegiatan.

Permasalahan

- a. masih kurangnya data lapangan dan keterangan masyarakat yang memberikan informasi untuk dapat dilakukan analisis terhadap kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Tingkat pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang masih terbatas dan cenderung mudah terprovokasi oleh kasus-kasus yang timbul di lingkungan sekitarnya;
- b. Belum tersedianya JFT PPLH dan PPNS Lingkungan Hidup yang sah secara hukum untuk tindak lanjut pengaduan pencemaran, sebab secara regulasi JFT PPLH yang memverifikasi pengaduan dan PPNS LH yang menindak lanjuti jika ada dugaan tindak pidana lingkungan. Selain itu juga harus difasilitasi dengan diklat teknis fungsional tertentu untuk menunjang pengetahuan teknis jabatan fungsional tertentu;
- c. Belum tersedianya mediator sengketa lingkungan yang secara kompetensi mampu memediasi jika terjadi sengketa lingkungan.

Solusi

- a. meningkatkan anggaran dalam kegiatan tindak lanjut pengaduan masyarakat, karena setiap kasus pengaduan yang dilaporkan harus terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan keterangan yang akurat dan segera dilakukan analisis, serta melakukan mediasi dengan pihak pemilik kegiatan dan/atau usaha yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, perlunya komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak agar kasus pengaduan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku;
- b. Perlu dibentuk Jabatan Fungsional Tertentu PPLH dan PPNS Lingkungan Hidup yang disahkan secara hukum dan selain itu juga harus difasilitasi dengan diklat teknis fungsional tertentu



-
- c. Perlunya Diklat mediator lingkungan untuk personil yang mempunyai atau membidangi pengaduan dan sengketa lingkungan

d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1) Pengembangan data dan informasi lingkungan;

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi bidang lingkungan hidup, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertuang dalam bentuk laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah sebagai bentuk komitmen kepala daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Good Environmental Governance) di Kabupaten Dharmasraya. Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas akses dan informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup melalui tersedianya data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2019.

Keluaran dari kegiatan ini yaitu tersedianya data dan informasi lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2019, serta penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2018 yang terdiri dari 2 buku yaitu buku ringkasan eksekutif dan buku laporan utama, yang diseleksi mulai dari di Tingkat Provinsi dan dinilai di tingkat Nasional oleh tim independen. Hasil capaian kegiatan tersebut yaitu meningkatnya ketersediaan data dan informasi Tahun 2019, dan meningkatnya kualitas informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah tahun 2019. Pemanfaatan Dokumen DIKPLHD ini diantaranya untuk penyusunan KLHS RTRW, KLHS RPJMD, dokumen RPPLH kedepannya dan dokumen perencanaan lainnya, serta dokumen lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan yang akan mengurus izin lingkungan.

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran yang berasal dari APBD TA.2019 dengan pagu sebesar Rp.83.242.750,-(delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh



rupiah) dan realisasi kegiatan ini yaitu sebesar Rp.82.374.402,- (delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua ribu rupiah), atau dengan persentase sebesar 98,95% dari pagu kegiatan.

Permasalahan

masih terkendala dalam proses penghimpunan data dan informasi, karena untuk melengkapi data dan informasi tidak hanya diperoleh dari dinas lingkungan hidup, namun juga perlu koordinasi lintas sektoral di Kabupaten Dharmasraya, instansi terkait di provinsi dan kementerian, instansi vertikal (BPS, Samsat), usaha/kegiatan terkait, serta LSM/NGO (*Non-Governmental Organization*), dan dibutuhkan biaya analisis yang cukup besar terkait analisis kualitas lingkungan. Selain itu, lamanya proses pengumpulan data dan informasi dari sumber pemberi informasi, dan masih kurangnya respon dalam memberi informasi terkait data yang diminta. Pada seleksi DIKPLHD Tahun 2018 atau Nirwasita Tantra 2019 dilakukan pemaparan oleh Kepala Daerah terhadap Kepemimpinan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga perlu dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dan perlu adanya bentuk program dan kegiatan yang lebih inovatif terkait upaya peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya, dan hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama melibatkan berbagai instansi dan leading sektor terkait, serta masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang sesuai SDG's.

Solusi

Melakukan validasi data terkait data dan informasi yang telah diterima terhadap keabsahan dan kebenaran sumber data yang disusun dengan melibatkan Tim Data dan Tim Analisis DIKPLHD dan kepala dinas terkait, perlunya konsultasi publik terkait pemaparan hasil penyusunan DIKPLHD yang juga bermanfaat dalam memberikan saran dan masukan serta ide-ide inovatif yang bermanfaat dalam peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan



hidup di Kabupaten Dharmasraya, serta perlu adanya sosialisasi terhadap program dan kegiatan serta inovasi daerah yang akan dikembangkan dan dapat tertuang dalam laporan kinerja dan wawancara kepala daerah dengan tim panelis independent Nirwasita Tantra untuk pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Peningkatan anggaran dalam kegiatan penyusunan DIKPLHD untuk memenuhi data sekunder dari instansi terkait dan masyarakat sehingga terpenuhi dan terlengkapinya data dan informasi yang dibutuhkan dengan segera, dan perlunya adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi serta kerjasama antar instansi, leading sektor terkait, dan masyarakat.

2) Inventarisasi dan Penyusunan Data Base Pengelolaan Lingkungan

Kegiatan ini bertujuan untuk penataan lingkungan hidup dengan melakukan kegiatan inventarisasi terhadap usaha/kegiatan yang memiliki izin di Kabupaten Dharmasraya, serta melakukan pembinaan terhadap administrasi dokumen lingkungan dari pemrakarsa/pemilik kegiatan dan/atau usaha. Sasaran dari kegiatan ini yaitu pihak yang memiliki kegiatan dan/atau usaha yang memberikan dampak terhadap perubahan kualitas lingkungan dengan melakukan pengurusan dokumen setingkat UKL/UPL dan/atau AMDAL untuk proses penerbitan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan target 1 dokumen data base.

Keluaran dari kegiatan ini yaitu terinventarisirnya kegiatan/usaha yang memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan di Kabupaten Dharmasraya, dan pada tahun 2019 telah terdata usaha/kegiatan yang telah membuat melakukan penyusunan dokumen lingkungan yaitu sebanyak 14 usaha/kegiatan untuk pengurusan AMDAL, UKL/UPL, dan beberapa telah selesai dibahas di DLH dan telah diterbitkan izin lingkungannya oleh DPMPTSP, dan masih ada pemrakarsa yang juga masih belum melakukan perbaikan dokumen dan ada yang dalam proses pengesahan. Untuk pembahasan AMDAL dilakukan melalui Tim Komisi Penilai AMDAL (KPA) Provinsi



Sumatera Barat karena Kabupaten Dharmasraya belum memiliki Tim Komisi Penilai AMDAL. Ada 4 (empat) dokumen AMDAL yang dibahas, dimana 3 (tiga) kegiatan diantaranya telah dikeluarkan surat rekomendasi kelayakan pengelolaan lingkungan hidup dan rekomendasi izin lingkungan AMDAL nya yaitu, kelanjutan AMDAL Galian C Aprison, kelanjutan AMDAL Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT Andalas Wahana Berjaya (AWB), serta AMDAL dan DELH Gardu Induk dan Tower 525 Kv PT PLN Persero Sumbagteng, dan sedangkan 1 (satu) kegiatan AMDAL RSUD Sungai Dareh yang masih baru tahap awal Kerangka Acuan (KA). Sedangkan untuk dokumen UKL-UPL yang dilakukan verifikasi dan pembahasan di DLH Dharmasrayaterdapat 10 (sepuluh) perusahaan yang telah dikeluarkan rekomendasi izin lingkungan. Hasil capaian kegiatan ini yaitu tersedianya data base informasi lingkungan dalam bentuk rekap 1 (satu) dokumen yang berisikan informasi dari kegiatan/usaha sudah memiliki dokumen dan izin lingkungan, dan bagi yang belum memiliki izin dan memiliki investasi modal akan dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Tim khusus pada Dinas PMPTSP. Dana kegiatan ini berasal dari APBD TA. 2019 sebesar Rp.25.855.500,-(dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah). Realisasi kegiatan ini sebesar Rp.25.773.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) atau 99.53% dari pagu kegiatan.

Permasalahan

- a. masih terbatasnya jumlah SDM yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dokumen lingkungan kegiatan/usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan keterbatasan SDM untuk melakukan inventarisir usaha/kegiatan yang telah terlaksana terhadap kesesuaian kriteria dokumen lingkungan, dan masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha untuk membuat dokumen lingkungan dan izin lingkungan juga menjadi kendala dalam melakukan pembinaan.



-
- b. Keterbatasan anggaran dalam melakukan sosialisasi terkait proses izin lingkungan yang harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, dan proses inventarisasi usaha/kegiatan yang tersebar di Kabupaten karena perlu dilakukan pembinaan dan peninjauan lapangan pada usaha/kegiatan yang dalam proses administrasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan;

Solusi

- a. peningkatan SDM dapat melalui pendidikan dan pelatihan khusus AMDAL untuk peningkatan kapasitas.
- b. Penyesuaian anggaran terhadap target kinerja karena pengurusan dokumen lingkungan dan izin lingkungan penting bagi pemilik kegiatan/usaha sebagai upaya penataan secara administrasi dan hukum, serta perlunya sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada pelaku kegiatan/usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan;
- c. Membuat hasil verifikasi dokumen dan perbaikan dokumen yang telah dibahas tim teknis, karena rekomendasi hanya dapat diberikan setelah perbaikan dokumen dilakukan sesuai dengan saran dan masukan tim teknis pembahasan

3) Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA);

Tujuan dari kegiatan ini adalah menciptakan sekolah yang peduli dan berwawasan lingkungan serta membentuk karakter pendidik, anak terhadap kepeduliannya untuk mengelola lingkungan sekolah sehingga sekolah menjadi nyaman dan mendorong peningkatan prestasi anak didik serta perubahan perilaku. Target dari kegiatan ini melakukan pembinaan sebanyak 40 sekolah baik tingkat SMA/SMK, SLTP dan SD/Sederajat. Anggaran kegiatan ini melalui dana APBD sebesar Rp. 56.215.000,- terealisasi sebesar Rp. 56.210.900 atau 99,99%.

Permasalahan

pada kegiatan ini adanya beberapa sekolah yang masih mempunyai persepsi kurang pentingnya Adiwiyata.

Solusi



telah dilakukan koordinasi dan sosialisasi melalui dinas Pendidikan dan melalui koordinasi langsung ke majelis guru serta Kepala Sekolah.

e. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1) Pengelolaan Ruang Terbuka (RTH)

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap ruang terbuka hijau /taman sehingga dapat dipertahankan unsur kebersihan dan keindahannya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran beberapa titik lokasi seperti taman rumah dinas bupati, taman luar kantor dinas bupati, taman sepanjang lintas sungai daerah sampai kantor bupati serta taman jalur dua sport center. Jumlah anggaran untuk kegiatan ini berasal dari APBD sebesar Rp. 29.677.900 dengan realisasi sebesar Rp. 29.638.179 atau 99,86%.

5. Urusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Urusan kependudukan dan pencatatan sipil, merupakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1) Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil, sehingga target dapat terwujud. Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 257.520.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 256.134.250,-

2) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan ini merupakan Dana Alokasi Khusus non Fisik dalam rangka sosialisasi kepada Kecamatan, nagari dan jorong. Diharapkan antusiasme dan pemahaman masyarakat meningkat dengan diadakannya sosialisasi ini. Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 53.575.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 53.575.000,-

3) Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pembersihan data dan pembuatan buku profil serta Data Agregat Kependudukan. Dengan adanya



kegiatan ini diharapkan akurasi database kependudukan dapat meningkat, serta Buku profil di tahun bersangkutan dapat diterbitkan. Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 39.000.000 yang terealisasi sebesar Rp. 38.790.000.

4) Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Kegiatan ini merupakan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Pusat serta Kegiatan Pelayanan Keliling ke Nagari. Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 303.781.000 yang terealisasi sebesar Rp. 303.557.506.

5) Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online

Kegiatan ini merupakan Pengadaan Aplikasi Kependudukan. Dengan adanya aplikasi yang pelayanan kependudukan dapat dilakukan dirumah atau tidak harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 140.200.000 yang terealisasi sebesar Rp. 136.694.247

6) Pelayanan Dokumen Kependudukan

Kegiatan ini merupakan Pelayanan Dokumen rutin terhadap masyarakat Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 293.550.000 yang terealisasi sebesar Rp. 282.000.000

7) Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak

Kegiatan ini merupakan Pelayanan Dokumen dan Kartu Identitas Anak. Didalamnya juga menganggarkan pembelian Blangko, peralatan cetak KTP-el serta berbagai formulir untuk dokumen pencatatan sipil. Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 380134.000 yang terealisasi sebesar Rp. 379.890.000

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, merupakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

1) Monitoring dan pembinaan Adm Keuangan dan Aset Nagari



Melakukan monitoring ke Nagari se Kabupaten Dharmasraya dalam rangka pelaksanaan implementasi Pelaksanaan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Aset Nagari yang dikerjakan oleh Pemerintah Nagari se Kab. Dharmasraya. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 31.935.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 31.845.500,- (99,72%)

Permasalahan

- a. Aplikasi Siskeudes hanya diimplementasikan pada Tahap Penganggaran, tapi belum pada tatanan Penatatausahaan Keuangan dan Pelaporan.
- b. Penataan Aset Nagari belum berjalan sebagaimana mestinya.

Solusi

- a. Perlu pelatihan berkelanjutan terhadap admin/operator Siskeudes di tingkat Nagari maupun di DPMD.
- b. Perlu kebijakan pelimpahan Kompilasi Siskeudes ke tingkat kecamatan disertai dengan pembiayaannya.
- c. Perlu pembinaan atau coaching clinic untuk Nagari terutama Nagari yang lambat dalam pelaksanaan Aplikasi Siskeudes nya.
- d. Perlu regulasi atau Peraturan Bupati sebagai pengurusan Pelaksanaan Aset

2) Pembinaan Adminitrasi Program (PAP) Dana Desa

Merupakan kegiatan pokok dari pelaksanaan Dana Desa, yang menunjang pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari di Kabupaten Dharmasraya yaitu pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintahan Nagari untuk menjalankan Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 281.697.700,- dengan realisasi keuangan Rp. 280.998.815,- (99,75 %).

Permasalahan

- a. Adanya Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang masih rendah pemahamannya terhadap aturan dan peraturan yang berlaku.



-
- b. Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melakukan pendampingan terhadap Pemerintahan Nagari.
 - c. Dalam Penilaian Lomba Transparansi Dana Desa diadakan di akhir tahun tanpa dukungan anggaran yang memadai.
 - d. Pelimpahan kewenangan dalam Mengevaluasi perencanaan dan keuangan Nagari sudah dilimpahkan ke Kecamatan tapi belum optimal.

Solusi

- a. Perlu pelatihan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari yang berkelanjutan.
- b. Perlu penganggaran khusus untuk Lomba Transparansi Dana Desa sekiranya ini memang menjadi agenda rutin tahunan Pemerintahan Propinsi dan betul betul, diseleksi sampai ke tingkat Nagari.
- c. Perlu peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan atau yang disebut Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) dalam bentuk Bimbingan Teknis.

3) Pembinaan Nagari Berprestasi

Kegiatan pembinaan nagari berprestasi merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Nagari/ Desa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan nagari sehingga dapat dilakukan pembinaan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Sasaran seluruh nagari di Kabupaten Dharmasraya (52 nagari). Pelaksanaan kegiatan pembinaan nagari berprestasi mengacu pada Indikator Penilaian Standar Nasional berdasarkan Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Nagari/ Desa yang merupakan lampiran II permendagri Nomor 81 Tahun 2015. Hasil dari kegiatan ini adalah diketahuinya tingkat perkembangan nagari yang terdiri dari tiga kelompok yaitu: kurang berkembang, berkembang dan cepat berkembang. Selanjutnya bagi nagari yang kurang berkembang akan dilakukan pembinaan yang lebih agar dapat setara dengan nagari lainnya dan bagi nagari dengan penilaian terbaik akan diikuti dalam ajang lomba nagari



tingkat provinsi. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 72.117.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 71.823.750,- (99.60%)

Permasalahan

- a. Masih ada nagari yang tidak mengirimkan laporan evaluasi perkembangan nagarinya,
- b. Masih banyak nagari yang tidak melengkapi dokumen/ arsip terkait data isian perkembangan nagari.

Solusi

Mengadakan monitoring dan evaluasi ke nagari yang tidak mengirimkan laporan evaluasi perkembangan nagari dan nagari yang belum melengkapi dokumen pendukung.

4) Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat dan desa merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk pelestarian nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan mengikut sertakan seluruh komponen bangsa termasuk unsur pemerintahan. Pelaksanaan kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat dilaksanakan pada Bulan Agustus di nagari yang ditunjuk berdasarkan hasil rapat. Untuk tahun 2019 Setelah dilakukan kegiatan bulan bakti masyarakat pada Bulan Agustus, di Nagari Koto Laweh sekaligus memberikan penghargaan kepada nagari tersebut yang telah memenangkan ajang perlombaan nagari Tingkat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.60.041.250,- dengan realisasi keuangan Rp. 59.954.400,- (99.86%)

Permasalahan

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kegiatan gotong royong.

Solusi



- a. Meningkatkan sosialisasi kegiatan gotong-royong agar masyarakat menyadari manfaat kegiatan tersebut.
- b. Membuat edaran gotong royong secara tertulis yang ditandatangani oleh Sekda Dharmasraya.
- c. Mengadakan lomba gotong royong nagari di tingkat Kabupaten Dharmasraya

5) kegiatan Pokjanal Posyandu

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) merupakan wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat dengan bimbingan dari petugas kesehatan , lintas sector dan lembaga terkait.

Pokjanal Posyandu (Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu) berkedudukan mulai dari Tingkat Provinsi , Kabupaten / Kota dan Kecamatan sedangkan Pokja Posyandu berkedudukan di Desa / Nagari. Dan yang menjadi Sekretariat Pokjanal Posyandu adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disetiap Kabupaten / Kota. Adapun Jumlah Posyandu yang ada di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 246 Posyandu dengan Jumlah Kader sebanyak 1225 orang, Posyandu Aktif sebanyak 216 Posyandu.

Dengan Strata Posyandu Madya : 26 Posyandu, Purnama : 86 Posyandu, dan Mandiri : 127 Posyandu. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 62.238.600,- dengan realisasi keuangan (99,88%) dan sisa anggaran sebesar Rp 74.350,-
Permasalahan

- a. Masih minimnya dana yang tersedia untuk pelaksanaan program kegiatan , dan dana untuk peningkatan kapasitas kader posyandu



-
- b. Masih banyaknya kader posyandu yang belum menggunakan Sistem Informasi Posyandu (SIP) On Line. Dan masih bersifat manual.
 - c. Masih banyaknya kegiatan posyandu yang belum mempunyai gedung sendiri dan masih menumpang di beberapa gedung serba guna dan rumah penduduk.
 - d. Kurangnya partisipasi aktif baik perangkat daerah dalam mensukseskan program posyandu maupun partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu.
 - e. Kurangnya komunikasi lintas sector dalam menggerakkan kegiatan posyandu, sehingga peningkatan strata posyandu pun masih lama.

Solusi

- a. Mengupayakan penambahan dana untuk program kegiatan posyandu dan pokjanal posyandu agar terjadi sinkronisasi kegiatan baik antara pokjanal posyandu dan pokja posyandu, maupun kegiatan kegiatan yang dilaksanakan di posyandu disetiap kejurongan.
- b. Melakukan pelatihan SIP bagi kader kader posyandu
- c. Mendorong Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi setiap kegiatan pokjanal posyandu
- d. Melakukan sosialisasi , penyuluhan, dan pembinaan, serta informasi terkait kegiatan Pokjanal Posyandu

6) Kegiatan Pemetaan dan Penguatan Kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Perdesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan salah satu kegiatannya yaitu Pemetaan dan Penguatan Kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Perdesaan. Sasaran kegiatan ini untuk membentuk dan menguatkan kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek). Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah Posyantek Kecamatan maupun Posyantek Nagari se Kabupaten Dharmasraya. Aplikasi dari kegiatan kegiatan ini adalah melakukan pembinaan terhadap kelompok sasaran, melakukan monitoring dan evaluasi program. Jumlah dana yang dialokasikan



untuk kegiatan ini sebesar Rp31.200.500,- dengan realisasi keuangan Rp30.675.900,- (98,32%)

Permasalahan

- a. Masih kurangnya pemahaman Camat dan Wali Nagari akan pentingnya peran Posyantek dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Nagari
- b. Masih kurangnya dukungan dana untuk kegiatan Posyantek di Kecamatan maupun Nagari
- c. Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai peran penting Posyantek.
- d. Masih adanya pengurus kelembagaan Posyantek yang telah terbentuk di Kecamatan dan Nagari yang belum memahami tugas pokok, fungsi dan peranan Posyantek
- e. Belum lengkapnya data seluruh Nagari se Kabupaten Dharmasraya yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Solusi

- a. Melakukan kunjungan langsung ke lapangan sekaligus memberikan arahan untuk mengembangkan Posyantek.
- b. Melayani konsultasi yang dilakukan pengurus posyantek dengan Bidang UEM SDA dan TTG, baik tatap muka / via telepon dan juga mengikutsertakan pengurus posyantek pada kegiatan sosialisasi Posyantek yang diselenggarakan Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat.
- c. Memberikan sosialisasi pada masyarakat dan pengurus Posyantek mengenai Peran Posyantek dan Penerapan TTG untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Melakukan koordinasi dengan melibatkan Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam pengumpulan data Nagari yang menerapkan TTG di Kabupaten Dharmasraya

7) Fasilitas Kemitraan dan Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat dengan Perguruan Tinggi

Kegiatan Fasilitas Kemitraan dan Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat dengan Perguruan Tinggi diaplikasikan dalam bentuk



Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM). Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu kegiatan untuk merekatkan diri mahasiswa dengan masyarakat sebagai bentuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan kata lain kegiatan ini merupakan pengabdian yang dibebankan kepada setiap mahasiswa guna perwujudan keterikatan emosional antara dunia kampus dengan masyarakat.

Melalui kegiatan KKN ini, mahasiswa diharapkan dapat melakukan proses transfer pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh semasa mengikuti perkuliahan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing kepada masyarakat. Sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di lokasi tempat KKN-PPM dilaksanakan. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.17.798.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 17.565.250,- (98,69%). Hasil dari kegiatan KKN-PPM mahasiswa ini, sudah banyak dirasakan manfaatnya bagi nagari, yaitu antara lain seperti:

- a) Adanya pelatihan dan pembuatan website nagari
- b) Berbagai kegiatan revolusi mental di masyarakat, yaitu antara lain:
 - ✓ Sosialisasi bahaya narkoba
 - ✓ Sosialisasi bahaya bullying
 - ✓ Sosialisasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
 - ✓ Sosialisasi deteksi dini uang palsu
 - ✓ Sosialisasi deteksi dini kanker
 - ✓ Sosialisasi cerdas menggunakan obat dan obat tradisional
 - ✓ Sosialisasi bahaya merokok
 - ✓ Sosialisasi go green
 - ✓ Sosialisasi struktur pemerintahan
 - ✓ Pemeriksaan kesehatan gratis
 - ✓ Pendidikan anti korupsi
 - ✓ Pendidikan sex remaja



-
- ✓ Sosialisasi anti hoax dan literasi media
 - ✓ Sosialisasi pembuatan kompos dan produk dari limbah
 - ✓ Pendidikan wirausaha sejak dini
 - ✓ Bimtek pemasaran BUMNag
 - ✓ Membisakan masyarakat untuk senam dan mengenalkan kelas bumil
 - ✓ Pendidikan manajemen waktu sejak dini
 - ✓ Penyuluhan tertib lalu lintas
 - ✓ Penyuluhan tentang makanan berlogo halal
 - ✓ Membiasakan masyarakat untuk bergotong royong
 - ✓ Sosialisasi tentang konservasi Harimau Sumatera, dll.
- c) Pembangunan lapangan volley dan sarana olah raga nagari
 - d) Pembuatan taman bacaan
 - e) Pembuatan nama-nama tokoh masyarakat
 - f) Pembuatan nama-nama jalan dan jorong di nagari
 - g) Pendidikan agama dan ceramah agama di mesjid-mesjid dan gerakan baliak ka surau
 - h) Pendidikan baca tulis quran
 - i) Pendidikan seni tari

Permasalahan

Masih banyak nagari sepeninggal mahasiswa yang tidak melanjutkan kegiatan yang telah diprogramkan oleh mahasiswa KKN-PPM

Solusi

Untuk tahun selanjutnya perlu ditekan kepada mahasiswa dan juga perangkat nagari agar membentuk kader atau penerus kegiatan yang telah dicanangkan oleh mahasiswa.

b. Program peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

1) Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa di Kecamatan

Untuk memperkuat fungsi Kecamatan dalam melakukan Pendampingan di Nagari maka dilakukan Pelatihan sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa untuk Aparatur Kecamatan. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 27.395.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 25.395.000,- (100,00%)

Permasalahan



Pelatihan Aparatur Kecamatan sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa hanya dilakukan 1 hari, sehingga membahas permasalahan mendasar saja, tidak menyentyk pada persoalan teknis di lapangan.

Solusi

Perlu penganggaran yang memadai untuk Pelatihan aparatur Kecamatan sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa sehingga Pelimpahan kewenangan Bupati berjalan menurut semestinya.

c. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui

1) Kegiatan Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Program penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat melalui gerakan PKK meliputi kegiatan 10 program pokok PKK dimana kader Dasawisma sebagai ujung tombak kegiatan PKK dan keluarga sebagai sasaran utama. Kegiatan ini bersifat berjenjang dari tingkat pusat sampai ke nagari / desa, dimana kegiatan-kegiatannya dibagi menjadi empat (4) kelompok kerja yang merangkum 10 program pokok PKK. Kegiatan ini adalah untuk mengetahui sebesar apa peran serta masyarakat yang menjadi kader PKK untuk membantu proses pembangunan di masyarakat dimana PKK sebagai mitra kerja dari pemerintah.

Kegiatan yang meliputi seluruh ruang lingkup kehidupan mulai dari sandang, pangan, perumahan, tata laksana rumah tangga, kesehatan, lingkungan, dan sumber daya manusia dalam beragamapun menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan PKK mulai dari tingkat terbawah yaitu keluarga sampai dengan tingkat pusat. Kegiatan PKK dilaksanakan oleh kepengurusan PKK yang dibentuk dari tingkat nagari sampai dengan pusat yang diketuai oleh satu orang yang merupakan istri dari Mendagri, istri Gubernur, istri Bupati, Istri Camat, dan Istri Kepala Desa atau Wali Nagari.

Adapun Jumlah Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten sebanyak 1 organisasi, PKK Kecamatan sebanyak 11, dan PKK Nagari sebanyak 52 dengan total jumlah



PKK sebanyak 64 organisasi PKK, dan tergolong PKK Aktif, dari 64 organisasi PKK tersebut terdapat 2195 kader PKK Aktif yang tersebar di seluruh jorong, nagari, Kecamatan se Kab. Dharmasraya. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 913.843.850,- dengan realisasi keuangan (99,86%) serta prestasi yang diraih tahun 2019 sebagai berikut

- a. Juara I Lomba UP2K PKK pada Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, yang diwakili oleh Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung.
- b. Juara III lomba tertib administrasi PK pada Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang diwakili oleh Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar.
- c. Harapan III Jambore PKK Bidang Pokja IV pada jambore Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 di Batusangkar.

Permasalahan

- a. Masih banyaknya kader dan pengurus ditingkat kecamatan dan nagari yang masih minim pengetahuan tentang administrasi PKK dan 10 program pokok PKK.
- b. Pengelola dasawisma dan pengurus PKK yang sering berganti setiap tahunnya dan koordinasi lintas sektor.
- c. Masih kurangnya pemahaman kader dan pengurus serta lintas sektor tentang pentingnya program PKK dan percepatan program gerakan PKK.
- d. Kurangnya koordinasi, kerja sama, dan dukungan lintas sektor terhadap program PKK.
- e. Masih banyaknya pengurus dan kader yang belum mendapatkan pelatihan (TOT) di setiap jenjang.
- f. Masih banyaknya PKK yang belum memiliki plang dan belum memiliki ruangan serta identitas lainnya.
- g. Semua data PKK baik di nagari dan Kecamatan masih menggunakan data manual belum memakai elektronik data apalagi Sistem Informasi Manajemen PKK On-Line.



-
- h. Kurangnya dukungan dan peran serta aktif keterlibatan para perangkat nagari dan kecamatan dalam mensukseskan program-program dan kegiatan PKK.
 - i. Masih minimnya dana yang disediakan di Kecamatan untuk mendukung kegiatan kegiatan PKK.
 - j. Sumber daya manusia di PKK yang minim.

Solusi

- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait.
- b. Mengupayakan pelatihan bagi kader dan pengurus mengenai administrasi dan kegiatan-kegiatan PKK lainnya.
- c. Melakukan sosialisasi penyuluhan dan pembinaan serta informasi terkait 10 program pokok PKK kepada pengurus-pengurus dan kader kader secara berjenjang.
- d. Mengalokasikan dana untuk program-program PKK yang tepat sasaran.
- e. Menambah anggaran untuk kesuksesan program PKK
- f. Mendorong OPD terkait agar mengalokasikan dana yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan PKK di dalamnya.
- g. Mendorong nagari untuk mengalokasikan sebagian dananya untuk kegiatan-kegiatan PKK di tingkat Kenagarian.
- h. Meningkatkan mutu SDM dalam pengelolaan manajemen PKK dengan 10 program pokoknya.

d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya

1) Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian LKAAM

Salah satu lembaga sosial yang mewakili kepentingan masyarakat adat di Sumatera Barat adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Organisasi ini (idealnya) merupakan wadah menyalurkan aspirasi komunitas adat dalam hubungannya dengan pelestarian nilai-nilai adat dalam masyarakat, disamping, tentunya dalam menjaga kepentingan komunitas adat itu sendiri. LKAAM sebagai organisasi adat bentukan pemerintah, dalam anggaran dasarnya, dicantumkan bahwa tujuan organisasi ini adalah melestarikan nilai-nilai luhur adat Minangkabau serta



mengembangkan falsafat adat minang kabau yaitu : Adat basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berorientasi kultural, wilayah kerja organisasi ini ternyata tidak meliputi semua wilayah kultural Minangkabau, akan tetapi hanya mengikuti batasan wilayah teritorial Propinsi Sumatera Barat. Organisasi ini berada di ibukota Propinsi dan secara hirarkhis mempunyai cabang disetiap Daerah tingkat II Kabupaten/ Kotamadya dan di tingkat Kecamatan. Untuk Nagari, ada Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang tidak mempunyai hubungan struktural secara langsung dengan LKAAM tingkat Kecamatan, tetapi hanya bersifat konsultatif saja terutama menyangkut program-program yang dilaksanakan di tingkat pedesaan. Organisasi LKAAM ini meningkatkan serta melestarikan nilai-nilai kebudayaan Minangkabau melalui berbagai program pembinaan-pembinaan dan penyebaran pengetahuan adat Minangkabau, baik melalui ceramah, penataran, serta mengupayakan kerjasama dengan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukan pelajaran adat sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah menengah di Sumatera Barat. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.74.240.000,- dengan realisasi keuangan Rp.117.500,- (99,84%)

Permasalahan

- a. Masih banyaknya ninik mamak yang belum terdata secara administrasi
- b. Masih banyaknya pengurus LKAAM Kecamatan yang belum dibentuk
- c. Masih banyaknya LKAAM kecamatan yang belum mempunyai kantor Sekretariat
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan LKAAM
- e. Tidak adanya dana untuk operasional LKAAM

Solusi

- f. Mengupayakan pendataan ulang nama-nama ninik mamak.
- g. Melakukan Musda LKAAM Kecamatan
- h. Mendorong pemerintah Daerah untuk memfasilitasi LKAAM



- i. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan serta informasi terkait keberadaan LKAAM
- j. Mendorong OPD terkait agar mengalokasikan dana terkait dengan kegiatan yang melibatkan LKAAM.

e. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa

1) Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa salah satu kegiatannya yaitu Pemberdayaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Hasil dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan manajemen dan pengembangan pengelolaan BUMNag. Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh BUMNag yang ada di Kabupaten Dharmasraya yakni sebanyak 52 BUMNag. Aplikasi dari kegiatan ini adalah melakukan pembinaan, pengawasan serta melakukan monitoring dan evaluasi program terhadap kelompok sasaran. Prestasi yang diraih tahun 2019 yakni Juara I (satu) Lomba BUMNag Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat diraih oleh BUMNag Koto Ranah Sakti, Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp123.195.000,- dengan realisasi keuangan Rp122.205.400,- (99,2%)

Permasalahan

- a. Belum semua Nagari memahami pentingnya keberadaan BUMNag terkait dengan penyediaan penyertaan modal dari pemerintah nagari dan belum adanya kesiapan pengurus BUMNag untuk pengelolaan dan pengembangannya
- b. Belum adanya keterkaitan, keterpaduan dan sinergitas Program dan Kegiatan menyangkut pemberdayaan ekonomi masyarakat di antara OPD se Kabupaten Dharmasraya
- c. Adanya satu UPK Kecamatan (UPK Kecamatan Sungai Rumbai) yang tidak melaksanakan perguliran dana Pasca PNPM-MPd, sehingga tidak memberikan manfaat bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat (Kelompok SPP) Sungai Rumbai.

Solusi



- a. Memberikan sosialisasi kepada Wali Nagari mengenai pentingnya penyertaan modal bagi operasional BUMNag, dan memberikan informasi/penjelasan langkah-langkah kesiapan pengurus BUMNag untuk memulai usaha/mencairkan dana penyertaan modal Nagari pada BUMNag untuk mengembangkan usahanya.
- b. Melaksanakan Rapat Koordinasi bulanan bersama forum UPK se-Kab Dharmasraya untuk mengevaluasi kegiatan UPK.

2) Kegiatan Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Nagari

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa salah satu kegiatannya yaitu Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Nagari. Hasil dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat nagari. Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah lumbung pangan masyarakat nagari. Aplikasi dari kegiatan kegiatan ini adalah melakukan pembinaan terhadap kelompok sasaran, melakukan monitoring dan evaluasi program. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp13.463.000,- dengan realisasi keuangan Rp13.452.500,- (99,92%)

Permasalahan

- a. Belum adanya kesamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas pembinaan antar instansi terkait
- b. Belum semua Wali Nagari memahami akan pentingnya membentuk Kader Pangan Aman dan Nagari Pangan Aman
- c. Masih Kurangnya Pemahaman Kader Nagari Pangan Aman (PAMAN) tentang tugas dan Fungsinya

Solusi

- a. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk menyamakan persepsi mengenai pembinaan kegiatan lumbung pangan nagari
- b. Melakukan Sosialisasi kepada Wali Nagari secara intensif mengenai pentingnya membentuk Kader Pangan Aman dan Nagari Pangan Aman



-
- c. Mengupayakan adanya Pelatihan / Sosialisasi tentang tugas dan Fungsi Kader Nagari Pangan Aman

7. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, merupakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Keluarga Berencana

1) Pembinaan Keluarga Berencana

Kegiatan ini berupa pembayaran honor klinik KB sebanyak 19 orang terdiri dari 1 orang di PKBRS dan 18 orang di Faskes. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini Rp 38.868.250,-dengan realisasi anggaran sebesar Rp 38.843.250,- atau 99,94% dan capaian kegiatan 100%.

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK 2019)

Pengadaan belanja barang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang terdiri dari BKB Kit 4 paket untuk Kampung KB (Kampung KB Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai, Kampung KB Koto Gadang Kec. Koto Besar, Kampung KB Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kampung KB Aur Jaya, Kecamatan Koto Baru) KBL Kit 5 paket untuk (Kampung KB Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai, Kampung KB Koto Gadang Kec. Koto Besar, Kampung KB Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kampung KB Aur Jaya, Kecamatan Koto Baru, Kampung KB Padang Laweh, Kec. Padang Laweh, Kampung KB Sitiung Kecamatan Sitiung) GenRe Kit 10 Paket untuk 10 Kampung KB dan Sarana PKB/PLKB + Smartphone Untuk PKB (Helon Gusrani, A.Md), pengadaan 1 unit Laptop Untuk Pengolahan Data, serta 51 set Tempat Penyimpanan Kit/Alat dan Obat Kontrasepsi untuk 51 Fasilitas Kesehatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini Rp1.174.000.000,-dengan realisasi



anggaran sebesar Rp1.117.356.000,- atau 95,18% dengan capaian fisik 100%.

3) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Kegiatan ini diperuntukan pelayanan kontrasepsi terdiri 3 momen (Bhakti Sosial IBI KB KES, TNI KB KES, PKK KB KES) serta pencangan TNI KB KES Tingkat Kodim 0310/SSD tahun 2019. Untuk alokasi anggaran kegiatan ini Rp108.984.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp108.677.593,- atau 99,72%. dengan kegiatan fisik 100%.

4) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Untuk kegiatan penyuluhan/edukasi di Kabupaten Dharmasraya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2019 melalui Dinas Sosial P3APKB di 11 Kecamatan serta pada Kampung KB sebanyak 28 Kampung KB yang terletak di Kecamatan dengan anggaran bersumber dari DANA DAK NON FISIK sebesar **Rp. 2.529.320.000,- (Dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)** yang terdiri dari kegiatan Penyuluhan Program KKBPK sebanyak Rp. 880.000.000,- untuk operasional Distribusi Alokasi ke Fasilitas Kesehatan Rp. 28.500.000, untuk penggerakan/penyuluhan di 28 Kampung KB Rp. 1.045.000.000,-, pembinaan program oleh Kader KB kepada masyarakat Rp. 312.000.000,- dan dukungan manajemen Rp. 263.820.000,- diharapkan dengan adanya penyuluhan program KKBPK di tingkat Kecamatan dan nagari sehingga paham masyarakat sudah berubah **“Dua Anak cukup”**.

Untuk pertumbuhan penduduk masih dirasa cukup tinggi di kabupaten Dharmasraya bukan oleh pertumbuhan Kelahiran tetapi oleh perpindahan penduduk dari luar daerah yang mencari rezeki ke Kabupaten yang baru mekar ini. (Tingkat mobilitas Penduduk). Untuk itu alokasikan anggaran kegiatan ini sebesar Rp2.529.320.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.481.604.540,- atau 98,11%.

5) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)



Kegiatan ini dilaksanakan kegiatan Lomba Duta GenRe Tingkat Sumatera Barat yang di adakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat selama 3 hari di Hotel Kryad Bumi Minang di Kota Padang. Kabupaten Dharmasraya mengikuti lomba mengutus peserta 2 orang Duta GenRe. Untuk alokasi anggaran kegiatan ini Rp17.795.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp17.672.750,- atau 99,31%.

6) Temu Kreatif Remaja Saka Kencana

Kegiatan ini dilaksanakan kegiatan GenRe Fellowship Tingkat Sumatera Barat yang di adakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat selama 4 hari di Mifan Padang Panjang. Untuk alokasi anggaran kegiatan ini Rp 7.589.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 7.566.750,- atau 99,70%

8. Perhubungan

Urusan perhubungan, merupakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1) Pembangunan Pelataran, Sarana dan Prasarana Parkir Terpadu

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembangunan pelataran parkir di Pasar Sei. Rumbai sebanyak satu paket. Pada kegiatan ini dianggarkan pagu sebesar Rp 61.874.750,- dengan realisasi Rp 57.534.500,- atau 92,99%.

Permasalahan

Keterbatasan anggaran, sehingga lahan parkir yang disediakan tidak tergarap keseluruhannya, hanya 3/4 dari lahan yang ada yang dapat direalisasikan untuk pengecoran rijit betonnya.

Solusi

Untuk tercapainya program kegiatan ini dan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan pada Tahun 2019, agar dapat dilanjutkan pembangunannya di tahun anggaran 2020 ini.

b. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas



1) Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengadaan Rambu Larangan 10 buah, Rambu Perintah 4 buah dan Rambu Peringatan 95 buah. Pada kegiatan ini dianggarkan pagu sebesar Rp 105.496.650,- dengan realisasi Rp 105.112.750,- atau 99,64%

Permasalahan

- a. Rambu-rambu yang selama ini kita pasang cenderung diganggu masyarakat dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tangkai dodos (paner sawit).
- b. Selanjutnya rambu-rambu diambil dan dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis serta dibuang.

Solusi

- a. Sebaiknya ukuran tiang lebih besar dari pada yang seperti biasanya.
- b. Sebaiknya disosialisasikan ke nagari atau masyarakat agar tidak mengganggu rambu tersebut.
- c. Di serahkan ke pihak nagari agar sama-sama menjaga rambu yang sudah terpasang tersebut.

c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1) Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengaman di jalan raya pada hari-hari besar nasional. Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 54.545.000,- dengan realisasi sebesar Rp 54.545.000,- atau 100%.

2) Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ juruMudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui acara seleksi/ lomba dalam rangka pemilihan sopir teladan untuk persiapan mengikuti lomba di tingkat propinsi dan nasional. Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.900.000,- dengan realisasi Rp 2.287.000,- atau 20,98%.

3) Pemilihan dan Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan.



Kegiatan ini dilaksanakan melalui acara seleksi/ lomba dalam rangka pemilihan pelajar teladan di bidang perhubungan di Kab. Dharmasraya untuk persiapan mengikuti lomba di tingkat propinsi dan nasional. Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 51.011.000,- dengan realisasi Rp 49.171.750,- atau 96,39%.

d. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kalibrasi alat uji kendaraan bermotor sebanyak 8 unit dan pengadaan jaringan SIM PKB sebanyak 1 paket. Pada kegiatan ini dianggarkan pagu sebesar Rp 169.373.850,- dengan realisasi Rp 32.146.000,- atau 18,98%.

Permasalahan

Karena gangguan jaringan internet pada server kominfo mengakibatkan gangguan jaringan internet di Dinas Perhubungan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan belum terkoneksi dengan SIM PKB Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta. Akibat hal tersebut maka belum bisa mengajukan SPP dan SPM untuk pencairan.

Solusi

Kedepannya diharapkan agar pembayaran kegiatan tersebut dapat dianggarkan pada anggaran perubahan tahun 2020.

9. Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika, merupakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Kegiatan ini dilakukan untuk proses Penyusunan Master Plan E-government Kabupaten Dharmasraya tahun 2020-2024. Master plan e-government ini disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman dan



acuan dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengolahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk tender secara elektronik melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 299.295.900 (93,46%)

2) Pembangunan Jaringan antar Organisasi Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilakukan untuk proses penggunaan mesin absensi secara elektronik (Finger print) untuk 8 Kecamatan beserta proses perekaman data dan pengaktifan SIMDA di 8 Kecamatan serta pemasangan speedy untuk gedung auditorium Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan untuk pengadaan mesin absensi 8 unit, tower 8 unit untuk 8 Kecamatan disertai kelengkapan pengaktifan serta peralatan pengaktifan untuk pemasangan speedy di Gedung Auditorium. Khusus untuk Kecamatan Timpeh diperlukan peralatan tambahan karena kondisi Kantor Camat yang dikelilingi bukit sehingga penambahan relay untuk proses pengaktifan finger print dan SIMDA. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 486.205.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 484.551.042 (99,65%)

Permasalahan

Adanya kontur wilayah kecamatan yang tertutup oleh perbukitan yang sulit dijangkau sinyal dari kabupaten.

Solusi

Koordinasi dan peminjaman menara / tower di Gunung Medan milik perusahaan BUMN yaitu PT. Telkom.

3) Pemeliharaan Jaringan antar OPD

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan perbaikan jaringan yang berada di OPD, apabila terdapat pengaduan kerusakan. Perbaikan



dilakukan dari perbaikan ringan sampai perbaikan berat. Tahun 2019 hanya terdapat perbaikan ringan dan perbaikan sedang seperti tower terkena sambaran petir. Perbaikan jaringan ini dilaksanakan agar kebutuhan aplikasi di setiap OPD tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Seperti kerusakan di ruang server karena hujan angin sehingga air merembes masuk dan mengenai server yang mengakibatkan seluruh sistem mengalami down salahsatunya SIMDA tidak aktif dan mengganggu proses penatausahaan, penganggaran dan pembangunan daerah. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 111.775.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 111.338.250 (99,61%)

b. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

1) Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan informasi pembangunan ke masyarakat melalui pembentukan dan peningkatan aktifitas web di masing-masing OPD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan membentuk 7 (tujuh) web baru oleh programmer dan pelatihan operator web terhadap 7 OPD yang baru dan 11 operator Kecamatan. Narasumber kegiatan ini berasal dari programmer yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan operator web dan meningkatkan aktifitas web tentang keterbukaan informasi publik dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 16.290.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.794.750 (96,95%).

Permasalahan

Belum optimalnya operator website OPD dalam mengelola website OPD masing-masing.

Solusi

Beberapa informasi atau berita dilakukan kerjasama dengan Bagian Humas Setda.



2) Pembinaan dan Peningkatan Peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan peran Kelompok Informasi Masyarakat yang berada di Kabupaten Dharmasraya dengan melakukan studi banding ke KIM Tujuh Koto di Kab. 50 Kota yang merupakan KIM pemenang Nasional. Target peserta berasal dari Ketua KIM Kab. Dharmasraya dan berjumlah peserta 11 (sebelas) orang. Narasumber kegiatan ini berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. 50 Kota dan Ketua KIM Tujuh Koto. Peningkatan peran KIM ini dilaksanakan untuk meningkatkan informasi pembangunan dengan melaksanakan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, salah satunya diwujudkan melalui pemberian informasi masyarakat di website OPD. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 46.768.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.816.250 (98,01%)

c. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Prasarana Komunikasi

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 118 unit tower/menara BTS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya. Setiap tower/menara BTS dicek kondisinya dan dilakukan foto kondisi lingkungan. Pengecekan kondisi dilakukan terhadap keaktifan sinyal, jangkauan sinyal, kondisi alat (kabel, keropos tiang, dll), kondisi lingkungan (pepohonan sekitarnya), kondisi tanah, dan kondisi lain yang dibutuhkan. Kondisi pengecekan ini sulit dilakukan berkala oleh pemilik sehingga sebagai bentuk pelayanan terhadap pemilik tower/menara BTS dan pemilik tower/menara BTS membayar retribusi tower/menara BTS ke Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan ini dilakukan minimal 2 kali dalam setahun untuk setiap tower/menara BTS khususnya yang berada di perbukitan dan jauh dari pemukiman penduduk. Setelah dilakukan monitoring di lapangan, dibuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan dikirimkan penagihan



kepada pemilik tower/menara BTS. Apabila tidak terdapat respon, maka dilakukan koordinasi penagihan secara langsung. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 97.500.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 96.593.373 (99,07%).

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1) Pembinaan Peningkatan dan Pengembangan Kemitraan Usaha Bagi UMKM

Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing. Membangun kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu: persamaan perhatian, saling percaya, dan saling menghormati, harus saling menyadari penting nya kemitraan, harus ada kesepakatan visi, misi, tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak pada landasan yang sama, dan kesediaan untuk berkorban. Jumlah Anggaran Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 133.036.000 dan realisasi sebesar Rp.132.691.208 dengan Capaian Kinerja sebesar 99,7%.

Permasalahan

- a. Fasilitas Kemitraan Sangat Terbatas, Saat Ini Hanya Untuk Study Komperatif UMKM Ke Kota Palembang.
- b. Belum Mampu Mengembangkan Mitra Usaha Mikro dengan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah

Solusi

- a. Perlu peningkatan dampingan bagi pelaku usaha terutama wirausaha yang berada di daerah jauh dari pusat kabupaten dan yang berusia setengah baya



-
- b. Kuantitas pelatihan perlu ditingkatkan sehingga kemampuan pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk mampu bersaing dengan daerah lain.

2) Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan Kewirausahaan bertujuan meningkatkan pengetahuan Manajemen dan keterampilan UKM tentang kewirausahaan dan mendorong peningkatan kapasitas UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM. Peran UKM dinilai sangat penting dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, terutama menggerakkan sektor riil. Karena itu, penguatan terhadap ekonomi skala mikro dan kecil dipandang perlu menjadi salah satu prioritas untuk menunjang ekonomi daerah dan nasional yang kuat, tangguh, dan terciptanya fundamental ekonomi yang andal dan kokoh. Jumlah Anggaran Tahun 2018 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 144.340.000 dan realisasi sebesar Rp. 127.648.568 dengan Capaian Kinerja sebesar 88,6%.

Permasalahan

- a. Peserta belum mampu mengopersikan Aplikasi Gadget untuk peningkatan pemasaran produk.
- b. Tidak semua peserta mempunyai paket Internet.
- c. Waktu yang digunakan tidak optimal karena keterbatasan paket dan kemampuan mengoperasikan Aplikasi internet

Solusi

- a. Perlu pendampingan bagi pelaku usaha terutama wirausaha yang berada di daerah jauh dari pusat kabupaten dan yang berusia setengah baya.
- b. Kuantitas pelatihan perlu ditingkatkan sehingga kemampuan pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk mampu bersaing dengan daerah lain.

3) Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi



Pada Program peningkatan daya saing koperasi dan UKM yang memacu perkembangan koperasi di Kabupaten Dharmasraya, Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan agar masyarakat agar lebih memahami tentang tata cara mendirikan dan mengelola koperasi sehingga mampu berkembang dengan baik. Jumlah Anggaran Tahun 2018 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 47.682.00 dan realisasi sebesar Rp. 47.264.300 dengan Capaian Kinerja sebesar 99,1%.

Permasalahan

- a. Keterbatasan SDM Pembina koperasi dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.
- b. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan Pembina, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.

Solusi

Untuk menunjang kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, maka kegiatan ini sangat penting dilaksanakan setiap tahunnya.

b. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

1) Fasilitasi Pelaksanaan RAT Koperasi

Kegiatan RAT atau singkatan dari Rapat Anggota Tahunan merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi, karena pada Kegiatan RAT akan dibahas tentang pertanggungjawaban pengurus koperasi selama satu tahun buku yang akan disampaikan kepadasemua anggota koperasi yang bersangkutan. Jumlah Anggaran Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 28.630.500 dan realisasi sebesar Rp. 26.407.750 dengan Capaian Kinerja sebesar 92,2%.

Permasalahan

- a. Kurangnya keaktifan Pengurus Koperasi dalam menyikapi Himbauan Dinas untuk melaksanakan RAT.
- b. Permasalahan dalam menyelesaikan laporan keuangan.
- c. Keterbatasan SDM Pembina Koperasi dalam melakukan Pembinaan di lapangan.



-
- d. Keterbatasan Anggaran untuk Kegiatan yang menyentuh pada Kegiatan Pembinaan Koperasi non aktif.

Solusi

Untuk menunjang program kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, maka kegiatan ini sangat penting dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan yang bertujuan dapat membantu pengurus dan Pengelola Koperasi dalam menyajikan Laporan keuangan sehingga laporan yang di sajikan bisa di Pertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota, memberikan masukan dan Saran Kepada pengurus agar dapat melaksanakan RAT Setiap tahun buku. dan menyajikan Laporan Keuangan yang Akuntabel Sesuai dengan Prinsip – prinsip Akuntansi Koperasi.

c. Program Peningkatan Daya Saing Koperasi Dan Umkm

1) Pembinaan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi ini dalam rangka peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya dan berharap agar melalui pelatihan ini mampu menerapkan keterampilan pengelolaan usahanya serta akan memberikan nilai positif bagi perekonomian di Kabupaten Dharmasraya, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM sehingga akan memberikan manfaat yang lebih bagi koperasi itu sendiri. Jumlah Anggaran Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 149.486.000 dan realisasi sebesar Rp. 149.197.350 dengan Capaian Kinerja sebesar 99,8%.

2) Pembinaan dan Penilaian KSP Koperasi

Koperasi simpan pinjam (KSP) adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam. Dalam rangka untuk mengetahui apakah mengalami peningkatan atau pun penurunan kinerja koperasi simpan pinjam, maka diperlukan untuk melaksanakan penilaian kesehatan koperasi. Jumlah Anggaran Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 37.085.000 dan realisasi sebesar Rp. 36.523.850 dengan Capaian Kinerja sebesar 98,5%.



Permasalahan

Kesulitan dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Penilaian KSP/USP Koperasi berdasarkan aspek:

- a. Aspek Organisasi, dikarenakan koperasi belum memiliki struktur organisasi yang jelas.
- b. Aspek Manajemen, dikarenakan koperasi belum memiliki SOP dan SOM. Sehingga menyulitkan untuk melakukan penilaian.
- c. Aspek Permodalan, menemukan hambatan apabila koperasi menghimpun dana yang tidak jelas dari masyarakat. Sehingga menyulitkan untuk melakukan penilaian.

Solusi

Untuk menunjang program kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, maka kegiatan ini sangat penting dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa sehatnya koperasi dalam melaksanakan usahanya. Agar penilaian tersebut didapatkan hasil yang valid serta dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk bisa melanjutkan usahanya agar lebih maju dan berkembang serta tujuan dari koperasi tersebut bisa tercapai dengan baik.

3) Pelatihan akuntansi koperasi

Koperasi harus memiliki sistem manajemen keuangan yang handal dan akuntabel. Tata kelola koperasi yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong menuntut peran dan partisipasi aktif dari seluruh anggota (stake holder). Sistem manajemen koperasi, khususnya yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan. Jumlah Anggaran Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 64.480.000 dan realisasi sebesar Rp. 62.402.250 dengan Capaian Kinerja sebesar 96,8%.

Permasalahan

Masih kurangnya kesadaran pengurus koperasi untuk menambah dan meningkatkan SDM.

Solusi

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu upaya riil untuk melakukan suatu cara di dalam menata, mengontrol dan



mengendalikan kegiatan pencatatan keuangan yang dilakukan koperasi. Selain itu, hal lain yang dipandang perlu untuk dilakukan yaitu pengadministrasian pencatatan keuangan yang tertib dan terarah sesuai dengan aturan koperasi sehingga dengan adanya manajemen pengelolaan administrasi yang dilakukan dengan baik, maka peningkatan dan pengembangan keberadaan koperasi akan mudah untuk mencapainya.

11. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Investasi

Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan dalam rangka mempromosikan investasi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten, sebagai upaya pencapaian target realisasi investasi di Kabupaten Dharmasraya. Dimana pada kegiatan ini mengikuti Ivent-ivent pameran di Daerah maupun Nasional baik yang diikuti sendiri maupun bergabung dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Kegiatan promosi terhadap potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Dharmasraya dalam rangka meningkatkan masuknya investasi. Upaya tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai kegiatan promosi dan pemanfaatan media informasi. Jumlah Anggaran Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 122.800.750,- dan realisasi sebesar Rp. 119.824.000,- dengan Capaian Kinerja sebesar 97,57%

2) Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal

Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal kepada kegiatan usaha yang menanamkan investasinya di Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan ini adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap investasi kepada kegiatan usaha dan



menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal ke Provinsi bagi pelaku usaha tersebut. Dalam penyelenggaraan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan tahun 2019 jumlah investor sesuai dengan data tahun 2019 yang berinvestasi diatas Rp. 500 juta sebanyak 110 Perusahaan sementara yang dipantau sebanyak 30 Perusahaan yang terpantau (46,15%) dengan target 65 perusahaan. Jumlah Anggaran Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 46.095.100,- dan realisasi sebesar Rp. 45.698.400,- dengan Capaian Kinerja sebesar 99,13%

Permasalahan

- a. Target belum tercapai dan masih banyak perusahaan yang belum dipantau, karena defisit anggaran
- b. Tingginya target yang diberikan oleh BKPM RI

Solusi

- a. Tahun 2020 menambah anggaran untuk Pemantauan, pembinaan dan pengawasan
- b. Mengharapkan kepada pihak perusahaan untuk melaporkan kejadian yang tidak diinginkan ke DPMPTSP berhubung anggaran 2020 berkurang dari tahun 2019.

3) Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal (Tim Task Force)

Kegiatan ini untuk memfasilitasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah. Banyak hal yang mengakibatkan investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Dharmasraya. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini telah didapatkan cara atau strategi untuk mengatasi kendala atau hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan penanaman modal. Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal (Tim Task Force) tahun 2019 sebanyak 10 Investor. Jumlah Anggaran Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 38.984.500,- dan realisasi sebesar Rp. 38.549.100,- dengan Capaian Kinerja sebesar 99,88%

Permasalahan



Permasalahan yang ditemukan dilapangan adalah masalah yang ringan dan bisa di selesaikan oleh pihak perusahaan, seperti pencurian buah kelapa sawit di sekitar lokasi dan masalah tersebut sudah disepakati oleh pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar lokasi.

Solusi

Diharapkan kepada perusahaan untuk melaporkan ke DPMPTSP bila terjadi permasalahan, selanjutnya termasuk permasalahan pada tahun 2020 berhubung Anggaran pada kegiatan Koordinasi Fasilitas Penyelenggaraan Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal (Tim Task Force) tahun 2020 tidak ada.

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1) Kegiatan Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

Sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik adalah Kegiatan Pengembangan System Informasi Penanaman Modal, masih banyak perusahaan belum memahami dan belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Online per tiga bulan sesuai dengan Perka BKPM No. 7 tahun 2018. Jumlah Anggaran Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 35.696.750,- dan realisasi sebesar Rp. 35.678.850,- dengan Capaian Kinerja sebesar 99,94%

Permasalahan

- a. Banyaknya perusahaan yang belum mengirti cara menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online
- b. Sosialisasi LKPM Online ditahun 2019 belum di lakukan berhubung dana tidak tersedia.

Solusi

Melakukan Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online pada tahun anggaran 2020 dengan Investor sebanyak 40 perusahaan di Kabupaten Dharmasraya.

2) Kegiatan penyederhanaan Prosedur dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pemrosesan



izin berusaha baik itu perizinan maupun non perizinan di Kabupaten Dharmasraya. Seluruh permohonan izin diproses melalui aplikasi Si Cantik dan SIPO. Setelah diberlakukannya PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik maka seluruh Perizinan Berusaha diproses melalui Online Single Submission (OSS). Hasil dari kegiatan ini adalah terbitnya dokumen perizinan. Jumlah Anggaran Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 76.994.000,- dan realisasi sebesar Rp. 75.787.169,- dengan Capaian Kinerja sebesar 98,43%

Permasalahan

- a. Masih kurangnya pemahaman pengelola pelayanan perizinan tentang OSS
- b. Kurangnya koordinasi dengan OPD terkait maupun dengan pengelola pelayanan perizinan di tingkat propinsi.
- c. Masih banyaknya pengelola pelayanan perizinan yang belum mendapatkan pelatihan (Bimtek/sosialisasi) tentang perizinan terkait dengan OSS.
- d. Masih terbatasnya perangkat komputer untuk pemrosesan izin secara OSS.
- e. Kurangnya sosialisasi tentang OSS kepada masyarakat atau pelaku usaha.
- f. Anggaran yang tidak memadai untuk operasional pemrosesan izin penanaman modal, seperti rapat dan perjalanan dinas tim teknis pelayanan perizinan terpadu.

Solusi

- a. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan aparatur atau pengelola pelayanan perizinan dengan cara mengalokasikan dana untuk mengikuti pelatihan dan bimtek baik yang diadakan oleh provinsi maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- b. Melakukan sharing atau study banding ke daerah yang sudah mendapat predikat terbaik dalam hal pelayanan perizinan agar dapat menyerap ilmunya untuk diterapkan di Kab. Dharmasraya.



-
- c. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait demi percepatan proses izin melalui OSS.
 - d. Mengalokasikan dana untuk inovasi baru agar masyarakat mengurus segera Izin Mendirikan Bangunan mereka yang tentu saja berdampak kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3) Kegiatan Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Daerah

Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Dharmasraya ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan calon investor yang menginginkan informasi awal bagi pengembangan investasi di Kabupaten Dharmasraya. Akhirnya, penyusunan potensi diharapkan dapat memenuhi arahan PM nasional dan Sumatera Barat, menjawab tantangan otonomi daerah serta mencapai target penanaman modal Kab. Dharmasraya sampai tahun 2025. Dengan demikian pemetaan ini sangat berguna bagi daerah bersangkutan dan juga bagi investor, khususnya yang akan berinvestasi di wilayah tersebut. Kegiatan ini menghasilkan suatu wadah dan media untuk melakukan promosi terhadap investasi dan potensi yang bisa ditawarkan kepada para investor berupa buku potensi dan peluang investasi kabupaten yang memuat secara detail peluang-peluang potensi investasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Aplikasi dari kegiatan ini adalah melakukan pendataan untuk menghasilkan data yang valid yang dituangkan dalam bentuk buku. Dalam buku ini akan di dapat informasi oleh para penanam modal/investor peluang-peluang potensi investasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Jumlah Anggaran Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 29.030.000,- dan realisasi sebesar Rp. 28.622.050,- dengan Capaian Kinerja sebesar 98,59%

Permasalahan

- a. Walaupun dengan potensi alam yang subur dan menjanjikan serta didukung oleh jumlah penduduk yang cukup besar (tenaga kerja), namun belum banyak menarik para investor menanamkan modalnya di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya bahan kajian (data dan



informasi) dalam bentuk salah satu dokumen yang dapat ditelaah sebagai pedoman.

- b. Tidak ada petugas yang mempunyai keahlian dibidang multimedia sehingga buku tidak dapat disajikan lebih menarik lagi.
- c. Keterbatasan Anggaran untuk Kegiatan Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi dan peluang Investasi Daerah.

Solusi

- a. Penempatan anggaran yang lebih proporsional sesuai dengan kebutuhan membuat suatu kajian yang lebih jelas dan terinci.
- b. Menempatkan petugas yang mempunyai keahlian dibidang multimedia atau penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya masing-masing.

4) Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan PTSP Secara Elektronik

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) yang didukung Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi terkait Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal (Perpres Nomor 54 Tahun 2018) dan Implementasi OSS dengan SICANTIK di PTSP Daerah yang diperkuat dengan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Nomor 503/9533/SJ dan 503/4032/SJ, serta Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota Nomor 503/9534/SJ dan 503/4033/SJ yang meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas PTSP dalam rangka implementasi OSS. Jumlah Anggaran Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 38 56.340.500,- dan realisasi sebesar Rp. 54.800.803,- dengan Capaian Kinerja sebesar 97,27%

Permasalahan

- a. Masih belum terintegrasi Sicantik Cloud dengan sistim OSS
- b. Belum memakai tanda tangan elektronik

Solusi



- a. Melakukan koordinasi secara intens dengan Kementerian Kominfo dan BKPM. Mengikuti perkembangan aplikasi Sicanik dan Sisitim OSS berupa bimtek dan koordinasi dengan daerah lain berkaitan dengan Sicanik Cloud dan OSS.
- b. Untuk tanda tangan elektronik direncanakan tahun 2020 akan diurus langsung ke BBPT dan Kominfo Pusat.

5) Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Dengan keluarnya Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor : 110 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Dharmasraya sebanyak 139 izin, maka dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dengan peserta dari unsur Pemerintahan Nagari se-Kabupaten, Kecamatan se-Kabupaten, PerBankan, Asosiasi, Pengusaha, OPD terkait dan pelaku usaha di Kabupaten Dharmasraya tentang pelayanan perizinan dan non perizinan dan data elektronik pelayanan perizinan melalui sistim Online Single Submission (OSS) dengan narasumbernya dari DPMPTSP Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dan Dinas PU-PR Kabupaten Dharmasraya. Jumlah Anggaran Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 38.984.500,- dan realisasi sebesar Rp. 38.549.100,- dengan Capaian Kinerja sebesar 99,88% Jumlah Anggaran Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 61.954.950,- dan realisasi sebesar Rp. 58.712.700,- dengan Capaian Kinerja sebesar 94,77%

Permasalahan

- a. Pemahaman yang masih kurang bagi pelaku usaha dan masyarakat tentang pelayanan elektronik dari manual ke sistim OSS yang masih dalam masa transisi.
 - b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) belum seluruhnya selesai dari masing – masing Kementerian/ lembaga
- Solusi



- a. Memberikan penjelasan ulang melalui monitoring dan evaluasi pasca sosialisasi ke Kecamatan dan Nagari tentang sistim elektronik dengan melakukan praktek langsung bagi tenaga pelayanan Nagari dan Kecamatan se-Kabupaten Dharmasraya.
- b. Koordinasi dengan DPMPTSP Provinsi, Kementrian Kominfo/ Lembaga dan BKPM

6) Peningkatan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Perizinan (Benchmarking)

Program Peningkatan Iklim Investasi adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan inovasi dalam bidang pemrosesan izin berusaha baik itu perizinan maupun non perizinan di Kabupaten Dharmasraya. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya terobosan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha, sehingga mempermudah proses izin, tidak lagi berbelit-belit seperti yang sering dikeluhkan pemohon.

Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah sumber daya manusia atau pengelola pelayanan perizinan. Dari kegiatan ini diharapkan adanya inovasi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pelayanan perizinan. Untuk itu diperlukan studi tiru ke daerah lain untuk belajar inovasi apa yang bias dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sehingga akan meningkat pula investasi di Kabupaten Dharmasraya. Jumlah Anggaran Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 24.209.400,- dan realisasi sebesar Rp. 22.447.778,- dengan Capaian Kinerja sebesar 92,72%

c. Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

1) Kegiatan Pembentukan Unit Pengaduan Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

Kegiatan Pembentukan Unit Khusus penanganan pengaduan masyarakat meliputi pem bentukan tim penanganan pengaduan, anggota tim berasal dari OPD teknis yang mendukung terlaksananya penanganan pengaduan tentang perizinan di Kabupaten Dharmasraya. Tim penanganan pengaduan dapat melaksanakan tugas apabila adanya pengaduan baik langsung maupun tidak



langsung dalam bentuk tertulis dan lisan dari masyarakat. Jumlah Anggaran Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 14.099.500,- dan realisasi sebesar Rp. 2.683.500,- dengan Capaian Kinerja sebesar 19,03%

Selama tahun 2019 pengaduan yang masuk ke DPMPTSP antara lain :

- a. Surat dari Wali Nagari Sungai Duo Nomor : 648/1677/Pem/VIII-2019, tanggal 6 Agustus 2019 Perihal Mohon Tindak Lanjut IMB an. Jeferson. Ditindaklanjuti dengan turunya Tim Penanganan Pengaduan kelokasi pembangunan ruko an. Jeferson dan pembangunannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini sehingga pembangunan ruko tersebut dapat dilanjutkan pengurusan IMBnya dapat diproses secara berjenjang.
- b. Pengukuran ulang luas izin SITU-HO PT. Kharisma Wirajaya Perkasa di Jorong Padang Sidondang Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung. Ditindaklanjuti kelokasi dan telah diselesaikan pengukuran ulang dengan penambahan luas adalah wajar karena PT. Kharisma Wirajaya Perkasa mengalami peningkatan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Permasalahan

- a. Masih kurang terkoordinirnya pengaduan masyarakat di DPMPTSP sehingga tupoksi TPP pun belum maksimal.
- b. Pengaduan secara lisan belum bisa ditindaklanjuti melalui prosedur pengaduan karena untuk pengaduan masyarakat dalam bentuk isu atau wacana karena tidak langsung ke DPMPTSP.
- c. Pengaduan berupa laporan dari masyarakat tentang pelaku usaha yang belum mempunyai izin terkait usaha yang dilakukan mengganggu lingkungan sekitarnya.

Solusi



- a. Peningkatan Koordinasi bidang pelayanan dengan pengelola pengaduan.
- b. Mencari pusat isu /wacana yang berkembang tentang pengaduan masyarakat dengan memantau/ melihat langsung dokumen atau tinjauan lokasi yang menjadi pengaduan masyarakat.
- c. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan meminta pelaku usaha yang belum memiliki izin agar segera melakukan pengurusan izin dimulai dari Pemerintahan Nagari, Kecamatan dan DPMPTSP secara berjenjang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak akan bermasalah dan mengganggu lingkungan sekitarnya.

12. Kepemudaan dan Olahraga

Pada urusan Kepemudaan dan Olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

1) Seleksi pendidikan dan pelatihan paskibraKegiatan

Aksi Paskibra alias Pasukan Pengibar Bendera di setiap perayaan Kemerdekaan RI selalu jadi pusat perhatian. Ada rasa bangga pada siswa-siswi SMA yang terpilih ini, apalagi bila mereka berhasil menjadi anggota Paskibraka, yang bertugas di Istana Negara, di hadapan Presiden RI, maka pada Tahun 2019 mulai dari Bulan Juli–Agustus Dinas Budparpora Kab. Dharmasraya telah melakukan seleksi dan pelatihan Anggota Paskibraka untuk Pasukan Pengibar Bendera di setiap perayaan Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2019, di Kantor Bupati Dharmasraya. Jumlah anggaran yang dialokasi pada kegiatan ini adalah Rp1.338.061.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1319272440,- atau 99 %, sehingga dana bersisa sebesar Rp. 18.788.560,- atau 1,00%. Sehingga realisasi kegiatan sudah mencapai 100%



Permasalahan

- a. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dengan sekolah – sekolah, sehingga Anggota paskibraka yang ditampilkan belum sesuai dengan standar yang diharapkan
- b. Belum memadai Sarana dan prasarna untuk karentina Anggota Paskibraka, sehinga pada Tahun 2019 masih menggunakan Ruangn Sport Center di Koto Padang
- c. Belum cukupnya Anggaran untuk melaksanakan rekrut dan pelatihan Anggota Paskibraka

Solusi

- a. Meningkatkan koordinasi semua pihak, terutama ke pihak Sekolah – sekolah baik sekolah swasta maupun Negeri.
- b. Adanya pengadaan sarana dan perasarana untuk menunjang kegiatan karentina anggota Paskibraka.
- c. Adanya penambahan anggaran untuk kegiatan Paskibraka pada tahun berikutnya

b. Program peningkatan peran serta kepemudaan

1) Kirab dan Jambore Pemuda

Kegiatan Kirab dab Jambore Pemuda Indonesia dilaksanakan pada Bulan September 2019 dan puncaknya dilaksanakan pasa tanggal 31 Oktober s.d 6 November di Sulawesi Utara. Dalam pelaksanaan Kegiatan ini diawali dengan Sosialisasi, rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya juga melibatkan beberapa stake holder terkait seperti ikatan Uda Uni Kabupaten Dharmasraya. Diharapkan setelah mengikuti seleksi dan dinyakatan layak/lulus selanjutnya peserta yang dinyatakan lulus tersebut akan di kirim ke Tk. Provinsi Sumatera Barat di Padang. Jumlah anggaran yang dialokasi pada kegiatan ini adalah Rp 88.750.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 69.805.450,- atau 78 %, sehingga dana bersisa sebesar Rp. 18.945.050,- atau 22%. Sehingga realisasi kegiatan sudang mencapai 100%

Permasalahan



Sesuai dengan DPA yang ada, Kegiatan Kirab dan jambore Pemuda ini, perwakilan Pemuda Kab. Dharmasraya pada Seleksi Tingkat Provinsi tidak berhasil Lolos sebagai utusan kab. Dharmasraya sehingga dana yang semula di alokasikan untuk fasilitasi ke tingkat Nasional tidak dapat di realisasikan.

Solusi

- a. Diperlukan sosialisasi yang lebih baik dengan melibatkan semua stekholder
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Propinsi, supaya perwakilan Kab, Dharmasraya dapat menjadi pertimbangan untuk mewakili propinsi di tingkat Nasional .

2) Kursus Mahir Lanjut (KML) Pembina Pramuka dan Jambore Daerah

Kegiatan Kursus Mahir Lanjutan Pembina Pramuka dilaksanakan pada hari Jumat -Rabu tanggal 19 s/d 24 Juli 2019 Bertempat di Gelanggang Olahraga/Sport Center Koto Padang Kecamatan Koto baru Kabupaten Dharmasraya. Dalam pelaksanaan Kegiatan ini Dinas Kebudayaan Pariwisata pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya juga melibatkan beberapa stake holder Pramuka seperti Kwartir Daerah 03 Sumatera Barat dan Kwarcab 18 Dharmasraya terutama dalam urusan pelaksanaan Kursus dan penyediaan tenaga instruktur dan pelatih. Diharapkan setelah mengikuti Kursus Mahir Lanjutan ini Pembina Pramuka yang dilatih berperan aktif sebagai Pemina Pramuka dalam rangka Pembangunan Kepramukaan kabupaten Dharmasraya. Jumlah anggaran yang dialokasi pada kegiatan ini adalah Rp 148.464.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 135.728.100,- atau 91 %, sehingga dana bersisa sebesar Rp. 12.735.900,- atau 9%. Sehingga realisasi kegiatan sudah mencapai 100%

Permasalahan

Dalam kegiatan ini kendala yang dihadapi adalah, Sesuai dengan DPA yang ada, bahwa Kegiatan Kursus Mahir Lanjutan Pembina Pramuka dan Jambore Daerah ini, pada kegiatan Jambore Daerah berdasarkan Program Kerja Kwartir Daerah 03 Sumatera Barat



bahwa Jambore Daerah yang semula direncanakan pada bulan November 2019 ini tidak Jadi dilaksanakan. Sehingga berdampak pada beberapa Objek Belanja tidak dapat di realisasikan seperti BBM kontingen Jamda, makan Minim kontingen Jamda dan Pembelian Seragam Kontingen Jamda.

Solusi

- a. Kegiatan yang tidak dilaksanakan maka Sisa Anggarannya di menjadi Silva pada Akhir tahun
- b. Dalam Perencanaan Kegiatan akan meningkatkan koordinasi dengan instansi Pembina dan Instansi terkait

3) Pelatihan Pemuda Kreatif

Kegiatan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Pihak Kepolisian Kab. Dharmasraya untuk melakukan merekrutmen dan melakukan pelatihan serta pembinaan bagi Pemuda dan Pemuda Kab. Dharmasraya yang akan masuk Kepolisian Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Bulan Februari s/d April 2019 di Markas Kepolisian Dharmasraya Gunung Medan. Jumlah anggaran yang dialokasi pada kegiatan ini adalah Rp98.056.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 97.9320.00,- atau 100 %, sehingga dana bersisa sebesar Rp. 124.000,- atau 0%. Sehingga realisasi kegiatan sudah mencapai 100%

Permasalahan

- a. Kurangnya koordinasi antara Dinas Budparpora dengan pihak Kepolisian dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan
- b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan Sekolah – sekolah
- c. Belum adanya aturan yang jelas tentang kerja sama PEMDA dengan Pihak Kepolisian

Solusi

- a. Untuk kelancaran kegiatan Pelatihan Pemuda Kreatif tersebut perlunya konsultasi dan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dengan Pihak Kepolisian
- b. Perlunya sosialisasi ke Nagari – nagari dan Sekolah – sekolah



-
- c. Perlunya membuat aturan – aturan yang jelas antara pemerintah dengan Pihak Kepolisian.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
Realisasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan untuk membiayai operasional Sport Center, seperti pembelian Baju Lapangan tenaga kebersihan, Pemeliharaan AC, Mesin Ginset, Pembelian bahan kebersihan, pembelian Pupuk Lapangan dan Pemeliharaan Bagunan. Yang kelgiatannya mulai dari Januari s/d Desember 2019. Jumlah anggaran yang dialokasi pada kegiatan ini adalah 120.3215.00,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 118.183.419,- atau 98%, sehingga dana bersisa sebesar Rp. 2.138.081,- atau 2%. Sehingga realisasi kegiatan sudah mencapai 100%

Permasalahan

- a. Kondisi bangunan gedung sport senter pada saat telah mengalami kebocoran dan kerusakan di beberapa titik.
- b. Kurangnya tenaga Keamanan dan K3 di Sprot Center
- c. Kurangnya Anggaran operasional dalam pemeliharaan gedung sport center

Solusi

- a. Perlunya perhatian Dinas Budparpora yang berkoordinasi dengan instansi terkait tentang Peneliharaan Gedung Sport Center mengingat pada saat ini gedung tersebut sudah mengalami kebocoran loteng dan kerukan di beberapat titik
- b. Perlunya penambahan Tenaga Keamanan dan kebersihan, mengingat pada saat ini adanya beberapa peralatan yang sudah hilang
- c. Perlunya penambahan tenaga kebersihan, menginngat pada saat ini tidak terjaganya kebersihan gedung Sport center tersebut.

d. Program Pembinaan dan Permayarakatan Olah Raga

1) Pengembangan Olahraga Rekreasi



Kegiatan Pengembangan olahraga rekreasi ini Dilaksanakan pada Tanggal 05 s/d 08 Desember 2019 di Jorong Sei. Belit Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Yang mana dalam acara ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga memanggil Atlit Paralayang dan Gantole yang ada di Indonesia yang berminat mengikuti Iven Internasional Paralayang ini. Jumlah anggaran yang dialokasi pada kegiatan ini adalah 399.937.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 396.430.803,- atau 99 %, sehingga dana bersisa sebesar Rp. 3.506.697,- atau 1%. Sehingga realisasi kegiatan sudang mencapai 100%

Permasalahan

kurangnya anggaran untuk Tim Keamanan sehingga terbatasnya jumlah pengaman yang kita diminta untuk menjadi tim Keamanan masih kurang, dan Akses Jalan menuju lokasi pertandingan belum memadai sehingga menyulitkan panitia, peserta dan penonton untuk menuju lokasi perlombaan tersebut.

Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diminta Kepada Pemerintah Derah agar dapat meningkatkan anggaran dan menganggarkan perbaikan jalan menuju lokasi pelaksanaan pertandingan .

2) Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Kegiatan Kompetisi Olahraga dilaksanakan pada awal tahun Januari s.d Desember 2019 di berbagai tempat dan daerah se Kabupaten Dharmasraya adapun kompetisi olahraga tersebut berupa Bantuan Proposal dari Masyarakat dan Club Club Olah raga se Kabupaten Dharmasraya. Jumlah anggaran yang dialokasi pada kegiatan ini adalah 431.612.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 423.695.800,- atau 98 %, sehingga dana bersisa sebesar Rp. 7.916.200,- atau 7%. Sehingga realisasi kegiatan sudang mencapai 100%

Permasalahan

- a. Kurangnya dana untuk pemberian Proposal yang masuk



-
- b. Bantuan transportasi atlet atlet yang hendak bertanding ke Tingkat Provinsi dan Nasional belum teranggarkan.
 - c. Belum terdatanya organisasi olahraga dan Clup – clup olahraga harus diberikan bantuan

Solusi

- a. Perlunya penambahan Anggaran untuk proposal dan dana Transportasi Atlit – atlit yang bertanding di tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
- b. Perlunya pendataan organisasi olahraga dan Clup – clup olahraga yang harus mendapatkan bantuan.

3) Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi

Kegiatan adalah Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi pada Pertandingan Olahraga di Tingkat Propinsi yang di adakan di Padang Pariman pada tahun 2018. Jumlah anggaran yang dialokasi pada kegiatan ini adalah 2.752.750.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.752.750.000,- atau 100 %, sehingga dana bersisa sebesar Rp. 0,- atau 0 %. Sehingga realisasi kegiatan sudah mencapai 100%

Permasalahan

- a. Belum adanya koordinasi yang baik antara Dinas Budparpora, instansi terkait dengan Atlit – atlit yang melakukan pertandingan
- b. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini masih kurang

Solusi

- a. Perlunya koordinasi yang baik antara Dinas Budparpora, instansi terkait dengan Atlit – atlit sebelum melakukan pertandingan
- b. Perlunya penambahan anggran dimasa yang akan datang

13. Statistik

Urusan statistik, merupakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1) Kompilasi Produk Administrasi Bidang Sosial



Kegiatan ini bertujuan untuk pembuatan portal rumah data dharmasraya serta pelatihan terhadap operator OPD untuk pengisian portal rumah data dharmasraya. Pembuatan portal rumah data dharmasraya dilakukan oleh programmer dinas kominfo kabupaten dharmasraya sekaligus sebagai instruktur pada pelatihan pengisian portal rumah data dharmasraya. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 69.485.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 69.379.446 (99,84%)

Permasalahan

Belum sempurnanya aplikasi portal rumah data akibat keterbatasan SDM dalam pembuatan portal tersebut.

Solusi

Mengikutsertakan programmer Kabupaten Dharmasraya dalam konsultasi dan koordinasi ke daerah lain yang telah memiliki portal satu data dalam rangka penyempurnaan aplikasi portal rumah data yang telah dibuat.

2) Sosialisasi Statistik Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan sosialisasi terhadap seluruh OPD dan Nagari tentang Pemanfaatan Website Rumah Data Dharmasraya serta Nagari Statistik di Kabupaten Dharmasraya. Sosialisasi ini melibatkan seluruh OPD, Kecamatan dan Nagari dengan target 100 peserta. Narasumber kegiatan ini dari BPS Propinsi Sumatera Barat, Dinas Kominfo Sumatera Barat dan BPS Kabupaten Dharmasraya. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.745.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.523.250 (99,56%)

Permasalahan

Kegiatan sosialisasi statistik dapat dilaksanakan setelah pembuatan website rumah data dan tahapan penancangan nagari statistic selesai dilaksanakan oleh programmer.

Solusi

Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) serta programmer yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten



Dharmasraya meskipun kondisinya sangat terbatas, sehingga kegiatan sosialisasi dapat terlaksana dengan memadai.

b. Pengembangan Statistik Sektoral

1) Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk kerjasama pengumpulan, verifikasi dan validasi data dalam proses pembuatan buku Dharmasraya dalam Angka Tahun 2019, PDRB menurut Produksi 2013-2018 dan PDRB menurut Lapangan Usaha 2013-2018 serta Pencanangan Nagari Statistik di Kabupaten Dharmasraya. Dharmasraya dalam Angka Tahun 2019, PDRB menurut Produksi 2013-2018 dan PDRB menurut Lapangan Usaha 2013-2018 dipublikasikan dalam bentuk Buku (hard copy) serta website dharmasrayakab.go.id dan website rumahdata.dharmasrayakab.go.id (soft copy). Nagari Statistik merupakan satu-satunya kegiatan statistik sektoral yang merupakan kerjasama dengan instansi vertikal yaitu BPS yang merupakan instansi resmi Pembina data di tingkat Kabupaten. Tujuan pencanangan dan pembentukan Nagari Statistik adalah tersedianya data yang sektoral yang terperinci, akurat, akuntabel dan terintegrasi mulai dari tingkat Nagari sampai ke Kabupaten dalam mendukung Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, di tingkat Kabupaten. Pencanangan ini dilakukan di Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung pada tanggal 4 September 2019 dan ini juga menjadi pertama (pilot) di Propinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan ini juga didukung pembagian alokasi bandwidth oleh Dinas Kominfo Kab. Dharmasraya ke layanan internet di Nagari Sitiung sehingga pengisian data di Portal Rumah Data Dharmasraya di Nagari dapat langsung diketahui oleh Dinas Kominfo Kab. Dharmasraya. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 87.255.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 87.008.250 (99,71%)

Permasalahan

Belum teranggarkannya proses pencanangan Nagari Statistik dalam DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 serta belum



adanya pembentukan Nagari Statistik di daerah lain sebagai referensi.

Solusi

Diajukan kegiatan pencaangan Nagari Statistik dalam DPA Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 dan penggunaan dana Nagari Sungai Duo dalam proses pencaangan serta dicari reference yang memadai untuk langkah-langkah pembentukan Nagari Statistik.

14. Persandian

Urusan persandian, merupakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah

1) Penyediaan Kebijakan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membuat Peraturan Bupati tentang Penggunaan sertifikat elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, disertai dengan seluruh proses seperti rapat, penyusunan draft, dan konsultasi. Hasil kegiatan ini berupa tentang Penggunaan sertifikat elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang telah ditandatangani oleh Bupati Dharmasraya. Peraturan Bupati ini menjadi dasar untuk pelaksanaan penggunaan sertifikat elektronik seperti penandatanganan digital di daerah sehingga dapat mempercepat pelayanan masyarakat. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 18.990.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.015.250 (94,86%)

2) Pengelolaan Peralatan Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi yang Digunakan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan mengoperasikan peralatan sandi yang ada berupa jammer dan counter surveillance. Peralatan ini digunakan untuk deteksi alat sadap yang dipasang orang lain



hususnya untuk kegiatan Bupati, Wabup, DPRD, rapat, dll. Deteksi ini dapat dilakukan secara berkala atau kegiatan khusus. Selain itu, alat ini dapat digunakan atas permintaan SKPD terhadap deteksi alat sadap di kegiatan. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19.960.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.850.250 (99,45%)

Permasalahan

Belum adanya permintaan OPD untuk melakukan penggunaan alat persandian.

Solusi

Sosialisasi tentang penggunaan peralatan persandian berupa pengiriman SOP penggunaan alat dan Perbup tentang persandian daerah kepada OPD.

3) Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pejabat daerah tentang penerbitan dan pemanfaatan sertifikat digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik dan Perka Lemsaneng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan kegiatan Persandian di Daerah. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan sosialisasi untuk pejabat berupa Kepala OPD dan Sekretaris seluruh OPD dan Kecamatan sekitar 80 orang dengan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat. Sebelum dilaksanakan kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan konsultasi ke Dinas Kominfo Prop Sumatera Barat dan BSSN dalam rangka kelancaran proses kegiatan yang akan dilaksanakan. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 59.870.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 57.881.905 (96,67%).

b. Program Persandian Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan :

1) IT Security Asessment pada Aplikasi yang digunakan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengamanan informasi dalam aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten



Dharmasraya, dimana BSSN akan mengetahui titik lemah aplikasi dan dapat dilakukan pengamanan lebih awal sehingga tidak dapat dirusak/dihack oleh orang tak dikenal. Hasil kegiatan ini baru sebatas konsultasi dan koordinasi ke BSSN. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.700.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.554.250 (97,44%)

15. Kebudayaan

Pada urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Nilai Budaya

1) Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.148.093.250,-. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp.148.069.250,- (99%) Sedangkan realisasi kegiatan 100 %.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 bentuk kegiatan antara lain:

i. Fungsi Bundo Kanduang dalam adat

Peran Bundo Kanduang sangat penting dalam pelestarian Adat dan Budaya Minangkabau dan bundo kanduang merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari kaum ibu yang diakui keberadaannya dan perannya di daerah Minangkabau. Untuk itu organisasi yang berdampingan dengan lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) ini harus mampu melestarikan dan mewarisi nilai-nilai adat dan budaya minangkabau khususnya di daerah Dharmasraya. Oleh sebab itu sangat perlu di berikan pembekalan bagi pengurus Bundo Kanduang dan juga bundo kanduang ibarat ibu yang sejati dan sekaligus pemimpin dalam adat dan budaya minang kabau yang harus memiliki sifat-sifat keteladanan dan senantiasa memberikan contoh yang baik khususnya bagi kalangan anak-anak dan lingkungan, maka pada kegiatan ini Bundo kandung telah melakukan Study Banding dan melakukan Hari Ulang Tahun Bundo Kandung se Propinsi Sumatera Barat Kab. Dharmasraya pada tanggal 8 Desember 2019



ii. Fungsi LKAAM dalam pembinaan adat istiadat

LKAAM merupakan sebuah mitra pemerintahan Sumatera Barat yang mewadahi penyaluran aspirasi komunitas adat dalam hal pelestarian nilai-nilai adat dalam masyarakat. Secara garis besar, tujuan dari LKAAM ini adalah melestakan adat dan budaya Minangkabau secara utuh dan juga menerapkan kepada generasi penerus secara terlembaga. Ada pun tujuan lain dalam bentuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional secara bersama-sama.¹ Sedangkan fungsi dari LKAAM itu sendiri sebagai wadah koordinasi kerapatan adat Nagari-nagari sesuai dengan bentuk struktur adatnya di Nagari-nagari dalam wilayah provinsi Sumatera Barat serta daerah-daerah lain yang etnis masyarakatnya menganut sistem adat Minangkabau, yang Pelatihan dan Pembinaan terhadap Ninik Mamak, KAN, LKAAM dan Bundo Kandung yang dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 8 Desember 2019 dan Mukerda LKAAM se Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 9 Desember 2019

Permasalahan

- a. Bundo Kandung dan LKKAM adalah organisai yang belum terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM
- b. Anggota Bundo kandung dan LKAAM belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsinya sebagai lembaga adat yang akan memberikan pemahaman tentang adat dan istiadat kepada cucu kamanakan di Kab. Dharmaseraya.
- c. Kurangnya sosialisasi tentang adat dan istiadat terhadap Pengurus, Pemangku Adat dan Tokoh masyarakat tentang perlunya pengetahuan terhadap adat istiadat

Solusi

- a. Mendorong pemerintah Daerah dan organisasi Bundo Kandung serta LKAAM untuk membuat AD/ART dan mendaftarkan pada Kementrian Hukum dan HAM



-
- b. Kegiatan dalam bidang Organisasi yang selalu diberatkan pada pola pembinaan dan pengembangan organisasi baik ke dalam maupun ke luar,
 - c. Kegiatan dalam Bidang pendidikan yaitu melaksanakan pembinaan pendidikan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengetahuan tentang adat dan budaya adat Minangkabau,
 - d. Kegiatan Bidang adat mencakup seluruh agenda atau kegiatan yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat sesuai pengurus pusat.

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1) Pelestarian Kawasan Cagar Budaya

Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Kabupaten Dharmasraya baik berupa pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur seperti peningkatan pemahaman masyarakat tentang pelestarian cagar budaya. Dengan adanya kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya, maka Manfaatnya yang didapat adalah terjaganya kelestarian cagar budaya yang dimiliki Kabupaten Dharmasraya dan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya cagar budaya bagi ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung dalam tahun 2019 dimana pembangunan infrastruktur yaitu pembuatan sumur bor dilaksanakan pada juli tahun 2019, sementara kegiatan non fisik lainnya seperti sidang TACB dilaksanakan pada bulan februari, agustus dan pada bulan November tahun 2019. Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah Rp. 159.385.000,-. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp.159.302.746 (99%) sedangkan realisasi Kegiatan sudah mencapai 100%.

Permasalahan

- a. Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan terutama pembangunan fisik untuk pelestarian cagar budaya dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia.
- b. Masih banyaknya cagar budaya yang belum teridentifikasi.
- c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian cagar budaya



Solusi

- a. Menjadikan kegiatan pelestarian cagar budaya menjadi program prioritas
- b. Meningkatkan koordinasi semua pihak ,baik Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kementrian terkait.

c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1) Fasilitas Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

Mengikuti Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), pada tanggal 3 s/d 5 Juli 2019 yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta, Yang mana dalam acara ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengutus salah satu sanggar yang ada di Kabupaten Dharmasraya yaitu Sanggar Puti T`ungga dari kecamatan Sitiung. Jumlah Anggaran yang di alokasikan pada kegiatan ini adalah Rp. 66.415.000.Dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 62. 200.048,-. Atau (95%), dengan realiasi Kegaiaian 100%. Dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

2) Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah

Pembinaan dan Sosialisasi pada Sanggar, pelaku seni sekolah dan kesenian multi etnis yang ada di Kab.Dharmasraya, yang dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2019 di Auditorium Lantai II Kantor Bupati Kabupaten Dharmasraya. Yang mana dalam kegiatan ini dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengundang dan mengutus dari Pengurus Sanggar dan pelaku Seni sekolah serta Paguyuban Multi Etnis yang ada di Kabupaten Dharmasraya untuk mengikuti Sosialisasi Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang diikuti 13 Pelaku Seni Sekolah, 11 Sanggar dan 3 Panguyuban. Terbinanya Sanggar, Pelaku Seni dan Pangguyuban Kesenian Multi Etnis yang ada di Kab. Dharmasraya agar dapat meningkatkan inovasi Kreatif dan Mengajak Generasi muda agar dapat meningkatkan kecintaannya pada kesenian Tradisi Budaya Daerah. Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah Rp. 42.720.000,-.



Dengan realisasi keuangan sebesar Rp.41.676.000 (97 %) sedangkan realisasi Kegiatan sudah mencapai 100%.

Permasalahan

- a. Belum cukupnya anggaran untuk Tim Kesenian sehingga terbatasnya jumlah sanggar yang dilakukan pembinaan dan pengirimman untuk mengikuti Even – even Tingkat Propinsi dan Nasional
- b. Belum terakomodir seluruh Sanggar, Pelaku Seni dan Pangguyuban Kesenian Multi Etnis, yang ada di Kab. Dharmasraya
- c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebudayaan kesenian, sehingga kurangnya peminat dari masyarakat dan terutama generasi Muda dalam bidang Budaya dan kesenian

Solusi

- a. Perlu perhatian Pemerintah dan pihak terkait tentang perlunya menggali kebudayaan dan kesenian yang ada di Daerah Kab. Dharmasraya dengan memberikan Anggaran yang cukup untuk untuk kegiatan tersebut
- b. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggali kebudayaan dan kesenian.
- c. Diharapkan proaktif pemerintah Nagari untuk mendaftarkan Sanggar, Pelaku Seni dan Pangguyuban Kesenian Multi Etnis ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga

3) Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Harus diakui bahwa kebudayaan adalah cerminan dan jati diri suatu bangsa termasuk kabupaten Dharmasraya yang memiliki nilai kebudayaan yang tinggi dengan menganut falsafah adat “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”. Pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya telah berupaya untuk melindungi dan melestarikan adat dan budaya kabupaten Dharmasraya. Upaya – upaya yang dilakukan adalah memberikan bantuan kepada nagari yang melaksanakan kegiatan adat nagari atau alek nagari yang ada di kabupaten Dharmasraya. Melaksanakan pemilihan Duta



Budaya tingkat kabupaten Dharmasraya untuk memberikan contoh kepada generasi muda yang telah jarang mempelajari dan mengenal adat dan kebudayaan Minangkabau. Festival Pamalayu mengenang sejarah peradaban masa lalu. Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah Rp. 1.395.985.000,-. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.341.543.307 (96 %) sedangkan realisasi Kegiatan sudah mencapai 100%

Permasalahan

- a. Pada kegiatan Festival Pamalayu, masih banyaknya masyarakat Kab. Dharmasraya yang belum memahami sejarah Peradaban Dharmasraya secara utuh, meskipun sudah dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan Festival Pamalayu
- b. Pada kegiatan Alek Nagari, ada sebahagian Nagari yang melaksanakan kegiatan sebatas serimonial saja
- c. Kurangnya masyarakat dan Generasi Muda mengikuti Duta Budaya dan belum terseleksinya pemilihan Duta Budaya dengan baik, sehingga duta Budaya yang mewakili Dharmasraya tingkat Propinsi belum sesuai dengan yang diharapkan

Solusi

- a. Perlunya diterbitkan sebuah buku tentang sejarah peradaban Dharmasraya masa lalu, untuk bias di pedomani oleh Generasi Kab. Dharmasraya di masa yang akan datang
- b. Pemerintah Kab. Dharmasraya melalui Dinas Budparpora akan mengevaluasi dan melakukan pembinaan terhadap Nagari – nagari yang ada di Kab. Dharmasraya
- c. Untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengikuti lomba duta budaya maka diadakan sosialisasi kepada Wali Nagari dan sekolah SLTA ,serta memperbanyak brosur-brosur sebagai bahan informasi terhadap masyarakat .

4) **Workshop Penetapan Cagar Budaya**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Tim Ahli Cagar Budaya dalam membuat rekomendasi penetapan dan pemeringkatan cagar budaya daerah. Dimana pelaksanaan kegiatan ini berlangsung dalam tahun 2019 yaitu pada triwulan pertama di



bulan februari. Anggaran Kegiatan Workshop Penetapan Cagar Budaya adalah Rp. 17.185.000,- yang mana telah terealisasi sebesar Rp. 16.602.800,- atau sebesar 96,61%.

Permasalahan

Masih kurangnya pengetahuan dan wawasan TACB dalam penyusunan kajian tentang Cagar Budaya. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan TACB yang berbeda-beda ditambah dengan pengalaman dan pemahaman tentang cagar budaya yang masih kurang.

Solusi

Untuk meningkatkan kemampuan TACB tersebut maka perlu diadakan pembinaan-pembinaan seperti sosialisasi dan workshop sehingga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam penyusunan rekomendasi cagar budaya

d. Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya

1) Pengadaan sarana dan prasarana kesenian

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebudayaan daerah dalam hal pakaian adat daerah agar tetap ada corak kekhasannya. Kegiatan ini berlangsung dalam tahun 2019 dimana pengadaan baju basiba dilaksanakan pada triwulan pertama sedangkan pengadaan baju adat/khas daerah dilaksanakan pada triwulan keempat tahun 2019. Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian adalah Rp. 65.545.000,- yang mana telah terealisasi sebesar Rp. 63.565.000,- atau sebesar 96,97%.

Permasalahan

Banyaknya benda-benda warisan budaya yang hampir punah seperti pakaian khas adat daerah di beberapa kerajaan yang ada di dharmasraya. Kondisinya sebagian besar sudah usang dan lapuk dimakan usia.

Solusi

Untuk menjaga warisan budaya tersebut agar tidak punah, rusak dimakan usia maka perlu diadakan duplikatnya supaya bentuk dan model asli dari pakaian adat tersebut tetap ada



2) Pembuatan dokumen budaya daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk membuat Dokumen Sejarah tentang Kab.Dharmasraya dan Nagari Nagari yang ada di Kab. Dharmasraya, pada tahun 2019 baru dilakukan konsultasi dan koordinasi ke Dinas terkait. Anggaran Kegiatan Pembuatan Dokumen budaya Daerah ini adalah Rp.8.624.000,- yang mana telah terealisasi sebesar Rp. 8.409.000,- atau sebesar 97,00%.

16. Perpustakaan

Urusan perpustakaan yang juga dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdapat berbagai program dan kegiatan yaitu:

a. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.**1) Pengembangan minat dan budaya baca (lomba bercerita)**

Program Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam upaya menumbuhkan minat dan budaya baca, terutama di kalangan siswa sekolah dasar. Adapun bentuk kegiatan tersebut mendorong nagari dimana peserta didik tersebut untuk gemar membaca atau membiasakan untuk membaca sehingga membaca akan menjadi budaya bagi siswa. Kegiatan tersebut dirangkum dalam sebuah kegiatan Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI.

Kegiatan Lomba Bercerita merupakan agenda tahunan Nasional yang diselenggarakan seluruh Kabupaten/Kota se Indonesia dalam rangka Penumbuhan Minat dan Budaya Baca.

Adapun bentuk lain Kegiatan ini adalah Sosialisasi dan Pembinaan Penumbuhan Minat dan Budaya Baca ke sekolah-sekolah, organisasi-organisasi remaja, majlis ta'lim serta penumbuhan taman bacaan masyarakat, rumah baca, perpustakaan rumah ibadah dll. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 42.515.000,- (Empat puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.313.250,- (Empat puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 201.750,- (Dua ratus seribu



tujuh ratus lima puluh rupiah) atau Realisasi keuangan 99,53%. Target Realisasi kinerja dari kegiatan ini adalah 1 x lomba bercerita atau dengan realisasi 100%.

Permasalahan

- a. Tidak tersedianya anggaran di masing-masing sekolah untuk mengadakan kegiatan tersebut.
- b. Kurangnya dukungan dari instansi terkait untuk penekanan terhadap sekolah untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
- c. Ketersediaan Anggaran yang kurang memadai sehingga kegiatan di tingkat Kabupaten masing-masing UPTD/Kecamatan hanya mengutus 1 (satu) orang peserta.
- d. Tidak adanya anggaran untuk pembinaan dalam kegiatan Lomba Bercerita.

Solusi

- a. Memerintahkan agar masing-masing sekolah menyelenggarakan kegiatan membaca/ bercerita pada kegiatan-kegiatan tertentu di sekolah
- b. Kegiatan Lomba Bercerita di masukan dalam Agenda O2SN tingkat UPTD/Kecamatan.
- c. Memberikan buku-buku cerita kepada sekolah sebagai bahan bacaan peserta didik.

2) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan nagari

Program Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada Perpustakaan umum, khusus, sekolah dan nagari adalah merupakan dasar untuk mewujudkan pencapaian pemahaman terhadap pentingnya fungsi perpustakaan di dalam penerapan ilmu melalui membaca buku yang ada di perpustakaan.

Kegiatan Supervisi dan pembinaan ini merupakan kegiatan yang mendasar untuk menuju terwujudnya motivasi minat baca yang tinggi, baik di sekolah maupun di tengah tengah masyarakat. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 26.840.000,- (Dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.



26.107.500,- (sembilan belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) atau dengan serapan dana 97,27%. dengan sisa anggaran sebesar Rp. 732.500,- (Tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Capaian realisasi kegiatan ini 160% dari sasaran kinerja 40 orang dari 25 orang yang ditargetkan.

Permasalahan

- a. Kurangnya dukungan dari instansi terkait untuk pelayanan baik sekolah maupun nagari.
- b. Ketersediaan Anggaran yang sangat terbatas.
- c. Tidak adanya anggaran dalam kegiatan pelatihan pelatihan atau workshop

Solusi

- a. Mempererat hubungan dengan instansi terkait, baik Dinas Pendidikan maupun perangkat wali nagari.
- b. Sebagai Penanggung jawab, kita harus jeli dalam penggunaan anggaran.
- c. Hendaknya dalam kegiatan ini harus sering diadakan pelatihan pelatihan atau workshop.

3) Penyediaan Bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Dalam rangka mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memenuhi Hak Masyarakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Peranan penting Perpustakaan melalui upaya mewujudkan ekosistem masyarakat yang berpengetahuan, perpustakaan mengusung rencana strategis penguatan literasi masyarakat. Peranan perpustakaan dalam penguatan literasi masyarakat dilaksanakan melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Maksud dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan buku untuk keperluan layanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan perencanaan baik dari segi Volume, kualitas, biaya dan ketepatan waktu.



Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah dan mutu koleksi bahan bacaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya.

Target dan sasaran yang ingin dicapai dari pekerjaan ini adalah Buku Bahasa dan Sastra, Buku Pertanian dan Buku Peternakan. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 99.331.600,- (Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 97.655.350,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.676.250,- (Satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau Realisasi keuangan 98,31%. Target kinerja dari kegiatan ini adalah Bertambahnya bahan bacaan perpustakaan umum daerah sebanyak 752 eksemplar dari 600 eksemplar yang di targetkan atau dengan realisasi 125%.

Permasalahan

Terbatasnya ketersediaan buku-buku yang dibutuhkan untuk tingkat sekolah dasar.

Solusi

Perlunya dukungan dari pihak terkait/swasta melalui CSR untuk bantuan pengadaan buku-buku di sekolah.

4) Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Program Kegiatan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam upaya menumbuhkan minat dan budaya baca, terutama di kalangan siswa SLTP/Sederajat dan Masyarakat di Nagari. Adapun bentuk kegiatan tersebut mendorong bagaimana peserta didik dan Masyarakat di Nagari tersebut untuk gemar membaca atau membiasakan untuk membaca sehingga membaca akan menjadi budaya bagi siswa dan masyarakat. Kegiatan tersebut di layani dalam bentuk pelaksanaan perpustakaan



keliling untuk melayani kebutuhan siswa di sekolah dan Masyarakat di Nagari-Nagari dalam bentuk Buku bacaan .

Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah siswa SLTP/ Sederajat, SLTA / Sederajat dan Masyarakat di Nagari-Nagari yang ada di kabupaten Dharmasraya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui kegiatan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar yang lazim disebut dengan Perpustakaan Keliling untuk Sekolah SLTP/Sederajat serta masyarakat di Nagari Kegiatan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Perpustakaan Keliling merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan di Kabupaten Dharmasraya dalam rangka Penumbuhan Minat dan Budaya Baca. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 115.325.250,- (Dua puluh lima juta tiga ribu lima puluh rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 113.753.250,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.572.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau dengan serapan dana 98,64%. Capaian kinerja kegiatan ini 92,63% atau 7.642 orang dari 8.250 orang yang ditargetkan.

Permasalahan

- a. Kurangnya tenaga pengelola perpustakaan di masing-masing Sekolah dan Nagari.
- b. Kurangnya dukungan dari instansi terkait baik disekolah maupun di Nagari untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
- c. Kurangnya minat baca di tingkat Sekolah dan Masyarakat.
- d. Tidak adanya anggaran untuk pembinaan tenaga Pengelola Perpustakaan di Sekolah dan Nagari.

Solusi

- a. Agar dilaksanakan kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Nagari untuk mendukung kegiatan ini baik secara moril maupun materil



- b. Menyediakan buku-buku cerita kepada sekolah dan Nagari sebagai bahan bacaan.
- c. Agar disediakan Anggaran untuk Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan baik disekolah maupun di Nagari.
- d. Mengaktifkan kegiatan literasi / membaca sebelum belajar untuk mengembangkan minat dan budaya baca di sekolah-sekolah.

17. Kearsipan

Urusan kearsipan yang juga dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdapat berbagai program dan kegiatan yaitu:

a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1) Kajian Sistem Administrasi Kearsipan.

Maksud dari kegiatan ini adalah membina SDM penyelenggara kearsipan perangkat daerah agar pengelolaan kearsipan dapat terlaksana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 49.126.000,- (Empat puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah),- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.49.073.750,- (rupiah),- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 52.250 (Lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah),- atau dengan serapan dana 99,89%. Capaian realisasi kinerja kegiatan ini 77 orang atau 148,07 % dari 52 orang yang ditargetkan.

Permasalahan

Permasalahan pokok yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya salah satunya adalah keterbatasan wawasan dan pengetahuan sumber daya manusia pengelola arsip. Peningkatan kemampuan SDM kearsipan akan sangatlah berpengaruh dalam proses penyelenggaraan kearsipan pada masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya,

Solusi



Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia kearsipan yang profesional pada setiap perangkat daerah di Kabupaten Dharmasraya, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Kearsipan Bagi Petugas Pengelola Arsip Perangkat Daerah untuk meningkatkan kompetensi pengelola arsip

2) Bimbingan Teknis Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif.

Adapun maksud kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif ini adalah melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, terutama pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN dan/atau BUMD wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip*". Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini yaitu sebesar Rp.78.809.000,- (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah),- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.764.000,- (Tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah),- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 45.000 (Empat Puluh lima ribu rupiah),-atau dengan serapan dana 99,94%. Capaian realisasi kinerja kegiatan ini 100% atau 40 orang (12 Urusan) dari 40 orang (12 Urusan) yang ditargetkan.

Permasalahan

- a. Aparatur kurang mengetahui jenis arsip/dokumen apa saja yang tercipta di instansinya beserta nilai guna arsip tersebut kedepannya, sehingga penyusunan JRA menjadi kurang optimal.
- b. Kelompok sasaran yang dimaksud kurang terlibat dengan baik (pejabat yang membidangi urusan pemerintah daerah yang akan disusun JRA-nya tidak terlibat langsung,) sehingga penyusunan JRA lebih dominan dilakukan oleh staf padahal kegiatan ini sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam menentukan masa hidup arsip ataupun pemusnahan arsip.

Solusi



- a. Aparatur perlu memahami dengan baik arsip yang tercipta dari kegiatan/aktivitas yang berlangsung di instansinya masing-masing, bukan hanya sekedar merealisasikan program/kegiatan dan anggaran saja tetapi juga perlu memperhatikan arsip/dokumen dari realisasi program/kegiatan tersebut;
- b. Dibutuhkan apresiasi dari setiap aparatur pemerintah, baik pejabat maupun staf yang berkerja pada setiap urusan-urusan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan pedoman penyusutan arsip, karena isi dari daftar retensi arsip menjadi tanggung jawab masing-masing OPD dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan hanya menjadi leading sector dan perantara dalam pengesahannya ke ANRI.

b. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP DAERAH,

1) Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Keberadaan arsip bertujuan membantu melestarikan informasi berharga yang dimiliki organisasi, didalamnya terkandung informasi yang diciptakan sebagai hasil aktifitas organisasi, arsip juga dapat menjadi dokumen otentik sebuah sejarah yang dapat menjadi alat bukti yang akurat. Guna menyelamatkan keberadaan arsip dapat dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah. Penanganan arsip secara komprehensif dan terpadu akan mendukung kinerja organisasi secara optimal. Harapan dari terlaksananya kegiatan ini adalah mengurangi tumpukan arsip akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas administrasi pemerintahan dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dikarenakan arsip tidak menumpuk disembarang tempat. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 85.283.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 85.195.500,- (Delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah),- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 87.500 (Delapan puluh tujuh ribu lima ratus),- atau dengan serapan dana 99,90%.

Permasalahan



- a. Kondisi arsip khususnya di instansi pemerintah pada umumnya kurang mendapat perhatian semestinya dari berbagai tingkat manajemen pemerintahan. Hal ini mengakibatkan arsip-arsip tersebut tidak tertata, rusak, kurang lengkap dan bahkan sukar dilakukan penemuan kembali bila sewaktu-waktu diperlukan;
- b. Batasan frekuensi penggunaan arsip yang sudah menurun tidak ada keterangan lebih lanjut dan lebih jelas sehingga sering terjadi arsip yang sebenarnya jarang dipakai, namun tetap saja disimpan di ruangan kerja, sementara ruangan tersebut telah dipenuhi dengan tumpukan arsip.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pendataan dan penataan sehingga terjadinya penumpukan arsip.

Solusi

- a. Untuk mendukung optimalisasi pengelolaan kearsipan tersebut diperlukan perubahan mindset dan culture-set birokrasi, masyarakat, dan pengguna arsip bahwa peran arsip memiliki porsi penting, karena mampu merespons tuntutan dinamika gerak maju masyarakat dan bangsa ke depan;
- b. Perlunya pengadaan sarana dan prasarana untuk pendataan dan penataan dokumen arsip.

2. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

18. Perikanan

Urusan perikanan, merupakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Perikanan dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

1) Pembangunan Kolam Budidaya

Dalam rangka untuk meningkatkan produksi perikanan maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui Ekstensivikasi yaitu penambahan Luas/area wadah budidaya. Untuk itu, Dinas Pangan dan Perikanan melakukan kegiatan pembangunan kolam budidaya dengan inti kegiatan yaitu cetak kolam air tenang dengan menggunakan alat berat (Excavator). Kegiatan cetak kolam ini dilaksanakan secara swakelola dikarenakan Dinas Pangan dan



Perikanan mengelola 3 (tiga) Unit Excavator yang merupakan milik Pemda 2 (dua) Unit dan Pinjam Pakai dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat dalam cetak kolam maupun pembangunan sarana lainnya yang terkait dengan pengembangan perikanan. Oleh sebab itu, operasional dari 3 Unit excavator ini juga di anggarkan dalam Kegiatan Pembangunan Kolam Budidaya ini. Pada Tahun 2019, Cetak Kolam di lakukan pada tiga kelompok/Lokasi yaitu kelompok Tani Subur di Jorong Taratak Tinggi Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar seluas 0,61 Ha, di Kelompok Karya Tani Jorong Nabuhan Nagari Koto Ranah kecamatan Koto Besar seluas 0,57 Ha, dan di Kelompok Bunga Rayo Jorong Bunga Tanjung Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung seluas 0,10 Ha. Kegiatan Pembangunan Kolam Budidaya Tahun 2019 di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 399.949.998- dengan Realisasi Fisiknya 100%, sedangkan keuangannya 99,58% dengan dana yang terealisasi Rp.398.278.950,-.

Permasalahan

- f. Terbatasnya biaya pembangunan kolam budidaya yang tersedia sehingga banyak permohonan masyarakat yang tidak terfasilitasi sebagaimana harapan;
- g. Terbatasnya anggaran pemeliharaan dan perawatan exvator.

Solusi

- a. Perlu alokasi anggaran yang memadai karena kegiatan ini cukup diminati oleh masyarakat;
- b. Perlu anggaran yang cukup untuk kebutuhan pemeliharaan dan perawatan Excavator Perlu alokasi anggaran yang memadai karena kegiatan ini cukup diminati oleh masyarakat. Perlu anggaran yang cukup untuk kebutuhan pemeliharaan dan perawatan Excavator.

2) Bantuan Benih dan Pakan



Bantuan benih ikan dan pakan merupakan kegiatan yang mendukung dalam peningkatan produksi perikanan dengan memberikan sarana dan prasarana produksi budidaya ikan. Bantuan benih ikan ini memuat pekerjaan bantuan benih kepada kelompok pembudidaya ikan. Tahun 2019, bantuan yang diberikan dalam kegiatan bantuan benih dan pakan ini berupa bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan dalam benih dan pakan yang diterima oleh Kelompok Saiyo Basamo dan bantuan pembangunan kolam pendederan benih ikan lele sebanyak 1 unit pada kelompok Harapan Maju. Pada kegiatan ini realisasi Fisiknya 100% sedangkan keuangannya 98,02% dengan dana yang terealisasi Rp 48.193.600,- dari pagu dana Rp.49. 162.500,-.

Pemasalahan

- a. Banyaknya jumlah permintaan kelompok Pembudidaya ikan yang tidak sesuai dengan kapasitas kolamnya;
- b. Banyaknya kolam kolam budidaya ikan yang sudah tidak aktif lagi, hanya mengandalkan bantuan dari Dinas saja;
- c. Belum berkelanjutannya usaha budidaya ikan yang dilakukan oleh kelompok pembudidaya ikan, sehingga hasil keuntungan belum optimal;
- d. Jauhnya akses kolam dari pemukiman, sehingga belum optimal dalam pemantauan dan pemberian pakan ikan;
- e. Masih Tingginya harga pakan ikan, sehingga pembudidaya ikan banyak mengeluhkannya, dan belum bisanya memberikan pakan ikan pelet secara total,masih memberikanan pakan tambahan yang tidak sesuai dengan CBIB.

Solusi

- a. Melakukan CPCL sebeum memberikan bantuan bibit ikan, sesuai dengan kapasitas kolam pembudidaya dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dinas yang memadai.
- b. Memberikan pembinaan kepada kelompok pembudiaya ikan agar melakukan usaha budiaya secara kontinui, sehingga usaha budiaya ikan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mandiri.



-
- c. Memberikan penyuluhan, motifasi serta dorongan kepada pembudidaya ikan, agar dapat melaksanakan budidaya ikan dengan cara budidaya ikan yang baik dan benar (CBIB).

3) Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Budidaya Perikanan

Penguatan sarana dan prasarana pendukung usaha budidaya perikanan bertujuan membantu pembudidaya lebih mengembangkan usaha perikanan. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan ini memuat pekerjaan yaitu:

- Paket percontohan Nila Pokdakan Timpeh Jaya yang beralamat di Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh dengan dana sebesar Rp 43.040.000,- yang dilaksanakan oleh CV. FAZILA sesuai dengan Kontrak No. 521.3/13-PL/PA/DPP/DAK-2019;
- Paket Percontohan Nila Pokdakan Bunga Tanjung beralamat di Jorong Bunga Tanjung Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung dengan Dana sebesar Rp 42.999.000,- oleh Pihak ketiga (penyedia) CV. CREATIVE dengan Nomor Kontrak 521.3/03/PL/PA/DPP/DAK-2019;
- Paket percontohan nila Pokdakan Simpang Tugu di Jorong Simpang Tugu Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung dengan Dana sebesar Rp 42.999.000,- yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (penyedia) CV. FIGO YOU CITY dengan Kontrak No. 521.3/04-PL/PA/DPP/DAK-2019;
- Paket percontohan nila Pokdakan Bina Karya, yang beralamat di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar dengan dana sebesar Rp 43.918.000,- yang dikerjakan oleh Pihak ketiga (Penyedia) CV. KURNIA JASA PARATAMA Kontrak No. 521.3/14-PL/PA/DPP/DAK-2019;
- Paket percontohan nila Pokdakan Maju Bersama, yang berlokasi di Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru dengan anggaran sebesar Rp 43.027.000,- yang dilaksanakan oleh (Penyedia) CV. ALVIAN dengan Kontrak No. 521.3/12-PL/PA/DPP/DAK-2019.



- Paket percontohan nila Pokdakan Ponpes Darussalam yang beralamat di Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung dengan anggaran sebesar Rp 42.999.000,- yang dikerjakan oleh Pihak ketiga (Penyedia) CV. MULLA KARYA Kontrak Nomor 521.3/15-PL/PA/DAK/DPP/IV-2019;
- Paket percontohan budidaya patin di Kolam yang dilaksanakan pada kelompok Pembudidaya Ikan Patin Bina Harapan beralamat di Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar dengan anggaran sebesar Rp 51.645.000,- yang dikerjakan oleh Pihak ketiga (Penyedia) CV. RY. SAKATO Kontrak Nomor 521.3/23-PL/PA/DAK/DPP/VII-2019;
- Paket percontohan budidaya ikan lele di Kolam pada kelompok Karya Bersama yang beralamat di Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar dengan anggaran sebesar Rp 44.904.500,- oleh Penyedia CV. SAFA KARYA dengan Kontrak No. 521.3/26-PL/PA/DAK/DPP/VII-2019;
- Pembangunan Jalan Produksi sepanjang 500 Meter di Kelompok Pembudidaya Ikan Agro Rawa Talang Kecamatan Koto Salak dengan Anggaran sebesar Rp 64.620.000,- berdasarkan Kontrak No 521.3/27-PL/PA/DAK/DPP/VII-2019.

Pada kegiatan ini realisasi Fisiknya 100% sedangkan keuangannya 99,62 % dengan dana yang terealisasi Rp.444.055.150,- dari pagu dana Rp.445.726.400,-.

Permasalahan

Masih kurangnya kemampuan pengelola demplot percontohan dalam penguasaan teknik budidaya sehingga pengelolaan demplot tidak maksimal.

Solusi

Peningkatan kemampuan teknis budidaya pengelola melalui bimtek dan pelatihan yang lebih intensive.

4) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (DAK)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas prasarana Balai benih ikan lokal Kabupaten dalam rangka menunjang produksi benih ikan yang berkualitas. Kegiatan yang dilakukan berupa rehabilitasi



wadah proses produksi benih yang terdiri atas 1). Rehabilitasi Kolam/Bak Larva Paket 1, 2) Rehabilitasi Kolam/Bak Larva Paket 2, 3) Penyediaan Calon Induk Unggul dan Pakan Induk Unggul, 4) Rehabilitasi Bangunan Panti Benih/Hatchry, 5) Paket Pemeliharaan Larva, 6) Rehabilitasi Tandon, 7) Perencanaan Raheabilitasi Kolam/Bak Larva, 8) Pengawasan Rehabilitasi Kolam/Bak Larva. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah disusun dan telah mulai di manfatkan oleh pengelola balai benih ikan dalam melakukan proses produksi benih. Pada kegiatan ini realisasi fisiknya 100% sedangkan keuangannya 98,99 % dengan dana yang terealisasi Rp.451.252.000,- dari pagu dana Rp. 455.822.596,-.

5) Kegiatan Pengembangan Mina Usaha pedesaan.

Salah satu potensi pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Dharmasraya adalah Areal persawahan yang di dukung oleh suplay air yang baik yang berasal dari irigasi teknis. Potensi ini sangat baik untuk dikembangkan usaha perikanan yaitu Mina padi yang merupakan suatu kegiatan budidaya ikan yang dipadukan dengan budidaya padi dalam satu tempat dan satu waktu. Budidaya sistem Minapadi yang selama ini di kenal adalah Sistem Penyelang dan Tumpang Sari sehingga dalam satu lokasi/wadah di hasilkan dua komoditi yaitu Padi dan ikan tanpa mengurangi produksi salah satu komoditi.

Dalam Kegiatan Pengembangan Mina Usaha Pedesaan bertujuan mengembangkan Minapadi tersebut dengan membuat percontohan Minapadi pada 4 (empat) Lokasi dengan luasan setiap lokasi adalah 3 (tiga) Ha sehingga dari 4 (empat) kelompok tersebut terbentuk usaha budidaya minapadi seluas 12 (dua belas) ha. Kelompok yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah kelompok Tani yang memiliki luas sawah yang cukup dan memenuhi kriteria secara teknis dimana pada Tahun 2019 dilaksanakan pada Kelompok Sitiung Jaya dan



Tirtoyoso di Kecamatan Koto Baru dan Kelompok Jelita dan Juwita d Kecamatan Sitiung. Pada kegiatan ini realisasi Fisiknya 100% sedangkan keuangannya 98,37 % dengan dana yang terealisasi Rp.359.234.800,- dari pagu dana Rp.365.175.004,-

Permasalahan

- a. Terganggunya keberlanjutan usaha/ kegiatan akibat terjadinya pengeringan irigasi akibat normalisasi/ perbaikan irigasi;
- b. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Budidaya Minapadi sehingga sering mengalami kendala atau masalah di lapangan yang sulit untuk mereka atasi.

Solusi

- a. Perlu di buatkan embung-embung di sekitaran areal persawahan yang melaksanakan Minapadi sebagai alternative sumber air lain bagi sawah
- b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan teknis karena kabupaten Dharmasraya memiliki sawah dengan irigasi teknis sehingga berpotensi untuk pengembangan minapadi.

b. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

1) Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan Gemarikan

Forum Komunikasi Perikanan (Forikan) adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang yang bertujuan untuk mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat. Gemarikan adalah suatu gerakan memasyarakatkan makan ikan sehingga minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan semakin baik untuk mecipatakan generasi yang sehat dan berkualitas. Kegiatan Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan Gemarikan bertujuan untuk mengakomodir rencana kerja dari Forum Peningkatan Konsumsi Ikan dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk mencapai target konsusmsi ikan daerah sesuai dengan yang diharapkan.

Kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan dalam Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan Gemarikan ini antara lain adalah :



- Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional yang dilaksanakan pada Tanggal 13 sampai dengan 14 Desember 2019 di JCC Jakarta untuk kategori Menu Balita;
- Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada Tanggal 15 Juli 2019 di Padang dengan hasil meraih Juara 2 Lomba Masak Serba Ikan kategori Menu Kudapan;
- Pemberian Kudapan/Makanan berbahan Ikan yaitu Sate Ikan sebanyak 1519 Tusuk dan meraih penghargaan dari Museum rekor Indonesia (MURI) dengan Tema “ Sajian Sate Ikan Nila Terbanyak Tahun 2019” yang dilaksanakan di Sport Centre Gunung Medan yang di ikuti oleh 52 Nagari yang mengutus 30 Orang murid PAUD/TK tiap nagari;
- Pemberian Makanan Tambahan berbahan Ikan/Kudapan Ikan kepada Murid PAUD/ Tk sebanyak 6 Paket yang dilaksanakan pada TK Pembina Sungai Duo, TK Pembina Pulau Punjung dan TK Aisyah.

Pada kegiatan ini realisasi fisiknya 100% sedangkan keuangannya 90,42% dengan dana yang terealisasi Rp.226.240.686,- dari pagu dana Rp 250.197.750-.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

1) Pembinaan dan Pokmaswas Perairan Umum

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan perairan umum daratan melalui pembentukan kawasan-kawasan lubuk larangan yang dijaga secara bersama-sama oleh masyarakat yang di bentuk dalam satu kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Pokmaswas tersebut akan dibentuk melalui musyawarah masyarakat dan di kuatkan dengan surat keputusan Wali Nagari setempat. Untuk selanjutnya Pokmaswas ini yang akan terlibat secara aktif melakukan pengawasan dan pengelolaan Kawasan Lubuk Larangan di perairan umum sesuai dengan aturan dan kesepakatan-kesepakatan yang disepakati



bersama-sama. Untuk mendorong eksistensi Lubuk larangan tersebut, Dinas Pangan dan Perikanan memberikan bantuan fasilitas berupa bantuan benih ikan yang akan di tebar dalam kawasan lubuk larangan tersebut (Rsetocking) serta pembinaan terhadap kelompok. Pada Tahun 2019, Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan Benih Ikan Restocking Lubuk Larangan adalah sebagai berikut:

- Pokmaswas/Lubuk Larangan Mansagu Indah Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto;
- Pokmaswas/Lubuk Larangan Nagari Lubuk Karak Kecamatan Sembilan Koto;
- Pokmaswas/Lubuk Larangan Jorong Koto Tuo Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan;
- Pokmaswas/Lubuk Larangan Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan;
- Pokmaswas/Lubuk Larangan Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan.

Pada setiap lokasi atau kelompok tersebut diberikan bantuan berupa Benih Ikan Garing sebanyak masing-masing 1.000 ekor dengan ukuran 5-8 cm. Pada kegiatan ini di dukung dengan pendanaan sebesar Rp. 47.360.8500,- dengan realisasi sebesar Rp.46.647.550,- atau (98,49%)

Permasalahan

- a. Banyaknya jumlah permintaan kelompok masyarakat pengawas/ lubuk larangan terhadap ikan-ikan endemik perairan umum;
- b. Lambatnya masuk surat permohonan bantuan bibit ikan untuk lubuk larangan dari pokmaswas perairan umum, sehingga pemberian bantuan bibit ikan tidak bisa diberikan kepada beberapa pokmaswas / lubuk larangan di karenakan pada musim hujan ada lubuk larangan yang mengalami banjir;
- c. Belum terakomodirnya semua permintaan pokmaswas pada Tahun 2019;
- d. Kurangnya Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan Kawasan Perairan Perairan umum yang lestari.

Solusi



- a. Memberikan bantuan ikan-ikan endemik yang dominan terdapat pada kawasan pokmaswas perairan umum tersebut misalnya benih ikan Garing;
- b. Memprioritaskan pemberian bantuan benih ikan endemik untuk pokmaswas/lubuk larangan yang telah dilakukan pemanenan bersama masyarakat dan telah ditutup kembali lubuk larangannya;
- c. Menginformasikan kepada pokmaswas /lubuk larangan untuk membuat permohonan bantuan benih ikan di awal tahun karena mencegah kegiatan di musim hujan, yang akan terhambat oleh kondisi banjir;
- d. Memberikan dukungan terhadap pokmaswas lubuk larangan yang aktif dan tidak aktif untuk terus menjaga pelestarian lubuk larangannya. Untuk menjaga kawasan konservasi perikanan di Kabupaten Dharmasraya;
- e. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kawasan perikanan perairan umum yang lestari melalui sosialisasi dan pembinaan di lapangan.

d. Program Pengembangan dan Peningkatan Instalasi Pembenihan Ikan

1) Operasional UPTD BBI

Kegiatan memuat belanja dan pembiayaan dalam proses produksi benih ikan di Balai Benih Ikan Lokal Kabupaten Dharmasraya yang terdiri atas pembelian pakan, sarana produksi benih serta pembiayaan-pembiayaan lainnya yang terkait dalam proses produksi benih ikan. Dari pembiayaan yang dialokasikan tersebut bertujuan untuk mendapatkan benih ikan yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan benih dalam menjalankan kegiatan budidaya ikan.

Kegiatan Operasional Balai Benih Ikan ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) balai Benih Ikan Kabupaten Dharmasraya yang berada di Kecamatan Koto Baru. Pada kegiatan ini realisasi Fisiknya 100% sedangkan keuangannya 99,81% dengan



dana yang terealisasi Rp. 135.081.650,- dari pagu dana Rp.135.334.000,-.

Permasalahan

- a. Tidak Tercukupi Pakan Induk, Pakan Benih Dan Peralatan Pembenihan Lainnya (Dana Operasional Tidak Memadai);
- b. Produksi Benih Tidak Mencapai Target Karena:
 - Rehap Kolam Induk Ikan Selama Dua Bulan;
 - Pemeliharaan Induk Dan Benih Tidak maksimal Karena Kebutuhan Pakan Tidak Memadai;
 - Kematian induk ikan dan benih ikan karena factor alam yaitu kekeringan kolam.

Solusi

- a. Pengajuan Dana Operasional Yang Memadai agar dapat Melakukan Kegiatan Pembenihan;
- b. Menyediakan Pakan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan;
- c. Rehap Kolam Supaya Bisa Di Skedul sehingga tidak mengganggu pemijahan/ pembenihan ikan.

19. Pariwisata

Urusan pariwisata merupakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1) Dukungan Event Tour D' Singkarak (TDS) Tahun 2019

TDS dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 5 November 2019 dan dampak dari kegiatan ini terhadap Pemerintah serta masyarakat antara lain adalah: Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mempromosikan dan memasarkan pariwisata provinsi sumatera barat umumnya dan kabupaten Dharmasraya khususnya dengan meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, dan juga TdS ini dampaknya bagi masyarakat untuk menumbuhkan kembangkan ekonomi kreatif, kuliner, UKM, dan dengan jadi tuan rumahnya kita TdS Berarti kita juga telah



mempromosikan budaya, adat istiadat bahkan keramahan local penduduk setempat serta memberikan simpatik keinginan orang berkunjung kembali. Untuk tahun 2019 Dharmasraya sebagai tuan rumah star etape 4 dan menjadi grand start sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati jalannya kegiatan tersebut dan juga sebagai tempat persinggahan tamu-tamu kita yang datang ke Dharmasraya. Serta dengan digelarnya event TdS juga kita telah mempromosikan destinasi-destinasi wisata kita terhadap dunia luar karena peserta TdS itu sendiri adalah Pembalap-pembalap professional baik secara Nasional maupun internasional. Jumlah anggaran yang dialokasi pada kegiatan ini adalah Rp 432.884.150,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 429.603.399,- atau 99,25%.

Permasalahan

- a. Belum maksimalnya persipan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. Masih banyak titik–titik jalan Nasional dan jalan provinsi yang dilalui pembalap tersebut yang belum diperbaiki;
- c. Masih kurangnya fasilitas sarana prasarana untuk atlet dan official;
- d. Belum tersedianya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan TdS tersebut.

Solusi

- a. Meningkatkan koordinasi semua pihak ,baik Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kementrian terkait;
- b. Titik-titik jalan yang dilalui pembalap sudah dalam kondisi baik;
- c. Perlunya tambahan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk kenyamanan atlet dan official.

2) Pemilihan Dan Pemberdayaan Duta Wisata Kabupaten Dharmasraya

Duta wisata ini dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, seleksinya dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 20 Juni, untuk Karantina tanggal 23 sampai dengan 26 Juni 2019 bertempat di



Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunung Selasih dan Grandfinal dilaksanakan tanggal 30 Juni 2019 di Padang. Dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut terhadap pemerintah dan masyarakat antara lain adalah sebagai media informasi dan sosialisasi kepada masyarakat atas keberhasilan pembangunan kepariwisataan di daerah kita Dharmasraya dan juga memberikan ruang kepada para remaja atau pemuda yang memiliki potensi, bakat dan kompetensi untuk bersama-sama membangun dunia kepariwisataan di daerah, juga untuk menghasilkan putra-putri duta wisata yang profesional sebagai mitra pemerintah dalam menawarkan dan mempromosikan objek-objek wisata daerah sebagai destinasi wisatawan. Duta wisata harus kreatif dan inovatif dalam menciptakan pemikiran tentang wisata dan budaya serta memberikan rekomendasi dan mendukung program wisata yang dilaksanakan pemerintah dengan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan wisata, misalnya menggerakkan masyarakat untuk tidak merusak fasilitas wisata seperti Embung, wisata air terjun, Goa dan lain sebagainya. Pemenang atau juara dari beberapa kategori akan dipersiapkan untuk mewakili Dharmasraya ke Tingkat Provinsi Sumatera Barat. dalam pelaksanaan di Tingkat Provinsi Sumatera Barat Uni Dharmasraya mendapat peringkat pertama sedangkan untuk Uda masuk kedalam 10 (sepuluh) besar. Jumlah anggaran yang dialokasi pada kegiatan ini adalah Rp. 174.286.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 172.748.777,- atau 99,12%.

Permasalahan

- a. Masih kurangnya kompetensi pemuda-pemudi kita dalam berfikir kritis dan menganalisa permasalahan serta mampu memberikan solusi yang tepat;
- b. Masih rendahnya kepedulian pemuda-pemudi kita terhadap nilai-nilai budaya Dharmasraya;
- c. Kurang memadainya fasilitas karantina uda uni duta wisata.

Solusi

- a. Memberikan pembekalan terhadap Pemuda-pemudi Dharmasraya sebagai calon uda/uni, dengan mendatangkan



nara sumber baik secara lokal maupun secara provinsi sesuai dengan aturan yang ada;

- b. Memberikan Pembinaan dan motivasi terhadap peserta uda/uni Dharmasraya tentang pelestarian nilai-nilai budaya Dharmasraya;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi Terkait sebagai tempat Karantina uda/uni Dharmasraya agar kedepan dapat melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

3) Fasilitas Event-Event Kepariwisataaan

Salah satu cara mempromosikan Destinasi Wisata yang ada di Kabupaten Dharmasraya adalah melalui event fotografi, dimana Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga melalui bidang pariwisata mengadakan event ini sekaligus dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Dharmasraya yang ke-15. Jumlah anggaran yang dialokasi pada kegiatan ini adalah Rp.16.745.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.545.000,- atau 98,9%.

Permasalahan

- a. Belum maksimalnya persiapan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ,seperti informasi event yang belum tersebar luas;
- b. Masih kurangnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan event fotografi.

Solusi

- a. Perlunya koordinasi semua pihak baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi;
- b. Tersedianya sarana pra sarana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
- c. Terealisasinya penambahan dana pada anggaran perubahan 2019 yang belum tekoormudir pada anggaran awal 2019 dalam rangka mensukseskan kegiatan tersebut.

4) Promosi Pariwisata Dalam Daerah dan luar Negeri

APKASI ini dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta tanggal 2 sampai dengan 5 Juli 2019 yaitu ekonomi expo dengan mengikuti pameran sebagai ajang promosi kuliner dan



UKM seperti batik tanah liat dan pembangunan daerah serta dengan menampilkan bermacam-macam kesenian daerah kita, budaya daerah sebagai kearifan lokal melalui penampilan-penampilan pakaian adat daerah. Kegiatan ini dilaksanakan juga bertujuan untuk mempromosikan dan memasarkan pariwisata Provinsi Sumatera Barat umumnya dan Kabupaten Dharmasraya khususnya demi meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Jumlah anggaran yang dialokasi pada kegiatan ini adalah Rp. 93.128.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 91.474.339,- atau 98,3%.

Permasalahan

- a. Belum disahkannya RIPPKD Pariwisata Dharmasraya;
- b. Masih belum tersedianya SDM yang Profesional untuk mempromosikan objek wisata di Dharmasraya;
- c. Belum maksimalnya persiapan masyarakat dalam mempromosikan kuliner Dharmasraya.

Solusi

- a. Pemerintah daerah segera mensahkan RIPPKD Pariwisata;
- b. Menfasilitasi pegawai kita dalam rangka penambahan kompetensi untuk mengikuti pelatihan baik ditingkat provinsi maupun nasional tentang promosi;
- c. Menfasilitasi pengusaha Kuliner dan UKM untuk mengikuti BIMTEK baik ditingkat Provinsi maupun nasional.

b. Program Pengembangan Destinasi Dan Daya Tarik Pariwisata

1) Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata (DAK)

Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun 2019, yang bertujuan untuk pengembangan sarana prasarana pariwisata sebagai destinasi dan daya tarik wisata di kabupaten Dharmasraya. Dengan adanya pembangunan tempat ibadah, pergola, broadwalk dan gapura identitas yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Jumlah anggaran yang dialokasi pada kegiatan ini adalah Rp. 1.679.262.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.497.314.170,85,- atau 89,3%.



Permasalahan

- a. Terlambatnya proses lelang, karena lamanya proses verifikasi perencanaan;
- b. Terbatasnya lahan pembangunan;
- c. Terbatasnya anggaran yang diberikan.

Solusi

- a. Perlunya personil (pegawai) tenaga teknis di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya;
- b. Perlunya ketersediaan lahan untuk Pembangunan Sarana dan prasarana Pariwisata;
- c. Perlunya tambahan anggaran untuk pembangunan.

2) Pembangunan Dan Pengembangan Destinasi Wisata 2019

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun 2019 sebesar Rp. 1.679.262.000,- untuk bidang pariwisata yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Untuk penunjang pelaksanaan Dana Alokasi Khusus tersebut diperlukan anggaran dari APBD untuk Desk DAK dan pembuatan master plan kawasan destinasi wisata. Dengan adanya master plan ini, maka pengembangan pembangunan pariwisata akan mengacu pada master plan tersebut. Jumlah anggaran yang dialokasi pada kegiatan ini adalah Rp. 274.475.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 264.559.998,- atau 97%.

Permasalahan

- a. Masih belum bisanya masyarakat menerima manfaat dari pembangunan kepariwisata terhadap perkembangan perekonomian sehingga terhambatnya proses pemanfaatan lahan pada daerah potensi wisata yang berada di Kabupaten Dharmasraya;
- b. Masih kurangnya anggaran untuk Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Wisata 2019.

Solusi



- a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat di daerah potensi wisata dimana dengan pembangunan kepariwisataan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. Perlunya tambahan anggaran untuk Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Wisata 2019.

c. Program Pengembangan Kemitraan Dan Ekonomi Kreatif

1) Peningkatan dan Pengembangan Gerakan Kelompok Sadar Wisata

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mempromosikan dan memasarkan pariwisata provinsi sumatera barat umumnya dan kabupaten Dharmasraya khususnya demi meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Jumlah anggaran yang dialokasi pada kegiatan ini adalah Rp 10.260.250,-. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.132.000,- atau 90%.
Permasalahan

- a. Masih belum adanya akomodasi yang memenuhi standar;
- b. Masih belum adanya destinasi yang bisa dijadikan andalan kepariwisataan;
- c. Masih kurangnya anggaran untuk pelaksanaan acara.

Solusi

- a. Meningkatkan minat investor untuk berinvestasi dibidang akomodasi di kabupaten dharmasraya;
- b. Diharapkan perhatian lebih dalam pembangunan destinasi pariwisata melalui kucuran anggaran baik dari APBD dan APBN;
- c. Perlunya tambahan anggaran untuk lebih meriahnya acara tour de singkarak di Kabupateh Dharmasraya.

20. Pertanian

Urusan pertanian, merupakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1) Kegiatan Penyuluhan Dan Pendampingan Dan Pelaku Agribisnis (Pengendalian Opt)



Kegiatan Penyuluhan Dan Pendampingan Dan Pelaku Agribisnis (Pengendalian Opt) dianggarkan anggaran sebesar Rp. 2.524.900,-

21. Kehutanan

Urusan kehutanan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

22. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

23. Perdagangan

Urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perdagangan

1) Operasional Retribusi Pasar Dan Kerja Sama Kemitraan Dengan Pengurus Padang

Retribusi merupakan simpul utama dalam pergerakan pendapatan PAD pada suatu daerah. Kesejahteraan suatu daerah dapat dilihat secara nyata dengan nilai Retribusi dipasar, semakin tinggi nilai Retribusi dipasar pada suatu daerah berarti Retribusi yang baik hal ini sudah pasti mendapatkan Retribusi lebih baik. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan pemerintah Nagari mengadakan kerja sama antara Pemda dengan Wali Nagari (MOU) untuk membayar Retribusi Pasar melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang mana jumlah pasar yang ada MOU nya adalah sebanyak 27 Pasar. Penerimaan retribusi dari 27 pasar pada tahun 2019 yang telah diterima dan disetorkan pertanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 80.049.000,-. Jumlah Anggaran Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 16.940.000,- dan realisasi sebesar Rp. 16.864.250,-.

2) Pemantauan dan pengendalian sembako dan barang strategis lainnya

Dalam kegiatan ini sangat perlu tinjauan pengawasan karena pengawasan merupakan simpul utama dalam pergerakan bahan



berbahaya dari zat kimia, formalin dan harga barang yang tidak stabil pada daerah, regional, nasional bahkan internasional. Untuk pengawasan suatu daerah dapat di pasar atau minimarket dan sekolah. Jumlah Anggaran Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini sebesar Rp. 50.714.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.172.650,-.

Permasalahan

Masalah yang terdapat dalam kegiatan ini terdapat dalam pemantauan dan pengendalian sembako masih banyak barang beredar yang mengandung bahan kimia yang berbahaya seperti formalin dan masih kurangnya kesadaran pandangan dalam hal pengawasan barang beredar yang telah di laksanakan oleh dinas terkait.

Solusi

Setelah dilaksanakan kegiatan ini berharap bisa berlanjut kedepannya, harga sembako dipasar telah distabilkan untuk meningkatnya perekonomian masyarakat dan telah dilaksanakan pemantauan barang yang berbahaya dari zat kimia dan formalin di pasar, mini market dan sekolah dapat diatasi.

b. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

1) Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah

Metrologi legal berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal metrology yang di pergunakan untuk transaksi khususnya perdagangan. Kegiatan ini juga untuk melindungi kepentingan umum dengan adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hokum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan sebuah amanah yang diemban dan dilaksanakan oleh pemerintah beserta aparaturnya, dibawah koordinasi menteri yang membindangi metrology legal yaitu menteri perdagangan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pelaksanaan tera/tera ulang UTTP berupa pemeriksaan penunjukan alat-alat ukur seperti : pompa ukur SPBU, timbangan pegas, timbangan elektronik, timbangan emas, timbangan jembatan elektronik dan timbangan lain sebagainya. Kemudian



pembubuhan cap tanda tera terhadap UTTP yang sudah dilakukan pengujian kebenarannya sebagai legalitas terhadap UTTP tersebut boleh dipergunakan untuk transaksi perdagangan dan lainnya. Jumlah anggaran pada pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 133.444.000,00,-. dengan realisasi anggaran sebesar Rp.132.745.942,00,-.

Permasalahan

- a. Keluhan dari masyarakat UTTP tentang mahalnya biaya tera/tera ulang UTTP, sebagai dampak dari biaya yang harus ditanggung pemilik UTTP untuk mendatangkan personil dari pihak ketiga;
- b. Masih banyak UTTP metrologi wajib tera/tera ulang yang belum bisa dilaksanakan teranya. Sehingga masih banyak UTTP yang tidak bertanda tera yang dipakai untuk transaksi perdagangan serta penyerahan lainnya di Kabupaten Dharmasraya;
- c. Masih rendahnya pengetahuan, wawasan dan pemahaman masyarakat/konsumen terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal;
- d. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat/pemilik/pemakai alat UTTP terhadap kewajiban menera ulang alat UTTP-nya, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kepentingan konsumen.

Solusi

- a. Koordinasi dengan dinas/instansi terkait baik di tingkat propinsi maupun di tingkat pusat agar lebih intensif;
- b. Membuat data base potensi alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Kabupaten Dharmasraya agar dapat memudahkan pengawasan kemetrologian;
- c. Menyebarkan informasi pentingnya kemetrologian bagi masyarakat dan dunia usaha baik melalui media cetak, elektronik (radio) maupun dalam bentuk penyuluhan secara langsung dengan melibatkan tokoh masyarakat dan alim ulama;
- d. Meningkatkan fungsi pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP yang beredar di masyarakat baik secara preventif maupun refresif;



- e. Mensegerakan operasionalisasi Unit Metrologi Legal (UML) di Kabupaten Dharmasraya, jika SKKPTTU telah keluar dari Direktorat Metrologi Bandung, agar pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pengawasan kemetrologian bisa lebih terlaksana dengan maksimal;
- f. Jumlah potensi UTTP yang lumayan besar di Kabupaten Dharmasraya, agar pengawasannya dapat terlaksana untuk semua UTTP dapat dengan menambah jumlah SDM Pengamat Tera/Pengawas Kemetrologian;
- g. Bagi SDM Pengamat Tera dapat mengikuti diklat – diklat teknis lanjutan untuk peningkatan kompetensi karena alat – alat UTTP akan mengalami perubahan dengan mengikuti perubahan zaman;
- h. SDM pengamat tera agar dapat mengikuti diklat lanjutan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mejadi fungsional Pengawas Metrologi, hal ini bertujuan agar dapat melakukan tindak lanjut terhadap adanya pelanggaran hukum terhadap Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

c. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pasar

1) Peningkatan Prasarana Pasar Rakyat (DAK Penugasan 2019)

Kementerian Perdagangan Republik Inonesia melalui Dana Alokasi Khusus (DAK Penugasan 2019) telah menganggarkan Dana untuk Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Dharmasraya. Untuk mendukung Dana Alokasi Khusus tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, selaku instansi yang menangani masalah tersebut, memberikan dukungan sepenuhnya untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini. Hasil dari pelaksanaan Kegiatan adalah Terbangunnya Pasar Rakyat Di Pasar Koto Agung Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung, Pasar Mayang Taurai Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar, Los Pasar Koto Salak Nagari Koto Salak, Los Pasar Beringin Sakti Nagari Beringin Sakti Kabupaten Dharmasraya. Jumlah Anggaran



Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.650.974.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.195.171.781,-.

Permasalahan

Dalam kegiatan ini terdapat beberapa kesulitan dan permasalahan yang dihadapi seperti, proses penentuan lokasi pasar yang akan dibangun berlangsung agak lambat, pembuatan dokumen Lelang terlambat karena menunggu pengumuman hasil lelang dari LPSE Kabupaten Dharmasraya, pelaksanaan pembangunan harus mengacu kepada Petunjuk Teknis pembangunan pasar yang telah ditentukan oleh Kementerian Perdagangan, keterbatasan waktu pelaksanaan fisik pekerjaan sehingga kontraktor pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan sedikit kerepotan merealisasikannya sesuai dengan schedule yang telah direncanakan, keterbatasan Bahan yang diperlukan di pasaran sehingga pesanan pelaksana pekerjaan harus menunggu.

Solusi

Hasil Pembangunan sarana dan prasarana pasar terutama pasar rakyat Kementerian Perdagangan dalam rangka mewujudkan pasar rakyat yang bernuansa bersih, sehat, tertata rapi, nyaman dan terkelola dengan manajemen yang baik dapat diwujudkan di Kabupaten Dharmasraya.

24. Perindustrian

Urusan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

1) Pelatihan Teknologi Informasi Bagi Industry Kecil dan Menengah

Pada Kegiatan ini di Kabupaten Dharmasraya diketahui bahwa sebagian besar IKM masih menggunakan teknologi tradisional yang disebabkan keterbatasan kemampuan modal kerja, teknologi modern dan keterbatasan SDM yang memanfaatkan teknologi, sehingga mengakibatkan lemahnya daya saing produk yang ditandai dengan proses produksi tidak standar dan kualitas produk rendah. Jumlah



Anggaran Tahun 2019 untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.30.366.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.197.800,-.

Permasalahan

Masih kurangnya pengetahuan IKM Tentang penggunaan Aplikasi Google Business dan masih sulitnya jaringan telekomunikasi di daerah tertentu .

Solusi

Untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan daya saing IKM dalam hal pemasaran Produk IKM lewat Aplikasi Google Business dan Sosial Media (online), maka kegiatan ini sangat penting dilaksanakan secara berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya.

2) Pembinaan industri kecil menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Pengembangan Industri Kerajinan merupakan salah satu langkah yang cukup penting dalam mempercepat pembangunan daerah. Karena industri kerajinan mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dari peranannya yang penting dalam penyediaan kesempatan usaha, lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan ekspor yang akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah Anggaran Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 45.269.000,- dan realisasi sebesar Rp. 45.155.650,- dengan Capaian Kinerja sebesar 99,7%.

Permasalahan

- a. Belum adanya program kegiatan yang terarah dari Dekranas; Pusat sehingga menyulitkan untuk menganggarkan kegiatan yang belum diikuti.
- b. Belum adanya keinginan pengrajin untuk mengikuti pameran/bazar secara mandiri, karena pada umumnya pengrajin dengan biaya sendiri tidak mau mengikuti event tersebut, sementara anggaran Dekranasda sangat minim sekali.

Solusi



Untuk menunjang program kegiatan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, maka kegiatan ini sangat penting dilaksanakan setiap tahunnya.

3) Pengendalian dan pengawasan industri kecil dan menengah

Pengawasan dan pengendalian industri merupakan suatu hal yang perlu di lakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengontrol segala sesuatu yang dapat merugikan perusahaan, saat ini pengendalian kualitas tidak hanya di lakukan oleh perusahaan kecil untuk mencapai produk yang standar dengan kualitas yang maksimal dan waktu yang minimal. Setiap perusahaan perlu untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terus menerus terhadap proses produksinya sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang maksimal dan mempunyai daya tarik terhadap konsumen sehingga dapat bertahan di dunia perindustrian. Kualitas suatu produk merupakan salah satu faktor yang utama bagi para konsumen dalam memilih serta menentukan produk yang akan di beli. Adapun hasil kegiatan kepala seksi pengendalian dan Pengawasan Industri dari bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2019 adalah mengeluarkan Rekomendasi IKM sebanyak 23 (dua puluh tiga) Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI) terdiri dari : 19 (Sembilan belas) produk pangan, 1 (satu) AMDK, 1 (satu) bengkel las, 1 (satu) kerajinan rendo, dan 1 (satu) percetakan digital. Jumlah Anggaran Tahun 2019 Untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 27.020.000,- dan realisasi sebesar Rp. 26.754.250,-.

Permasalahan

- a. Masih ada IKM yang belum mengerti cara mengurus Izin usaha industri (IUI);
- b. Masih kurang nya keinginan IKM dalam mengurus Izin Usaha Industri (IUI);
- c. IKM beranggapan tidak pentingnya Izin Usaha Industri (IUI) bagi usahanya;



-
- d. Belum pahamnya pelaku usaha dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penggunaan aplikasi sistem OSS ini.

Solusi

Untuk menunjang program kegiatan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, maka kegiatan ini sangat penting dilaksanakan setiap tahunnya.

4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam (Pendamping DAK)

Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM logam Kabupaten Dharmasraya Anggaran bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perindustrian RI dengan jumlah total dana Rp. Dalam menyongsong Revolusi Industri 4.0 memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan ekonomi digital dinilai menguntungkan Indonesia. Pengembangan ekonomi digital adalah pasar dan bakat dan Indonesia memiliki keduanya. Dalam menjalankan Making Indonesia 4.0 terdapat lima industri yang menjadi fokus implementasi industri 4.0 di Indonesia yaitu, Makanan dan minuman, Tekstil, Otomotif, Elektronik dan Kimia. Lima industri ini merupakan tulang punggung dan harapan membawa pengaruh yang besar dalam hal daya saing dan kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia menuju 10 besar ekonomi dunia di tahun 2030. Kelima sektor inilah yang akan menjadi contoh bagi penerapan industri 4.0 , penciptaan lapangan kerja baru dan investasi baru berbasis teknologi. Dana yang dianggarkan sebanyak Rp. 29.294. 115.000,- dengan Realisasi Rp. 27.491.749.576,-..

Permasalahan

- a. Pemotongan anggaran DAK yang mempengaruhi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam;
- b. Kurang disiplinnya kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan sehingga kemajuan realisasi fisik tidak sesuai dengan schedule yang telah direncanakan.



Solusi

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam Kabupaten Dharmasraya diharapkan dapat menumbuhkembangkan IKM logam yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Untuk optimalnya operasional sentra IKM Logam ini, kedepannya diharapkan juga agar sarana dan prasarana ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam memproduksi produk dari logam yang cukup potensial di Kabupaten Dharmasraya baik melalui Dana APBN, DAK, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

25. Transmigrasi

Urusan transmigrasi, merupakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

- 1)** Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan Lingkungan Transmigrasi
Rp. 15.864.000,- Realisasi Anggaran sampai 31 Desember 2019
Rp.5.509.200,-
- 2)** Penyediaan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Rp.121.472.000,- Realisasi Anggaran sampai 31 Desember 2019 Rp. 54.745.249,-.

Permasalahan

- a. Karena keterbatasan anggaran pada tahun 2019 pekerjaan rehabilitasi sarana dan prasarana UPT Padang Hilalang SP 1 belum dapat dilaksanakan;
- b. Karena terdapat perbedaan floting peta calon lokasi transmigrasi Padang Hilalang SP antara RTRWK dan SKPKH Pembangunan Pemukiman belum dapat dilaksanakan pada tahun 2019.

Solusi

- a. Diusahakan sebagian dapat dianggarkan pada APBD Tahun 2019;
- b. Menunggu Revisi RTRW Dharmasraya yang sedang berjalan.



3. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**26. Perencanaan****j. Program Perencanaan Pembangunan Daerah****16) Penyusunan Rancangan RKPD**

Target kegiatan ini adalah terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam RKPD Tahun 2019 dan terealisasi dalam APBD, kegiatan ini dilaksanakan bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2019. Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya antara lain banyaknya usulan kegiatan yang belum dilengkapi dengan data yang valid. Guna mengatasi hal ini maka diperlukan upaya-upaya untuk melengkapi data-data pendukung untuk usulan kegiatan terkait. Anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 409,640,000.00,- Dengan realisasi sebesar Rp. 409,269,082.00 ,- atau dengan capaian sebesar 100%.

17) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kegiatan penyelenggaraan musrenbang RKPD bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan serta membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan hasil musrenbang kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD serta merumuskan juga usulan kegiatan yang akan disampaikan kemusrenbang provinsi maupun nasional. Kegiatan dilakukan bulan Maret sampai bulan April Tahun 2019. Anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.201,277,000.00,- Dengan realisasi sebesar Rp. 200,300,474.00,- atau dengan capaian sebesar 100%

Permasalahan

Masih terdapatnya usulan berupa keinginan dan belum dilengkapi usulan dengan data-data yang akurat.

Solusi

Guna menyikapi hal ini maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat kepada masyarakat tentang tujuan musrenbang mulai dari jorong, nagari hingga kecamatan dan melakukan pembinaan



secara berkesinambungan terkait peningkatan kualitas usulan rencana pembangunan.

18) Penetapan RKPD

Tujuan Kegiatan ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan baik antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan (SKPD) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juni-Juli Tahun 2019 dengan mengikuti aturan dan sesuai dengan jadwal waktu perencanaan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.31,810,000.00,- Dengan realisasi sebesar Rp. 31,776,000.00,- atau dengan capaian sebesar 100%.

19) Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah

Kegiatan ini ditujukan memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pada dokumen RKPD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diatur pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 46,120,000.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 44,947,919.00,- atau 97%.

Melalui kegiatan ini telah dilaksanakan kegiatan yaitu:

- Rapat koordinasi dengan seluruh SKPD pengguna anggaran yang ada di lingkungan SKPD Kabupaten Dharmasraya secara berkala untuk setiap Triwulan;
- Inventarisir permasalahan yang timbul dan rencana tindak lanjut agar efektivitas pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana;
- Koordinasi hasil monitoring dan evaluasi baik dana TP/UB dan DAK ke BAPPPEDA Provinsi Sumatera Barat;

Permasalahan



Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tidak berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Solusi

Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan konsistensi antara APBD dengan RKPD.

20) Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Daerah.

Kegiatan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Dharmasraya bertujuan agar tersedianya dokumen perencanaan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2019. Kebijakan umum APBD Kabupaten Dharmasraya merupakan rumusan hasil pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya yang menjadi dasar penyusunan rancangan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 serta menjadi arah/pedoman bagi seluruh OPD melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan ini menghasilkan 4 (empat) dokumen yaitu KUA Perubahan dan PPPAS Perubahan Tahun 2019, KUA dan PPAS Tahun 2020. untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.1,054,478,500.00,- Dengan realisasi Rp.1,052,902,750.00,-.

Permasalahan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah masih adanya program dan kegiatan yang diakomodir dalam KUA PPAS yang diluar dokumen RKPD.

Solusi

Untuk mengatasi hal ini maka perlu dipersiapkan kembali pembahasan yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perencanaan dan penganggaran yang tersedia.

21) Penyusunan dan Pengolahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Data Dasar



Kegiatan Penyusunan dan Pengolahan Sistem Informasi lah dilakukan antara lain (1) Rapat Tim Koordinasi dan Rapat Tim Teknis Pengelola Forum Data Kabupaten Dharmasraya secara berkala untuk setiap Triwulan; (2) Pengentrian data secara online terhadap data-data pembangunan yang telah dikumpulkan melalui situs www.sipd.go.id dan www.sdp2d.sumbarprov.go.id; (3) Koordinasi data dan informasi ke BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 67,818,000.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 66,646,696.00,- atau 98%.

Permasalahan

- f. Kurangnya pemahaman dan peran dari masing-masing anggota Tim baik Tim Kooordinasi maupun Tim Teknis Pengelola Forum Data Tahun 2019;
- g. Kurangnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan Forum data Kabupaten Dharmasraya;
- h. Kurangnya prasarana pendukung dalam pengelolaan data pembangunan;

Solusi

- a. Peningkatan fungsi dan peran Forum Data Tahun 2019;
- b. Penguatan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pengelola Forum Data;
- c. Melibatkan BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat untuk memfasilitasi dan sosialisasi Forum Data;
- d. Pengumpulan data/informasi terkait Forum Data di Tingkat Nasional Dan Kabupaten/Kota.

22) Implementasi Sistem Informasi e-Planing

Kegiatan E-Planing menjadi alat bantu BAPPPEDA dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah agar terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dalam perencanaan termasuk diantaranya konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran. E-Planing memfasilitasi BAPPPEDA dan SKPD dalam penyusunan program kerja, sehingga perencanaan dapat berjalan secara efektif, efesien dan terintegrasi.



Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 52,002,700.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 51,552,000.00,- atau 99%.

23) Inovasi Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan daya saing daerah, karena kunci dalam meningkatkan daya saing daerah adalah jika semua daerah bergerak melakukan inovasi di daerahnya masing-masing, kegiatan ini baru pada tahap pengenalan inovasi pada masing-masing perangkat daerah. Permasalahan yang ditemui pada kegiatan ini adalah kurangnya inovasi daerah di Kabupaten Dharmasraya, diharapkan dengan adanya kegiatan ini terbukanya wacana terhadap inovasi daerah. Adapun kegiatan bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.53,900,000.00,- Dengan realisasi sebesar Rp. 41,890,900.00,- atau dengan capaian sebesar 78%.

k. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan ini berguna untuk meningkatkan fungsi pengendalian dan evaluasi dibidang perencanaan pembangunan ekonomi. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Luar Provinsi dan dilaksanakan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Melalui kegiatan ini telah dilaksanakan rapat koordinasi sebanyak 6 (enam) kali. Anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan ini Rp.51,699,400.00,- dengan realisasi sebesar Rp.50,696,400.00,- atau dengan capaian sebesar 98%.

2) Penyusunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Kegiatan ini ditujukan untuk mendapatkan dasar yang tepat bagi perencanaan investasi yang diperlukan oleh target pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang ditetapkan. Anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan ini Rp. 67,088,800.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 66,677,800.00,- atau dengan capaian sebesar 99%.

3) Penyusunan Analisis Tabel Output Input



Kegiatan ini ditujukan untuk mengidentifikasi struktur penggunaan barang dan jasa dimasing-masing sektor serta distribusi produksinya. Anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan ini Rp. 98,382,000.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 97,353,000.00,- atau dengan capaian sebesar 99 %,-

I. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

1) Fasilitas Tim Koordinasi Kemiskinan

Kegiatan Fasilitas Tim Koordinasi Kemiskinan dilakukan di BAPPPEDA Dharmasraya pada bulan Januari-Desember 2019, Kegiatan ini melibatkan OPD terkait program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan dan unsur masyarakat terkait lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Luar Provinsi dan dilaksanakan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini Rp. 36,840,000.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 34,585,000.00,- atau capaian sebesar 94%.

2) Fasilitas dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Kegiatan ini berguna untuk meningkatkan fungsi pengendalian dan evaluasi dibidang perencanaan pembangunan sosial budaya Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Luar Provinsi dan dilaksanakan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan ini Rp.171,841,000.00,- dengan realisasi sebesar Rp.170,585,730.00,- atau dengan capaian sebesar 99%.

3) Fasilitas Pengarusutamaan Gender

Kegiatan ini bertujuan agar terbentuknya Kelompok Kerja (POKJA) PUG, namun pada pelaksanaannya diperlukan penetapan rencana aksi daerah PUG melalui Peraturan Bupati (Perbup) dengan dibentuknya tim penyusunan Ranperbup tentang Rencana Daerah (RANDA) PUG. Anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan ini Rp.49,452,000.00,- dengan realisasi sebesar Rp.49,129,050.00,- atau dengan capaian sebesar 99%.

4) Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat (KKS)



Kegiatan KKS bertujuan agar tercapai kondisi Kabupaten Kota bersih, aman, nyaman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain sehingga dapat meningkatkan sarana, produktivitas dan perekonomian masyarakat. Penyelenggaraan Kegiatan KKS melibatkan banyak lintas sektor dan lintas program melalui Tatanan dalam KKS. Ada 7 tatanan KKS, yaitu Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum, Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi, Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat, Kawasan Pariwisata Sehat; Kawasan Pangan dan Gizi, Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri, serta Kehidupan Sosial yang Sehat. Anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan ini Rp.154,144,500.00,- dengan realisasi sebesar Rp.153,437,036.00,-.

m. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

1) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Tujuan kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Perkotaan adalah meningkatkan kualitas percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan ini ditekankan dalam bentuk sosialisasi, fasilitasi, formulasi dan koordinasi antar SKPD terkait (Dinas Kesehatan terkait dengan aspek penanganan masalah sanitasi dan Dinas Pekerjaan Umum untuk menyelaraskan pembangunan Infra struktur dasar dan Kementerian Pemerintah Pusat terkait dengan program kegiatan nasional) terhadap aspek-aspek sektorsanitasi yang ada dalam menangani permasalahan sanitasi di Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan yang berhubungan dengan koordinasi dengan perencanaan sektorsanitasi ada 3 (tiga) subsektor, yaitu air limbah, persampahan dan drainase tersier. Tidak lupa pendukung dari ke 3 subsektor sanitasi diatas yaitu PROHISAN (Promosi Higienis Sanitasi).



Kegiatan terkait dengan Pelaksanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada dasarnya adalah terkait dengan pemenuhan akses sanitasi. Pelaksanaan Kegiatan lebih merupakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan khususnya dengan sanitarian dan tenaga fasilitator Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM). Anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp. 42,073,000.00,- terealisasi sebesar Rp.41,198,953.00,- atau 98%.

n. Program Perencanaan Tata Ruang

1) Penetapan Kebijakan tentang RTDRK, RTRK, RTBL

Kegiatan ini ditujukan untuk penyelesaian Legalisasi Perda RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Pulau Punjung dan Persetujuan substansi RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Koto Baru, Kawasan Pulau Punjung dan Kawasan Sitiung. Realisasi pelaksanaan kegiatan yaitu asistensi peta dalam rangka perolehan rekomendasi Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk 3 RDTR dimaksud, sementara untuk Rekomendasi Gubernur RDTR dan PZ Kawasan Sitiung belum dapat dibahas oleh Tim TKPRD Provinsi Sumatera Barat karena padatnya kegiatan Tim TKPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinans Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor 936/SRT-TKPRD/BPR-PUPR/XII-2019 tanggal 3 Desember 2019. Anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.110,449,800.00,- Dengan realisasi sebesar Rp. 56,685,530.00,- atau dengan capaian sebesar 51%.

Permasalahan

- a. Rekomendasi BIG untuk peta dasar baru diperoleh untuk RDTR Kawasan Sitiung sementara untuk RDTR Kawasan Koto Baru dan kawasan Pulau Punjung masih perlu perbaikan;
- b. Adanya pedoman penyusunan RDTR dan PZ baru yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2019



Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (PZ) Kabupaten/Kota sementara Penyusunan RDTR dan PZ yang telah dilakukan mengacu pada Peraturan menteri PU Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

Solusi

- a. Guna mengatasi hal ini dibutuhkan koordinasi, review dan asistensi secara kontiniu dan intensif dengan BIG;
- b. Melakukan koordinasi dengan TKPRD Provinsi Sumatera Barat karena untuk melakukan penyesuaian Materi Teknis sesuai dengan aturan baru membutuhkan biaya yang cukup besar.

2) LegalisasiRevisiRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya

Kegiatan ini ditujukan untuk merevisi RTRW Kab. Dharmasraya Tahun 2012-2031 meliputi materi teknis, naskah akademis, Ranperda dan album peta. Realisasi Kegiatan hampir mencapai 95% yaitu tersedianya dokumen (Materi Teknis, Naskah Akademis, Ranperda dan Album Peta) Revisi RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031. Anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.503,602,500.00,- Dengan realisasi sebesar Rp.495,127,735.00,- atau capaian sebesar 98%.

Permasalahan

- a. Konsultasi Publik hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sementara yang dipersyaratkan dalam aturan minimal 2 (dua) kali;
- b. Review dan asistensipetamemerlukanwaktu yang panjang, rekomendasi yang sudahdiperolehyaituuntuk Peta Dasar sementarauntuk Peta Tematikcdan Peta Rencanamasihdalam proses review;
- c. Keluarnya Permendagri Nomor 70, Nomor 71 dan Nomor 72 tentang Batas Daerah yang memiliki dampak terhadap perubahan Peta Revisi RTRW Kabupaten Dharmasraya (Berpengaruh terhadap Materi Teknis dan Peta);



-
- d. Pembahasan Lintas Sektor dan belum dilakukan 1x (sekali lagi) karena keterbatasan anggaran begitu pun dengan pembahasan Perda RTRW dengan DPRD

Solusi

- a. Melakukan Koordinasi dan secara kontiniu melakukan asistensi dengan BIG.
- b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait,
- c. Mengagendakan pembahasan lintas sektor dan pembahasan materi Revisi RTRW Kabupaten Dharmasraya dengan DPRD pada tahun 2020 guna menuntaskan kegiatan ini.

o. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air (PAMSIMNAS)

Kegiatan PAMSIMNAS bertujuan untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota (peri-urban). Kegiatan ini dilakukan dilokasi target sasaran program PAMSIMNAS yaitu jorong-jorong yang telah menjadi lokasi sasaran (lokasipasca) dan lokasi sasaran yang berminat untuk menjadi pelaksana kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2019. Saat ini hampir seluruh lokasi yang dikategorikan daerah rawan air bersih menjadi sasaran program Pamsimas yang dilaksanakan dengan pola partisipatif yang berbasiskan masyarakat. Pelaksanaan Program PAMSIMAS IV di Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dalam bentuk penjaringan minat lokasi yang akan menjadi sasaran program. Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS di Kabupaten Dharmasraya telah dilakukan sosialisasi program, pengajuan minat oleh kelompok masyarakat, verifikasi minat dan kesiapan masyarakat pada jorong/lokasi sasaran yang berminat terhadap Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019. Anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan ini dengan pagu sebesar Rp. 51,248,900.00,- dan terealisasi sebesar Rp.50,561,900.00 – atau 99%.



Permasalahan

- a. Penerapan pendekatan SPAM Berbasis Masyarakat;
- b. Belum tersedianya lembaga yang khusus menangani pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan sebagaimana PDAM di perkotaan;
- c. Belum tersedianya sistem data/informasi air minum dan sanitasi perdesaan, untuk menjadi bagian dari sistem informasi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah, yang andal sebagai basis pengambilan keputusan program dan anggaran pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan;
- d. Belum memadainya dukungan program dan anggaran daerah yang memberikan fokus pada peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan;
- e. Belum memadainya investasi bagi sistem penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan; pendanaan masih bertumpu pada anggaran Pemerintah, alokasi APBD untuk pembangunan air minum dan sanitasi masih rendah, dan belum dimanfaatkannya potensi pendanaan dari swasta dan masyarakat;

Solusi

- a. Koordinasi dengan setiap pelaku program lainnya baik dari konsultan di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat seperti District Coordinator (DC), Fasilitator Keberlanjutan dan Fasilitator Masyarakat yang selalu mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan program dilapangan. Keberadaan Panitia Kemitraaan (PAKEM) dan District Project Management (DPMU) selaku perpanjangan tangan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) juga memberikan dukungan dan kontribusi dalam menyukkseskan pelaksanaan program;
- b. Kendala Kelembagaan dalam menjaga keberlanjutan program pada dasarnya sangat terkait dengan keterbatasan anggaran dalam operasional awal program keberlanjutannya. Namun hal ini pada dasarnya dapat dicarikan solusinya dengan lebih memberi ruang pada BPML2NPPKB dalam konsep pemberdayaan masyarakat;



- c. Dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air (TKK PAMSIMAS) permasalahan yang dihadapi tidak terlalu kompleks mengingat pelaku langsung dilapangan adalah masyarakat selaku pelaksana dan penerima manfaat program. Permasalahan yang ada pada umumnya lebih pada keterbatasan waktu pelaksanaan. Selain itu mengingat kondisi geografis dan geologi Kabupaten Dharmasraya yang cenderung datar mengakibatkan pada umumnya sumber air berupa sumur bor dengan opsi teknologi pembangunan menara air sebagai reservoir (bak penampungan air) sebelum didistribusikan kepada masyarakat penerima bantuan;
- d. Keberlanjutan program dalam memanfaatkan dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun. Untuk itu melalui Fasilitator Keberlanjutan dan BPML2NPPK diharapkan dapat dirumuskan pola yang baik dalam menjaga keberlangsungan kelembagaan pengelola Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) yang telah dibangun yaitunya BP-SPAMS (Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) di masing-masing lokasi penerima program;

27. Keuangan

Sub urusan administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD). Kegiatan tersebut secara teknis dilaksanakan oleh bidang-bidang terkait yang ada di BKD, yakni sebagai berikut:

a. Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.10.210.000,- dengan realisasi keuangan Rp.10.164.051,- atau 99,55% sedangkan fisiknya terealisasi 100%.

2) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2020



Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.578.925.000,- dengan realisasi keuangan Rp.561.248.908,- atau 96,55% sedangkan fisiknya terealisasi 100%.

3) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2019

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.608.860.000,- dengan realisasi keuangan Rp.588.434.301,- atau 96,65% sedangkan fisiknya terealisasi 100%.

4) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.181.132.350,- dengan realisasi keuangan Rp.181.126.750,- atau 100% sedangkan fisiknya terealisasi 100%.

5) Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.691.720.860,- dengan realisasi keuangan Rp.690.433.944,- atau 99,81% sedangkan fisiknya terealisasi 100%.

6) Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.154.955.000,- dengan realisasi keuangan Rp.126.270.831,- atau 81,49% sedangkan fisiknya terealisasi 100%.

7) Peningkatan manajemen aset/barang daerah.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.171.027.750,- dengan realisasi keuangan Rp.161.790.604,- atau 94,60% sedangkan fisiknya terealisasi 100%.

8) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.202.185.000,- dengan realisasi keuangan Rp.194.407.500,- atau 96,15% sedangkan fisiknya terealisasi 80%.

9) Penatausahaan Barang Milik Daerah



Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.214.155.450,- dengan realisasi keuangan Rp.212.767.013,- atau 99,39% sedangkan fisiknya terealisasi 100%.

10) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.578.925.000,- dengan realisasi keuangan Rp.561.248.908,- atau 23,24% sedangkan fisiknya terealisasi 80%.

11) Pengelolaan penyaluran belanja PPKD (Hibah Bansos)

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.100.659.500,- dengan realisasi keuangan Rp.90.077.500,- atau 89,49% sedangkan fisiknya terealisasi 100%.

12) Operasional pajak daerah

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.182.587.000,- dengan realisasi keuangan Rp.155.289.750,- atau 85,05% sedangkan fisiknya terealisasi 100%.

13) Fasilitas tim penyelesaian kerugian daerah

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.40.074.850,- dengan realisasi keuangan Rp.38.437.935,- atau 95,92% sedangkan fisiknya terealisasi 100%.

14) Rapat koordinasi dan evaluasi PAD dan PLL

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.101.745.000,- dengan realisasi keuangan Rp.84.997.942,- atau 83,54% sedangkan fisiknya terealisasi 100%.

15) Penyusunan potensi dan dokumen pendapatan daerah

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.39.325.000,- dengan realisasi keuangan Rp.29.412.700,- atau 74,79% sedangkan fisiknya terealisasi 100%.

16) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (IKPD)

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.137.092.500,- dengan realisasi keuangan Rp.136.454.763,- atau 99,53% sedangkan fisiknya terealisasi 100%.

17) Analisis dokumen anggaran perubahan APBD 2019



Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.25.377.650,- dengan realisasi keuangan Rp.24.130.809,- atau 95,09% sedangkan fisiknya terealisasi 100%.

18) Analisis dokumen anggaran APBD 2020

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.35.160.000,- dengan realisasi keuangan Rp.33.987.292,- atau 96,66% sedangkan fisiknya terealisasi 100%.

19) Penyusunan Laporan Semesteran Pelaksanaan APBD

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.70.151.000,- dengan realisasi keuangan Rp.66.171.864,- atau 94,33% sedangkan fisiknya terealisasi 100%.

20) Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.140.000,- dengan realisasi keuangan Rp.86.375.450,- atau 96,12% sedangkan fisiknya terealisasi 100%.

21) Pengelolaan penatausahaan keuangan daerah

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.106.793.000,- dengan realisasi keuangan Rp.101.268.160,- atau 94,83% sedangkan fisiknya terealisasi 100%.

22) Penyusunan produk hukum tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.68.965.000,- dengan realisasi keuangan Rp.58.104.700,- atau 84,25% sedangkan fisiknya terealisasi 100%.

28. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan berbagai program dan kegiatan antara lain:

a. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

a. Seleksi penerimaan calon PNS

Pada Tahun Anggaran 2019 ini Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melaksanakan fasilitasi dalam rangka rekrutmen CPNS dari Pelamar Umum yang bekerja sama dengan BKN Regional XII Pekanbaru,



yang pelaksanaannya telah selesai sampai dengan tahap seleksi administrasi. Adapun jumlah Formasi yang diterima sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang. Untuk tahap seleksi administrasi, jumlah pelamar yang mendaftar berjumlah 3014 orang, lulus seleksi 2.825 orang dan yang tidak memenuhi syarat berjumlah 189 orang. Untuk tes CAT dan ujian kompetensi Bidang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Jumlah Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebanyak Rp. 420.000.000,- dengan Realisasi Rp. 264.162.152,-.

Permasalahan

- a. Belum adanya fasilitas yang digunakan untuk pelaksanaan CAT di Kabupaten Dharmasraya;
- b. Kurang telitinya pelamar dalam melengkapi dokumen lamaran CPNS.

Solusi

- a. Melakukan kerjasama dengan pihak BKN, yang penyelenggarannya dilakukan Kabupaten Solok dan untuk jangka panjang akan dilakukan penganggaran untuk pembuatan ruang CAT di Kabupaten Dharmasraya;
- b. Menghubungi pelamar untuk melengkapi kembali dokumen yang masih kurang.

b. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Kegiatan Ini dititikkan pada Kenaikan Pangkat Bagi ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terbagi pada dua periode yaitu pengurusan Kenaikan Pangkat Periode April 2010 dan Periode Oktober 2019 sebanyak 844 orang. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebesar Rp.49.478.500 dan terealisasi sebesar Rp.49.277.500,-.

Permasalahan

- a. Masih terdapatnya pegawai yang BTL naik pangkat karena pangkat yang bersangkutan melebihi pangkat atasan;
- b. Masih kurang komitmennya PNS yang akan naik pangkat terhadap aturan yang berlaku.

Solusi



-
- a. Memberikan masukan dan saran kepada pimpinan agar melakukan mutasi terhadap atasan yang pangkatnya lebih rendah dari pada bawahannya;
 - b. Melakukan sosialisasi secara langsung kepada yang bersangkutan.

c. Penyusunan Instrumen analisis Jabatan

Kegiatan ini berfungsi untuk menghitung kebutuhan, kelebihan dan kekurangan ASN (Formasi Jabatan) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan pengelolaan Formasi sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang. Jumlah anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 39.170.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.073.877,-.

Permasalahan

- a. Masih terdapatnya formasi yang diusulkan belum diakomodir oleh Menpan RB;
- b. Masih kurang formasi CPNS Kabupaten Dharmasraya.

Solusi

- a. Membuat usulan kembali ke Menpan RB;
- b. Melakukan penambahan dan usulan formasi kembali ke Menpan RB.

d. Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan Tanda Kehormatan atau penghargaan bagi PNS yang Mengabdikan dengan masa kerja 10, 20 dan 30 Tahun. Pada tahun 2019 diberikan sebanyak 365 Orang PNS. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebesar Rp.31.575.000,- dan terealisasi sebesar Rp.31.499.033,-.

e. Proses Penanganan Kasus Kasus Pelanggaran Disiplin

Kegiatan ini meliputi Melaksanakan konseling perkawinan bagi PNS dan Memberikan Rekomendasi izin melakukan PNS yang akan menikah, memproses izin perceraian Bagi PNS yang mengajukan Perceraian serta memproses PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin, sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 32.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.238.961,-.



Permasalahan

- a. Pejabat struktural di OPD banyak yang belum mendalami penanganan kasus-kasus indisipliner yang dilakukan bawahannya sehingga setiap setiap masalah yang muncul dikembalikan ke BKPSDM;
- b. OPD yang mempunyai jajaran yang luas dan besar sulit untuk mengakomodir permasalahan PNS. Bahkan ada PNS yang tidak masuk lebih kurang 46 hari kerja ditindaklanjuti secara serius oleh OPD;

Solusi

Perlu dilakukan sosialisasi ke OPD.

f. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Kegiatan ini dititik beratkan pada pemberian Bantuan Pemerintah terhadap ASN yang mengikuti Tugas Belajar dan pemberian ijin belajar bagi ASN dinkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, sebanyak 103 (seratus tiga) orang. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 32.240.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.025.378,-.

g. Pelayanan SKPP Pengabdian, SK Pensiun

Pada Tahun Anggaran 2019 ini Pelayanan SKPP, pengabdian dan SK Pensiun mempunyai target 82 (delapan puluh dua) orang. Yang terdiri dari yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), pensiun Janda/duda dan pensiun Anak. Jumlah PNS yang pensiun melebihi dari target karena berlakunya PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang memberlakukan Pensiun Atas Permintaan sendiri dengan Masa Kerja 20 (dua puluh) Tahun dan Umur 45 (empat puluh lima) tahun, dan yang telah diterbitkan SK Pensiunnya sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 36.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.082.133,-.

Permasalahan

Masih banyak bahan pensiun yang lambat masuk ke BKPSDM.

Solusi

Dengan cara menghubungi yang bersangkutan secara langsung.



h. Pelaksanaan Pengiriman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah telah dilaksanakan pada bulan Desember 2018, pada proses ujian telah menggunakan Sistem CAT BKN (Computer Assistent Test Badan Kepegawaian Negara), sebanyak 66 (enam puluh enam) orang. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebesar Rp.40.911.750,- dan terealisasi sebesar Rp.41.891.750,-.

i. Pelayanan Pengurusan Penerbitan Karpeg Karis dan Karsu

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi PNS dalam memperoleh Kelengkapan Administrasi kepegawaian seperti Karpeg, Karsu, Karis, Taspen dan SK Konversi NIP Baru, yang telah dilaksanakan sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebesar Rp.28.490.000,- dan terealisasi sebesar Rp.28.447.233,-.

Permasalahan

Masih terdapatnya PNS yang sudah memiliki Karpeg, Karsu, karis belum di input ke SAPK secara keseluruhan karena keterbatasan sumber daya manusia.

Solusi

Dilakukan input ke SAPK melalui Admin Simpeg.

j. Pengembangan Program Simpeg

Sistem informasi Manajemen PNS Digunakan oleh Pemda Dharmasraya untuk Membuat Statistik Data seluruh ASN Kabupaten Dharmasraya berupa Updating database kepegawaian dalam hal mutasi, kenaikan pangkat ,pension dan Mengadakan Sofwer Komputer untuk E-Disiplin. Anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan ini sebesar Rp.64.170.000 dengan realisasi sebesar Rp.63.741.239,-

Permasalahan

Aplikasi SIMPEG yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena belum dilakukan upgrade sesuai OPD baru, sehingga penghitungan statistik data PNS Kab. Dharmasraya berjalan sangat lambat karena dilakukan secara manual dengan menghimpun dan



menghitung data bazetting yang diberikan oleh seluruh OPD dan belum seluruh OPD menyerahkan bazetting

Solusi

Akan di anggarkan perubahan untuk di akomodir penambahan anggaran untuk memperbaharui system informasi kepegawai Daerah.

k. Penempatan PNS

Kegiatan ini dititikberatkan pada Penempatan PNS dan Pelantikan Jabatan Struktural yang ada di lingkungan Pemkab Dharmasraya, pejabat yang telah dilantik selama tahun 2018 sebanyak 258 orang dengan 11 kali pelaksanaan. Anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan ini sebesar Rp. 216.904.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 181.509.741,-.

l. Pengelolaan dan Fasilitas Administrasi Kepegawaian

Kegiatan ini yaitu dalam hal memfasilitasi ASN dalam Pengelolaan Administasi Kepegawaian seperti penyusunan SKP sebanyak 1.506 orang yang digunakan untuk melihat prestasi Kerja ASN di Lingkungan Pemkab Dharmasraya. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 30.351.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.923.250,-.

Permasalahan

Masih banyaknya PNS yang belum membuat SKP hal ini disebabkan karena masih banyak yang tidak memahami cara pembuatan SKP dan pentingnya SKP.

Solusi

Melaksanakan Sosialisasi tentang pembuatan SKP.

b. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

1) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah

Diklat teknis tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada tahun 2019 Bimtek (Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi Manajerial bagi Pejabat Eselon IV) dan Sosialisasi Kode etik PNS dan Pembinaan Displin PNS. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan



Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 117.883.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 117.564.700,-

Permasalahan

Belum adanya arah kebijakan pengembangan kompetensi PNS dan minim anggaran.

Solusi

Pembentukan Tim rencana diklat dan penembahan anggaran.

2) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD

Peserta Diklat Prajabatan pada tahun 2019 terdiri atas CPNS Formasi Umum sebanyak 105 orang dan dari Tenaga Honorer K2 sebanyak 8 orang. Pelaksanaan Diklat bagi CPNS Umum berlangsung selama 51 hari di BPSDM Provinsi Sumatera Barat dengan sistem ON/Off kampus, sedangkan bagi CPNS dari Tenaga Honorer K2 diklat prajabatan berlangsung selama 7 (tujuh) hari yang dilaksanakan di Pusdiklat Regional Kemendagri Bukittinggi. Jumlah anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini berjumlah Rp. 1.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.977.104.039,-.

Permasalahan

- a. Masih terdapat PNS yang belum dapat mengikuti diklat Dasar pada tahun 2019 karena anggaran yang kurang;
- b. Belum adanya tempat diklat yang memadai bagi peserta dan fasilitator di Dharmasraya.

Solusi

- a. Akan dilakukan diklat dasar pada tahun 2020;
- b. Menyewaq gedung BKPSDM Prop Sumatera Barat, pembangunan tempat diklat untuk masa yang akan datang.

c. Program Pendidikan Kedinasan

1) Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Dalam rangka untuk meningkatkan Kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2019, dengan cara melaksanakan dan mengirim peserta Bimtek dan uji kompetensi bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, sebanyak 5



orang. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 62.090.000,- dan realisasi sebesar Rp. 61.098.498,-.

Permasalahan

Belum adanya prioritas diklat bagi PNS Dharmasraya dan tempat diklat.

Solusi

Pembentukan Tim Rencana diklat PNS dan menyewa tempat yang layak untuk diklat.

2) Diklat Penjenjangan Struktural

Diklat kepemimpinan bagi Pejabat Struktural dilaksanakan untuk jenjang Esselon III dan IV, pada tahun 2019, sebanyak 7 orang yakni Diklat PIM. III sebanyak 3 orang, Diklat PIM. III, sebanyak 4 orang. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebesar Rp.205.500.400,- dan terealisasi sebesar Rp.205.234.000,-.

Permasalahan

Masih banyak pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat PIM dan Anggaran untuk diklat PIM tidak cukup.

Solusi

Akan dilakukan penambahan anggaran 2019 dan dikoordinasikan dengan TAPD pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

29. Penelitian dan Pengembangan

Pada Tahun 2019 Urusan Penelitian dan Pengembangan merupakan urusan yang baru dan masih dalam tahap persiapan sehingga belum ada kegiatan konkrit yang dilaksanakan dan kegiatan yang dilaksanakan baru sebatas kerjasama dengan pihak perguruan tinggi.

30. Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

a. Sekretariat Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan pada jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, yang dibagi dalam program dan kegiatan, yakni:

a. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1) Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah



Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah tahun 2019 dilaksanakan dengan melakukan pembinaan ke sekolah peserta Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi dan TP UKS Kecamatan, dimana sekolah yang akan mengikuti Lomba Tingkat Provinsi Sumbar, TK Pembina Sitiung, SDN 20 Sitiung, SMPN 1 Pulau Punjung dan SMAN 1 Koto Salak dari keempat sekolah yang mewakili Kabupaten Dharmasraya meraih Juara 2 (dua) adalah TK Pembina Sitiung dan Juara 3 (tiga) SMPN 1 Pulau Punjung pada LSS Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2019. Pada Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 115.695.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 115.695.000,- atau capaian 100%.

b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1) Kegiatan pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah tidak memberangkatkan Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD). Pada tahun ini jumlah Calon Jamah haji Kabupaten Dharmasraya berjumlah 317 orang, kemudian 1 orang jamaah meninggal di tanah suci sehingga menjadi 316 orang. Kegiatan ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap Pemberangkatan dan tahap Penjemputan. Pada tanggal 18 Juli 2019 pada hari Kamis diselenggarakan acara pelepasan Calon Jamaah Haji di Masjid Agung Babussalam kecamatan Pulau Punjung. Pada tanggal 23 Agustus 2019 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dibawah Koordinator Bagian Kesra memfasilitasi kembali kepulangan Jamaah Haji kabupaten Dharmasraya dari Asrama haji Parupuak Tabing Padang kembali ke Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 376.419.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 332.104.000,-.

2) Penyelenggraan MTQ Tingkat Provinsi sumatera Barat

Pada tahun 2018, kegiatan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten Dharmasraya yang dilaksanakan tanggal 1 s/d 3 November 2018 MTQ ke X Tingkat Kabupaten Dharmasraya di Kecamatan Sembilan Koto. MTQ ke X di Ikuti oleh 11



Kecamatan. Masing–masing Kecamatan mengirim Peserta Kafilah MTQ sebanyak 46 Peserta MTQ X tingkat Kabupaten Dharmasraya di Kecamatan Sembilan Koto jadi Jumlah Peserta yang mengikuti MTQ X sebanyak 506 Kafilah MTQ dengan Jumlah Cabang yang di lombakan sebanyak 10 Cabang. Kecamatan Yang mendapat Juara Umum MTQ X Tingkat Kabupaten Dharmasraya di Kecamatan Sembilan Koto adalah Kecamatan Koto Baru.

Dalam mengikuti MTQ X ini peserta yang mendapat prestasi juara 1 dan 2 akan diundang atau diseleksi untuk mengikuti MTQN XXXVIII Provinsi Sumbar yang akan dilaksanakan di Kota Solok pada tanggal 14 s/d 22 Juni 2019. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan dengan menyeleksi atau mengundang pemenang 1, 2 dan pada MTQ Tingkat Kabupaten Dharmasraya ke X di Kecamatan Sembilan Koto dan peserta lain yang mempunyai kemampuan diundang untuk mengikuti Seleksi dan Training Centre. Pada Kegiatan Seleksi dan Training Centre tersebut pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Tim Kerja Kabupaten mengundang 15 orang Pelatih Provinsi dan 15 orang Pelatih Kabupaten.

Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut adalah : Training I (TC I) diikuti sebanyak 100 orang peserta yang dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 9 Februari 2019 di Hotel Sakato Jaya Pulau Punjung dan Pelaksanaan Training Centre (TC II) sebanyak 57 orang yang dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 10 Maret 2019 serta Pelaksanaan Training Centre (TC III) sebanyak 57 orang pada tanggal 26 s/d 28 April 2019 dan selanjutnya TC Intensif yang diikuti oleh 57 kafilah yang dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 Juni 2019. Dan Kegiatan training Centre tersebut dilaksanakan di Hotel Sakato Jaya Pulau Punjung, semua peserta trianing Centre berjumlah 57 orang Qori Qoriah untuk menjadi peserta MTQ Provinsi XXXVIII di Kota Solok dan adapun Kafilah yang dikirim sebanyak 117 orang yang terdiri dari peserta, Official pelatih, Official pendamping, pendamping peserta, uda uni, petugas



kesehatan dan petugas transportasi pada Pelaksanaan MTQ Nasional XXXVIII Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Solok tanggal 14 s/d 22 Juni 2019. Pada pelaksanaan MTQN XXXVIII Tingkat Provinsi tersebut kita meraih peringkat 12 besar dari 19 Kabupaten / Kota, selain itu Kabupaten Dharmasraya juga meraih Juara 1 Cabang Tilawah Putri a.n Yunia Safitri, Juara 2 Tahfiz 5 Juz Tilawah putra an. Asraldi, Juara 2 Bintang Qasidah anak-anak Putra an. M. Iqbal Irawadi, Juara 3 Bintang Qasidah Remaja Putra an. Egi Indra Juara 3 Qira'at Murottal Putri an. Mimi Gunita dan Harapan I cabang Kitab Standar putri an. Tuti Aryani, dan juara harapan III cabang Bintang Qasidah Dewasa Putri an. Yunia Nora Rostianti Qori-Qori'ah berprestasi ini diberikan bonus yang berbeda sesuai prestasi yang mereka dapatkan. Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp.1.449.465.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.424.715,000,- .

Permasalahan

Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan MTQ dan STQ tahun 2019 sudah maksimal, prestasi yang kita raih juga kurang memuaskan hal ini disebabkan karena kurangnya waktu pelaksanaan TC bagi qori-qori'ah yang akan mengikuti MTQ Provinsi, sehingga kemampuan qori-qori'ah kita juga belum tergali secara maksimal dimana untuk menggali potensi anak kita akan merencanakan pondok Alqur'an yang sudah ada akan diadakan pembinaan dari pemda kalau dana dianggarkan untuk pembinaan Pondok Tahfiz dan Pembinaan cabang bidang lomba dimaksud.

Solusi

Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan MTQ dan STQ agar dirancang secara mantap pelaksanaan seleksi dan TC yang akan dilaksanakan dan penambahan anggaran untuk pelaksanaan TC tersebut.

3) Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam



Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam dilaksanakan dalam rangka untuk memperingati Hari Besar Islam. Dan Peringatan Hari besar Islam pertama yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 06 April 2019 bersama Ustad Salman, S.Hi.MH di Mushala AT-Tauhid Komplek Kantor Bupati Dharmasraya yang dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Bupati Dharmasraya Amrizal Dtk. Rajo Medan, S.Sos dan seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya Hari Raya Idul Fitri tanggal 6 Juni 2019 di Halaman Kantor Bupati Dharmasraya dengan Imam Rahman Lc, 2019 dan Khatib Aminullah Salam, S.MIQ dan selanjutnya Acara Halal Bi halal yang disampaikan oleh Drs. Syafwan Diran pada tanggal 10 Juni 2019 bertempat di Auditorium Kabupaten Dharmasraya yang dihadiri langsung bupati dan wakil bupati dan seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya Shalat Hari Raya Idul Adha pada tanggal 11 Agustus 2019 di Halaman Kantor Bupati Dharmasraya dengan Khatib buya Syafrul Nalus, S.Ag, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 November 2019. Masing-masing diisi dengan kegiatan ceramah agama oleh penceramah dari Provinsi dan Kabupaten. Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 30.361.000.00,- dengan realisasi sebesar Rp.28.261.000.00,- atau capaian sebesar 75,48%.

Permasalahan

Pada Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kehadiran PNS/ASN pada pelaksanaan wirid.

Solusi

Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam juga harus dikelola dan direncanakan lebih baik lagi dan untuk meningkatkan kehadiran PNS pada acara Wirid dilaksanakan pengambilan absen dan dilaporkan kepada Bupati.



4) Kegiatan Safari Ramadhan

Kegiatan Safari Ramadhan dilaksanakan oleh 17 Tim yang turun ke 52 Nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 13 Mei, 15 Mei, dan 17 Mei 2019. 52 Masjid yang dikunjungi diberikan bantuan Al-Qur'an Terjemahan sebanyak 2 bh/, Tikar 1 buah Masjid dan bantuan uang sebesar Rp. 10.000.000,-/ Masjid melalui bantuan hibah. Selain kunjungan ke 52 Masjid juga dilaksanakan buka bersama dengan seluruh aspek masyarakat di rumah Bupati dan Wakil Bupati. Pada Pelaksanaan Buka bersama dibagikan souvenir kain sarung sebanyak 7000 helai, dimana pengadaan sarung dilaksanakan melalui LPSE Dharmasraya dengan pihak ketiganya CV. Andalas Multi Sarana dengan nilai kontrak Rp. sebesar 848.430.000,-. Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp.1.059.477.300,- dengan realisasi sebesar Rp.1.043.222.800,-

5) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Pembahasan Masalah serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dibidang Agama, Pendidikan, Kesehatan, dan Kebudayaan merupakan kegiatan koordinasi bidang kesra. Dimana kegiatan ini dilaksanakan untuk mengkoordinasikan permasalahan yang masuk ke bagian kesra baik Pendidikan, kesehatan, agama, maupun sosial. Tahun 2019 telah dilaksanakan 10 (Sepuluh) kali rapat diantaranya rapat Temu Ramah dengan Pimpinan Pondok Pesantren se Kabupaten Dharmasraya dan sekaligus membahas Program Pendidikan Berbasis Agama, Rapat Persiapan Sosialisasi BPNT dan Bansos PKH Tahun 2019, Rapat Panitia Peringatan Hari Ulang tahun Lanjut Usia (HLUN) serta Pelaksanaan Kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) bagi penyandang Cacat, Rapat Persiapan dalam rangka memberikan Penghargaan /Reward kepada Kafilah pada MTQ Nasional ke XXXVIII Tingkat Provinsi Sumatera barat tanggal 14 s.d 22 Juni 2019 di Koto Solok untuk penyerahan bonus, Pembahasan Rapat Kegiatan



Bansos Lansia untuk 3000 (tiga ribu) Tahun 2020, Rapat Pembahasan Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Tahun 2019, Pembahasan tentang Izin Pengangkatan dan Pembayaran Honorarium Tenaga harian Lepas Dokter Umum dan Pembahasan Tentang Permasalahan terkait izin operasional RSUD Sungai dareh pada gedung baru. Selain itu juga dilakukan koordinasi dalam Kabupaten, Luar Kabupaten Dalam Provinsi dan Luar provinsi.

c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1) Kegiatan Sosialisasi dan fasilitasi Operasi Bibir Sumbing

Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Operasi Bibir Sumbing, yang dilaksanakan sosialisasi Ke sebelas Kecamatan se Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019. Instansi yang terkait diantaranya Kesra, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD dan Dinas Sosial. Yang mana pada tahun 2019 ini ada 4 Kecamatan yang terfasilitasi Operasi Bibir Sumbing Sebanyak 5 Orang dan Pelaksanaan Kegiatan ini berjalan sukses dan lancar. Pada tahun 2019 pada kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp.300.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.277.681.500,-.

d. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Daerah

1) Pengadaan Media Internal

Target kegiatan tersebarluasnya informasi pembangunan daerah kepada seluruh masyarakat luas melalui media cetak berupa majalah bulanan Dharmasraya, Spanduk, Baliho, Buku Selayang Pandang, selebaran dan Videotron. Adapun dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 731.111.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu rupiah) dengan realisasi Rp.727.596.300,- (Tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus rupiah) atau sebesar 99.5%.

2) Peningkatan hubungan dengan Media Massa/Relations

Target kegiatan adalah meningkatnya hubungan baik antara Pemerintah Daerah dan Media Massa yang telah bekerjasama



dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan meningkatkan pelayanan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Adapun dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 153.717.000,- (Seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan realisasi Rp. 143.222.600,- (Seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 93.2 %.

3) Pembinaan Kompetensi SDM Jurnalistik

Target kegiatan tersedianya petugas pengelolaan website nagari, terlaksananya pelatihan jurnalistik bagi petugas informasi nagari-nagari yang ada di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Adapun dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 58.700.000,- (Lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan realisasi Rp. 57.930.000,- (Lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau 98.7 %

4) Peningkatan Pelayanan Informasi Dokumentasi (PPID)

Target kegiatan terlayannya kebutuhan informasi public, terbangunnya partisipasi public dalam pembangunan dan peningkatan pelayanan informasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Adapun dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 418.959.000,- (Empat ratus delapan belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dengan realisasi Rp. 398.833.000 (Tiga ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) atau 95.2 %

5) Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi KDH/WKDH

Target kegiatan tersebut adalah pengumpulan dan penyebarluasan informasi kebijakan daerah serta meningkatnya ketersediaan informasi kebijakan daerah melalui media website. Adapun dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 444.426.000,- (Empat ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah),- realisasi Rp. 443.392.571,- (Empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah),- atau 99.8 %.



6) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi Media Massa dan Elektronik.

Target kegiatan tersebut untuk pelayanan informasi melalui media cetak dan elektronik, dan terwujudnya pembinaan taman bacaan masyarakat Dharmasraya. Adapun dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.282.667.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi Rp. 1.262.035.800,- (Satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau 98.4 %.

e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terdiri dari belanja perangko prisma, materai, perjalanan Dinas Dalam daerah yang diperuntukkan untuk pegawai PNS dan Non PNS yang diberi tugas menyampaikan surat undangan dari Sekretariat Daerah sampai kepada yang dituju baik itu OPD maupun Kantor Camat se Kabupaten Dharmasraya. Serta pembelian perangko prisma yang dicetak pada saat Hari Raya Idul Fitri yaitu perangko bergambar Bupati dan Wakil Bupati yang digunakan untuk mengirim ucapan Minal Aizin wal faizin pada Tahun 2019 atau 1440 H . Untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 37.700.000,- dengan target pencapaian terkirimnya surat selama satu tahun. Realisasi kegiatan ini sebesar Rp. 37.700.000,- atau sebesar 100 %.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terdiri dari belanja telepon, air dan listrik selama satu tahun yang dilaksanakan rutin setiap bulannya. Belanja Telepon Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah serta TV Kabel, Belanja air di Mess Pemda Dharmasraya di kota Padang. Belanja listrik Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah. Untuk kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.825.600.000,- dengan target pencapaian terbayarnya seluruh tagihan biaya air, listrik dan telepon Kepala / Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat



Daerah selama tahun 2019. Realisasi kegiatan ini sebesar Rp.825.600.000,- atau sebesar 100 %.

3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah dialokasikan untuk biaya premi asuransi kendaraan dinas/operasional Bupati/Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah sebanyak 41 kendaraan dinas roda empat yang asuransikan. Pada tahun 2019 dialokasikan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 199.924.365,- atau sebesar 99,96% untuk unit kendaraan dinas/operasional yang diasuransikan. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah ini dilaksanakan oleh PT. Asuransi Wahana Tata Padang.

4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi perizinan kendaraan jabatan/operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta kendaraan dinas/operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari KIR Mobil Pemda serta Belanja Pajak Kendaraan Bermotor baik Roda 2 , 4 dan 6 yang ada di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 98.250.000,- terdiri dari belanja jasa Kir, Belanja STNK dan Belanja perpanjangan SIM. Realisasi belanja Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional sebesar Rp. 98.250.000 atau sebesar 100%.

5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Untuk tahun anggaran 2019 dianggarkan dana sebesar Rp.3.470.750.000,-. Dana ini dialokasikan untuk honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honorarium jasa pengelola keuangan, honorarium panitia pemeriksa barang dan jasa, uang lembur PNS dan Non PNS, belanja materai perangko serta pembayaran Honorarium Non PNS yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari sopir sebanyak 32 (dua puluh dua) orang, serta honorarium Pegawai



Honorar sebanyak 114 orang. Realisasi belanja pada kegiatan ini sebesar Rp. 3.470.533.000,- sebesar 99,99 %,

6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pada kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor telah dialokasikan dana sebesar Rp. 660.350.000,-. Dana ini dianggarkan untuk penyediaan jasa cleaning service untuk kantor bupati dan gedung auditorium serta untuk membayar pembelian peralatan kebersihan dan pembelian bahan kimia. Realisasi keuangan pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 660.258.471,- atau sebesar 99,98%.

7) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dianggarkan untuk pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan Kerja ,terdiri dari servise AC, Komputer, Laptop serta servise alat studio. Pada tahun 2019 dialokasikan dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 86.000.000,- dengan Realisasi keuangan sebesar Rp. 86.000.000,- atau sebesar 100%.

8) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor Bupati / Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah selama satu tahun. Total anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 169.081.000,- dengan Jumlah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 169.080.500,- atau sebesar 99,99%. Pada di akhir tahun anggaran 2019 masih terdapat persediaan sebesar Rp. 1.979.600,- terdiri dari alat tulis kantor sebesar Rp. 1.829.600,- dan alat kebersihan sebesar Rp. 150.000,-

9) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan belanja cetak seperti cetak buku kwitansi, cetak buku SPPD, cetak buku nota permintaan barang, cetak himbauan/seruan Bupati/Wakil Bupati, fotocopi dan penjiilidan Sekretariat Daerah. Untuk tahun 2019



dianggarkan sebesar Rp.143.350.000,-. Dengan Realisasi keuangan sebesar Rp.143.344.900,- atau sebesar 99,99%.

10) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor merupakan kegiatan yang bertujuan untuk tersedianya jasa perbaikan jaringan/instalasi air, belanja alat listrik dan elektronik, belanja alat listrik elektronik rumah dinas Bupati, Wabup, Setda belanja alat listrik taman kantor serta pengadaan ATC. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,-. Realisasi keuangan kegiatan ini pada tahun 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- atau sebesar 100%.

11) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah merupakan belanja yang bertujuan untuk menyediakan belanja sewa ruang rapat/ pertemuan, sewa penginapan, sewa mobilitas darat, sewa meja/kursi, sewa tenda, belanja alat rumah tangga, belanja sewa sound system serta pengadaan alat rumah tangga. Total dana yang dianggarkan sebesar Rp.1.910.000.000,- Realisasi kegiatan ini sebesar Rp.1.909.958.000,- atau sebesar 99.99%.

12) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya kebutuhan rumah tangga Bupati/Wakil Bupati dan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Terdiri dari belanja pengisian tabung gas, air galon, peralatan Rumah Tangga dan jasa laundry. Total anggaran yang dialokasikan pada kegiatan ini sebesar Rp. 53.250.000,- yang penggunaannya adalah untuk belanja pengisian tabung gas, air galon, belanja peralatan rumah tangga untuk Rumah Dinas Setda, Pengadaan alat rumah tangga untuk Mess Pemda yang di Padang serta jasa laundry. Realisasi belanja untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 58.350.000,- atau sebesar Rp. 100 %.

13) Penyediaan Makanan dan Minuman



Penyediaan makanan dan minuman bertujuan untuk terpenuhinya makan dan minum di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, yang mencakup makan dan minum harian pegawai, makan dan minum harian Bupati dan Wakil Bupati, Makan dan minum harian Sekda, makan dan minum rapat serta makandan minum tamu Bupati/wakil bupati dan Sekretariat Daerah. Total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.999.600.000,- Realisasi belanja makanan dan minuman pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 2.336.174.042,- atau sebesar 99,99%,

14) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Rakor dan konsultasi ke luar Daerah, dianggarkan untuk membiayai perjalanan dinas PNS dan Non PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, baik untuk rapat koordinasi maupun konsultasi. Total anggaran untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.336.174.042,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.336.174.042,- atau sebesar 100%.

15) Penyediaan jasa jaminan kesehatan

Kegiatan jasa kesehatan KDH/WKDH adalah kegiatan yang disediakan untuk Bupati dan Wakil Bupati serta anggota keluarganya yang dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- Realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 100.000.000,- atau 100%.

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional terdiri dari Belanja pengadaan kendaraan Roda 4 terdiri dari kendaraan dinas Sekretaris Daerah, Kendaraan Dinas untuk DPRD, tujuh buah kendaraan dinas operasional serta satu buah kendaraan roda dua. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah Rp. 2.859.582.500,- dengan realisasinya sebesar Rp. 2.858.782.500,- atau sebesar 99,97%.

2) Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor



Pada tahun 2019 total anggaran yang dialokasikan pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 266.400.000,- terdiri dari:

- Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Rp.12.500.000,-
- Belanja peralatan rumah tangga Rp 107.900.000,-
- Belanja material Rp. 25.000.000,-
- Belanja Modal Pengadaan alat Rumah Tangga Rp.121.000.000,-

Pengadaan bahan material untuk penghias ruangan dan peralatan terdiri dari belanja. Plakat lambang daerah, bendera panjang kantor Bupati, bendera panjang rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris daerah, Auditorium, penghias ruang Bupati serta pembelian tiang marawa. Belanja Modal pengadaan karpetdi Mess Pemda serta belanja mesin air dengan realisasinya sebesar Rp. 265.317.000,- atau 99,59%.

3) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan /Dinas

Sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 153.000.000,- terdiri dari:

- Belanja peralatan dan mesin Rp. 55.000.000,-
- Belanja alat pembersih air rumah dinas Rp.35.000.000,-
- Belanja alat pendingin Rp. 16.000.000,-
- Belanja alat rumah tangga (home use) Rp. 41.000.000,-
- Belanja peralatan studio visual Rp.6.000.000,-

Realisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp.151.682.000,- atau 99,13%

4) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor bertujuan supaya terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Antara lain belanja AC Mess Pemda, belanja kulkas, belanja computer , pengadaan laptop, pengadaan peralatan studio, TV serta lensa kamera. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 165.900.000,- dengan realisasi kegiatan pengadaan peralatan



gedung kantor adalah sebesar Rp. 165.300.000 atau sebesar 99,63%/

5) Pengadaan Mobiler

Kegiatan pengadaan mebeleur Tahun 2019 terdiri dari belanja antara lain :

- Belanja kursi rapat Rp. 120.000.000,-
- Belanja modal pengadaan kursi staf Rp. 5.000.000,-
- Belanja Mobiler kesra Rp. 60.000.000,-
- Belanja Mobiler Mess Rp. 35.000.000,-

Total Anggaran pada pengadaan mobiler sebesar Rp.220.000.000,- dengan Realisasi pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 220.000.000,- atau sebesar 100%.

6) Pemeliharaan rutin / Berkala rumah Jabatan

Kegiatan pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan bertujuan untuk tersedianya biaya pemeliharaan rutin rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati Dan Sekretaris Daerah serta sewa rumah Wakil Bupati karena Pemerintah Kabupaten Dharmasraya hanya memiliki satu rumah jabatan yakni untuk Bupati. Total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 210.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 209.960.000,- atau sebesar 99,98%.

7) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sekretariat Daerah. Pada Tahun 2019 bangunan yang dikerjakan adalah membuat Toilet lantai 1 dan Lantai 2. Total Anggaran pada kegiatan ini adalah Rp.778.566.000,- dengan realisasi anggaran 99,84% atau Rp.777.325.400,-.

8) Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan bertujuan supaya mobil jabatan Bupati dan Wakil Bupati dapat terpelihara



dengan baik. Kegiatan ini meliputi belanja jasa service, penggantian suku cadang, penggantian oli dan BBM operasional Bupati dan Wakil Bupati. Total anggaran kegiatan ini pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 379.108.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 379.108.000,- atau sebesar 100% dari total anggaran.

9) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Kegiatan ini dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan perawatan dan biaya BBM kendaraan dinas/operasional Sekretariat Daerah selama tahun anggaran 2019. Total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.236.029.000,- Adapun realisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.235.974.000,- atau sebesar 99.99%.

10) Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobeuler

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobeuler merupakan kegiatan yang bertujuan untuk tercapainya pemeliharaan mobeuler Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya seperti meja, kursi dan lemari selama tahun 2019. Total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- atau sebesar 100%.

11) Pemeliharaan Rutin Berkala Instalasi Listrik, air dan telepon

Kegiatan ini terdiri dari belanja upah kerja baik itu perbaikan listrik, perbaikan telepon dan air. Anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 14.000.000,- dimana realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 14.000.000,- atau 100%.

12) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobeuler

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk tercapainya pemeliharaan mobeuler Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya seperti meja, kursi dan lemari selama tahun 2019. Total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2019



adalah sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- atau sebesar 100%.

g. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kegiatannya adalah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bertujuan untuk tersedianya pakaian dinas KDH/WKDH untuk tahun 2019. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 449.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 449.000.000,- atau sebesar 100 %.

h. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Kegiatan Perayaan Hari-hari Besar Nasional/Daerah

Pada pelaksanaan kegiatan ini yang dilaksanakan yaitu perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Dharmasraya dan perayaan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka mendukung dan memeriahkan. Hasil dari kegiatan ini adalah terkoordinirnya pelaksanaan perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Dharmasraya dan perayaan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Pagu dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.96.752.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 96.662.300,- atau 98%.

i. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1) Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dianggarkan untuk membiaya kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati Dharmasraya ke seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya. Pada kegiatan ini dianggarkan biaya BBM, makan dan minum kegiatan serta belanja perjalanan dinas dalam daerah, dengan total anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp



584.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 584.600.000,- atau 100%.

2) Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 3.424.774.000,- untuk kegiatan ini yang digunakan untuk membiayai biaya perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati Dharmasraya beserta sopir dan ajudan dalam rangka koordinasi, konsultasi, sharing informasi dan tugas kedinasan lainnya dalam perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dan Provinsi serta ke pemerintahan pusat. Adapun realisasi kegiatan ini adalah sebesar Rp.3.424.774.000,- atau sebesar 100%.

3) Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan

Untuk mendukung kegiatan tersebut dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar terjalin komunikasi yang baik antar OPD. Rapat yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan ini membahas segala permasalahan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan ini, disediakan anggaran Rp. 123.416.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 122.614.122,- atau 98%.

4) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH). Disedikan anggaran Rp.1.009.378.500,- tetapi dalam berjalannya kegiatan dalam tahun 2019 banyak terjadi kekurangan anggaran maka untuk menutupi kekurangan anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH), ditambah dari anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur senilai Rp.52.323.400,00 jadi anggaran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala



Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) Rp.1.061.851.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.061.701.900,- atau 99,99%.

j. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

1) Fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Pada kegiatan ini dilaksanakan Fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ke Kecamatan dengan pagu dana yang disediakan anggaran sebesar Rp. 29.057.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.057.500,- atau sebesar 100%.

Permasalahan

- a. Tidak tersedianya anggaran khusus ditingkat kecamatan untuk pengelolaan kegiatan PATEN;
- b. Wilayah kecamatan masih terdapat kesulitan daya tangkap sinyal telekomunikasi.

Solusi

Menganggarkan dana khusus untuk pengembangan dan pemanfaatan untuk pengelolaan PATEN (bidang teknologi informasi, aplikasi PATEN).

k. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1) Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan koordinasi kerjasama peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kegiatan pada program penataan peraturan perundang-undangan untuk memberikan bantuan hukum kepada Perangkat Daerah/Pejabat Tata Usaha Negara dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Dalam rangka membantu aparatur lingkungan pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang memerlukan bantuan hukum. Bantuan hukum yang dimaksud adalah bantuan hukum yang berbentuk preventif (konsultasi hukum, mediasi, penyuluhan hukum dll) dan bantuan hukum yang berbentuk represif berupa pendampingan di pengadilan. Bantuan hukum bertujuan untuk memfasilitasi



penyelesaian permasalahan hukum, khususnya perkara perdata dan Tata Usaha Negara. Jika dibutuhkan Pemerintah Daerah dapat mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN), untuk menjadi kuasa hukum Pemerintah Daerah terhadap permasalahan hukum yang dihadapi daerah sepanjang dikuasakan oleh Bupati kepada JPN. Jika JPN bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemerintah Daerah, maka biaya operasional JPN dalam penanganan perkara dapat dianggarkan dalam Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah daerah bisa juga memakai jasa pihak ketiga dalam penanganan perkara, sepanjang dapat dikuasakan dan anggaran tersedia, maka hal itu dapat dilakukan. Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp. 137.569.450,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.111.101.165,- (Seratus Sebelas Juta Seratus satu Ribu seratus enam puluh lima Rupiah) atau capaian sebesar 80,7%.

2) Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Rencana kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan merupakan kegiatan penyusunan Produk Hukum Daerah, dengan sasaran penyiapan Draft Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Tahun 2019 ditargetkan tersusunnya dan dibahasnya sebanyak 68 Produk Hukum Daerah yang terdiri dari 18 Rancangan Peraturan Daerah dan 50 Peraturan Bupati. Pada tahun 2019 terrealisasikan Fasilitasi Penyusunan 7 (tujuh) Ranperda dan Dibahas dan ditetapkannya 97 (Sembilan puluh tujuh) Peraturan Bupati, Selain Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati diatas, melalui kegiatan ini juga telah Ditetapkannya 478 (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan) Keputusan Bupati Dharmasraya sebagai Dasar Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan. Kegiatan ini dianggarkan dana



sebesar Rp. 275.525.500,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah). Dari anggaran yang dialokasikan pada kegiatan ini, dapat terealisasi sebesar Rp. 275.165.849,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau capaian sebesar 99.9%.

3) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan merupakan kegiatan untuk mensosialisasikan, mempublikasikan serta memberikan Penyuluhan terhadap Peraturan Perundang-undangan kepada Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Untuk Tahun 2019 ada 3 (tiga) Peraturan Daerah yang disosialisasikan, yaitu :

- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Rabies;
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kerjasama Daerah.

Empat Peraturan Daerah dimaksud disosialisasikan kepada Seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang pelaksanaannya di pusatkan di aula lantai 2 kantor bupati Dharmasraya. Untuk Nara sumber dalam Kegiatan ini berasal dari Perangkat Daerah terkait sesuai unit yang membidangi Peraturan Daerah tersebut. Dana yang tersedia dalam rangka pendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 63.709.800,- (Enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.58.834.001,- (lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat satu rupiah) atau capaian sebesar 92,3%.

4) Publikasi Peraturan Perundang-undangan



Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam rangka penyebarluasan Produk Hukum Daerah Kepada Masyarakat. Berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Bupati wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Bupati yang telah diundangkan dalam Berita Daerah. Penyebarluasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan dengan penerbitan buku Lembaran Daerah dan penginformasian melalui website JDIH dengan alamat www.jdi-hukumdharmasrayakab.go.id Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Dharmasraya yang merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. sehingga siapapun yang membutuhkan informasi mengenai Produk hukum dapat dengan mudah mengakses melalui website dimaksud. Seluruh Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Dharmasraya dapat dilihat melalui website JDIH sebagaimana dimaksud diatas. Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dialokasikan Dana sebesar Rp.79.692.100,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua seratus rupiah) dengan sasaran penerbitan Buku Lembaran daerah sebanyak 50 Buku. Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangn dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 dengan serapan dana sebesar Rp.79.154.465,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) atau capaian sebesar 99,3%, sedangkan realisasi Fisik mencapai 100%.

5) Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari merupakan kegiatan untuk meningkatkan koordinasi dan tertib administrasi dalam pembentukan produk hukum nagari agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



lebih tinggi. Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari dilaksanakan dalam bentuk evaluasi dan klarifikasi terhadap Peraturan Nagari yang disampaikan oleh Wali Nagari sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Melalui Kegiatan ini telah dilaksanakan evaluasi dan klarifikasi terhadap 7 (tujuh) Peraturan Nagari (Pernag) yang dibahas oleh Tim sebagai berikut:

- Peraturan Nagari Koto Tinggi tentang Pengelolaan Mobil Siaga dan Ambulance nagari;
- Peraturan Nagari Kurnia Selatan tentang Pendapatan Asli Nagari;
- Peraturan Nagari Sungai Rumbai Timur tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
- Peraturan Nagari Tebing Tinggi tentang Larangan Meracun dan Menyentrum ikan;
- Peraturan Nagari Gunung Selasih tentang Pendapatan Asli Nagari;
- Peraturan Nagari Abai Siat tentang Pengelolaan Pasar Nagari;
- Peraturan Nagari Koto Gadang tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari.

Dana yang tersedia dalam rangka pendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 38.582.500,- (tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.37.618.300,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) atau capaian sebesar 97,5%.

6) Laporan Percepatan Pemberantasan Korupsi, dengan target kegiatan terlaksananya pelaporan harta kekayaan Pejabat yang wajib Lapor.

Kegiatan ini merupakan bentuk kewajiban penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan sebelum, selama dan setelah menjabat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Sebagai Pedoman dalam Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara ini telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman



Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Tindak lanjut dari Peraturan Bupati ini telah ditetapkan Penyelenggara Negara yang Wahib melaporkan Harta Kekayaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/379/KPTS-BUP/2018. Pada Pelaporan LHKPN Tahun Lapor 2019 diperoleh angka Kepatuhan sebesar 100% dengan 106 Wajib Lapor sudah melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id. Disamping angka kepatuhan 100% diperoleh juga angka tepat waktu 100 %. untuk Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya termasuk yang tercepat, karena sudah menyelesaikan pelaporan sebelum tanggal 31 Maret. Alokasi anggaran tahun 2019 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 29.544.500,- (Dua Puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah. Kegiatan ini dapat direalisasikan 100% dalam penyerapan anggaran dan secara fisik kegiatan ini juga dapat terlaksana 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

I. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1) Pembakuan Nama Rupabumi

Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka untuk menciptakan sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota guna memantapkan data dan informasi akurat mengenai nama rupabumi yang baku. Adapun tujuannya adalah menginventarisasi, pendataan nama, arti nama, sejarah nama, posisi koordinat atas unsur buatan. Hasil dari kegiatan ini adalah terinventarisi nama rupabumi unsure buatan di Kabupaten Dharmasraya. Pagu dana sebesar Rp. 31.222.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.169.300,- atau 98%.

Permasalahan

- a. Kegiatan pembakuan nama rupabumi belum begitu dikenal;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam hal pemetaan;
- c. SDM yang masih terbatas terhadap penggunaan dan kelengkapan pemetaan.



Solusi

- a. Lebih giat melakukan sosialisasi;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana seperti GPS dll.
- c. Perlu dilaksanakan diklat atau pelatihan dalam pelaksanaan pemetaan.

2) Penyusunan Analisis Jabatan OPD

Target kegiatannya adalah tersusunnya dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja serta dokumen Standar Kompetensi Jabatan untuk JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 123.954.500,- (seratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan realisasi Rp.123.776.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 99,86%. Melalui kegiatan ini telah disusun dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai evaluasi terhadap dokumen Anjab dan ABK yang telah disusun tahun sebelumnya. Selain itu juga telah disusun Standar Kompetensi Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama). Dokumen evaluasi jabatan telah disampaikan kepada Menteri PANRB untuk divalidasi dan mendapatkan persetujuan yang merupakan salah satu persyaratan dalam pelaksanaan seleksi terbuka (lelang jabatan) JPT Pratama di daerah.

Permasalahan

- a. Belum samanya persepsi masing-masing Perangkat Daerah dalam menyusun informasi jabatan untuk jabatan seluruh jabatan yang ada serta menyusun Standar Kompetensi Jabatan terutama dalam penyusunan kamus kompetensi jabatan;
- b. Tidak konsistennya Perangkat Daerah dalam menyampaikan dokumen informasi jabatan yang telah disusun kepada Sekretariat Tim Penyusun Kabupaten sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Demikian juga



halnya untuk penyampaian Standar Kompetensi Jabatan dari masing-masing Perangkat Daerah.

solusi

solusi yang telah dilakukan dengan sistem jemput bola oleh Tim Kabupaten dengan cara mendatangi Perangkat Daerah yang terkendala dalam melakukan penyusunan informasi jabatan serta Standar Kompetensi Jabatan sehingga seluruh Perangkat Daerah dapat menyerahkan dokumen yang telah disusun kepada Bagian Organisasi sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

3) Penyusunan evaluasi jabatan OPD

Melalui kegiatan penyusunan evaluasi jabatan ini telah dilaksanakan evaluasi terhadap susunan organisasi dan tugas serta fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri/Lembaga yang dikeluarkan setelah Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah diundangkan. Sebanyak 17 (tujuh belas) Peraturan Bupati telah ditetapkan dan diundangkan terkait dengan susunan organisasi. Jumlah alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 143.050.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 142.975.249,- (seratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah) atau sebesar 99,95%.

m. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1) Fasilitas Pembinaan Tugas Umum Pemerintahan dan Penilaian Camat Teladan/Berprestasi

Pada program ini dilaksanakan kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan dan Penilaian Camat Teladan/Berprestasi. Melalui kegiatan ini telah terpilih Camat terbaik yang mewakili Dharmasraya untuk mengikuti kompetensi Camat Tingkat Propinsi. Alokasi Dana untuk kegiatan ini adalah Rp. 39.498.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.433.00 atau 96%.

Permasalahan



Kondisi saat ini Basis Pendidikan camat tidak semuanya berlatarbelakang ilmu pemerintahan.

Solusi

Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap camat sebagai penyelenggara pemerintah dibidang kepomongan bagi camat.

2) Penilaian Nagari Terbaik Bidang Keagamaan dan Ketertiban.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah daerah, TNI dan Polri yang dimaksudkan dalam rangka meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum sehingga terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif di tingkat nagari umumnya di Kabupaten Dharmasraya, terwujudnya kesadaran masyarakat semangat gotong royong, terwujudnya kerjasama 3 pilar yaitu Wali Nagari, Babinsa dan Bhabinkamtibmas (Pemerintah, TNI/Polri). Pagu anggaran sebesar Rp. 27.817.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.817.500,- atau 100%

Permasalahan

- a. untuk tahun 2019 peserta atau utusan 1 (satu) kecamatan diikuti oleh 1 (satu) Wali Nagari;
- b. masih terbatasnya anggaran untuk kegiatan ini terutama untuk para pemenang atau juara.

Solusi

- a. adanya peningkatan peserta sehingga utusan dari kecamatan bisa 2 (dua) Wali Nagari;
- b. untuk meningkatkan motivasi, anggaran untuk hadiah bagi pemenang lebih ditingkatkan.

3) Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan PMD, PPKB, Transmigrasi dan Dukcapil

Pada program dilaksanakan kegiatan Rapat koordinasi, konsultasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan PMD, PPKB, Transmigrasi dan Dukcapil dengan keluaran kegiatan berupa peningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum terutama



dalam fungsi koordinasi fasilitasi supervise dengan pagu dana sebesar Rp. 36.389.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.389.450,- atau 98%.

Permasalahan

Pelaksanaan kegiatan lintas organisasi perangkat daerah ini sebagai fungsi koordinasi dan pemberian supervisi terkait dengan data dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya belum optimal karena organisasi perangkat daerah terkait belum memahami bahwa tugas pokok di Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah salah satunya adanya mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan diorganisasi perangkat daerah terkait untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Dharmasraya sebagai dasar penyusunan kebijakan selanjutnya.

Solusi

Supervisi dengan perangkat daerah terkait akan dioptimalkan salah satunya dengan pembentukan Standart Operate procedure (SOP) yang akan menjabarkan mekanisme pelaksanaan supervisi oleh Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

n. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan,

1) Kegiatan Fasilitasi dan Pelaporan Rencana Aksi HAM

Ada 2 (dua) jenis laporan pada Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan dan Implementasi HAM di Daerah, Pertama Pelaporan RANHAM (Rencana Aksi HAM) yang terbagi pada 4 (empat) priode Pelaporan, Yaitu Pada Bulan April (B04), Bulan Juni (B06), Bulan September B09 dan bulan Desember (B12). Laporan RANHAM ini terdiri dari 4 aksi, aksi pertama tentang Harmonisasi Peraturan Daerah yang mengakomodir hak-hak anak dan Perempuan serta hak penyandang disabilitas, aksi kedua tentang layanan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perempuan dan anak, penyandang disabilitas dan pengaduan lahan, aksi ketiga terkait dengan data sebaran guru



dan analisa dari sebaran tersebut dan terakhir aksi keempat terkait dengan penyediaan ruang menyusui pada gedung Pemerintah dan swasta serta aturan terkait yang mendukung aksi ini. Jenis Laporan Kedua adalah Pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM yang terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Pelaporan dimana masing-masing Indikator mempunyai daftar isian yang harus diisi dan dilengkapi dengan data dukungannya 7 (tujuh) indikator dimaksud adalah:

- Pemenuhan Hak atas Kesehatan;
- Pemenuhan Hak atas Kependudukan;
- Pemenuhan Hak atas Pekerjaan;
- Pemenuhan Hak atas Perempuan dan Anak;
- Pemenuhan Hak atas Pendidikan;
- Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak;
- Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang berkelanjutan.

Untuk Pelaporan RANHAM dikirimkan melalui aplikasi KSP yang dikoordinatori oleh Bappeda sedangkan pelaporan KKP HAM dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat. Bagi Daerah yang pelaporannya baik dan memenuhi kriteria akan mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Presiden Republik Indonesia.

Untuk Capaian RANHAM dan KKP HAM Tahun 2019 lalu Alhamdulillah Kabupaten Dharmasraya kembali mendapatkan Penghargaan Kabupaten Peduli HAM yang penyerahan Piagamnya diserahkan oleh Menteri Hukum dan Ham kepada Wakil Bupati Dharmasraya pada tanggal 11 Desember 2019 di Gedung Merdeka Bandung. Alokasi anggaran tahun 2019 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 78.367.500,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 78.365.926,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) atau sebesar 99,9%.

o. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan



1) Kegiatan koordinasi bidang Perhubungan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan rapat koordinasi pemanfaatan sumber daya alam dengan pagu dana berasal dari dana APBD sebesar Rp. 27.900.700,-. Realisasi pelaksanaan kegiatan tercapai 100%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.27.791.600,- atau 99,61%.

p. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah**1) Kegiatan penyusunan standar biaya umum**

Kegiatan penyusunan standar biaya umum merupakan kegiatan pada program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah yang akan menjadi pedoman belanja SKPD untuk efisiensi pelaksanaan program kegiatan. Adapun Outcome dari kegiatan ini adalah Dokumen Perubahan Standar Belanja Umum (SBU) 2019, Dokumen Perubahan TPP Tahun 2019, Dokumen Standar Belanja Umum (SBU) 2020 dan Dokumen TPP 2020 yang sudah dapat diselesaikan dengan baik. Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dari anggaran yang telah dialokasikan pada kegiatan ini, dapat terealisasi sebesar Rp. 196.546.300,- (Seratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau capaian sebesar 98.27%.

2) Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga.

Kegiatan dilaksanakan dengan melakukam penyusunan standar satuan harga yang merupakan pedoman bagi OPD dan masyarakat sebanyak 1 (satu) dokumen. Pagu dana sebesar Rp.63.639.500,-. Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggran 2019 untuk Pedoman APBD Tahun Anggaran 2020. Realisasi pelaksanaan kegiatan tercapai 53,3 % dengan tersedianya 80 (delapan puluh) Dokumen Standar Satuan Harga Barang dari yang di targetkan Tahun Anggaran 2020. Realisasi Anggaran sebesar Rp.63.244.500,- atau 99,38 %



Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi terkait respon OPD dalam penyampaian kebutuhan barangnya tidak optimal,

Solusi

Untuk mengatasi hal tersebut SSH akan menggunakan aplikasi online ke depannya. Surat Keputusan Dokumen SSH lebih banyak dari yang direncanakan sehingga hasil cetakan/buku dokumen menjadi lebih sedikit untuk menyesuaikan dengan anggaran.

3) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan merupakan kegiatan pada program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis dan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, serta akuntabilitas laporan yang akurat. Outcome dari kegiatan penyusunan dan dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah, dokumen perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah, dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja (Renja) Setda dan Dokumen Lakip/ Sakip Setda yang sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 559.000.000,- (Lima ratus lima puluh Sembilan juta rupiah), dari anggaran yang sudah dialokasikan pada kegiatan ini dapat terealisasi sangat baik yaitu sebesar Rp. 558.727.443,- (Lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) atau capaian sebesar 99,95%.

4) Kegiatan Sistem Informasi dan Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)

Kegiatan Sistem Informasi dan Pembangunan Daerah (SIMBANGDA) merupakan Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah yang akan



menjadi pedoman untuk tersedianya laporan OPD yang akurat dan tepat waktu tentang realisasi kegiatan pembangunan. Outcome dari kegiatan Sistem Informasi dan Pembangunan Daerah ini terlaksananya Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang memadai. Untuk pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 276.587.500,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dari anggaran yang sudah ada pada kegiatan ini dapat terealisasi sebesar Rp. 272.977.925,- (Dua ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) atau capaian sebesar 98,69%.

q. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1) Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar daerah, pihak ketiga dan luar negeri

Pada program dilaksanakan kegiatan fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dengan hasil kegiatan tercapainya MoU dan perjanjian kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga dan Luar Negeri dengan Pagu dana sebesar Rp. 143.690.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 143.650.096,- atau 98%.

Permasalahan

- a. Organisasi perangkat daerah belum memahami fungsi dan pentingnya pelaksanaan kerja sama daerah dalam peningkatan pembangunan di daerah;
- b. Organisasi perangkat daerah belum mempunyai pemahaman bahwa kerja sama daerah harus melalui fasilitasi dari tim koordinasi kerja sama daerah;
- c. Kerja sama daerah dengan kementerian dan/atau lembaga Negara memiliki pedoman umum tersendiri yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerja sama daerah sehingga menyulitkan tim koordinasi kerja sama daerah kabupaten dharmasraya untuk menelaah lebih lanjut terkait dengan substansi hukumnya.

Solusi



-
- a. Untuk meningkatkan pelaksanaan kerja sama daerah serta untuk menjawab beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kerja sama daerah, pada tahun 2020 Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah telah mengajukan rancangan Peraturan Daerah Tentang Kerja Sama Daerah sehingga kedepannya pihak legislatif dan eksekutif dalam hal ini organisasi perangkat daerah dapat memahami secara menyeluruh perihal pelaksanaan kerja sama daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
 - b. Dilakukan sosialisasi perihal kerja sama daerah yang akan difasilitasi oleh kepala Pusat Fasilitas Kerja sama Sekretariat Jendral Kementrian Dalam Negeri dan Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri.
- r. Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik**
- 1) Kegiatan Dialog / Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan, Anggota LSM/ Anggota Masyarakat.**
Kegiatan Dialog / Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan, Anggota LSM/ Anggota Masyarakat. Pada pelaksanaan kegiatan ini disediakan anggaran sebanyak Rp.24.438.000,- yang terealisasi sebesar Rp.124.438.000,- atau 100%.
- s. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan**
- 1) Kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah antar daerah-daerah-daerah dan batas nagari.** Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 136.236.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 136.091.736,- atau 98%.
Permasalahan
Masih diperlukan tindaklanjut penyelesaian batas wilayah antar Kabupaten ataupun dengan Kabupaten tetangga luar provinsi.
Solusi
 - a. Koordinasi insentif dengan Tim Penegasan Batas Provinsi Sumatera Barat, Badan Informasi Geospasial dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
-



-
- b. Pengumpulan data dan dokumen penunjang yang dijadikan dasar dalam penegasan batas daerah.

t. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumberdaya Alam

1) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

Pelaksanaan program kegiatan dilakukan dengan rapat koordinasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA. Kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam dan pemanfaatan SDA yang ada tidak menyimpang dan tidak merusak kelestarian alam serta mengganggu kehidupan sosial masyarakat serta pemanfaatannya diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. sumber pelaksanaan dana berasal dari APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.85.148.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.84.739.600,-.

2) Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan rapat koordinasi pemanfaatan sumber daya alam Bertujuan objek sebanyak kali dengan pagu dana berasal dari dana APBD sebesar Rp. 74.599.000,-. Realisasi pelaksanaan kegiatan tercapai 100 %, dengan realisasi dana sebesar Rp. 74.544.000,- atau 99,93 %.

u. Program Koordinasi Dan Fasilitasi Potensi Daerah

1) Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian

Kegiatan ini berupa rapat koordinasi bersama OPD terkait tentang permasalahan ekonomi yang terjadi, dengan volume sebanyak 30 rapat dalam bentuk rapat koordinasi dan konsultasi, keikutsertaan pameran 1 kali dan 1 Dokumen kelayakan BUMD. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik dan munculnya penanaman modal baru baik yang berasal dari masyarakat langsung atau perusahaan besar. Pagu dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan ini berasal dari dana APBD sebesar Rp 282.275.100,-. Realisasi keuangan sebesar



Rp.280.740.601,- atau 99.46 %, sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %

2) Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Inflasi

Kegiatan inflasi bertujuan untuk pengendalian dan pemantauan terhadap harga bahan pangan khususnya agar tetap dapat terjangkau dan tersedia bagi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dengan survey dan pengendalian harga dengan berkoordinasi dengan stake holder terkait, pengendalian persediaan bahan kebutuhan masyarakat di pasar Wilayah Kab. Dharmasraya. Sumber dana berasal dari APBD Tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 59.501.000 Realisasi keuangan sebesar Rp53.319.400,- atau 89,61%, sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan 100%

v. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

1) Kegiatan Pengawasan Barang-Barang Bersubsidi.

Kegiatan Pengawasan barang-barang bersubsidi dilaksanakan terhadap barang-barang bersubsidi yaitu pupuk bersubsidi, gas LPG tabung 3 kg bersubsidi, dan BBM bersubsidi. Pengendalian dan pengawasan terhadap pupuk bersubsidi dilakukan dengan oleh Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Dharmasraya, Gas LPG tabung 3 Kg dilakukan pengawan terhadap harga dan ketersediaan di lapangan oleh OPD terkait dan bagian Perekonomian, sedangkan untuk BBM bersubsidi pengawasn dilakukan dengan melihat kondisi lapangan jika terjadi kelangkaan BBM maka di ajukan penambahan ke Kementerian ESDM. Pembiayaan Kegiatan ini bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 83.242.500,- Realisasi pelaksanaan kegiatan tercapai 100% dengan realisasi dana sebesar Rp.77.814.482 atau 93.48%.

Permasalahan

Daerah Dharmasraya relatif luas sehingga pengendalian dan pengawan cukup berat dilakukan khususnya daerah-daerah pinggiran atau pedalaman yang cukup jauh terjangkau oleh pangkalan gas LPG tabung 3 Kg dan SPBU sehingga HET belum dapat tercapai.



Solusi

Untuk solusinya pemerintah daerah akan membangun koordinsai dengan pemerintah Nagari untuk membentuk Badan Usaha Milik Nagari untuk penyaluran barang-barang bersubsidi.

w. Program Pengembangan Promosi Dan Kerjasama Investasi**1) Kegiatan Fasilitasi dengan dunia usaha/lembaga (CSR)**

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dengan dunia usaha/lembaga (CSR) dilakukan dengan rapat koordinasi dengan OPD terkait untuk menghimpun kegiatan OPD yang sekiranya dapat dibiayai oleh dana CSR. Anggaran berasal dari APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.36.691.000,- Realisasi dana kegiatan sebesar Rp. 36.691.000,- atau 100%.

Permasalahan

Pengendalian dan monitoring kegiatan realisasi CSR dari perusahaan belum maksimal karena tidak terkoordinirnya kebutuhan kegiatan OPD yang akan di upayakan pendanaannya dari dana CSR.

Solusi

Pengoptimalan Forum TJSLP/CSR akan sangat membantu untuk memaksimalkan pemanfaatan dana CSR untuk Pembangunan Kabupaten Dharmasraya.

x. Program Pelaksanaan Pembangunan Daerah**1) Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN RB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.



Didalam penyusunan Laporan Kinerja, diawali dengan menyusun perjanjian kinerja, Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Jumlah alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah ini sebesar Rp. 204.555.893,- (dua ratus empat juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 204.491.786,- (dua ratus empat juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) atau sebesar 99.97%.

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang dilaporkan tahun 2018 Memperoleh nilai 60,46 atau Predikat B, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya memperoleh nilai 45,67 atau Predikat C. dan pada tahun 2019, pencapaian penilaian terhadap tahun 2017, meningkat menjadi 62.12 dengan prediket B Pencapaian nilai ini tidak terlepas dari komitmen Pimpinan Daerah bersama dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menerapkan system management kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Permasalahan

- a. Masih ada perjanjian kinerja yang masih bersifat lebih mikro;
- b. Masih banyak bahan untuk pelaporan Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang belum selaras terutama RPJMD, Restra, Renja dan LAKIP;



- c. Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah masih belum selaras dengan visi dan misi bupati sehingga masih banyak kegiatan yang kurang efektif dan efisien;
- d. Perencanaan Kinerja mulai dari RPJMD, Renstra, Renja dan penetapan kinerja hingga menjadi DPA belum berorientasi outcome.

Solusi

- a. Perlu penyerasan atas semua laporan pendukung LAKIP;
- b. Penyelarasan indicator kinerja utama dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati;
- c. Casecading mulai dari eselon tertinggi sampai terendah;
- d. Casecading berorientasi hasil.

2) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, pasal 71 ayat (2) bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hasil dari kegiatan ini adanya dokumen tentang gambaran kondisi riil penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di tahun 2019. pagu dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.75.027.000,- dengan realisasi sebesar Rp.21.580.000 atau 98.15%.

Permasalahan

- a. Lambatnya OPD dalam mengantar dan menyerahkan laporan LKPj;
- b. Format penyusunan LKPj tidak sesuai dengan yang seharusnya ;
- c. Keterbatasan SDM dalam hal penyusunan laporan.

Solusi

- a. Penambahan personil atau pegawai;
- d. Perlu dilaksanakan Bimtek atau diklat mengenai penyusunan LKPj bagi organisasi perangkat daerah.



3) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi maksud pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 220.336.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 220.229.888,- atau 99%.

Permasalahan

Lambatnya pengiriman data dari OPD sehingga menghambat penyusunan.

Solusi

Mendatangi langsung OPD yang belum mengirimkan data atau yang telah mengirimkan data tetapi belum lengkap

4) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Pada program dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan pagu dana sebesar Rp. 15.309.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.309.750,- atau 100%.

Permasalahan

Data pelaksanaan kegiatan monitoring dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan belum secara optimal disampaikan kepada aparat pembina pemerintah nagari tingkat Kabupaten Dharmasraya.

Solusi

Akan dilakukan perbaikan data indikator dalam pelaksanaan monitoring penyelenggaraan pemerintahan nagari kedepannya sehingga output akhir pelaksanaan kegiatan yaitu laporan kepada Bupati Dharmasraya akan menggambarkan secara komprehensif terkait pelaksanaan pemerintahan nagari sehingga



kebijakan-kebijakan daerah kedepannya dapat optimal dan berhasil guna.

5) Fasilitas Nagari Binaan Perantau, Kerjasama Rantau

Pada Kegiatan ini dilaksanakan kegiatan Fasilitas Nagari Binaan Perantau dan Kerjasama Rantau dengan pagu anggaran sebesar pagu dana sebesar Rp. 54,995,000- dengan realisasi sebesar Rp. 54.880.658,- atau (99,79%).

Permasalahan

- a. Belum efektifnya kontribusi organisasi perantau pada nagari binaan kerja sama rantau dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam dokumen *master plan* yang telah disusun oleh nagari binaan kerja sama rantau dengan fasilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan tim kerja daerah Kabupaten Dharmasraya;
- b. Tim Kerja Nagari Binaan Kerja Sama Rantau belum optimal dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan program kegiatan yang terdapat dalam master plan pengembangan nagari binaan kerja sama rantau belum terintegrasi dalam dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah terkait.

Solusi

- a. Percepatan pelaksanaan kegiatan nagari binaan kerja sama rantau akan dilakukan dengan optimalisasi sosialisasi kepada para perantau potensial yang telah didata;
- b. Akan dilakukan fasilitas nagari binaan kerja sama rantau kepada perantau potensial yang ada sehingga program kegiatan yang ada dalam master plan pengembangan nagari binaan kerja sama rantau dapat terlaksana;
- c. Tim Kerja Nagari Binaan Kerja Sama Rantau dengan supervise dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan pendampingan yang komprehensif terkait dengan pengembangan nagari binaan kerja sama rantau meliputi pelaksanaan perencanaan, sosialisasi serta pelaksanaan kegiatan;



- d. Masing-masing organisasi perangkat daerah yang terkait dengan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman antara Bupati Dharmasraya dengan Organisasi Perantau akan menyusun program kegiatan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan dalam master plan pengembangan nagari binaan kerja sama rantau.

6) Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Kerjasama Daerah

Pada Kegiatan ini dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Kerjasama Daerah. Pelaksanaan kegiatan ini telah sampai kepada pembahasan Peraturan Daerah tentang kerjasama daerah dengan pagu anggaran sebesar pagu dana sebesar Rp.15.804.000,- dengan realisasi sebesar Rp.15.80.4000,- atau (100%).

y. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembanguna Daerah

1) Bimtek Penyusunan LPPD

Kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur penyusunan LPPD ini dilaksanakan dalam bentuk bimtek yang diikuti oleh pejabat atau staf yang menyusun LPPD dari seluruh OPD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar penyusunan LPPD disusun sesuai format yang tercantum dalam Permendagri. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 33.422.000,- dengan realisasi Rp. 33.422.000,- atau 97%.

z. Program Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1) Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Fisik dan Pembangunan

Kegiatan monitoring dan pelaporan kegiatan fisik dan pembangunan merupakan kegiatan dari Program Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini disesuaikan dengan schedule pembangunan pada beberapa SKPD. Outcome dari kegiatan Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Fisik dan Pembangunan ini dokumen laporan



perkembangan kegiatan fisik dan pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh konsistensi kebijakan dan penganggaran dan pelaksanaannya bagi pencapaian program. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kegiatan Monev Program/Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 dilakukan bersama-sama dengan melibatkan peran aktif penerima manfaat dalam memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama dilapangan dari data-data dan informasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pembangunan dapat disimpulkan:

- Secara umum masing-masing OPD telah berjalan dengan baik, walaupun ada sebagian kecil satuan kerja perangkat daerah belum menyelesaikan pada akhir desember 2019 dan dilanjutkan tahun 2020.

Beberapa hal yang dapat disaran terkait dengan monitoring dan evaluasi berdasarkan data-data dan pengamatan dilapangan:

- Diharapkan agar masing-masing OPD lebih mengoptimalkan pelaksanaan, sehingga sesuai dengan target dan tahapan pekerjaan yang telah ditetapkan;
- Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk percepatan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Pada masing-masing OPD setiap laporan dari pengawas yang ditugaskan lebih optimal penanganannya karena realisasi fisik pekerjaan tidak sesuai RAB;
- Tindak tegas pelaksanaan pekerjaan yang melakukan over kegiatan atau melakukan sub-sub pelaksanaan pekerjaan / borongan pekerjaan;
- Teliti dalam hal penyediaan tenaga kerja dan terukur kompetensinya;



- Seleksi dengan benar bagi rekanan yang melaksanakan pekerjaan melebihi kemampuan yang dimilikinya;
- Pelajari dengan benar kronologis riwayat rekanan dan kemampuannya di akui publik guna peningkatan kualitas suatu pekerjaan lebih baik dimasa mendatang;
- Rekanan /Pelaksana pekerjaan kegiatan kiranya mengikuti aturan sebagaimana yang ditetapkan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk kiranya memasang plank merek , adanya bedeng / kantor pekerja dilapangan;
- Agar kiranya dokumen / photo pekerjaan fisik dibuat kondisi 0 %. 50 %. 100 %, guna memudahkan evaluasi progres fisik pekerjaan;
- Setiap rekanan pelaksana pekerjaan administrasi dibuat secara lengkap guna mengurangi resiko kesalahan suatu pekerjaan yang rencanakan dari awal dan untuk mengantisipasi kesalahan fatal nantinya.

Dana yang tersedia dalam rangka pendukung pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 152.000.000,- (Seratus lima puluh dua juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 151.919.250,- (Seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau capaian sebesar 99.95%.

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1) Pembahasan Ranperda.

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah merupakan kegiatan penyusunan Produk Hukum Daerah dalam hal Peraturan Daerah dengan sasaran penyiapan Draft Rancangan Peraturan Daerah. Pada tahun anggaran 2019 ini Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya yang diusulkan baik oleh Inisiatif DPRD maupun Eksekutif dalam hal ini Dinas terkait ada sekitar 22 Propemperda



dan 1 Ranperda di luar Propemperda. Sedangkan yang dibahas bersama Pemerintah Daerah ada 7 Rancangan Peraturan Daerah di dalam Rapat Paripurna untuk dilakukan persetujuan bersama menjadi Peraturan Daerah. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.6.150.825.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.602.499.894,- atau 91,09%

2) Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan.

Kegiatan ini merupakan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yang terdiri dari :

- Rapat Gabungan Komisi
- Rapat Komisi
- Rapat Paripurna HUT Kabupaten Dharmasraya
- Rapat Paripurna Istimewa
- Rapat Kerja/Hearing
- Rapat Pansus/Bamus/Baleg/Banggar

Dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.423.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 310.532.500,- atau 73,29%

3) Kegiatan Reses.

Kegiatan ini merupakan aspirasi Anggota Dewan ke daerah pemilihannya/ konstituen untuk mencari masukan agar pelaksanaan pembangunan di daerah yang diwakilinya dapat ditampung dalam tahun anggaran yang akan dilaksanakan. Reses ini dilakukan dalam satu tahun anggaran sebanyak 3 kali dengan masa pertemuannya di daerah konstituen 3 – 6 hari dalam satu kali reses. Rendahnya capaiannya kegiatan ini dikarenakan tidak terlaksananya reses sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Total anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 419.627.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 245.226.900,- atau 58,44%

4) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah.

Kegiatan kunjungan kerja ini dianggarkan untuk membiayai biaya perjalanan dinas Anggota DPRD beserta pendamping dari Sekretariat DPRD dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan sharing informasi ke Kabupaten/Kota dalam propinsi dan luar



Provinsi yang bertujuan untuk pembandingan data pembangunan untuk diterapkan/diaplikasikan di daerah. Dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.267.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.076.348.425,- atau 96,95%

5) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Kegiatan ini diharapkan dapat tercapainya Anggota DPRD yang handal dalam bidang fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dituangkan dalam bentuk Workshop, Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Orientasi Anggota DPRD yang baru di ambila sumpah/dilantik . Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2019 ini rata-rata dilakukan oleh para anggota dewan sebanyak 6 kali Bimtek Pendalaman tugas dan 1 Kali Bimtek Orientasi. Kegiatan ini sudah terealisasi 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.460.021.390,- atau 94,71% dari alokasi dana sebesar Rp. 2.597.360.000,-.

6) Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD.

Melalui kegiatan ini diharapkan keluaran berupa terbitnya Kalender tahun 2019, buku agenda, dan Buku Foto Dharmasraya Dalam Lensa. Secara fisik kegiatan ini terealisasi 100%. Produk-produk ini dibagikan ke seluruh SKPD, hingga ke Nagari dan Kab/Kota di Sumbar. Dana awal yang diperuntukan untuk mencetak buku kerja, cetak baliho dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 372.908.688 atau 79,09% dari Rp. 471.498.000,- anggaran yang tersedia.

7) Fasilitasi Pembentukan Staf Ahli.

Kegiatan ini terdiri dari belanja ATK dan belanja penggandaan serta honorarium tenaga ahli fraksi. Tenaga Ahli Fraksi bertugas membantu para Anggota Dewan untuk memberikan pandangan/masukan perihal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedewanan, agar semua hal-hal yang diperlukan Anggota dapat mereka laksanakan, yang honorarium per bulannya berkisar Rp. 3.000.000,-. Dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 219.621.000 dan terealisasi sebesar Rp. 171.000.000 atau 77,86%.



c. Kesatuan Bangsa dan Politik**a. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan****1) Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama (FKUB)**

Kegiatan Rapat Koordinasi Pemeliharaan dan pemberdayaan kerukunan Umat beragama(FKUB) dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kerukunan umat beragama demi terciptanya suasana yang kondusif di kabupaten dharmasraya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2019 di Gedung FKUB Kantor Kemenag Kabupaten Dharmasraya dengan peserta sebanyak 35 Orang terdiri dari Pengurus FKUB, Tokoh Masyarakat, Ormas dan Tokoh Pemuda. Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp25.164.000,-. Adapun dana ini di gunakan untuk Rapat Koordinasi Pemeliharaan dan Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan realisasi sebesar Rp. 20.686.700,- atau 82,2%.

Permasalahan

- a. Pada pelaksanaan kegiatan adalah keterlambatan kehadiran Peserta;
- b. Biaya untuk Keynote Speaker dan Sewa gedung tidak dibayarkan karena Bupati diwakili oleh asisten I dan kegiatan dilaksanakan di Gedung FKUB Kantor Kemenag Kabupaten Dharmasraya.

Solusi

Pada tahun berikut ditegaskan kepada para peserta untuk datang tepat waktu agar kegiatan ini dapat berjalan lebih maksimal.

b. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)**1) Penunjang Koordinasi Forum Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)**

Kegiatan Penunjang Koordinasi Forum Pimpinan Daerah ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan terjaminnya kewaspadaan nasional dan



terjaganya stabilitas daerah. Kegiatan ini juga memfasilitasi anggota Forum komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam konsultasi serta sharing informasi ke luar daerah luar provinsi. Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan koordinasi konsultasi serta sharing informasi untuk meningkatkan Kewaspadaan terhadap Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG). Oleh karena itu anggota FORKOPIMDA mengikuti Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Golden View Hotel J. Bengkong Laut TjBuntung Kota Batam tanggal 27 Februari s.d 1 Maret 2019. Adapun hasil yang didapat pada kegiatan ini adalah terpadunya informasi dalam meningkatkan kewaspadaan dan saling memberikan informasi tentang Gejala Ancaman Hambatan, tantangan dan Gangguan (ATHG) serta terwujudnya silaturahmi anggota FORKOPIMDA.

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp145.719.000,-. Adapun dana ini di gunakan untuk anggota Forkopimda mengikuti Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dengan realisasi sebesar RP. 145.555.073,- atau 99,8%

2) Penyuluhan Anti Narkoba dalam rangka Peringatan Hari HANI

Kegiatan Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba. Dengan adanya penyuluhan ini diharapkan kepada generasi muda memahami bahaya narkoba dan miras sehingga dapat mengurangi penggunaan barang haram tersebut pada generasi muda. Dimana kegiatan ini narasumbernya berasal dari BNNK sawahlunto, Kasat Narkoba Polres Dharmasraya dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.

Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah Mahasiswa dan pelajar SLTA yang terdiri dari 8 Orang utusan per sekolah dan perguruan tinggi sebanyak 140 orang. Aplikasi dari kegiatan ini



adalah menjadikan pemuda yang mempunyai jiwa yang sehat rohani maupun jasmani dan pola hidup yang sehat Bebas narkoba.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 39.101.550,- dengan realisasi keuangan Rp 31.036.500,- atau 79,3%.

3) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi permasalahan yang akan terjadi dan menghimpun data dan kondisi kesatuan daerah sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah di Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2019 di Aula Kantor Kemenag Kabupaten Dharmasraya dengan peserta sebanyak 60 Orang terdiri dari Camat Se- Kab. Dharmasraya, Pimpinan Ormas, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda. Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp28.405.000,-. dana dari kegiatan ini terealisasi sebesar RP. 23.753.600,- (83,6 %)

Permasalahan

- a. Pada pelaksanaan kegiatan permasalahannya adalah keterlambatan kehadiran Peserta.
- b. Biaya untuk Keynote Speaker tidak dibayarkan karena Bupati diwakili oleh asisten I .

Solusi

Pada tahun berikut ditegaskan kepada para peserta untuk datang tepat waktu agar kegiatan ini dapat berjalan lebih maksimal.

4) Pemantauan dan Pengendalian Warga Negara Asing Di Kabupaten Dharmasraya

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya pemetaan keberadaan terhadap orang asing dan organisasi masyarakat asing di kabupaten Dharmasraya. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2019 di Aula Lt.II Kantor Bupati Dharmasraya dengan peserta sebanyak 60 Orang terdiri dari Anggota Tim PORA,



Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda. Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp 20.732.500,-. dana dari kegiatan ini terealisasi sebesar RP. 17.767.000,- atau 85,6%

c. Program Pendidikan Politik Masyarakat dilaksanakan

1) Penyuluhan kepada Masyarakat (Politik)

Penyuluhan kepada Masyarakat (Politik) ini di tujukan Kepada Tokoh Masyarakat, Pimpinan Partai Politik, Ormas dan Generasi muda dilaksanakan bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Partai Politik serta Generasi Muda se Kabupaten Dharmasraya. Adapun hasil dari Kegiatan ini dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan pengetahuan dan informasi kepada seluruh stakeholder masyarakat tentang politik serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu tahun 2019. Hasil kegiatan ini juga dapat mewujudkan sistem politik demokratis yang berbasis pada makin berfungsinya supra dan infra struktur politik secara efektif yang dilandasi oleh menguatnya etika moral dan budaya politik yang beradab.

Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Partai Politik serta Generasi Muda se Kabupaten Dharmasraya yang di ikuti oleh 150 orang peserta. Aplikasi dari kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan pengetahuan dan informasi tentang politik guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menyongsong penyelenggaraan pesta demokrasi yakni Pemilu Serentak 17 April 2019. yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 06 Maret 2019 bertempat di Auditorium Kantor Bupati Kabupaten Dharmasraya. Nara Sumber dari kegiatan ini adalah Kasubid Pendidikan Politik Ditjen Politik dan Pemerintahan umum Kementrian Dalam Negeri, Polda Sumatera Barat dan DANDIM 0310 SS. Jumlah dana untuk Kegiatan ini sebesar Rp 58.837.250,-. Adapun realisasi pada kegiatan ini adalah Rp. 58.667.250 (99,7 %)

2) Bimbingan Teknis Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol Pengurus Partai Politik



Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pembinaan administrasi keuangan kepada partai politik dan pengurus parpol mampu mengelola dana bantuan partai politik yang bersumber dari APBD, sehingga bantuan keuangan partai politik tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara transparan, efektif dan akuntabel dan dapat dilakukan secara benar sesuai aturan dan peraturan yang berlaku.

Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah perwakilan dari 10 partai politik penerima bantuan keuangan yang berjumlah 33 orang peserta. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 22 Agustus 2019 bertempat di Aula lantai II Kantor Bupati KM.2 Pulau Punjung. Dengan Nara Sumber dari Kabid Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Kasubag Evaluasi Pengawasan Inspektorat Kab. Dharmasraya, Nara Sumber cukup profesional di bidang masing-masing dan diskusi antar peserta dengan Nara Sumber sangat memuaskan peserta. Kegiatan ini telah berjalan dengan sukses dan lancar sesuai rencana. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.33.155.000,-. Adapun realisasi anggaran pada kegiatan ini adalah Rp 30.960.500,- (93,3 %)

3) Monitoring dan Pemantauan Kegiatan Pemilu

Monitoring dan Pemantauan Kegiatan Pemilu dilakukan dalam rangka turut mensukseskan kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilu di Kabupaten Dharmasraya agar berjalan secara transparan, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp25.800.759,- dengan realisasi keuangan Rp23.914.350,- (92,6%)

d. Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan penanggulangan bencana daerah, merupakan urusan ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,



Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan rincian sebagai berikut: beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

1) Sumber Dana dan Jumlah Anggaran

a) APBD Kabupaten Dharmasraya

i. Pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Dharmasraya

- Jambore Pengurangan Resiko Bencana Tingkat Provinsi. Alokasi anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.830.000 (Dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Anggaran terealisasi sebesar Rp. 25.830.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Operasional Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana. Alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 46.450.000,- (Empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan anggaran terealisasi sebesar Rp.46.416.500,- (Empat puluh enam juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

ii. Pada DPA Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jumlah dana yang tersedia dalam rangka cepat tanggap darurat tersedia sebesar Rp.76.585.000,- Terhadap korban bencana diberikan bantuan logistik bencana yang berupa: sembako, family Kid, Kid Ware, Peralatan Rumah Tangga, Peralatan Khusus, dll.

iii. Dana Sosial. Dana Belanja Sosial Yang Tidak Direncanakan BKD Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp. 200.000.000,-.

b) Dana Dekonsetrasi. Dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 90.201.522,-.

c) Anggaran Pusat (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)



Jumlah anggaran yang telah diterima Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana penanganan darurat akibat bencana banjir Biaya Penanganan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

d) Dana sumbangan masyarakat dan pihak ketiga

Selama Tahun 2019 ada dana sumbangan dari masyarakat dan pihak ketiga yang langsung diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk Penanggulangan Bencana sebesar Rp.23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

2) Status Bencana

Status bencana yang terjadi pada umumnya bersifat bencana lokal.

3) Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

Antisipasi daerah dalam menghadapi bencana adalah dengan menyusun beberapa program dan kegiatan, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- a) Penulurusan alur sungai, penebangan/pemotongan pohon kayu yang mengarah serta condong ke jalan negara, Propinsi dan Jalan Kabupaten, dengan tujuan untuk pencegahan dini bencana alam;
- b) Pembinaan Kapasitas Relawan Bencana terhadap Relawan Bencana (anggota KSB) dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan anggota KSB dalam menghadapi bencana;
- c) Memperbanyak armada/Unit pemadam kebakaran;
- d) Kerjasama lintas sektoral saat terjadinya bencana;
- e) Menyediakan bahan makanan untuk antisipasi terjadinya bencana serta menyediakan peralatan penanggulangan bencana, tenda, alat masak untuk dapur umum;
- f) Melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas dalam penanggulangan bencana;



4) Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

Berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Dharmasraya bervariasi antara berbukit, bergelombang dan datar dengan variasi ketinggian dari 98,3 M sampai 1.525 M dari permukaan laut, maka jenis-jenis bencana berpotensi terjadi di Kabupaten Dharmasraya adalah :

- a) Banjir;
- b) Longsor;
- c) Angin Putting Beliung;
- d) Kebakaran Pemukiman, hutan dan lahan;
- e) Kekeringan.

e. Kecamatan

Pelaksanaan sub urusan ini adalah dalam bentuk dukungan kegiatan yang dilaksanakan pada 11 kecamatan, yang diarahkan pada 4 program antara lain Program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

Adapun dukungan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Koto Baru**, alokasi anggaran sebesar Rp. 588.962.589,- dengan realisasi pemanfaatan dana sebesar Rp. 585.273.625,- atau sebesar 99,37 %.
- b. Kecamatan Pulau Punjung**, alokasi anggaran sebesar Rp. 551.106.250,- dengan realisasi pemanfaatan dana sebesar Rp. 550.748.042,- atau sebesar 99,94 %.
- c. Kecamatan Sungai Rumbai**, alokasi anggaran sebesar Rp. 474.716.400,- dengan realisasi pemanfaatan dana sebesar Rp. 471.813.013,- atau sebesar 99,38 %.
- d. Kecamatan Sitiung**, alokasi anggaran sebesar Rp. 464.100.000,- dengan realisasi pemanfaatan dana sebesar Rp. 463.793.300,- atau 99,93 %.



-
- e. **Kecamatan Sembilan Koto**, alokasi anggaran sebesar Rp. 467.982.400,- dengan realisasi pemanfaatan dana sebesar Rp. 465.409.006,- atau sebesar 99,45 %.
 - f. **Kecamatan Timpeh**, alokasi anggaran sebesar Rp. 479.517.950,- dengan realisasi pemanfaatan dana sebesar Rp. 438.724.250,- atau sebesar 91.49%.
 - g. **Kecamatan Koto Salak**, alokasi anggaran sebesar Rp. 590.704.100,- dengan realisasi pemanfaatan dana sebesar Rp. 590.478.007,- atau sebesar 99,96%.
 - h. **Kecamatan Tiumang**, alokasi anggaran sebesar Rp. 562.787.250,- dengan realisasi pemanfaatan dana sebesar Rp. 556.191.667,- atau sebesar 97,7 %
 - i. **Kecamatan Padang Laweh**, alokasi anggaran sebesar Rp. 453.808.871,- dengan realisasi pemanfaatan dana sebesar Rp. 452.085.265,- atau sebesar 99.62 %
 - j. **Kecamatan Asam Jujuhan**, alokasi anggaran sebesar Rp. 520,200,500,- dengan realisasi pemanfaatan dana sebesar Rp. 517,815,579 , - atau sebesar 99.5 %.
 - k. **Kecamatan Koto Besar**, alokasi anggaran sebesar Rp. 564.225.844,- dengan realisasi pemanfaatan dana sebesar Rp. 563.187.344,- atau sebesar 99.82 %

f. Pengawasan

Pelaksanaan sub urusan pengawasan internal merupakan fungsi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Pemeriksaan Rutin/Operasional

Laporan hasil pemeriksaan operasional adalah output dari penugasan Audit Operasional atas pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019. Target sebesar 64 laporan dalam Program Kerja Pengawasan



Tahunan (PKPT) yang terdiri dari Badan/Dinas/Kantor/RSUD/Kecamatan, Nagari, UPT Pendidikan dan sekolah-sekolah namun yang terealisasi hanya sebanyak 45 laporan. Hal ini merupakan pengalihan tugas dari operasional ke reviu sehingga PKPT Tahun 2019 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 498.985.750,- dengan realisasi keuangan Rp.496.992.750,- atau 99,60%.

Permasalahan

Realisasi Pemeriksaan Operasional Inspektorat hanya berkisar 70,31% disebabkan karena adanya pengalihan kegiatan dari pemeriksaan rutin ke kegiatan reviu yang harus dilaksanakan sehingga PKPT Tahun 2019 direvisi kembali.

Solusi

Perlunya dilakukan perubahan PKPT Tahun 2019 sehingga pencapaian target pemeriksaan operasional dapat dirasionalisasikan sesuai dengan waktu dan anggaran yang tersedia.

2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Kasus

Merupakan kegiatan untuk menangani pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah baik yang langsung ke Inspektorat maupun melalui media masa atau pun melalui instansi lain, yang penanganannya sudah dilimpahkan oleh pimpinan ke Inspektorat. Pada tahun 2019 penanganan kasus yang telah dituntaskan adalah sebanyak 4 kasus. Penyerapan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.15.070.000,- dari anggaran sebesar Rp.18.120.000,- atau 83,17%

Permasalahan

Kinerja Inspektorat akan semakin baik apabila pengaduan yang diterima atau sejenisnya memiliki jumlah/intensitas pengaduan yang semakin menurun.

Solusi



Dalam PKPT Tahun 2019, penanganan kasus pengaduan direncanakan secara lumpsum sehingga tidak mempengaruhi laporan akhir secara signifikan.

3) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 ditargetkan sebanyak 4 kali/tahun dan telah direalisasikan sebanyak 4 kali/tahun. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dituangkan dan dilaporkan dalam Laporan Triwulan yang mencakup seluruh kegiatan pengawasan selama Tahun 2019. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.20.824.600,- dengan realisasi keuangan Rp.20.347.750,- atau 97,71%

Permasalahan

Masih rendahnya capaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kesadaran masing-masing pegawai dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan.

Solusi

Telah diterbitkannya kebijakan untuk memberikan rekomendasi bebas temuan bagi ASN yang melakukan pengurusan kenaikan pangkat, SKPP Gaji, pemberian penghargaan, pensiun bahkan pindah/mutasi tugas ke daerah lain.

4) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dan Gelar Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya menargetkan sebanyak 3 Kali/Tahun. Pada Tahun 2019 telah direalisasikan sebanyak 3 kali yakni pada tanggal 12 September 2019 Kegiatan Rakorwas dan Desember 2019 Kegiatan Rakorwas sekaligus Gelar Pengawasan. Penyerapan anggaran bagi kegiatan ini adalah sebesar Rp.124.240.130,- dari yang direncanakan sebesar Rp.124.725.000,- atau berkisar 99,61%.



Secara keseluruhan kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak bagi penyelesaian temuan hasil pengawasan Inspektorat.

5) Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pemeriksaan Khusus dilakukan apabila adanya indikasi kerugian Negara/Daerah. Pada tahun 2019 telah dilaporkan adanya indikasi kerugian Negara/Daerah sebanyak 3 khusus dan telah ditindaklanjuti. Pada kegiatan ini menyerap dana APBD sebesar Rp. 20.209.000,- dari anggaran sebesar Rp. 23.915.000,- atau 84,50%. Realisasi keuangan tersebut setidaknya memberikan gambaran bahwa indikasi kerugian negara/daerah sangat kecil di Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya dan ini membuktikan kinerja yang baik dari Inspektorat dalam mengawasi pemerintahan.

6) Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LKPD, RKPD Perubahan 2019, Reviu Renja, Reviu RKA dan Reviu RKA Perubahan telah menghasilkan 36 Laporan. Pada PKPT Tahun 2019 direncanakan pelaksanaan reviu terhadap 9 obyek reviu namun realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dilatar belakangi karena adanya kewajiban APIP untuk melakukan reviu terhadap Dana DAK Fisik yang dilaksanakan 3 kali/tahun terhadap perangkat Daerah penerima Dana DAK. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 167.300.000,- dengan realisasi keuangan Rp 162.134.250,- (96,91%)

Permasalahan

Khususnya kegiatan reviu RKA Tahun 2020 belum maksimal dilaksanakan karena sampai berakhir penugasan reviu dokumen KUA dan PPAS Tahun 2020 yang valid tidak disampaikan kepada APIP oleh Perangkat Daerah terkait.

Solusi

Perlu pembenahan dalam penyusunan APBD secara keseluruhan terutama dalam penetapan KUA PPAS dan kepada



perangkat daerah terkait diharapkan dapat memberikan dokumen yang akan direviu diserahkan tepat waktu ke Inspektorat.

7) Monitoring Program dan Kegiatan SKPD

Monitoring Program dan Kegiatan SKPD yang menjadi indikator kinerja adalah output dari penugasan yaitu : Monitoring Program dan Kegiatan SKPD tahun 2019 menargetkan sebanyak 22 laporan, dengan realisasi sebanyak 22 laporan. Yang terdiri dari 11 laporan monitoring program kegiatan pada Nagari dan Kecamatan, 5 laporan pada Perangkat Daerah dan 6 Laporan pada Monitoring penutupan Kas. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Inspektorat telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 63.620.000,- dengan realisasi keuangan Rp 61.446.750,- (96,58%)

Permasalahan

Monitoring program kegiatan tidak dapat terlaksana ke seluruh program kegiatan Perangkat Daerah dan Nagari karena keterbatasan waktu dan Sumber Daya Manusia.

Solusi

Perlunya penambahan dana dan SDM yang memadai untuk melaksanakan monitoring program kegiatan Perangkat Daerah dan Nagari.

8) Pelaksanaan Gratifikasi

Selama tahun 2019 Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Dharmasraya yang sekretariatnya berada pada Inspektorat tidak ada menerima laporan gratifikasi. Untuk setiap bulannya UPG telah membuat laporan nihil penanganan laporan gratifikasi dan sudah dikirimkan ke KPK RI. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 25.198.000,- dengan realisasi keuangan Rp 23.937.829,- (94,99%)

Permasalahan



Masih rendahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap “apa itu gratifikasi” sehingga tidak adanya laporan gratifikasi yang masuk ke Inspektorat.

Solusi

Perlunya peningkatan intensitas pelaksanaan sosialisasi tentang gratifikasi bagi peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap gratifikasi.

9) RAD PPK

Kegiatan Rencana Aksi Daerah atas Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang ditargetkan pada tahun 2019 sebanyak 4 Aksi, telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan ini merupakan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan beberapa perangkat daerah terkait. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 30.893.000,- dengan realisasi keuangan Rp 30.614.750,- (99,10%)

Permasalahan

Hasil evaluasi berkala yang dilakukan terhadap RADPPK Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 belum menunjukkan hasil yang baik karena masih terdapat penilaian terhadap bagian-bagiannya yang belum hijau terutama pada Bidang Perencanaan dan Penganggaran dan Optimalisasi Pendapatan Daerah. Kondisi ini disebabkan masih kurangnya data yang disampaikan.

Solusi

Perlu peningkatan intensitas forum komunikasi untuk selalu mengingatkan perangkat daerah terkait agar mempersiapkan dokumen yang diminta pada RAD PPK sekaligus melengkapi dokumen pendukungnya.

10) SPIP

Kegiatan SPIP dengan indikator Tingkat Kematangan Implementasi SPIP didukung oleh kegiatan SPIP pada tahun 2018 Kabupaten Dharmasraya mencapai nilai 3,010. Pada tahun 2019 realisasi anggaran sebesar Rp50.291.400,- dari



perencanaan penganggaran sebesar Rp50.775.000,- atau berkisar 99,05%.

Permasalahan

Pada tahun 2018 sudah mulai dilaksanakan penilaian maturitas SPIP berbasis elektronik, program ini diprioritaskan bagi Pemerintah Daerah yang pada tahun 2017 belum mencapai Level 3. Kabupaten Dharmasraya telah mencapai level 3 sehingga pada tahun 2019 belum dilaksanakan penilaian SPIP berbasis elektronik.

Solusi

Inspektorat akan memfasilitasi dan telah mempersiapkan regulasi penilaian SPIP berbasis elektronik pada tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

11) Kapabilitas APIP

Kegiatan ini dengan indikator Level kapabilitas APIP didukung oleh kegiatan Kapabilitas APIP. Pada tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Dharmasraya telah memperoleh level 3 DC (Level 3 Dengan Catatan) dan belum ada perkembangan lebih lanjut terhadap penilaian kapabilitas APIP. Penyerapan dana tahun 2019 adalah sebesar Rp. 40.653.500,- dari ketersediaan dana sebesar Rp. 41.155.000,- atau berkisar 98,78%.

Masalah

Kapabilitas APIP Kabupaten Dharmasraya belum mencapai level 3 penuh (masih 3 DC) karena masih adanya kekurangan dokumen pada PPBR dan Lapotan Audit Kinerja.

Solusi

Perlu pelaksanaan pelatihan dan penambahan wawasan terhadap aparatur pemeriksa Inspektorat Kabupaten Dharmasraya bagi pelaksanaan audit kinerja sekaligus penyempurnaan PPBR.

12) Saber Pungli

Sapu Bersih Pungutan Liar merupakan kegiatan koordinasi dengan penegak hukum lainnya (Kepolisian dan Kejaksaan). Pada tahun 2019 kegiatan ini menyerap dana APBD sebesar



Rp.56.048.250,- dari perencanaan penganggaran sebesar Rp.58.704.000,- atau berkisar 95,48%.

g. Pengadaan Barang dan Jasa

Pada sub urusan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dengan berbagai program dan kegiatan yaitu :

a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1) Kegiatan Operasional LPSE

Kegiatan Operasional LPSE merupakan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terpadu dengan sistem Layanan Pengadaan Layanan Secara Elektronik (LPSE)/ e-Procurement. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.132.330.500,- dengan realisasi sebesar Rp.130.644.900,- atau (98,73%). Adapun Outcome dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan Tender secara elektronik.

Permasalahan

- a. Masih kurangnya pemahaman SKPD tentang pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Kurangnya koordinasi SKPD yang memiliki Paket Pekerjaan yang akan ditenderkan dg Unit Layanan Pengadaan (ULP).
- c. tidak pahamnya PPK / KPA untuk melelang paket pekerjaan karena tidak membuat KAK dan penganggaran hanya berdasarkan perkiraan/estimasi, sehingga paket yang telah dianggarkan dalam RUP terkadang harus menunggu APBD perubahan untuk pelaksanaannya, karena tidak pas dalam penganggaran.

Solusi

Memberikan pelatihan kepada tenaga yang mengentrikan RUP, memberikan pelatihan kepada POKJA ULP maupun PA/KPA/PPK untuk lebih memahami cara melelang paket pekerjaan yg dimiliki di SKPD masing-masing.



2) Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan SPSE

Kegiatan ini merupakan kegiatan maintenance/pemeliharaan sistem, peralatan tambahan yang dibutuhkan, untuk keamanan backup data, update sistem jaringan SPSE, penambahan peralatan server, instalasi jaringan. Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.158.500.000,- dengan realisasi Rp. 156.146.697,- (98.52 %).

Permasalahan

- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk peningkatan kapasitas jaringan internet.
- b. Kurang nya SDM yang memiliki background di bidang Teknologi Informasi.

Solusi

- a. Agar Pemerintah Daerah menambah Anggaran untuk peningkatan Kapasitas Jaringan Internet di Kab. Dharmasraya.
- b. Pemerintah Daerah agar menambah porsi Rekrutmen CPNS yang memiliki latar belakang pendidikan Komputer dan Teknologi Informasi (TI).

3) Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE

Merupakan kegiatan peningkatan kualitas SDM Sekretariat Pengelola LPSE, setiap ada aplikasi terbaru, maka anggota sekretariat pengelola layanan harus lebih dahulu mengetahui aplikasi, karena akan dipakai oleh user, sehingga kalau user mengalami kesulitan maka anggota sekretariat pengelola sudah mengetahui solusinya. Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.96.152.000,- dengan realisasi Rp.94.893.754,- atau 98,69 %.

Permasalahan

Masih kurangnya kurangnya kualitas SDM pengelola LPSE dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Solusi



Agar dilakukan Pelatihan dan Bimbingan Teknis terkait dengan tugas dan fungsi pengelola LPSE serta pengetahuan terhadap regulasi terbaru tentang SPSE.

4) Peningkatan SDM Penyelenggara dan Penyedia Barang/Jasa

Kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggara penyedia barang/jasa Pemerintah. Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.134.327.000,- dengan realisasi Rp. 131.318.600,- atau 97.78%.

Permasalahan

Masih kurangnya pengetahuan penyedia tentang internet, email dan aplikasi SPSE, dan ditingkat penyelenggara diperlukan update ilmu pengetahuan setiap keluarnya peraturan terbaru yang diberlakukan untuk proses pengadaan barang/jasa.

Solusi

Mengikuti pelatihan Pengadaan barang/jasa Pemerintah sehingga meningkatnya kualitas penyelenggara dan mengadakan pelatihan aplikasi untuk penyedia.

5) Operasional ULP

Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah bagian dari Bidang Pengadaan Barang/Jasa yang didalamnya terdiri dari Sekretariat ULP dan Pokja (Kelompok Kerja) ULP yang merupakan panitia penyelenggara tender/lelang BP2MPBJ. Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.329.206.500,- dengan realisasi Rp. 306.280.424,- (93.04%).

Permasalahan

Anggota Pokja ULP yang terdiri dari beberapa orang Staf yang memiliki kompetensi dibidang Pengadaan Barang/Jasa dibuktikan dengan memiliki sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa yang dikelompokkan dalam Pokja ULP oleh ketua ULP. Anggota Pokja ini berada di SKPD yang berbeda-beda sehingga untuk koordinasi membutuhkan waktu khusus untuk koordinasi masalah jadwal lelang, anwidzing, pembukaan penawaran,



evaluasi penawaran sampai penetapan pemenang. Tugas tambahan ini sama pentingnya dan sama butuh waktu dalam pengerjaannya dan juga butuh biaya operasional.

Solusi

Untuk menjadikan Pokja ULP agar tidak “over kapasitas” dalam mengerjakan tugasnya, Maka menjadikan Pokja ULP menjadi staf Fungsional di JFT Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah solusi terbaik.

Memberikan Insentif yang layak untuk pekerjaan yang “over kapasitas” tersebut.

6) Penanganan Permasalahan PBJ

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memfasilitasi jika terdapat masalah dalam proses pengadaan Barang/Jasa. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.54.717.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 54.242.900,- (99.13 %).

Pemasalahan

Banyak permasalahan dalam proses lelang yang mengakibatkan POKJA ULP dipanggil oleh APH/TIPIKOR/kejaksaan, tetapi anggaran untuk kegiatan ini sangat terbatas.

Solusi

POKJA seharusnya juga memiliki pengacara untuk perlindungan hukum jika terdapat pengadaan barang dan jasa yang bermasalah. Mengalokasikan anggaran yang proporsional untuk kegiatan dimaksud

7) Performance Management monitoring ULP

Kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan tender terpadu. Mempercepat proses pengadaan barang dan Jasa. Melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD agar tepat waktu dalam mengentrikan data ke Sistem Rencana Umum Pengadaan. Memfasilitasi Pokja ULP dalam menerima data RUP dan Paket Lelang yang akan diproses secara elektronik. Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.14.375.000,- dengan realisasi Rp. 14.056.100,- (97.76%).

Permasalahan



Minimnya anggaran pada kegiatan performance management monitoring ULP.

Solusi

Agar anggaran untuk kegiatan performance management monitoring ULP perlu ditingkatkan.

8) Koordinasi pembinaan, peningkatan, kelembagaan bidang PBJ

Kegiatan ini merupakan pelatihan aplikasi LPSE kepada penyedia untuk lebih memahami penggunaan aplikasi SPSE. Aplikasi SPSE mengalami pembaharuan setiap tahunnya, sehingga penyedia, Pokja Ulp, PPK, maupun Pejabat Pengadaan harus belajar dalam pengoperasiannya. Alokasi dana sebesar Rp.130.329.000,- dan terealisasi sebesar Rp.129.856.322,- (99.59 %).

Permasalahan

Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang selalu mengalami perubahan/ up grade.

Solusi

Masih perlunya peningkatan serta pembinaan terhadap kelembagaan PBJ dalam memahami perubahan/upgrade aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

B. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DI TETAPKAN

C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUM NYA



BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

T

ugas Pembantuan dan Penugasan merupakan tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, terdapat program dan kegiatannya dalam bentuk tugas pembantuan dan penugasan, yakni sebagai berikut:

I. Bidang Tenaga Kerja

a) Dasar Hukum

- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: KEP.285/NAKER/SJ/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Perubahan ke Enam atas lampiran keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 623 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Jasa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Pusat pada UPT Pusat Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2017;
- Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-026.13.2.089378/2018, tanggal 5 Desember 2017 dan Petunjuk Operasional Kegiatan Balai Latihan Kerja Padang Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2017;

b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI.

c) Perangkat Daerah yang Melaksanakan

UPTD BLK Sungai Dareh (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja).

d) Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

**BLK DharmaSraya / Sungai Dareh**

No	Kapasitas BLK				Realisasi Paket Pelatihan 2019 (s.d Sept 2019)			
	Kejuruan	Program	Paket	Orang	Kejuruan	Program	Paket	Orang
1.	Otomotif	Mekanik Junior Sepeda Motor	5 Pkt	80 Orang	Otomotif	Mekanik junior sepeda motor	8 Paket	128 orang
2.	TIK	Operator Basic Office	10 Pkt	1608 Orang	TIK	Operator Basic Office	11 Paket	176 orang
3.		Perakitan Komputer	2 Paket	32 Orang		Perakitan Komputer	6 Paket	96 Orang
4.	Garmen	Penjahit Pakaian	10 Pkt	160 Orang	Garmen	Penjahit Pakaian	21 Paket	336 orang
5.	Las	Las SMAW 3G	5 Pkt	80 Orang	LAS	Las SMAW 3G	4 Paket	64 Orang
6.		Cad 2D	2 Pkt	32 Orang		Cad 2D	2 Pkt	32 Orang
7.	Manufaktur	Bubut	5 Pkt	80 Orang		Bubut	4 Paket	64 Orang
8.	Elektronika	Teknisi Audio dan HP	5 Pkt	80 Orang	Elektronika	Teknisi Audio dan HP	6 Paket	96 Orang
9.	Listrik	Instalasi Listrik	5 Pkt	64 Orang	Listrik	Instalasi Listrik	6 Paket	96 Orang
10.	Perhotelan	Tata Boga	5 Pkt	64 Orang	Tata Boga	Tata Boga	6 Paket	96 Orang
11.	Bangunan	Gambar Bangunan	2 Pkt	32 Orang	Bangunan	Cad 3D	2 Pkt	32 Orang
	Jumlah						76 Paket	1.216 Orang

e) Sumber dan Jumlah Anggaran

Kegiatan Pelatihan berbasis kompetensi di BLK DharmaSraya ini bersumber dari dana APBN.

f) Permasalahan dan Solusi

Untuk Peralatan tahun 2019 ini BLK Sungai Dareh sudah mendapatkan 1 paket bantuan peralatan kejuruan menjahit,. UPTD BLK juga mengusulkan rehabilitasi workshop dan sarana lainnya. Karena area lokasi di DharmaSraya cukup luas, maka peserta harus di asramakan, karena itu dibutuhkan asrama yang memadai, akomodasi/konsumsi untuk peserta yang di asramakan. UPTD BLK juga kekurangan ruangan teori dan workshop untuk pelaksanaan pelatihan, jadi direncanakan pada tahun 2020, akan menambah ruangan untuk pelaksanaan teori dan rehab workshop.

II. Bidang Pertanian



1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

a) Dasar Hukum

SP DIPA 018.08.4.089137/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat. (Satker Distanhorbun).

c) Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

d) Program dan Kegiatan

Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Pelaksanaan: Alokasi 400 Ha terdiri dari 18 Kelompok Tani tersebar di 7 Kecamatan. Pekerjaan telah selesai 100% dan telah diserahterimakan ke Kelompok Tani.

e) Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah dana dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 480.000.000,-

f) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- Keterbatasan dana bantuan mengakibatkan kurang optimalnya penanganan masalah jaringan irigasi secara menyeluruh;
- Tidak tersedianya dana operasional dan dampingan terutama dalam hal desain perencanaan sehingga kegiatan rehab jaringan sangat tergantung kepada DPA Dampingan Irigasi Pertanian dari APBD Kabupaten Dharmasraya;
- Kelompok tani masih kesulitan dalam hal teknis pekerjaan konstruksi dan penyusunan pelaporan pemakaian dana.

Solusi:



- Mengganti pola pendanaan kegiatan dengan sistem paket pekerjaan, bukan bergantung kepada luasan area sawah kelompok tani;
- Tersedianya dana operasional dan dampingan terutama dalam hal desain perencanaan kegiatan rehab jaringan pada DPA Dampingan Irigasi Pertanian dari APBD Kabupaten Dharmasraya;
- Tim teknis agar lebih intens dan solutif terhadap persoalan teknis di lapangan.

2. PENGEMBANGAN OBOR PANGAN LESTARI (OPAL) SATKER (08):

a) Dasar Hukum

SP DIPA 018.08.4.089137/2019 Tanggal 5 Desember 2018

b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (Satker Distanhorbun / 08)

c) Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

d) Program dan Kegiatan

Program : Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatan : Pengembangan Obor Pangan Lestari (OPAL) Satker (08)

Pelaksanaan : Kegiatan berupa instalasi aquaponic dengan acc, pagar, tiang rambatan, jalan beton dan pengadaan bibit beserta kelengkapannya.

e) Sumber dan Jumlah Anggaran adalah Rp. 50.000.000,-

f) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Belum adanya follow Up terkait operasional dan pemeliharaan sehingga menyulitkan keberlangsungan OPAL di tahun berikutnya.

Solusi

Perlunya dana operasional dan pemeliharaan tahunan OPAL.

3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, Pengelolaan Keuangan



a) Dasar Hukum

SP DIPA 018.08.4.089137/2019 Tanggal 5 Desember 2018

b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat. Satker Distanhorbun (08)

c) Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

d) Program dan Kegiatan

Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatan : Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya: Pengelolaan Keuangan

e) Sumber dan Jumlah Anggaran adalah Rp. 100.000.000,-

f) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

Terlalu sering dilakukan perubahan/ revisi POK sehingga pengelola mengalami keraguan dalam pelaksanaan kegiatan

Solusi :

Agar POK yang dijadikan acuan kegiatan sudah fix untuk direalisasikan

4. PENYALURAN ALSINTAN

a) Dasar Hukum

SP DIPA 018.08.4.089137/2019 Tanggal 5 Desember 2018

b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat (Satker Distanhorbun / 08).

c) Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

d) Program dan Kegiatan

Program:



Kegiatan: pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian

e) Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran : Rp. 291.300.000,-

Realisasi : Rp. 290.595.800,-

Realisasi kegiatan: Terlaksana secara baik

- Target:
 1. Menyediakan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan untuk diserahkan kepada masyarakat sebagai berikut:
 1. Traktor Roda 2 : 5 Unit
 2. Pompa Air : 5 Unit
 2. Menyediakan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Hortikultura untuk diserahkan kepada masyarakat sebagai berikut:
Cultivator : 2 Unit
- Capaian Output
Dari Dana APBN sebesar Rp. 291.300.000,- terealisasi sebanyak Rp. 290.595.800,-
- Terlaksananya penyerahan / penyaluran bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dari Pemerintah kepada Kelompok Tani/Gapoktan.
- Terlaksananya monitoring, pengawasan dan pengembangan Alsintan.
- Outcome :
- Bertambahnya jumlah Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) baik yang ada di Kelompok Tani maupun Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
- Bertambahnya jumlah Alsintan di Kabupaten Dharmasraya melalui dana APBN:

No	Jenis Alsintan	Jumlah (unit)	Keterangan
1	Traktor Roda 2	5	APBN
2	Traktor Roda 4	2	APBN
3	Pompa Air	9	APBN
4	Cultivator	4	APBN
5	Hand Sprayer	38	APBN
6	Corn Planter	5	APBN



7	Combine Besar	3	APBN
8	Corn Seller	17	APBN
9	Power Thresher	3	APBN

- Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP), Produktivitas dan Produksi. (Alsintan mempercepat proses berusaha tani)
- Meningkatnya produksi berdampak pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.

f) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- Secara umum, permasalahan yang menyangkut pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian di Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2019, ini tidak ada. Alsintan yang sudah diserahkan kepada Kelompok Tani sudah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- Kelompok Tani masih banyak memerlukan Alsintan khususnya Traktor Roda 4 dan Mesin Panen (Combine Harvester).

Solusi:

- Penambahan Traktor Roda 4 dan Combine Harvester untuk Brigade Alsintan Kabupaten Dharmasraya.

5. Fasilitas Pupuk dan Pestisida

a) Dasar Hukum

SP DIPA 018.08.4.089137/2019 Tanggal 5 Desember 2018

b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat (Satker Distanshorbun / 08).

c) Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

d) Program dan Kegiatan



Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian.

Kegiatan : Fasilitasi pupuk dan pestisida.

e) Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran : Rp. 146.600.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 146.525.000,-

Realisasi kegiatan : Terlaksana secara baik

Target:

Alokasi Pupuk Bersubsidi yang meliputi Urea, SP-36, ZA, NPK Phonska dan Petroganik. RDKK yang sudah dikonversikan ke e-RDKK Tahun 2019 dan 2020. Pengawasan pada penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi.

Capaian Output:

Dari Dana APBN sebesar Rp. 291.300.000,- terealisasi sebanyak Rp. 290.595.800,-

- Terlaksananya pengawasan penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi.
- Terlaksananya pengentryan dan pengaploudan e-RDKK Tahun 2019 dan 2020 untuk dikeluarkannya Kartu Tani.

Outcome :

- Terserapnya alokasi pupuk bersubsidi oleh Distributor pupuk bersubsidi, Kios Pengecer Resmi pupuk bersubsidi dan petani sesuai dengan RDKK.
- Lancarnya pendistribusian pupuk bersubsidi dari Produsen sampai Petani.
- Terjaminnya ketersediaan pupuk bersubsidi.
- Bertambahnya alokasi pupuk bersubsidi. (Bertambahnya alokasi pupuk bersubsidi merupakan realokasi dari kabupaten lain yang penyerapannya dibawah target).
- Meningkatnya Produktivitas dan Produksi.
- Meningkatnya produksi berdampak pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.
- Tersalurnya Kartu Tani sebagai alat transaksi pembelian pupuk bersubsidi pada Tahun 2020.



f) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Terjadinya kekurangan pupuk bersubsidi pada beberapa Kecamatan karena alokasinya sudah habis.
- Pemberitahuan bahwa sisa pupuk bersubsidi bulan Desember Tahun 2018 yang masih berada di Kios Pengecer dan belum disalurkan kepada petani, dijadikan perhitungan penebusan ditahun 2019, baru disampaikan pada bulan Oktober Tahun 2019, sehingga mengurangi sisa penebusan. Akibatnya mulai bulan September alokasi pupuk bersubsidi menipis dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sampai bulan Desember.
- Sulitnya mendapatkan komponen-komponen data petani untuk keperluan pengentryan dan pengaploudan data RDKK, contohnya data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Solusi

- Diadakan realokasi pupuk bersubsidi antar kecamatan, kecamatan yang serapan pupuk bersubsidinya rendah dan masih banyak sisa maka sisanya direlokasikan kepada kecamatan yang kekurangan pupuk bersubsidi.
- Pupuk bersubsidi yang sudah ditebus oleh Kios Pengecer harus segera disalurkan ke petani, khususnya penebusan pada bulan Desember.
- Diperlukan kerjasama dengan pihak Wali Nagari untuk mendapatkan data yang diperlukan pada proses pengentryan data RDKK.

6. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

a) Dasar Hukum



SP DIPA 018.08.4.089137/2019 Tanggal 5 Desember 2018

b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat (Satker Distanhorbun / 08).

c) Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

d) Program dan Kegiatan

Program :Penyediaan dan Pengembangan Prasaran dan Sarana Pertanian

Kegiatan : Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Pelaksanaan : 1 kali musim tanam

e) Sumber dan Jumlah Anggaran : Rp. 17.950.000,-

f) Permasalahan dan solusi

Permasalahan :

- Setelah dilaksanakan sosialisasi kepada kelompok tani yang ada di Kabupaten Dharmasraya dan koordinasi instansi terkait seperti, BPP,Camat dan Wali Nagari dengan target 850 ha dari Provinsi yang terealisasi hanya sampai 349,75 ha, karena adanya penutupan pintu air Batang Hari, sehingga kelompok tani mengganti pola tanam yang beralih dari tanam padi ketanaman jagung dan palawija lainnya.
- Target realisasi penyaluran bantuan premi tidak tercapai kemungkinan di sebabkan petani keberatan membayar premi swadaya
- Masih kurangnya kesadaran petani untuk pembayaran premi AUTP karena kurang tau/kurang memahami dengan AUTP
- Kurang memahami PPL pendamping untuk mendaftarkan petani ke aplikasi SIAP AUTP.

Solusi



- Dengan perbaikan bendungan Batang Hari diharapkan untuk kedepannya dengan Irigasi yang memadai musim tanam bisa dilakukan 2 sampai 3 kali setahun, sehingga target AOTP bisa tercapai.
- Ditingkatkan lagi Sosialisasinya sehingga kelompok tani bisa memahaminya.
- Perlu diulang kembali pembelajaran tentang Aplikasi SIAP ke PPL

7. **Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS)**

a) **DASAR HUKUM :**

SP DIPA 018.08.4.089137/2019 Tanggal 5 Desember 2018

b) **INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN:** Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat. Satker Distanhorbun (08)

c) **ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MELAKSANAKAN:** Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

d) **PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA DAN PELAKSANAANNYA**

Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatan : Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS)

Pelaksanaan : April – November 2019 dengan 7 kali pertemuan bersama Narasumber pihak perbankan.

e) **SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN : Rp. 76.790.000,-**

f) **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Permasalahan

- Masih banyak usaha petani yang tidak bisa dibiayai/kurang layak dibiayai oleh pihak perbankan
- Lambatnya pencairan dana oleh pihak perbankan apabila pengajuan kredit oleh petani

Solusi



- Petani harus mengoptimalkan/meningkatkan usaha taninya agar bisa dibiayai oleh pihak perbankan
- Kepada pihak perbankan jangan menunda-nunda untuk memprosesajuan kredit yang diajukan

8. PENGEMBANGAN JAGUNG HIBRIDA

a) Dasar hukum :

- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor : 826/HK.150/C/03/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018.
- Petunjuk Operasional Kegiatan (POK mini/turunan dari Dinas Pertanian Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat)
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propttg penunjukan PPK, BPP dsb
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Nomor : 521.2/187/Distan-TP/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Kelompok Tani penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Jagung Hibrida pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (03) di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018.

b) Instansi pemberi Tugas Pembantuan :

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan C.Q. Dinas Pertanian Pangan hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

c) Program dan Kegiatan :

- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.
- Kegiatan Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 2 dan Varietas Umum 3

d) Realisasi pelaksanaan program dan Kegiatan :



Realisasi pelaksanaan fisik adalah 100 %.

e) Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan :

- Sumber dana = Tugas Pembantuan (APBN) TA. 2018
- Jumlah Anggaran = Rp. 540.390.000,-
- Realisasi s/d Desember 2018 = Rp.

f) OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan :

Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya

g) Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan :

- Kondisi sarana dan prasarana kurang memadai, karena lokasi kegiatan merupakan areal tanam baru yang pada umumnya lokasi tersebut adalah lokasi bukaan baru dan jauh dari pemukiman yang jalan menuju ke lokasi masih jalan tanah, bergelombang yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat biasa (single gardan). Untuk kendaraan roda dua harus dengan motor jenis trabas/trail. Sementara kedua jenis kendaraan tersebut untuk memonitor kegiatan ini belum ada.

h) Permasalahan dan solusi :

Permasalahan

- Terlalu seringnya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh pihak Pusat yang menurut kami justru membuat keraguan dalam melaksanakan Sosialisasi dan CPCL ke Lapangan.
- Penyaluran bantuan dalam bentuk uang memerlukan administrasi yang sangat banyak dan hal ini justru menghambat lajunya pelaksanaan kegiatan karena kelompok penerima ada yang berdomisili di pedesaan dan sulit untuk mencapai ibu kota Kabupaten untuk sebuah tanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama dan lain sebagainya.

- Ditunjuknya bank BNI sebagai bank penyalur bantuan pemerintah sangat menyulitkan proses pencairan dana bantuan karena bank BNI di Kabupaten Dharmasraya hanya ada pada 1 (satu) daerah yaitu di



Kecamatan Koto Baru. Sedangkan kelompok penerima bantuan tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten Dharmasraya (11 Kecamatan) mereka harus menempuh jarak puluhan bahkan ratusan kilo meter untuk mencairkan dana bantuan yang nilainya relatif kecil.

- Sarana produksi yang dianggarkan pemerintah jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan lahan bukaan baru (PATB) yang rata-rata merupakan tanah yang tandus, tidak subur atau kurus yang banyak membutuhkan unsur hara, bahan untuk menaikkan PH-tanah dan bahan organik.

Solusi

- Jangan terlalu sering revisi POK maupun Juknis terutama pada awal kegiatan karena sangat membuat keraguan dalam melaksanakan CPCL yang sedang berjalan dan nilai oleh masyarakat manajemen pemerintah tidak profesional (sering berubah-ubah)
- Kedepan penyaluran bantuan akan lebih praktis jika berupa barang dan dinas kabupaten cukup menerbitkan Surat Keputusan tentang kelompok penerima bantuan, dan tidak dibebani dengan surat-surat yang begitu banyak dan bisa memperlambat realisasi fisik kegiatan.
- Kalau pun bantuan pemerintah disalurkan dalam bentuk uang maka Bank Penyalur bantuan menurut kami akan lebih efektif dan efisien bila memakai Bank Rakyat Indonesia atau Bank Nagari Sumatera Barat, karena kedua Bank tersebut hampir di setiap kecamatan mempunyai kantor unit/cabang. Dengan demikian kelompok penerima akan lebih mudah mencairkan dana bantuan dan tidak harus menempuh jarak yang jauh.
- Penambahan jumlah dan jenis Saprodi yang disalurkan

9. Pengembangan Padi Gogo

a) Dasar hukum

- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor: 826/HK.150/C/03/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan



Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018;

- Petunjuk Operasional Kegiatan (POK mini/turunan dari Dinas Pertanian Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat);
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Nomor : 521.2/695/Distan-TP/VI/2018 tanggal 821.2/50/Distan-TP/II/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Budidaya Padi Gogo Pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat (03) di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018.

b) Instansi pemberi Tugas Pembantuan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan C.Q. Dinas Pertanian Pangan hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

c) Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.

Kegiatan Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Lahan Kering

d) Realisasi pelaksanaan program dan Kegiatan :

- Realisasi pelaksanaan fisik adalah 100 %.

e) Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan :

- Sumber dana = Tugas Pembantuan (APBN) TA. 2018
- Jumlah Anggaran =Rp. 467.250.000,-
- Realisasi s/d Desember 2018

f) OPD yang melaksanakan tugas :

- Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya

g) Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan :

- Kondisi sarana dan prasarana kurang memadai, karena lokasi kegiatan merupakan areal tanam baru yang pada umumnya lokasi tersebut adalah lokasi bukaan baru dan jauh dari pemukiman yang jalan menuju ke lokasi masih jalan tanah, bergelombang yang sulit



dijangkau oleh kendaraan roda empat biasa (single gardan). Untuk kendaraan roda dua harus dengan motor jenis trabas/trail. Sementara kedua jenis kendaraan tersebut untuk memonitor kegiatan ini belum ada.

h) Permasalahan dan solusi :

Permasalahan

- Terlalu seringnya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh pihak Pusat yang menurut kami justru membuat keraguan dalam melaksanakan Sosialisasi dan CPCL ke Lapangan.
- Penyaluran bantuan dalam bentuk uang memerlukan administrasi yang sangat banyak dan hal ini justru menghambat lajunya pelaksanaan kegiatan karena kelompok penerima ada yang berdomisili di pedesaan dan sulit untuk mencapai ibu kota Kabupaten untuk sebuah tanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama dan lain sebagainya.
- Ditunjuknya bank BNI sebagai bank penyalur bantuan pemerintah sangat menyulitkan proses pencairan dana bantuan karena bank BNI di Kabupaten Dharmasraya hanya ada pada 1 (satu) daerah yaitu di Kecamatan Koto Baru. Sedangkan kelompok penerima bantuan tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten Dharmasraya (11 Kecamatan) mereka harus menempuh jarak puluhan bahkan ratusan kilo meter untuk mencairkan dana bantuan yang nilainya relatif kecil.
- Sarana produksi yang dianggarkan pemerintah jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan lahan bukaan baru (PATB) yang rata-rata merupakan tanah yang tandus, tidak subur atau kurus yang banyak membutuhkan unsur hara, bahan untuk menaikkan PH-tanah dan bahan organik.

Solusi

- Jangan terlalu sering revisi POK maupun Juknis terutama pada awal kegiatan karena sangat membuat keraguan dalam melaksanakan CPCL yang sedang berjalan dan dinilai oleh masyarakat bahwa manajemen pemerintah tidak profesional (sering berubah-ubah)



- Kedepan penyaluran bantuan akan lebih praktis jika berupa barang dan dinas kabupaten cukup menerbitkan Surat Keputusan tentang kelompok penerima bantuan, dan tidak dibebani dengan surat-surat yang begitu banyak dan bisa memperlambat realisasi fisik kegiatan.
- Kalau pun bantuan pemerintah disalurkan dalam bentuk uang maka Bank Penyalur bantuan menurut kami akan lebih efektif dan efisien bila memakai Bank Rakyat Indonesia atau Bank Nagari Sumatera Barat, karena kedua Bank tersebut hampir di setiap kecamatan mempunyai kantor unit/cabang. Dengan demikian kelompok penerima akan lebih mudah mencairkan dana bantuan dan tidak harus menempuh jarak yang jauh.
- Penambahan jumlah dan jenis Saprodi yang disalurkan.

10. Pengembangan Kedelai

a) Dasar hukum

- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor : 826/HK.150/C/03/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018.
- Petunjuk Operasional Kegiatan (POK mini/turunan dari Dinas Pertanian Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat).
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Nomor : 821.2/51/Distan-TP/VI/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Penetapan Kelompok Tani penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Kedelai pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (03) di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018.

b) Instansi pemberi Tugas Pembantuan :

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan C.Q. Dinas Pertanian Pangan hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

c) Program dan Kegiatan :



- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.
 - Kegiatan Melaksanakan penyalurkan fasilitas Sarana Produksi Budidaya kedelai
- d) Realisasi pelaksanaan program dan Kegiatan :**
Realisasi fisik (penanaman kedelai) hanya 24,6 %
- e) Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan :**
- Sumber dana = Tugas Pembantuan (APBN) TA. 2018
 - Jumlah Anggaran =Rp.297.976.000,-
 - Realisasi s/d Desember 2018 = Rp.297.976.000,-
- f) OPD yang melaksanakan tugas :**
Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya
- g) Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan :**
- Kondisi sarana dan prasarana kurang memadai, karena lokasi kegiatan merupakan areal tanam baru yang pada umumnya lokasi tersebut adalah lokasi bukaan baru dan jauh dari pemukiman yang jalan menuju ke lokasi masih jalan tanah, bergelombang yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat biasa (single gardan). Untuk kendaraan roda dua harus dengan motor jenis trabas/trail. Sementara kedua jenis kendaraan tersebut untuk memonitor kegiatan ini belum ada.
- h) Permasalahan dan solusi :**
Permasalahan
- Terlalu seringnya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh pihak Pusat yang menurut kami justru membuat keraguan dalam melaksanakan Sosialisasi dan CPCL ke Lapangan.
 - Tidak tersedianya benih kedelai pada waktu yang tepat dan jumlah yang dibutuhkan untuk kegiatan.
 - Harga benih kedelai jauh lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan pada POK.
 - Penyaluran bantuan dalam bentuk uang memerlukan administrasi yang sangat banyak dan hal ini justru menghambat lajunya



pelaksanaan kegiatan karena kelompok penerima ada yang berdomisili di pedesaan dan sulit untuk mencapai ibu kota Kabupaten untuk sebuah tanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama dan lain sebagainya.

- Ditunjuknya bank BNI sebagai bank penyalur bantuan pemerintah sangat menyulitkan proses pencairan dana bantuan karena bank BNI di Kabupaten Dharmasraya hanya ada 1 (satu) daerah yaitu di Kecamatan Koto Baru. Sedangkan kelompok penerima bantuan tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten Dharmasraya (11 Kecamatan) mereka harus menempuh jarak puluhan bahkan ratusan kilo meter untuk mencairkan dana bantuan yang nilainya relatif kecil.
- Sarana produksi yang dianggarkan pemerintah jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan lahan bukaan baru (PATB) yang rata-rata merupakan tanah yang tandus, tidak subur atau kurus yang banyak membutuhkan unsur hara, bahan untuk menaikkan PH-tanah dan bahan organik.

Solusi

- Jangan terlalu sering merevisi POK maupun Juknis terutama pada awal kegiatan karena sangat membuat keraguan dalam melaksanakan CPCL yang sedang berjalan dan nilai oleh masyarakat manajemen pemerintah tidak profesional (sering berubah-ubah)
- Kedepan penyaluran bantuan akan lebih praktis jika berupa barang dan dinas kabupaten cukup menerbitkan Surat Keputusan tentang kelompok penerima bantuan, kelompok tidak dibebani dengan surat-surat yang begitu banyak dan bisa memperlambat realisasi fisik kegiatan.
- Kalau pun bantuan pemerintah disalurkan dalam bentuk uang maka Bank Penyalur bantuan menurut kami akan lebih efektif dan efisien bila memakai Bank Rakyat Indonesia atau Bank Nagari Sumatera Barat, karena kedua Bank tersebut hampir di setiap kecamatan mempunyai kantor unit/cabang. Dengan demikian kelompok penerima



akan lebih mudah mencairkan dana bantuan dan tidak harus menempuh jarak yang jauh.

- Penambahan jumlah dan jenis Saprodi yang disalurkan.

11. Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)

a) Dasar hukum

- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor : 826/HK.150/C/03/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Nomor :821.2/591/Distan-TP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penetapan Calon Kelompok Tani penerima penyaluran Bantuan UPPO Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018.

b) Instansi pemberi Tugas Pembantuan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan C.Q. Dinas Pertanian Pangan hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

c) Program dan Kegiatan:

- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.
- Kegiatan Melaksanakan penyalurkan fasilitas Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO).

d) Realisasi pelaksanaan program dan Kegiatan

Realisasi 100 %

e) Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

- Sumber dana : Dana APBN (dikelola langsung oleh Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat)
- Jumlah Anggaran : Rp.600.000.000,-
- Realisasi Keuangan : Rp.600.000.000,-

f) OPD yang melaksanakan tugas

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

g) Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan :

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan lengkap.

h) Permasalahan dan solusi



Permasalahan

- Waktu pelaksanaan yang begitu pendek dan berada pada akhir tahun, dimana cuaca pada saat itu adalah volume jumlah hari hujan tinggi dan bahkan disusul dengan banjir. Hal ini menyebabkan waktu pelaksanaan pekerjaan sering mundur dari waktu yang telah ditetapkan.

Solusi

- Kiranya dimasa yang akan datang kegiatan ini sdh bisa dimulai paling lambat pertengahan tahun anggaran.

12. Tugas Pembantuan Bidang Pertanian Bantuan Benih Padi Inbrida

Bersertifikat.

a) Dasar Hukum

- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 1348/HK.140/C/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018.
- Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat TA. 2018 Nomor SP DIPA : 01 804.3.089009 tanggal 5 Desember 2017.
- Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya nomor : 521.2/796/Distan-TP/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Fasilitas Bantuan Benih Padi Inbrida Bersertifikat di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggran 2018 Kegiatan Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat (03) di Kabupaten Dharmasraya.

b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

c) Program dan Kegiatan.

- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.
- Kegiatan Bantuan Benih Benih Padi Inbrida Bersertifikat



d) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi fisik : 70,28 %

e) Sumber dana dan target

- Sumber Dana APBN (dana dikelola langsung oleh propinsi)
- Target 3.941 Hektar
- Realisasi 2.770 Hektar

f) OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Cq. Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

g) Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan

- lengkap.

h) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Secara umum, ada beberapa permasalahan yang menyangkut pelaksanaan kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida Bersertifikat di Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2018, diantaranya :
Penyediaan benih tidak tepat waktu, jumlah maupun varietas tidak sesuai dengan kebutuhan petani.

Solusi

- Diharapkan kepada penyedia benih untuk kegiatan berikutnya dapat menyediakan dan menyalurkan benih sesuai dengan waktu, jumlah maupun varietas sesuai dengan kebutuhan petani.

13. Bantuan Budidaya Padi Inbrida Eks Cetak Sawah

a) Dasar Hukum

- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 1348/HK.140/C/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018.



- Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat TA. 2018 Nomor SP DIPA : 01 804.3.089009 tanggal 5 Desember 2017.
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Nomor : 902/1258/Keu-20187 tanggal 25 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Kabupaten/Kota Pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat (03) Dana Tugas Pembantuan TA. 2018.
- Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya nomor : 521.2/ /Distan-TP/VIII/2018 tanggal Agustus 2018 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Penerapan Budidaya Padi Inbrida Eks Cetak Sawah Kegiatan Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat (03) di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggran 2018.

b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

c) Program dan Kegiatan.

- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.
- Kegiatan Budidaya Padi Inbrida Eks Cetak Sawah

d) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- Realisasi fisik 100 %

e) Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

- Sumber Dana Tugas Pembantuan (APBN)
- Anggaran Rp. 14.937.000,-
- Realisasi Rp. 14.937.000,-

f) OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan



- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Cq. Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

g) Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan

- Lengkap.

h) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Waktu pelaksanaan kegiatan Bantuan Budidaya Padi Inbrida Eks Cetak Sawah tidak sesuai dengan perencanaan awal, karena proses pencairan dana yang terlambat masuk ke rekening kelompok tani, sehingga pelaksanaan terunda yang mengakibatkan terlambatnya panen pada tahun berikutnya.

Solusi

- Untuk semua kegiatan di tahun berikutnya proses transfer dana ke rekening kelompok tani agar lebih dipercepat sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.

**BAB
V****PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Dharmasraya kepada DPRD adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan program dan Kegiatan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Dharmasraya Tahun 2018 ini tidak hanya memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan, tetapi juga bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan dan fungsi sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga dengan demikian penyelenggaraan otonomi di daerah diharapkan dapat dikonstruksikan tetap dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kegiatan pemerintahan daerah merupakan rangkaian dan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara secara keseluruhan. Tujuan dari laporan ini juga sebagai upaya dalam melihat perkembangan, kemajuan dan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan serta sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang telah diuraikan, disadari masih banyak kekurangan dan perlu penyempurnaan. Untuk itu, masukan yang positif dan membangun sangat dibutuhkan demi terselenggaranya pemerintahan daerah yang lebih baik.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Dharmasraya ini dibuat, unuk dapat dijadikan sebagai bahan peningkatan kinerja dan pencapaian visi serta misi daerah yang telah ditetapkan bersama dalam upaya mewujudkan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya yang mandiri dan berbudaya, terima kasih.

Pulau Punjung, Maret 2020
BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E.